

Synergy and **Transformation** to **Strengthen Competitive Advantages**

Sinergi dan Transformasi untuk Memperkuat Keunggulan Kompetitif



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

DISCLAIMER

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perusahaan, serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Pertamina Marine Engineering tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu di masa yang akan datang, karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Perusahaan.

Pada Laporan Tahunan ini, terdapat penyebutan kata "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai PT Pertamina Marine Engineering. Adakalanya kata "Pertamina Marine Engineering" atau "PME" digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Pertamina Marine Engineering secara umum. Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp", atau "IDR", merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dollar Dollar" atau "USD", merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan Tahunan PT Pertamina Marine Engineering, disajikan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini juga dapat dilihat dan diunduh di *website* resmi, yakni www.pertamina-pme.com.

This Annual Report contains statements of financial condition, operating results, projections, plans, strategies, policies and objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws and regulations, except for historical matters. These statements have prospects of risk, uncertainty, and may result in actual developments that are materially different from those reported.

The prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding the current and future conditions of the Company, as well as the business environment in which the Company carries out its business activities. Pertamina Marine Engineering does not guarantee that documents whose validity has been confirmed will bring certain results in the future, because they can be influenced by several factors beyond the Company's control.

In this Annual Report, there is mention of the word "Company" which is defined as PT Pertamina Marine Engineering. Sometimes the word "Pertamina Marine Engineering" or "PME" is used on the grounds of convenience to refer to PT Pertamina Marine Engineering in general. The mention of the currency unit "Rupiah", "Rp", or "IDR", refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD", refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The Annual Report of PT Pertamina Marine Engineering is presented in two languages, namely Indonesian and English using an easy-to-read font type and size and good-quality printing. This Annual Report can also be viewed and downloaded on the official website, namely www.pertamina-pme.com.

PENJELASAN TEMA THEME EXPLANATION

Synergy and Transformation to Strengthen Competitive Advantages

Sinergi dan Transformasi untuk
Memperkuat Keunggulan Kompetitif



Seiring dengan *rebranding* yang dilakukan di tahun 2022, PT Pertamina Marine Engineering (PME) berkomitmen untuk mengedepankan sinergi atau kerja sama kemitraan dan memperkuat transformasi dalam mengembangkan strategi bisnis jasa bawah air. Di mana jasa pelayanan bawah air merupakan unit bisnis yang dikembangkan di lingkungan internal Pertamina Grup. PME memiliki kekuatan secara kompetitif (*competitive advantage*) dan diakui *established* pada bisnis jasa bawah air (*under water service*). Terlebih Perusahaan memiliki peralatan yang sudah sangat lengkap, dan memiliki pengalaman cukup lama dalam menggarap bisnis jasa bawah air. Di samping melakukan pengembangan bisnis *under water services*, Perusahaan juga terus memperkuat lini bisnis *dredging, salvage, waste management, fresh water management, dan EPC*, dengan mengedepankan keunggulan kompetitif.

Along with the rebranding carried out in 2022, PT Pertamina Marine Engineering (PME) is committed to prioritizing synergies or partnerships and strengthening transformation in developing underwater service business strategies. Where underwater services are a business unit developed within the Pertamina Group's internal environment. PME has a competitive advantage and is recognized as established in the underwater service business. Moreover, the Company has very complete equipment, and has quite a long experience in working on under water service business. In addition to developing the under water services business, the Company also continues to strengthen its dredging, salvage, waste management, fresh water management, and EPC business lines, by prioritizing competitive advantage.

SEKILAS TENTANG PERTAMINA MARINE ENGINEERING

PERTAMINA MARINE ENGINEERING AT A GLANCE



Pemegang Saham:

- PT Pertamina Trans Kontinental (99,17%)
- PT Pertamina Energy Terminal (0,83%)

Kegiatan Usaha:

Pengerukan, Rekayasa Teknik, Konstruksi, Teknik Bawah Air, Manajemen Limbah B3, Manajemen Air Bersih, dan Kegiatan Perdagangan Umum

Fokus Bisnis:

Dredging & Reclamation, Underwater Work Services, EPC & Port Maintenance, Waste Management, Fresh Water Management, dan General Trading

Total Aset:

Rp298,08 miliar per 31 Desember 2022

Shareholders:

- PT Pertamina Trans Kontinental (99.17%)
- PT Pertamina Energy Terminal (0.83%)

Line of Business:

Dredging, Engineering, Construction, Underwater Engineering, Hazardous Waste Management, Fresh Water Management, and General Trading Activities

Business Focus:

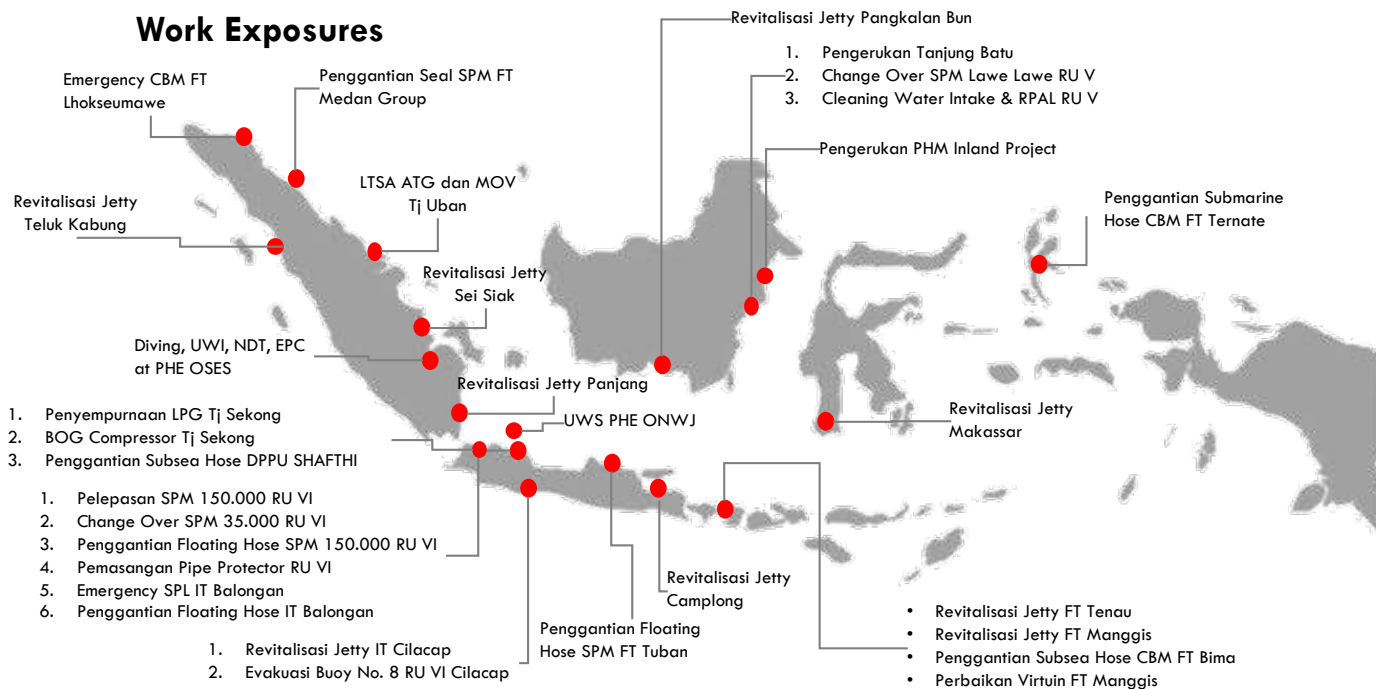
Dredging & Reclamation, Underwater Work Services, EPC & Port Maintenance, Waste Management, Fresh Water Management, dan General Trading

Total Assets:

IDR298.08 billion as of December 31, 2022

WILAYAH OPERASIONAL OPERATIONAL AREA

Work Exposures



DAFTAR ISI

LIST OF CONTENTS

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DISCLAIMER	2
PENJELASAN TEMA THEME EXPLANATION	3
SEKILAS TENTANG PERTAMINA MARINE ENGINEERING PERTAMINA MARINE ENGINEERING AT A GLANCE	4
WILAYAH OPERASIONAL OPERATIONAL AREA	5
DAFTAR ISI LIST OF CONTENTS	6
PENCAPAIAN PENTING 2022 SIGNIFICANT ACHIEVEMENTS 2022	8
Performa Performance	
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS	12
GRAFIK KINERJA KEUANGAN FINANCIAL PERFORMANCE GRAPH	14
PERISTIWA PENTING EVENT HIGHLIGHTS	15
Laporan Manajemen Management Report	
LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS REPORT	19
LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT	26
SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022 PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING STATEMENT LETTER OF MEMBERS OF THE BOARD COMMISSIONERS REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE 2022 ANNUAL REPORT OF PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING	32
SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022 PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING STATEMENT LETTER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE 2022 ANNUAL REPORT OF PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING	33

Profil Perusahaan Company Profile

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN GENERAL INFORMATION AND COMPANY IDENTITY	36
RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN BRIEF HISTORY OF THE COMPANY	37
KEGIATAN USAHA SERTA PRODUK DAN/ATAU JASA LINE OF BUSINESS AND PRODUCTS AND/OR SERVICES	38
VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN COMPANY VISION, MISSION AND VALUES	39
STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATIONAL STRUCTURE	40
PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE	42
PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS PROFILE	43
PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICERS PROFILE	45
DEMOGRAFI PEKERJA DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI EMPLOYEE DEMOGRAPHY AND COMPETENCY DEVELOPMENT	46
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS COMPOSITION	50
STRUKTUR GRUP GROUP STRUCTURE	51
INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE	52
SERTIFIKASI CERTIFICATION	53

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI OVERVIEW OF ECONOMIC AND INDUSTRIAL	56
TINJAUAN OPERASIONAL OPERATIONAL OVERVIEW	58
TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL REVIEW	61
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN COMPARISON BETWEEN TARGETS WITH REALIZATION AND PROJECTIONS FOR THE FINDING YEAR	67
PROSPEK USAHA TAHUN 2023 BUSINESS PROSPECTS IN 2023	69

Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE	72
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE	74
STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE	102
RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS	113
KEY PERFORMANCE INDICATOR KEY PERFORMANCE INDICATOR	114
REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS	116
AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT	117
MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT	118
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM	120
PERKARA PENTING SIGNIFICANT ISSUES	121

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE	122
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY	123
KODE ETIK PERUSAHAAN COMPANY CODE OF CONDUCT	124
WHISTLEBLOWING SYSTEM WHISTLEBLOWING SYSTEM	125

Keberlanjutan Sustainability

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN CORPORATE SUSTAINABILITY GOVERNANCE	128
---	-----

Laporan Keuangan Financial Report

PENCAPAIAN PENTING 2022

SIGNIFICANT ACHIEVEMENTS 2022

KINERJA OPERASIONAL

OPERATIONAL PERFORMANCE



Engineering Procurement, Construction & Diversifikasi Usaha

Engineering Procurement, Construction & Business Diversification



Hingga akhir tahun 2022, PME telah melaksanakan 34 pekerjaan EPC & Diversifikasi Usaha di antaranya adalah 21 pekerjaan EPC dan 13 pekerjaan Diversifikasi Usaha
Until the end of 2022, PME has carried out 34 EPC & Business Diversification jobs including 21 EPC jobs and 13 Business Diversification jobs



Dredging & Reclamation

Dredging & Reclamation

Hingga akhir tahun 2022, PME telah melaksanakan 4 pekerjaan *Dredging*
Until the end of 2022, PME has carried out 4 Dredging works



Underwater Work Services

Underwater Work Services

Hingga akhir tahun 2022, PME telah melaksanakan 30 pekerjaan *Underwater Work Services*
Until the end of 2022, PME has carried out 30 Underwater Work Services

KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE

Pendapatan Bersih

Net Income

Rp | IDR
380,43
miliar | billion

35,34%

Total Pendapatan Bersih di tahun 2022 mencapai Rp380,43 miliar meningkat 35,34% dari Rp281,10 miliar di tahun 2021.
Total Net Income in 2022 reached IDR380.43 billion, an increase of 35.34% from IDR281.10 billion in 2021.

Laba Bruto

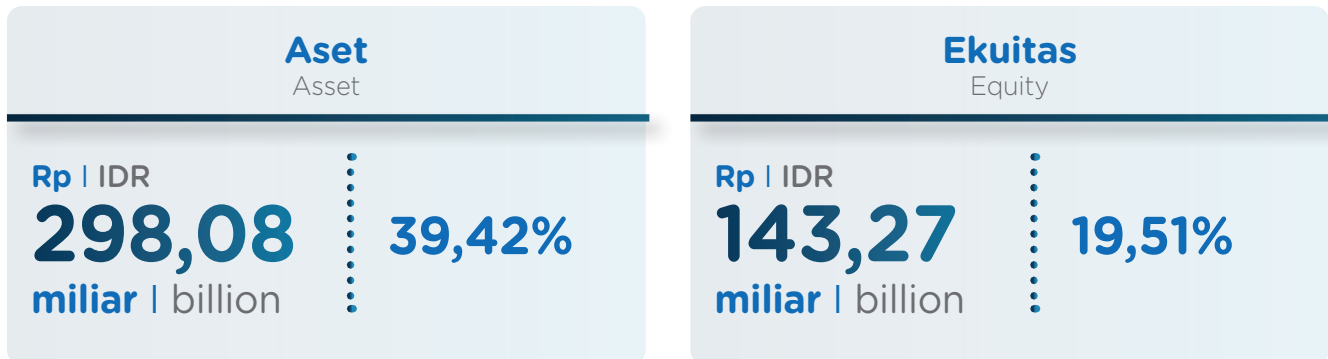
Gross Profit

Rp | IDR
58,05
miliar | billion

4,21%

Total Laba Bruto di tahun 2022 mencapai Rp58,05 miliar meningkat 4,21% dari Rp55,70 miliar di tahun 2021.
Total gross profit in 2022 reached IDR58.05 billion, an increase of 4.21% from IDR55.70 billion in 2021.

KINERJA KEUANGAN FINANCIAL PERFORMANCE



Total Aset Perusahaan di tahun 2022 mencapai Rp298,08 miliar meningkat 39,42% dari Rp213,79 miliar di tahun 2021.
The Company's total assets in 2022 reached IDR298.08 billion, an increase of 39.42% from IDR213.79 billion in 2021.

Ekuitas Perusahaan di tahun 2022 mencapai Rp143,27 miliar meningkat 19,51% dari Rp119,88 miliar di tahun 2021.
The Company's equity in 2022 reached IDR143.27 billion, an increase of 19.51% from IDR119.88 billion in 2021.

ASSESSMENT GCG (SK-16/S.MBU/2012) GCG ASSESSMENT (SK-16/S.MBU/2012)

Skor assessment GCG untuk penerapan Tahun Buku 2022 mencapai 46,18

The GCG assessment score for implementing the 2022 Fiscal Year reached 46.18

PENGHARGAAN AWARD

THE BEST HSSE RISK MANAGEMENT COMPLIANCE THE BEST HSSE RISK MANAGEMENT COMPLIANCE

PT Pertamina Marine Engineering meraih penghargaan pada acara "Kontraktor EPC Major Project PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2022" yaitu penghargaan "THE BEST HSSE RISK MANAGEMENT COMPLIANCE" pada 25 November 2022.
PT Pertamina Marine Engineering received an award at the "EPC Major Project Contractor PT Pertamina Patra Niaga Year 2022" event, namely the "THE BEST HSSE RISK MANAGEMENT COMPLIANCE" award on November 25, 2022.



1

Performa Performance

PME mencatatkan peningkatan total aset sebesar 39,42% dari Rp213,79 miliar di tahun 2021 menjadi Rp298,08 miliar di tahun 2022.

PME recorded an increase in total assets of 39.42% from IDR 213.79 billion in 2021 to IDR 298.08 billion in 2022.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

FINANCIAL DATA HIGHLIGHTS

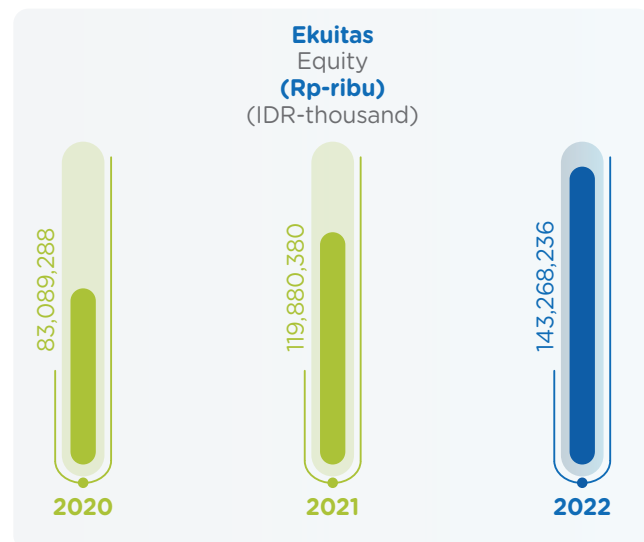
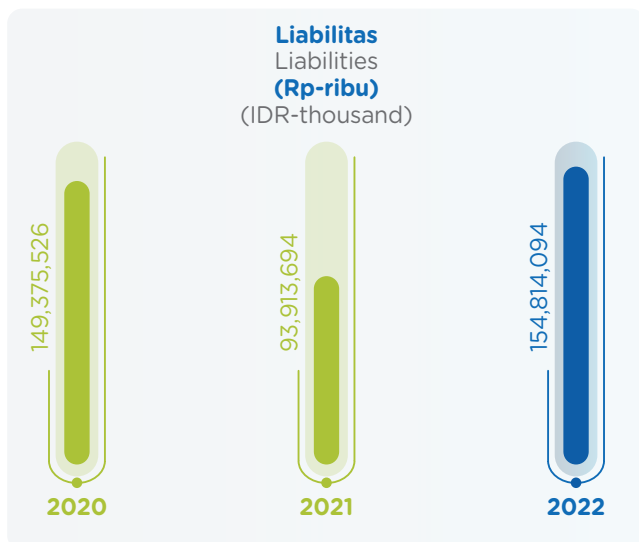
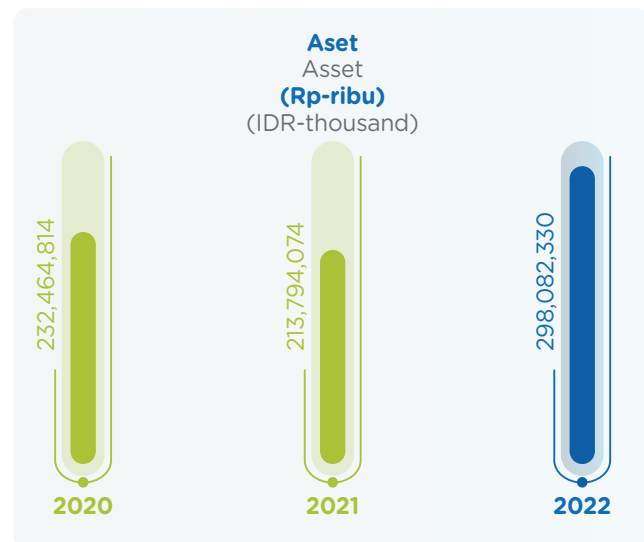
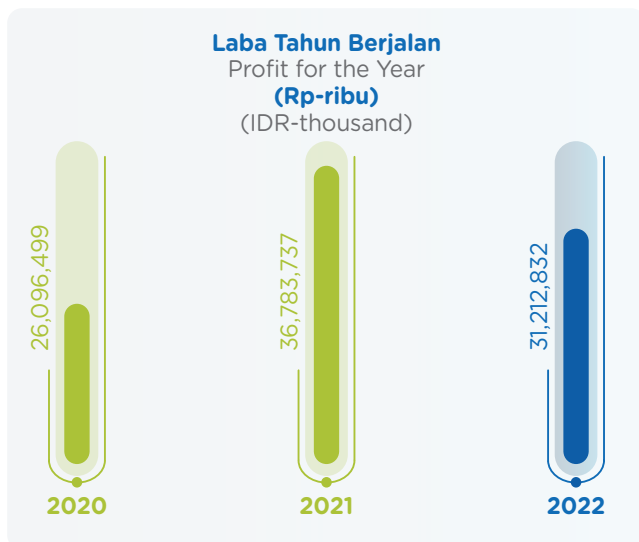
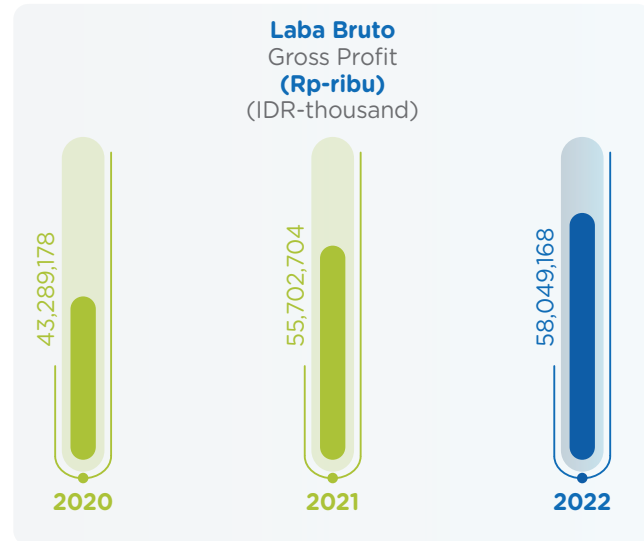
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Stated in thousands of Rupiah, unless stated otherwise

Uraian Description	2022	2021	2020
LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
STATEMENTS OF PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME			
Pendapatan Revenue	380.429.466	281.099.192	302.118.619
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(322.380.298)	(322.380.298)	(258.829.441)
Laba (Rugi) Bruto Gross Profit (Loss)	58.049.168	55.702.704	43.289.178
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(15.022.125)	(11.907.320)	(10.162.071)
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(4.491.377)	(3.096.859)	(5.394.271)
Pendapatan Keuangan Financial Income	388.915	527.207	499.897
Pendapatan Lain-Lain, Neto Other Income, Net	410.967	486.665	693.850
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	39.335.548	41.712.397	28.926.583
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(8.122.716)	(4.928.660)	(2.830.084)
Laba Tahun Berjalan Profit for the year	31.212.832	36.783.737	26.096.499
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income			
Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi: Items not be reclassified to profit or loss:			
Perubahan Nilai Wajar Instrumen Ekuitas melalui Penghasilan Komprehensif Lain Changes in Fair Value of Equity Instruments through Other Comprehensive Income	7.019	9.430	6.416
Pajak Penghasilan Terkait Related Income Tax	(1.544)	(2.075)	(1.412)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	31.218.307	36.791.092	26.101.503
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
FINANCIAL POSITION STATEMENT			
ASET			
ASSET			
Aset Lancar Current assets	288.717.533	184.239.211	230.798.045
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	9.364.797	29.554.863	1.666.769
Jumlah Aset Total assets	298.082.330	213.794.074	232.464.814

Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
Stated in thousands of Rupiah, unless stated otherwise

Uraian Description	2022	2021	2020
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY			
Liabilitas Liabilities	154.814.094	93.913.694	149.375.526
Ekuitas Equity	143.268.236	119.880.380	83.089.288
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	298.082.330	213.794.074	232.464.814
LAPORAN ARUS KAS CASH FLOW STATEMENT			
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	7.549.603	5.458.119	14.301.457
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	(4.153.850)	(3.809.959)	(103.400)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Funding Activities	(7.765.458)	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(4.369.705)	1.648.160	14.198.057
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	22.280.235	20.632.075	6.434.018
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	17.910.530	22.280.235	20.632.075

GRAFIK KINERJA KEUANGAN FINANCIAL PERFORMANCE GRAPH



PERISTIWA PENTING EVENT HIGHLIGHTS

Januari January

Transko Hiu 01 merupakan kapal *dredger* pertama milik PME, tujuan investasi kapal ini adalah untuk memperkuat bisnis *Dredging & Reclamation* PME dan pengurusan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi. Transko Hiu 01 is PME's first dredger ship, the purpose of this investment is to strengthen PME's Dredging & Reclamation business and obtain Dredging and Reclamation Business Permits.

Januari January

PT Pertamina Marine Engineering menjadi kontraktor utama dalam penanganan kondisi emergency kerusakan *Floating Hose* di IT Balongan, hal ini sebagai bentuk kontribusi dalam menjaga ketahanan stok BBM di Wilayah Jawa Bagian Barat.
PT Pertamina Marine Engineering is the main contractor in handling emergency conditions of damage to the Floating Hose at IT Balongan, this is a form of contribution in maintaining the resilience of fuel stocks in the West Java Region.

Juni June

Pada tanggal 23 Juni 2022, PT Pertamina Marine Engineering melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2021, di Kantor Pusat PT Pertamina Trans Kontinental.
On June 23, 2022, PT Pertamina Marine Engineering held the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for Fiscal Year 2021, at PT Pertamina Trans Kontinental Head Office.

November November

PT Pertamina Marine Engineering menyelenggarakan acara HUT yang ke-31 dengan tema *Transforming Beyond Expectation*, di Hotel Arya Duta.
PT Pertamina Marine Engineering held its 31st anniversary event with the theme *Transforming Beyond Expectation*, at the Arya Duta Hotel.

November November

PT Pertamina Marine Engineering berhasil meraih penghargaan "The Best Hsse Risk Management Compliance" dalam ajang "Kontraktor EPC Major Project PT Pertamina Patra Niaga Tahun 2022" pada tanggal 25 November 2022, di Hotel Ritz Carlton.
PT Pertamina Marine Engineering received the "The Best Hsse Risk Management Compliance" award in the "EPC Major Project Contractor PT Pertamina Patra Niaga Year 2022" event on November 25, 2022, at the Ritz Carlton Hotel.



2

Laporan Manajemen Management Report

PME senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai melalui pengembangan strategi bisnis Perusahaan yang berkelanjutan. PME is always committed to continue increasing the value through the development of a sustainable business strategy for the Company.

A man with glasses, wearing a dark suit, a white shirt, and a red tie with small white dots, is sitting on a brown leather stool. He is positioned in front of a large window that offers a panoramic view of a city skyline with numerous skyscrapers. The floor is a light blue color. The man is looking towards the camera with a slight smile.

Oce Madril

Komisaris
Commissioners

Dewan Komisaris menilai Direksi telah dengan baik menjalankan tujuan *rebranding* Perusahaan sebagaimana arahan Pemegang Saham untuk meningkatkan nilai.

The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has properly carried out the Company's rebranding goals as directed by the Shareholders to increase value.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS REPORT

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang atas perkenan-Nya, Dewan Komisaris dapat melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dalam pemberian pengawasan dan nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan dan pengembangan Perseroan selama tahun 2022. Pengawasan yang kami lakukan secara independen, cermat, efektif dan fokus untuk mencapai target sasaran Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022 yang searah dalam pencapaian sasaran-sasaran utama Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), serta dengan memegang teguh dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten dan berkelanjutan.

Pertamina Marine Engineering dapat melalui tahun 2022 dengan membukukan kinerja dengan cukup baik dan membanggakan. Perusahaan juga berhasil menyelesaikan proses *rebranding*. Kini, Perusahaan telah menyandang nama PERTAMINA, hal ini dinilai sebagai motivasi sekaligus tantangan. Dewan Komisaris senantiasa berharap seluruh insan PME mampu mengkonfersi semua tantangan ini menjadi pemicu untuk mewujudkan nilai tambah bagi Perusahaan. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris terhadap pengawasan pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku 2022 sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pandangan Dewan Komisaris Terkait Perkembangan Perusahaan di Tahun 2022

Dalam rangka melaksanakan pengawasan yang ketat atas kinerja Direksi dalam pengelolaan Perseroan di tengah masih bergejolaknya pandemi COVID-19 yang mulai mereda pada awal Triwulan IV 2022, Dewan Komisaris terus melakukan pemantauan kinerja Perseroan secara intensif melalui pendalaman, pengkajian dan pembahasan atas laporan kinerja Perseroan bulanan dan triwulanan. Selain itu ditekankan agar Direksi terus melakukan efisiensi usaha dengan cara menekan biaya beban usaha dan mengurangi beban bunga, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan operasional.

Selama tahun buku 2022, semua aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh Direksi dinilai Dewan Komisaris telah sesuai dengan RKAP 2022 dan/atau RJPP, serta memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan yang baik dan hasilnya menguntungkan Perseroan. Setiap keputusan rapat telah

Dear Shareholders and Stakeholders,

We express our gratitude to the presence of Allah SWT, with His permission, the Board of Commissioners can report on the implementation of their duties and obligations in providing supervisory and advice to the Board of Directors in the management and development of the Company during 2022. The supervision we carry out is independent, careful, effective and focused to achieve the targets of the 2022 Corporate Budget Work Plan (RKAP) which are in line with achieving the main objectives of the Company's Long Term Plan (RJPP), as well as by upholding and implementing the principles of good corporate governance (GCG) on an ongoing basis. consistent and sustainable.

Pertamina Marine Engineering can go through 2022 by recording quite good and encouraging performance. The company also successfully completed the rebranding process. Now, the company has the name PERTAMINA, this is seen as a motivation as well as a challenge. The Board of Commissioners always hopes that all PME people are able to convert all of these challenges into triggers to create added value for the Company. Next, allow us to submit the accountability report of the Board of Commissioners on the supervisory of the Company's management for the 2022 financial year as part of the implementation of the principles of Good Corporate Governance.

Views of the Board of Commissioners Regarding Company Development in 2022

In order to carry out strict supervision of the performance of the Board of Directors in managing the Company amidst the still turbulent COVID-19 pandemic which began to subside in early Quarter IV 2022, the Board of Commissioners continues to monitor the Company's performance intensively through in-depth, review and discussion of the Company's monthly performance reports and quarterly. In addition, it is emphasized that the Board of Directors continues to carry out business efficiency by reducing operating expenses and reducing interest expenses, as well as increasing the effectiveness of operational management.

During the 2022 financial year, all corporate actions carried out by the Board of Directors were assessed by the Board of Commissioners as being in accordance with the 2022 RKAP and/or RJPP, as well as fulfilling the provisions of good corporate governance and the results benefited the

ditindaklanjuti dan dimonitor secara ketat. Hasil audit oleh auditor eksternal dipantau tindak lanjutnya sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Atas pengelolaan Perseroan, Dewan Komisaris menilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan isi ketentuan dalam perjanjian dengan pihak ketiga.

Dewan Komisaris bersama Direksi sepakat meningkatkan efektivitas penerapan *Whistleblowing System* (WBS) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam rangka mencegah terjadinya korupsi dan *fraud*.

Dewan Komisaris memahami bahwa pencapaian kinerja Perusahaan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global maupun Nasional. Iklim perekonomian baik mikro ataupun makro tentu saja memberi pengaruh terhadap bisnis PT Pertamina Marine Engineering yang bergerak di bidang Jasa *Dredging*, Underwater Service, EPC & Port Maintenance serta kegiatan usaha lainnya. Walaupun pemulihan ekonomi dan bisnis belum berhasil 100%, realisasi kinerja Keuangan tahun 2022 dalam kategori sehat, meskipun belum sesuai target RKAP. Untuk itu diharapkan agar Direksi PT Pertamina Marine Engineering dapat melakukan upaya-upaya perluasan pasar (captive dan non-captive market), peningkatan kualitas jasa dan efisiensi di setiap lini, agar kinerja keuangan PME dapat meningkat dimasa mendatang.

Penilaian terhadap Kinerja Direksi atas Pengelolaan Perusahaan

Berdasarkan realisasi RKAP dan KPI tahun 2022, Dewan Komisaris berpandangan bahwa Direksi PT Pertamina Marine Engineering telah berupaya secara terus menerus untuk melakukan perbaikan dalam menjalankan usaha.

Untuk itu Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas hasil Kinerja Direksi atas Pengelolaan Perusahaan tahun 2022. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap bisnis proses perusahaan sebagai upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih baik.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Perusahaan

Mekanisme pengawasan dilakukan melalui rapat rutin dengan Direksi dan Tim Manajemen PME, minimal 1 x dalam satu bulan, yang membahas masalah strategis serta memberikan evaluasi dan arahan atas penyusunan dan *monitoring* pencapaian RKAP, review atas *Risk Register*, memberikan masukan atas Penyusunan dan realisasi KPI, melakukan analisis atas Laporan Keuangan bulanan, evaluasi Kinerja Operasi dan Finansial, *support* pengembangan sistem untuk tujuan efisiensi dan efektifitas proses bisnis,

Company. Each decision of the meeting has been followed up and closely monitored. The results of the audit by the external auditor are monitored for follow-up in accordance with the recommendations given. For the management of the Company, the Board of Commissioners considers that it is in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations and the contents of the provisions in agreements with third parties.

The Board of Commissioners and the Board of Directors agreed to increase the effectiveness of the implementation of the Whistleblowing System (WBS) and the Anti-Bribery Management System (SMAP) in order to prevent corruption and fraud.

The Board of Commissioners understands that the achievement of the Company's performance is influenced by global and national economic conditions. The economic climate, both micro and macro, certainly has an impact on the business of PT Pertamina Marine Engineering which is engaged in Dredging Services, Underwater Service, EPC & Port Maintenance and other business activities. Even though the economic and business recovery has not been 100% successful, the realization of financial performance in 2022 is in the healthy category, even though it has not met the RKAP target. For this reason, it is hoped that the Board of Directors of PT Pertamina Marine Engineering can make efforts to expand the market (captive and non-captive market), improve service quality and efficiency in each line, so that PME's financial performance can improve in the future.

Assessment of the Board of Directors' Performance on Company Management

Based on the realization of the 2022 RKAP and KPI, the Board of Commissioners is of the view that the Directors of PT Pertamina Marine Engineering have made continuous efforts to make improvements in running the business.

For this reason, the Board of Commissioners appreciates the results of the Board of Directors' performance on Company Management in 2022. The Board of Commissioners also encourages the Board of Directors to conduct a thorough evaluation of the company's business processes as an effort to improve in order to improve the company's performance..

Supervision on the Implementation of Company Strategy

The supervisory mechanism is carried out through regular meetings with the Board of Directors and the PME Management Team, at least once a month, which discuss strategic issues as well as provide evaluation and direction on the preparation and monitoring of the achievement of the RKAP, review the Risk Register, provide input on the formulation and realization of KPIs, carry out analysis of monthly Financial Reports, evaluation of Operational and Financial Performance, support for system development

pengembangan usaha perusahaan guna pencapaian target RKAP serta melakukan pengawasan tindak lanjut manajemen atas temuan audit baik internal maupun eksternal.

Dewan Komisaris juga melakukan kunjungan ke lokasi bersama Direksi (*Management Walkthrough*) guna melihat kondisi aktual di lapangan serta memberikan arahan kepada pekerja di lokasi terkait sasaran dan tujuan perusahaan.

Prospek Usaha dan Tantangan ke Depan

Dewan Komisaris melihat bahwa prospek usaha yang disusun oleh Direksi yang disampaikan dalam RJPP dan RKAP 2022 sudah baik. Prospek usaha tersebut, telah disusun dengan memperhatikan asumsi-asumsi dalam makro ekonomi global dan nasional. Terlebih dengan melihat pencapaian kondisi keuangan dan bisnis Perseroan pada tahun 2022 yang kuat, memberikan optimisme bahwa kinerja tahun 2022 sebagai landasan pertumbuhan bisnis Perseroan yang lebih tinggi ke depan seiring dengan dengan mulai pulihnya iklim perekonomian. Dewan Komisaris meyakini bahwa Direksi mampu menjalankan seluruh strategi dengan baik dan memanfaatkan peluang yang ada.

Sehingga Dewan Komisaris senantiasa mengingatkan Direksi untuk tetap mewaspadaikan dan melakukan upaya-upaya mitigasi risiko atas berbagai perubahan kondisi eksternal.

Dewan Komisaris tetap optimis akan prospek pertumbuhan usaha PME pada tahun 2023. Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah menyusun rencana, strategi dan target berdasarkan sejumlah asumsi yang dituangkan dalam RKAP. Rencana, strategi dan target yang disusun tersebut merupakan hal yang realistis dan sangat mungkin untuk diwujudkan.

Tahun 2022 merupakan masa yang cukup penting mengingat tahun ini merupakan transisi dari masa pandemi COVID-19 ke kondisi yang berangsur normal. Direksi telah menyusun prospek usaha untuk tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023, yang prosesnya diawali dengan *Challenge Session* oleh Dewan Komisaris, lalu dilanjutkan di level Konsolidasi PTK. Asumsi dan perhitungan target yang ditetapkan didasarkan pada kajian Konsultan yang ditugaskan oleh *Subholding* untuk menyusun reorganisasi dan *remapping* bisnis PTK Group.

Secara garis besar, Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sebagaimana yang tertuang dalam rencana kerja Perusahaan untuk tahun 2023, sudah cukup baik dan selaras dengan arah serta tujuan Perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan Komisaris menilai prospek usaha yang disusun Direksi, telah mempertimbangkan asumsi-asumsi dalam makro ekonomi global dan nasional pada masa mendatang.

for the purpose of efficiency and effectiveness of business processes, development of the company's business in order to achieve the RKAP targets and supervise management follow-up on audit findings both internal and external.

The Board of Commissioners also conducts site visits with the Directors (*Management Walkthrough*) to see actual conditions in the field and provide directions to workers at the location regarding company goals and objectives.

Business Prospects and Challenges Ahead

The Board of Commissioners sees that the business prospects prepared by the Directors presented in the 2022 RJPP and RKAP are good. The business prospects have been prepared by taking into account the assumptions in the global and national macro-economy. Especially by looking at the achievement of the Company's strong financial and business conditions in 2022, it provides optimism that the performance of 2022 will be the foundation for the Company's higher business growth going forward as the economic climate begins to recover. The Board of Commissioners believes that the Board of Directors is able to carry out all strategies properly and take advantage of the opportunities that exist.

So that the Board of Commissioners always reminds the Board of Directors to remain vigilant and make efforts to mitigate risks of various changes in external conditions.

The Board of Commissioners remains optimistic about the prospects for the PME business growth in 2023. The Board of Commissioners believes that the Board of Directors has prepared plans, strategies and targets based on a number of assumptions set forth in the RKAP. The plans, strategies and targets drawn up are realistic and very possible to achieve.

2022 is an important period considering that this year is a transition from the COVID-19 pandemic to normal conditions. The Board of Directors has prepared business prospects for 2023 which are contained in the 2023 Work Plan and Corporate Budget (RKAP), the process of which begins with a Challenge Session by the Board of Commissioners, then continues at the PTK Consolidation level. The assumptions and calculation of targets set are based on the review of the Consultant assigned by *Subholding* to compile the reorganization and remapping of the PTK Group business.

In general, the Board of Commissioners is of the view that the business prospects that have been prepared by the Board of Directors as stated in the Company's work plan for 2023 are quite good and in line with the direction and objectives of the Company both in the short and long term. The Board of Commissioners assesses the business prospects prepared by the Board of Directors, taking into account the assumptions in the global and national macro economy in the future.

Dewan Komisaris berharap agar segenap Insan Perusahaan senantiasa bersinergi untuk mencapai tujuan yang terbaik dan berkomitmen untuk terus membangun nilai usaha serta proses bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dengan semangat yang tinggi di tubuh PME, Dewan Komisaris yakin bahwa Perusahaan akan terus melaju dalam rangka menuju ke arah masa depan yang berkelanjutan

Pengawasan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

PME berkomitmen menerapkan GCG dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, dan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta *best practice* penerapan GCG. PME juga terus berkomitmen menerapkan GCG yang mampu memberikan dampak positif dalam pencapaian kinerja dan keberlanjutan Perseroan. Pada proses jalannya penerapan GCG di Perseroan, Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat yang dibutuhkan atas setiap tindakan strategis dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.

PME memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di setiap kegiatan usahanya secara konsisten. PME meyakini bahwa penerapan GCG dapat menjadi fondasi yang kuat dalam pengelolaan Perusahaan agar dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan hingga masa depan. Dengan adanya penerapan GCG, PME memiliki pedoman dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, agar senantiasa selaras dengan tujuan Perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Keselarasan antara Pemangku Kepentingan dan Perusahaan dapat menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif yang berdampak pada peningkatan sifat kerja unggul dan profesional di setiap insan PME.

Oleh karena itu, Komitmen penerapan GCG merupakan hal yang mutlak bagi PME. Hal tersebut diwujudkan melalui penguatan infrastruktur yang dimiliki dan secara berkesinambungan meningkatkan sistem dan prosedur untuk mendukung efektivitas pelaksanaan GCG di PME. Hingga akhir tahun 2022, PME telah menyusun pedoman GCG, sebuah pedoman penerapan Tata Kelola yang Baik di lingkup PME.

Meski penerapan nilai-nilai GCG (*Good Corporate Governance*) masih belum sepenuhnya sempurna namun Dewan Komisaris mengapresiasi upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan di sepanjang tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

The Board of Commissioners hopes that all Company personnel will always work together to achieve the best goals and are committed to continuing to build sound and sustainable business values and business processes. With high enthusiasm in PME's body, the Board of Commissioners believes that the Company will continue to progress towards a sustainable future

Supervision of the Implementation of Corporate Governance

PME is committed to implementing GCG with reference to the Minister of BUMN Regulation No. 01/MBU/2011 dated 1 August 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs as amended by Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012, and Decree of the Secretary of the Ministry of BUMN No. SK16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance, as well as best practices for implementing GCG. PME also continues to be committed to implementing GCG which is able to have a positive impact on achieving the Company's performance and sustainability. In the process of implementing GCG in the Company, the Board of Commissioners always carries out the supervisory function to ensure that the management of the Company carried out by the Board of Directors is in accordance with applicable laws and regulations and provides the necessary advice on every strategic action in order to achieve the Company's goals.

PME has a strong commitment to consistently apply the principles of Good Corporate Governance (GCG) in all of its business activities. PME believes that the implementation of GCG can become a strong foundation in managing the Company so that it can grow healthily and sustainably into the future. With the implementation of GCG, PME has guidelines in carrying out its daily business activities, so that they are always aligned with the Company's goals and meet the needs of shareholders and other stakeholders. Alignment between Stakeholders and the Company can foster an attitude of mutual trust and a conducive attitude that has an impact on improving the quality and professionalism of every PME employee.

Therefore, the commitment to implementing GCG is absolute for PME. This is realized through strengthening owned infrastructure and continuously improving systems and procedures to support the effectiveness of GCG implementation in PME. Until the end of 2022, PME has developed GCG guidelines, a guideline for implementing Good Governance within the PME scope.

Even though the implementation of GCG (*Good Corporate Governance*) values is still not completely perfect, the Board of Commissioners appreciates the improvement efforts that have been made throughout 2022, namely as follows:

1. Terlaksananya kegiatan dengan baik rapat BoD-BoC tahun 2022 sebanyak 10 kali pertemuan.
2. Adanya pembahasan dalam agenda rapat BoD-BoC tentang pentingnya implementasi GCG dan COC dan perbaikannya di PME.
3. Adanya pembahasan dalam agenda rapat BoD-BoC tentang *Risk Assesment, Risk Mitigation, Risk Register, Monitoring isssue* dan *progress audit* serta agenda pembahasan tindak lanjut atas temuan audit.
4. Pakta Integritas Direksi, Manager dengan mengikuti ketentuan PTK Group.
5. Pengelolaan *Website* Perusahaan dengan lebih baik dengan Pencantuman prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness*).
6. Pembentukan Tim PIC untuk *review* dan *update* TKO/ Prosedur Standart Operasi (PSO) sesuai dengan badan sertifikasi yang ada.
7. Pembuatan *Board Manual*, pedoman GCG, COI (*Conflict of Interest*) dan COC (*Code of Conduct*) dengan megadopsi ketentuan dari PTK.
8. Pembuatan komitmen bersama, surat pernyataan Dewan Komisaris, Direksi, Manager dan seluruh karyawan tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan Perusahaan pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.
9. Pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) rutin oleh Direksi dan Manager
10. Manajemen telah melakukan *campaign* sosialisasi ke karyawan dan pembuatan banner/poster terkait Strategi Anti *Fraud*, Implementasi AKHLAK dan Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistleblowing System* (WBS) dengan mengacu pada ketentuan Pertamina *Clean* dan PTK *Clean*.
11. Manajemen melakukan kegiatan pertemuan/*gathering* bersama dengan *stakeholders* dan bentuk lainnya.
12. Manajemen aktif menyampaikan laporan Triwulan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris dan PTK selaku Pemegang Saham.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022 PME tidak melakukan perubahan pada komposisi Dewan Komisaris. Maka dari pada itu, komposisi Dewan Komisaris masih tetap sama. komposisi Dewan Komisaris Perusahaan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2022 PME has no changes to the composition of the Board of Commissioners. Therefore, the composition of the Board of Commissioners remains the same. The composition of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2022 is as follows:

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2022

Structure and Composition of the Board of Commissioners for 2022

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Oce Madril	Komisaris Commissioner	24 Desember 2021 - RUPS 2022 24 December 2021 -2022 GMS	Ke-1 First	Keputusan RUPS tanggal 24 Desember 2021, yang telah dilembagakan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 07 tanggal 04 Januari 2022. GMS resolution on 24 December 2021, which has been institutionalized as stated in Deed No. 07th January 04th 2022

Apresiasi dan Penutup

Mengakhiri laporan pengawasan Dewan Komisaris tahun buku 2022 ini, kami menyampaikan penghargaan setingginya terhadap komitmen dan kerja keras Direksi dan seluruh Insan PME atas kerja sama dari seluruh *stakeholders*, sehingga Perseroan mampu bertahan di tengah tekanan dampak dari pandemi COVID-19 dan kondisi perekonomian global.

Dewan Komisaris berharap, seluruh jajaran PME dapat terus memberikan yang terbaik bagi Perusahaan di masa yang akan datang. Kepada seluruh Pemegang Saham, Dewan Komisaris menghaturkan rasa terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Demikian pula kepada regulator dan para Pemangku Kepentingan, Dewan Komisaris menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan yang telah diberikan.

Appreciation and Closing

Concluding the supervisory report of the Board of Commissioners for the 2022 financial year, we express our highest appreciation for the commitment and hard work of the Board of Directors and all PME personnel for the cooperation of all stakeholders, so that the Company is able to survive amid the pressures of the impact of the COVID-19 pandemic and global economic conditions.

The Board of Commissioners hopes that all levels of PME can continue to provide the best for the Company in the future. To all Shareholders, the Board of Commissioners expresses its gratitude for the given trust. Likewise to regulators and Stakeholders, the Board of Commissioners expresses its deepest gratitude for the given support.

Jakarta, Juni 2023
Jakarta, June 2023
PT Pertamina Marine Engineering



Oce Madril
Komisaris
Commissioners

A man with short dark hair and glasses, wearing a dark grey suit, a white shirt, and a red patterned tie, is sitting on a brown leather stool. He is smiling and looking towards the camera. The background is a high-angle view of a city skyline with many skyscrapers. The floor is a light blue color.

Yada Prawira Ganta

Direktur
Director

Dalam rangka menjalankan amanat Pemegang Saham, PME telah mengembangkan strategi bisnis yang terintegrasi untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.

In order to carry out the Shareholders' mandate, PME has developed an integrated business strategy to achieve the Company's vision and mission.

LAPORAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS REPORT

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Puji dan syukur terlebih dahulu kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karuniaNya PT Pertamina Marine Engineering dapat melalui tahun 2022 yang penuh tantangan namun tetap membukukan kinerja yang baik. Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 beserta laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*) dan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

Melalui Laporan Tahunan ini, perkenankan kami menyampaikan bagaimana PME mampu mencapai sejumlah *milestone* penting untuk terus mempertahankan kualitas pelayanan kepada pelanggan dengan melaksanakan kegiatan operasi di pelabuhan, serta bertekad menjalankan sistem manajemen terbaik, sehingga dapat mendukung pelayanan operasional dengan lancar.

Situasi Ekonomi Serta Perkembangan Perusahaan Tahun 2022

Tinjauan ekonomi global tahun 2022 masih sangat dipengaruhi oleh COVID-19, meskipun pemulihan dalam banyak aspek kehidupan ekonomi sosial telah banyak berjalan. Pandemi menyebabkan gangguan yang meluas pada aktivitas ekonomi di awal 2022, yang menyebabkan kontraksi tajam dalam Produk Domestik Bruto (PDB) global dengan kecenderungan pada resesi. Sebagian besar negara sudah melonggarkan penguncian, namun proteksi masih berjalan dan pandemi sudah mulai diterima sebagai endemi. Langkah-langkah proteksi untuk memperlambat penyebaran virus masih tetap diberlakukan dan menyebabkan tertahannya akselerasi bisnis dan pengeluaran konsumen.

Lebih lanjut, Perang Rusia-Ukraina juga telah mengganggu perdagangan global dan rantai pasokan, memperburuk kenaikan harga komoditas dan pangan global. Inflasi global yang terus-menerus tinggi disertai dengan pertumbuhan cenderung lambat membawa kekhawatiran stagflasi. Di tengah lingkungan ini, negara-negara maju secara tajam memperketat kebijakan moneter untuk mengekang inflasi. Hal ini telah diterjemahkan ke dalam kondisi pembiayaan eksternal yang lebih ketat dan tekanan keuangan untuk beberapa pasar negara berkembang.

Dear Shareholders and Stakeholders,

First of all, we offer praise and gratitude to the presence of God Almighty, for His abundance of blessings and gifts. PT Pertamina Marine Engineering was able to go through 2022 which was full of challenges but still recorded good performance. We hereby submit the Board of Directors' accountability report on the management of the Company for the financial year ending December 31, 2022 along with the financial statements that have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*) and obtained a fair opinion in all material respects.

Through this Annual Report, please allow us to convey how PME was able to achieve a number of important milestones to continue to maintain the quality of service to customers by carrying out operational activities at the port, and being determined to run the best management system, so that it can support operational services smoothly.

Economic Situation and Company Development in 2022

The global economic outlook for 2022 was still heavily affected by COVID-19, even though recovery in many aspects of social and economic life has progressed a lot. The pandemic caused widespread disruption to economic activity in early 2022, leading to a sharp contraction in the global Gross Domestic Product (GDP) with a trend toward recession. Most countries have relaxed their lockdowns, but protection is still running and the pandemic has begun to be accepted as endemic. Protective measures to slow the spread of the virus are still in place and holding back the acceleration of business and consumer spending.

Furthermore, the Russo-Ukrainian War has also disrupted global trade and supply chains, exacerbating rising global commodity and food prices. Constantly high global inflation accompanied by slow growth tends to raise fears of stagflation. Amidst this environment, developed countries sharply tightened monetary policy to curb inflation. This has translated into tighter external financing conditions and financial pressures for some emerging markets.

Dalam lingkup nasional, pertumbuhan PDB riil telah meningkat dari 3,7% pada 2021, menjadi 5,31% (YoY) pada 2022. Peningkatan pertumbuhan PDB riil tersebut disebabkan adanya penurunan tingkat infeksi COVID-19 dan program vaksinasi yang sukses telah mendorong pencabutan pembatasan mobilitas, sehingga berdampak pada percepatan tajam dalam konsumsi swasta. Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan yang kuat dan mengatasi potensi tantangan melalui beberapa inisiatif diantaranya menerapkan reformasi pajak dan beralih dari model subsidi ke model penetapan harga berbasis aturan untuk energi. Program jaring pengaman sosial dapat ditargetkan secara lebih efektif dan diperluas untuk menciptakan perlindungan minimum yang terjamin di seluruh siklus hidup masyarakat.

Selain momentum pertumbuhan ekonomi nasional, tahun 2022 juga menjadi momentum bagi PME dalam meningkatkan kinerja Perusahaan. Sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah mengalami perkembangan. Tahun 2022 juga menjadi penanda dari perubahan nama entitas dari yang dahulu bernama PT Peteka Karya Jala menjadi PT Pertamina Marine Engineering, *rebranding* ini diharapkan menjadi wujud optimisme manajemen disepanjang tahun 2022.

Untuk meningkatkan kinerja perusahaan di tahun 2022 telah bersinergi dan bekerja keras untuk dapat meningkatkan pencapaian melalui perluasan pasar *non captive*, efisiensi di setiap lini, peningkatan kualitas pelayanan, agar kinerja keuangan PME dapat meningkat di masa mendatang.

Sementara itu, beberapa faktor yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kinerja Perusahaan yaitu diperlukan penyiapan modal kerja untuk menunjang rencana bisnis potensial melalui percepatan penagihan piutang terhadap *user* dan rencana penambahan modal Perusahaan. Peningkatan hubungan sinergi dengan induk perusahaan dan sesama anak perusahaan kerap dioptimalkan sebagai bagian dalam upaya peningkatan pendapatan.

Analisis Kinerja Perusahaan di Tahun 2022

Melalui berbagai strategi yang dijalankan di tahun 2022, dan didukung oleh ketepatan perencanaan, Perusahaan berhasil membukukan kinerja yang cukup baik. Di tahun 2022, total pendapatan Perusahaan tercatat sebesar Rp 380,42 miliar mengalami peningkatan 35,23% dibanding tahun 2021 yang tercatat Rp 281,09 miliar.

Sumber pendapatan Perusahaan berasal dari kegiatan Dredging & Reclamation, EPC & Port Maintenance dan Underwater Work Service. Di mana pada tahun 2022, pendapatan EPC & Port Maintenance tercatat sebesar Rp201,30 miliar, mengalami kenaikan Rp53,10 miliar atau sebesar 35,87% dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp148,20 miliar. Sementara pendapatan Underwater Work Service tercatat sebesar Rp146,51 miliar di tahun 2022, mengalami kenaikan Rp83,59 miliar atau sebesar 132,68% dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp63,02 miliar.

At the national level, real GDP growth has increased from 3.7% in 2021 to 5.31% (YoY) in 2022. The increase in real GDP growth was due to a decrease in the COVID-19 infection rate and a successful vaccination program that prompted the lifting of restrictions mobility, resulting in a sharp acceleration in private consumption. Indonesia can sustain strong growth and address potential challenges through a number of initiatives including implementing tax reform and moving from a subsidy model to a rule-based pricing model for energy. Social safety net programs can be targeted more effectively and expanded to create a guaranteed minimum protection across the entire life cycle of a community.

Apart from the momentum of national economic growth, 2022 was also a momentum for PME to improve the Company's performance. Throughout 2022, the Company has experienced development. 2022 was also a marker of the change in the name of the entity from previously named PT Peteka Karya Jala to PT Pertamina Marine Engineering, this rebranding is expected to be a form of management optimism throughout 2022.

To improve the company's performance in 2022, they have synergized and worked hard to be able to increase achievement through expanding the non-captive market, efficiency in every line, improving service quality, so that PME's financial performance can improve in the future.

Meanwhile, several factors directly or indirectly impacted the Company's performance, namely the need to prepare working capital to support potential business plans through accelerating the collection of receivables from users and plans to increase the Company's capital. Increased synergies with the parent company and fellow subsidiaries are often optimized as part of efforts to increase revenue.

Company Performance Analysis in 2022

Through various strategies implemented in 2022, and supported by accurate planning, the Company has managed to record quite good performance. In 2022, the Company's total revenue was recorded at IDR 380.42 billion, an increase of 35.23% compared to 2021 which was recorded at IDR 281.09 billion.

The Company's sources of income come from Dredging & Reclamation, EPC & Port Maintenance and Underwater Work Service activities. Where in 2022, EPC & Port Maintenance revenue was recorded at IDR 201.30 billion, an increase of IDR 53.10 billion or 35.87% compared to 2021 which was recorded at IDR 148.20 billion. Meanwhile, Underwater Work Service revenue was recorded at IDR 146.51 billion in 2022, an increase of IDR 83.59 billion or 132.68% compared to 2021 which was recorded at IDR 63.02 billion. As for the Dredging & Reclamation business in 2022, it was recorded

Adapun bisnis Dredging & Reclamation di tahun 2022, tercatat sebesar Rp32,50 miliar, mengalami Penurunan sebesar Rp37,37 miliar atau sebesar -53,48% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp69,87 miliar.

Adapun realisasi laba bersih tahun buku 2022 tercatat sebesar Rp31,21 miliar atau mencapai 72,39% terhadap target 2022 sebesar Rp42,93 miliar. Di tahun 2022, Perusahaan juga mentorehkan pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan yang mencapai 85,96 (“SEHAT”), hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja Perusahaan dalam kinerja keuangan, kinerja pertumbuhan, kinerja operasional dan kinerja administrasi.

Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan

Sejalan dengan visi Perusahaan menjadi perusahaan yang profesional dan berdaya saing tinggi dibidang jasa Marine Engineering. PME dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya melalui bauran kebijakan dan strategi yang sejalan dengan arah tujuan Perusahaan.

Secara konsep bisnis, pada tahun 2022, PME yang telah menyelesaikan proses *rebranding*, proses ini diharapkan mampu memberikan perubahan yang mengarah pencapaian nilai tambah Perusahaan. Perusahaan juga telah menyesuaikan sejumlah hal penunjang perubahan mulai dari penambahan divisi (unit) bisnis, penambahan sumber daya manusia (SDM) kompeten termasuk program *upskilling* atau *training*, termasuk sarana infrastruktur, dan peralatan kerja sesuai bidang usahanya yang diperlukan.

Di Tahun 2022 PME berhasil melaksanakan Delivery kapal Transko Hiu 01, mendapatkan Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi serta melakukan Investasi 1 (spread) Diving Equipment untuk memperkuat kapabilitas PME di lini bisnis yang dilaksanakan.

Peranan Direksi dalam Perumusan dan Implementasi Strategi serta Kebijakan Strategis

Penyusunan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan dalam upaya mencapai target dilakukan secara seksama dan komprehensif. Direksi berperan penting dalam perumusan sekaligus memastikan terwujudnya kebijakan strategis yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Menetapkan visi, misi, dan strategi Perusahaan.
2. Membuat dan memberlakukan panduan, pedoman peraturan dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan maksud dan usaha Perusahaan.
3. Mengatur dan mengelola kegiatan usaha sesuai dengan bidang usaha Perusahaan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

at IDR 32.50 billion, experiencing a decrease of IDR 37.37 billion or -53.48% compared to the previous year of IDR 69.87 billion.

The realized net profit for the 2022 fiscal year was recorded at IDR 31.21 billion or reaching 72.39% of the 2022 target of IDR 42.93 billion. In 2022, the Company also achieved the Company's health level of 85.96 (“HEALTHY”), this indicates an increase in the Company's performance in financial performance, growth performance, operational performance and administrative performance.

Corporate Strategy and Policy

In line with the Company's vision of becoming a professional and highly competitive company in the field of Marine Engineering services. PME in carrying out its business activities always optimizes its resources through a mix of policies and strategies that are in line with the direction of the Company's goals.

In terms of business concept, in 2022, PME who have completed the rebranding process, this process is expected to be able to provide changes that lead to the achievement of the Company's added value. The company has also adjusted a number of things to support changes, starting from adding business divisions (units), adding competent human resources (HR), including upskilling or training programs, including infrastructure facilities, and work equipment according to the expanded business field.

In 2022 PME succeeded in carrying out the Delivery of the Transko Hiu 01 ship, obtaining a Dredging and Reclamation Business Permit and investing 1 (spread) Diving Equipment to strengthen PME's capabilities in the implemented business lines.

The Role of the Board of Directors in the Formulation and Implementation of Strategies and Strategic Policies

The preparation of the Company's strategy and strategic policies in an effort to achieve targets is carried out carefully and comprehensively. The Board of Directors plays an important role in formulating as well as ensuring the realization of the strategic policies that have been set, including:

1. Determine the vision, mission and strategy of the Company.
2. Create and enforce guidelines, regulatory guidelines and policies in the framework of implementing the aims and business of the Company.
3. Organize and manage business activities in accordance with the Company's line of business listed in the Company's Articles of Association.
4. Prepare Company Work Plan and Budget (RKAP) and Company Long Term Plan (RJPP).

5. Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian Perusahaan.

Direksi memastikan seluruh strategi tersebut dapat terimplementasikan dengan baik dengan senantiasa melakukan *monitoring*, diantaranya dengan menyelenggarakan rapat Direksi secara rutin. Pada tahun 2022, Direksi menyelenggarakan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris sebanyak 10 kali. Direksi menilai penerapan implementasi strategi yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKAP.

Kendala dan Tantangan

Sepanjang tahun 2022, PME menghadapi sejumlah tantangan yang menuntut Perusahaan untuk lebih lincah dan adaptif dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan masifnya upaya efisiensi di seluruh Pertamina Group, PME melakukan secara aktif beradaptasi dengan kondisi ini untuk dapat menjaga kinerja operasional dengan tuntutan efisiensi yang ada. Direksi secara aktif melakukan berbagai langkah koreksi dan mitigasi atas tantangan dan risiko yang terjadi. Perusahaan menyakini adaptasi yang dilakukan dalam menjawab tantangan yang terjadi dapat mempertahankan momentum pertumbuhan yang telah diraih sekaligus meminimalisir dampak yang dialami akibat dinamika ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2022.

Prospek Usaha Tahun 2023

Melihat prediksi iklim ekonomi dan industri yang positif di tahun depan, Direksi berupaya untuk mengoptimalkan potensi bisnis Perusahaan ke depan. Hal tersebut tercermin dari kebijakan strategis yang telah disusun sebagai acuan dalam menjalankan kinerja operasional di tahun 2023. Hal ini juga yang menjadi dasar dalam menyusun target dalam RKAP tahun 2023. Di mana pada tahun 2023, Perusahaan memproyeksikan dapat membukukan total pendapatan sebesar Rp1.152,25 miliar atau mencapai 150,43% terhadap realisasi tahun 2022. Adapun laba bersih, diproyeksikan sebesar Rp137,78 miliar di tahun 2023, atau mencapai 353% terhadap realisasi tahun 2022.

PME juga telah menyusun kebijakan dan inisiatif strategis dan meyakini dapat menerapkannya di tahun 2023. Meski demikian, PME menyadari bahwa di tahun 2023, Perusahaan masih akan menghadapi segala tantangan pada kegiatan bisnis Perusahaan dengan adanya penambahan bisnis baru yaitu Fresh Water Supply dan Waste Management sebagai bentuk diversifikasi usaha PME.

5. The Board of Directors develops HR, assesses performance and provides appropriate remuneration, and builds an HR environment that effectively supports the Company's achievements.

The Board of Directors ensures that all of these strategies can be properly implemented by constantly monitoring, including by holding regular Board of Directors meetings. In 2022, the Board of Directors will hold 10 joint meetings with the Board of Commissioners. The Board of Directors assesses that the implementation of the strategy carried out by the company is in accordance with the directions and policies set out in the RKAP.

Obstacles and Challenges

Throughout 2022, PME will face a number of challenges that require the Company to be more agile and adaptive in carrying out its business activities. With massive efficiency efforts throughout the Pertamina Group, PME is actively adapting to these conditions in order to be able to maintain operational performance with existing efficiency demands. The Board of Directors actively takes steps to correct and mitigate the challenges and risks that occur. The company believes that the adaptations made in responding to the challenges that occur can maintain the growth momentum that has been achieved while minimizing the impact experienced due to the economic dynamics that occur throughout 2022.

Business Prospects for 2023

Seeing the predictions of a positive economic and industrial climate next year, the Board of Directors seeks to optimize the Company's business potential going forward. This is reflected in the strategic policies that have been prepared as a reference in carrying out operational performance in 2023. This is also the basis for setting targets in the 2023 RKAP. Where in 2023, the Company projects to be able to record a total revenue of IDR 1,152.25 billion or reaching 150.43% of the realization in 2022. As for the net profit, it is projected to be IDR 137.78 billion in 2023, or reaching 353% of the realization in 2022.

PME has also prepared strategic policies and initiatives and believes it can implement them in 2023. However, PME realizes that in 2023, the Company will still face all challenges in the Company's business activities with the addition of new businesses, namely Fresh Water Supply and Waste Management as a form of PME business diversification.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perkembangan dunia usaha yang pesat menuntut Perusahaan memiliki sebuah perangkat untuk menciptakan iklim Perusahaan yang akuntabel dan berkelanjutan. Pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan upaya dalam menjadikan GCG sebagai kaidah dan pedoman bagi pengelola Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Penerapan GCG diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengawal pencapaian visi, misi, dan tujuan PME.

PME mempunyai misi dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik dengan melakukan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

Pada saat penyusunan Laporan Tahunan ini, PME telah melakukan peningkatan penerapan GCG di lingkup Perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menerbitkan Pedoman *Code of Corporate Governance*, No. PDM-002/PME-C0000/2022 yang berlaku sejak tanggal 19 Desember 2022.
2. Menerbitkan Pedoman *Code of Conduct*, No. PDM-001/PME-C0000/2022 yang berlaku sejak tanggal 19 Desember 2022.
3. Untuk pertamakalinya melakukan *assessment* GCG untuk Tahun Buku 2022, yang mengacu pada Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

Adapun sebagai bentuk komitmen PME dalam meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perusahaan, PME juga telah melaksanakan *assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2022 yang dilakukan di tahun 2023.

Penerapan Whistleblowing System

Whistleblowing System merupakan wujud komitmen PME terhadap penerapan praktik GCG dan menjadikannya sarana penyampaian informasi yang sistematis terkait penyelenggaraan PME agar informasi tersebut dapat dikelola dan ditindaklanjuti dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak kecurangan, yaitu dengan melaporkan kejadian perilaku pelanggaran serta mendorong budaya kejujuran dan keterbukaan di lingkungan PME. Di samping itu, PME menjadikan WBS sebagai landasan dalam merancang tindakan perbaikan yang diperlukan dan menyediakan mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran ke depannya.

Development of Corporate Governance Implementation

The rapid development of the business world requires the Company to have a tool to create an accountable and sustainable corporate climate. Company management based on the principles of Good Corporate Governance (GCG) is an effort to make GCG a rule and guideline for company managers in carrying out their business activities.

GCG implementation is expected to be used as a means to oversee the achievement of PME's vision, mission and objectives.

PME has a mission to achieve good corporate governance by carrying out and applying the GCG principles which consist of: transparency, accountability, responsibility, independence as well as fairness and equality.

During the preparation of this Annual Report, PME has made improvements to GCG implementation within the Company, including the following:

1. Published the Code of Corporate Governance Guidelines, No. PDM-002/PME-C0000/2022 which took effect on 19 December 2022.
2. Issued Code of Conduct Guidelines, No. PDM-001/PME-C0000/2022 which took effect on 19 December 2022.
3. For the first time conducting a GCG assessment for the 2022 Fiscal Year, which refers to the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

As a form of PME's commitment to increasing the application of GCG principles within the Company, PME has also carried out an assessment of GCG implementation for the 2022 financial year which will be conducted in 2023.

Whistleblowing System Implementation

The Whistleblowing System is a form of PME's commitment to the implementation of GCG practices and makes it a means of conveying systematic information related to the implementation of PME so that this information can be managed and followed up by referring to the applicable laws and regulations. This is done in preventing acts of fraud, namely by reporting incidents of violating behavior and encouraging a culture of honesty and openness within the PME environment. In addition, PME uses the WBS as a basis for designing the necessary corrective actions and provides an early warning system for possible problems due to future violations.

Perubahan Komposisi Direksi

Di tahun 2022, terdapat perubahan susunan Direksi, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham, dengan mengangkat Yada Prawira Ganta sebagai Direktur Perusahaan, menggantikan Afridal Rivai selaku pejabat sebelumnya, dengan demikian, komposisi susunan Direksi Perusahaan per 31 Desember 2022 terdiri dari 1 (satu) orang Direktur, yakni sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Yada Prawira Ganta	Direktur Director	10 Agustus 2022 10 August 2022	Ke-1 First	Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 10 Agustus 2022, yang telah dilembagakan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 420 tanggal 10 Agustus 2022 Resolution of the Circular GMS dated 10 August 2022, which has been institutionalized as stated in Deed No. 420 of August 10, 2022

Changes in Board of Directors Composition

In 2022, there was a change in the composition of the Board of Directors, based on a Shareholders' Decision, by appointing Yada Prawira Ganta as Director of the Company, replacing Afridal Rivai as the previous official, thus, the composition of the composition of the Board of Directors of the Company as of December 31, 2022 consists of 1 (one) Director, namely as follows:

Apresiasi dan Penutup

Dengan segala pencapaian yang telah dicatatkan di tahun 2022, izinkan Direksi mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Pemegang Saham, Direksi mengucapkan terima kasih atas arahan dan kepercayaan yang telah diberikan. Tidak lupa, Direksi juga memberikan apresiasi kepada Dewan Komisaris atas kerjasama, nasihat dan rekomendasi yang diberikan, sehingga Direksi mampu melakukan pengelolaan Perusahaan dengan baik. Pada kesempatan ini, Direksi juga memberikan apresiasi kepada seluruh konsumen atau pelanggan dan mitra kerja atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik dan kepercayaan yang telah diberikan pada Perusahaan. Kami senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan kualitas kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak. Kepada seluruh Insan PME, Direksi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah diberikan. Apa yang telah kita kontribusikan dan berikan untuk Perusahaan di tahun 2022, akan menjadi dasar bagi PME untuk dapat mengoptimalkan potensinya dan meraih kinerja terbaiknya di masa yang akan datang.

Appreciation and Closing

With all the achievements that have been recorded in 2022, allow the Board of Directors to give thanks to God Almighty. To the Shareholders, the Board of Directors would like to thank them for the given direction and trust. Not to forget, the Board of Directors also appreciates the Board of Commissioners for the cooperation, advice and recommendations provided, so that the Directors are able to manage the Company well. On this occasion, the Board of Directors also appreciates all consumers or customers and work partners for the cooperation that has been well established and the trust that has been placed in the Company. We always strive to continue to improve the quality of cooperation that benefits both parties. To all PME personnel, the Board of Directors expresses its highest appreciation for the dedication that has been given. What we have contributed and provided to the Company in 2022 will be the basis for PME to be able to optimize its potential and achieve its best performance in the future.

Jakarta, Juni 2023
Jakarta, June 2023
PT Pertamina Marine Engineering



Yada Prawira Ganta
Direktur
Director

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022 PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING

STATEMENT LETTER OF MEMBERS OF THE BOARD COMMISSIONERS REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE 2022 ANNUAL REPORT OF PT PERTAMINA MARINE ENGINEERINGG

Laporan Tahunan 2022 PT Pertamina Marine Engineering menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua data dan informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Marine Engineering untuk tahun buku 2022, telah dimuat secara lengkap. Kami selaku Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang tersaji dalam Laporan ini. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Annual Report 2022 of PT Pertamina Marine Engineering presents information regarding company performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ending December 31, 2022, and other information that is relevant and significant for stakeholders.

We, the undersigned, certify that all data and information contained in the Annual Report of PT Pertamina Marine Engineering for the 2022 fiscal year has been published completely. We as the Board of Commissioners are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report and Financial Statements presented in this Report. Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, Juni 2023
Jakarta, June 2023

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Oce Madril
Komisaris
Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022 PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING

STATEMENT LETTER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE 2022 ANNUAL REPORT OF PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING

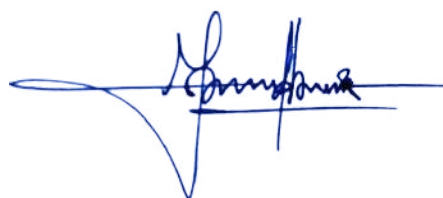
Laporan Tahunan 2022 PT Pertamina Marine Engineering menyajikan informasi mengenai kinerja perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan informasi lainnya yang relevan dan signifikan bagi para pemangku kepentingan.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua data dan informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Marine Engineering untuk tahun buku 2022, telah dimuat secara lengkap. Kami selaku Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang tersaji dalam Laporan ini. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Annual Report 2022 of PT Pertamina Marine Engineering presents information regarding company performance, implementation of corporate governance, implementation of corporate social responsibility, Financial Statements for the period ending December 31, 2022, and other information that is relevant and significant for stakeholders.

We, the undersigned, certify that all data and information contained in the Annual Report of PT Pertamina Marine Engineering for the 2022 fiscal year has been published completely. We as the Board of Directors are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report and Financial Statements presented in this Report. Thus this statement is made truthfully.

Direksi Board of Directors



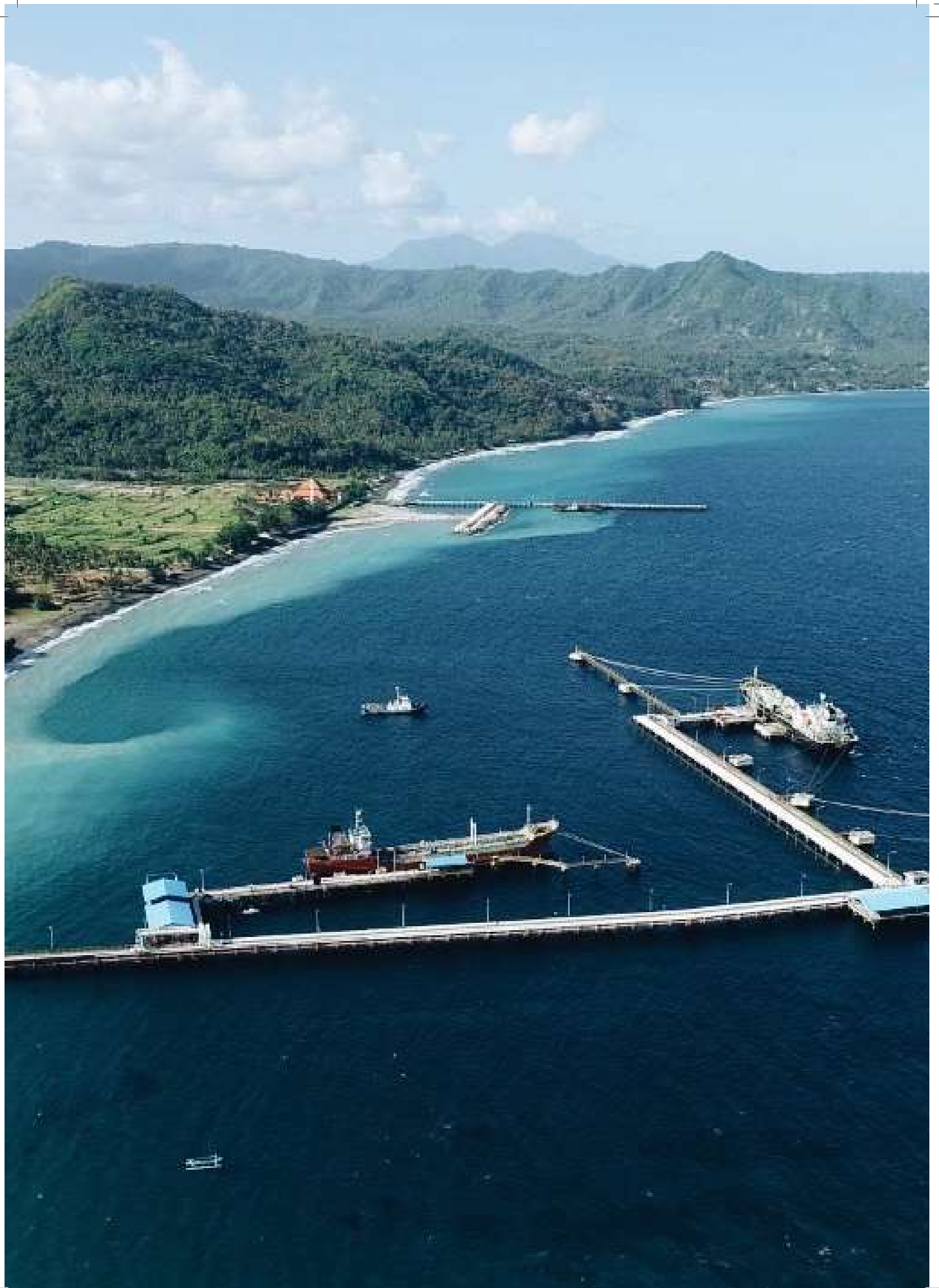
Yada Prawira Ganta
Direktur
Director



Afridal Rivai
Kuasa PLT Direktur
Proxy of Acting Director

Periode Jabatan
10 Agustus 2022 s/d 31 Desember 2022
10 August 2022 until 31 December 2022

11 April 2022 s/d 09 Agustus 2022
11 April 2022 until 9 August 2022



3

Profil Perusahaan Company Profile

Pada tahun 2022, PME memperluas lini bisnisnya menjadi 6 bisnis utama, yaitu *dredging & reclamation, underwater work services, EPC & port maintenance, fresh water management, waste management, and general trading.*

In 2022, PME expanded its business lines into 6 main businesses, namely dredging & reclamation, underwater work services, EPC & port maintenance, fresh water management, waste management, and general trading.

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION AND COMPANY IDENTITY



Nama Perusahaan

Company Name

PT Pertamina Marine Engineering

Nama Singkat

Short Name

PME



Tanggal Pendirian

Date of Establishment

6 November 1991
November 6, 1991



Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

Akta pendirian No. 62 tanggal 6 November 1991, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris, di Jakarta
Deed of establishment No. 62 dated November 6, 1991, made before Sinta Susikto, S.H., Notary, in Jakarta



Status Badan Hukum

Legal Entity Status

Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN")
Limited Liability Company ("PT"); Domestic Investment ("PMDN")



Informasi Perubahan Nama

Name Change Information

- 1991
PT Peteka Karya Jala (PKJ)
- 2022
PT Pertamina Marine Engineering



Kepemilikan Saham

Share Ownership

- PT Pertamina Trans Kontinental (99,17%)
- PT Pertamina Energy Terminal (0,83%)



Modal Dasar

Authorized Capital

Rp45.000.000.000,-
IDR45,000,000,000,-



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Issued and Fully Paid-up Capital

Rp12.000.000.000,-
IDR12,000,000,000,-

Kegiatan Usaha

Line of Business

Pengerukan, Rekayasa Teknik, Konstruksi, Teknik Bawah Air, Manajemen Limbah B3, Manajemen Air Bersih, dan Kegiatan Perdagangan Umum
Dredging, Engineering, Construction, Underwater Engineering, Hazardous Waste Management, Fresh Water Management, and General Trading Activitiespersons



Jumlah Pekerja

Total Employees

189 orang/persons (2022)



Alamat

Address

Gedung PT Pertamina Trans Kontinental
Area Logistik Pertamina
Jl. Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14350, Indonesia



Telp

Phone

+6221 2961 5165

Faksimili

facsimile

+6221 2961 5166

Email

E-mail

headoffice@pertamina-me.com

Situs Web

Website

www.pertamina-pme.com

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

PT Pertamina Marine Engineering, disebut juga sebagai “Perusahaan” atau “PME”, merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang pengerukan (*dredging*), *port EPC & maintenance*, *waste management*, *underwater work services*. Perusahaan awalnya didirikan dengan nama PT Peteka Karya Jala (PKJ) pada tanggal 6 November 1991, berdasarkan akta pendirian No. 62 tanggal 6 November 1991, dibuat di hadapan Notaris Sinta Susikto, S.H di Jakarta dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1991.

Pada tahun 2016, PME memulai proyek pengerukan pertamanya di TBBM Pulau Sambu, proyek ini merupakan tonggak penting bagi PME kedepannya. Kemudian, pada tanggal 3 Juni 2022, Perusahaan melakukan *rebranding* nama Perseroan sesuai dengan Akta No. 02 tanggal 3 Juni 2022, dibuat di hadapan Notaris Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., yang disetujui dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0038659.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 3 Juni 2022, nama Perseroan PT Peteka Karya Jala berubah menjadi PT Pertamina Marine Engineering. Lalu, PME pun melebarkan lini bisnisnya menjadi 6 bisnis utama yaitu *dredging & reclamation*, *underwater work services*, *EPC & port maintenance*, *fresh water management*, *waste management*, and *general trading*.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir yaitu Akta No. 1016 tanggal 26 Agustus 2022 dibuat di hadapan Notaris Fernandia Fabiola, S.H., M.Kn., mengenai penambahan bidang usaha. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0062597.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022.

PT Pertamina Marine Engineering, also known as the “Company” or “PME”, is a company engaged in dredging, port EPC & maintenance, waste management, underwater work services. The company was originally founded under the name PT Peteka Karya Jala (PKJ) on November 6, 1991, based on the deed of establishment No. 62 dated November 6, 1991, drawn up before Notary Sinta Susikto, S.H in Jakarta and started commercial operations in 1991.

In 2016, PME started its first dredging project at TBBM Pulau Sambu, this project is an important milestone for PME going forward. Then, on June 3, 2022, the Company rebranded the Company’s name in accordance with Deed No. 02 dated June 3, 2022, made before Notary Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., which was approved by Decree of the Minister of Law and Human Rights No. AHU-0038659.AH.01.02 Year 2022 dated June 3, 2022, the Company’s name PT Peteka Karya Jala changed to PT Pertamina Marine Engineering. Then, PME also expanded its business lines into 6 main businesses, namely dredging & reclamation, underwater work services, EPC & port maintenance, fresh water management, waste management, and general trading.

The Company’s Articles of Association have been amended several times, with the latest amendment being Deed No. 1016 dated August 26, 2022, made before Notary Fernandia Fabiola, S.H., M.Kn., regarding the addition of business fields. This change has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Decree No. AHU-0062597.AH.01.02 Year 2022 dated September 1, 2022..

KEGIATAN USAHA SERTA PRODUK DAN/ATAU JASA

LINE OF BUSINESS AND PRODUCTS AND/OR SERVICES

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah melalui Akta No. 1016 tanggal 26 Agustus 2026 yang dibuat dihadapan Fernandia Fabiola, S.H., M.Kn., Notaris, di Jakarta, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan, yang antara lain meliputi: perlengkapan alat apung, dak dan perbaikan, kerusakan, pekerjaan bawah air, serta rekayasa konstruksi, mekanik, dan ekspor/impor.

BISNIS UTAMA: PRODUK DAN/ATAU LAYANAN JASA

Dredging & Reclamation

1. Pengerukan alur, kolam pelabuhan & lokasi lain yang membutuhkan layanan pengerukan
2. Reklamasi, Pengangkutan material kerukan, pemadatan lahan
3. Pekerjaan teknik sipil terkait pengerukan dan reklamasi

Underwater Work Services

1. Survei hidrografi dan topografi dan soil investigation
2. Perbaikan dan perawatan bawah air
3. Pemeriksaan dan perawatan SBMP, SPM, Dermaga, dll.
4. Inspeksi Bawah Air (UT, MPI)
5. Pengangkatan benda bawah air

EPC & Port Maintenance

1. Konstruksi Dermaga
2. Revitalisasi Dermaga dan Fasilitasnya
3. Pemeliharaan Rutin Pelabuhan
4. Pekerjaan Listrik & Mekanik

Waste Management

1. Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
2. Pengelolaan Limbah B3

Fresh Water Management

1. Teknologi Pengolahan Air
2. Pasokan Air Bersih untuk Industri

General Trading

1. Penyediaan peralatan pendukung kelautan
2. Penyediaan aksesoris dan suku cadang pengiriman

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, which was last amended by Deed No. 1016 dated August 26, 2022 made before Fernandia Fabiola, S.H., M.Kn., Notary, in Jakarta, the aims and objectives of the Company are to run a business in the field of services and trade, which includes among others: floating equipment equipment, concrete and repairs, damage, underwater work, as well as construction engineering, mechanics, and export/import.

MAIN BUSINESS: PRODUCTS AND/OR SERVICES

Dredging & Reclamation

1. Dredging of canals, harbor pools & other locations requiring dredging services
2. Reclamation, Transport of dredged materials, land compaction
3. Civil engineering work related to dredging and reclamation

Underwater Work Services

1. Hydrographic and topographical survey and soil investigation
2. Underwater repair and maintenance
3. Inspection and maintenance of SBMP, SPM, Pier, etc.
4. Underwater Inspection (UT, MPI)
5. Lifting of underwater objects

EPC & Port Maintenance

1. Wharf Construction
2. Jetty Revitalization and Facilities
3. Port Routine Maintenance
4. Electrical & Mechanical work

Waste Management

1. Transportation of Hazardous and Toxic Waste (B3)
2. Hazardous Waste Management

Fresh Water Management

1. Water Treatment Technology
2. Clean Water Supply for Industry

General Trading

1. Provision of marine supporting equipment
2. Provision of accessories and delivery parts

VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI PERUSAHAAN COMPANY VISION, MISSION AND VALUES

Visi Vision

“Menjadi perusahaan *Dredging, Salvage, Underwater Work Services* dan *Maintenance Port Facility* yang profesional dan berdaya saing tinggi.”

“Become a professional and highly competitive *Dredging, Salvage, Underwater Work Services* and *Port Facility Maintenance* company.”

Misi Mission

Melaksanakan kegiatan *Dredging, Salvage, Under Water Work Services* dan *Maintenance Port Facility* yang berstandar internasional untuk menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengutamakan Kepuasan Pelanggan dan pemangku Kepentingan Lainnya.

Carry out international standard *Dredging, Salvage, Under Water Work Services* and *Port Facility Maintenance* activities to generate added value for the company by prioritizing Customer Satisfaction and Other Stakeholders.

Nilai-Nilai Perusahaan Company Values

PT Pertamina Marine Engineering yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah menerapkan nilai budaya AKHLAK, sebagai budaya Perusahaan yang harus ditaati oleh seluruh Insan Perusahaan. Dengan mentransformasi nilai AKHLAK ke dalam Budaya Perusahaan, diharapkan dapat menuntun segenap insan Perusahaan untuk lebih optimal dan berjalan lebih terarah di masa depan. Adapun penerapan nilai budaya AKHLAK di lingkup PT Pertamina Marine Engineering sebagai *core values* Insan Perusahaan, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

PT Pertamina Marine Engineering, which is part of a State-Owned Enterprise (SOE), has implemented AKHLAK cultural values, as a corporate culture that must be adhered to by all Company personnel. By transforming the AKHLAK values into the Corporate Culture, it is hoped that it can guide all Company personnel to be more optimal and more focused in the future. As for the application of AKHLAK cultural values within the scope of PT Pertamina Marine Engineering as the core values of Company Personnel, are as attached below.



AMANAH
Rompeten
Harmoni
Loyal
Adaptif
Kolaboratif

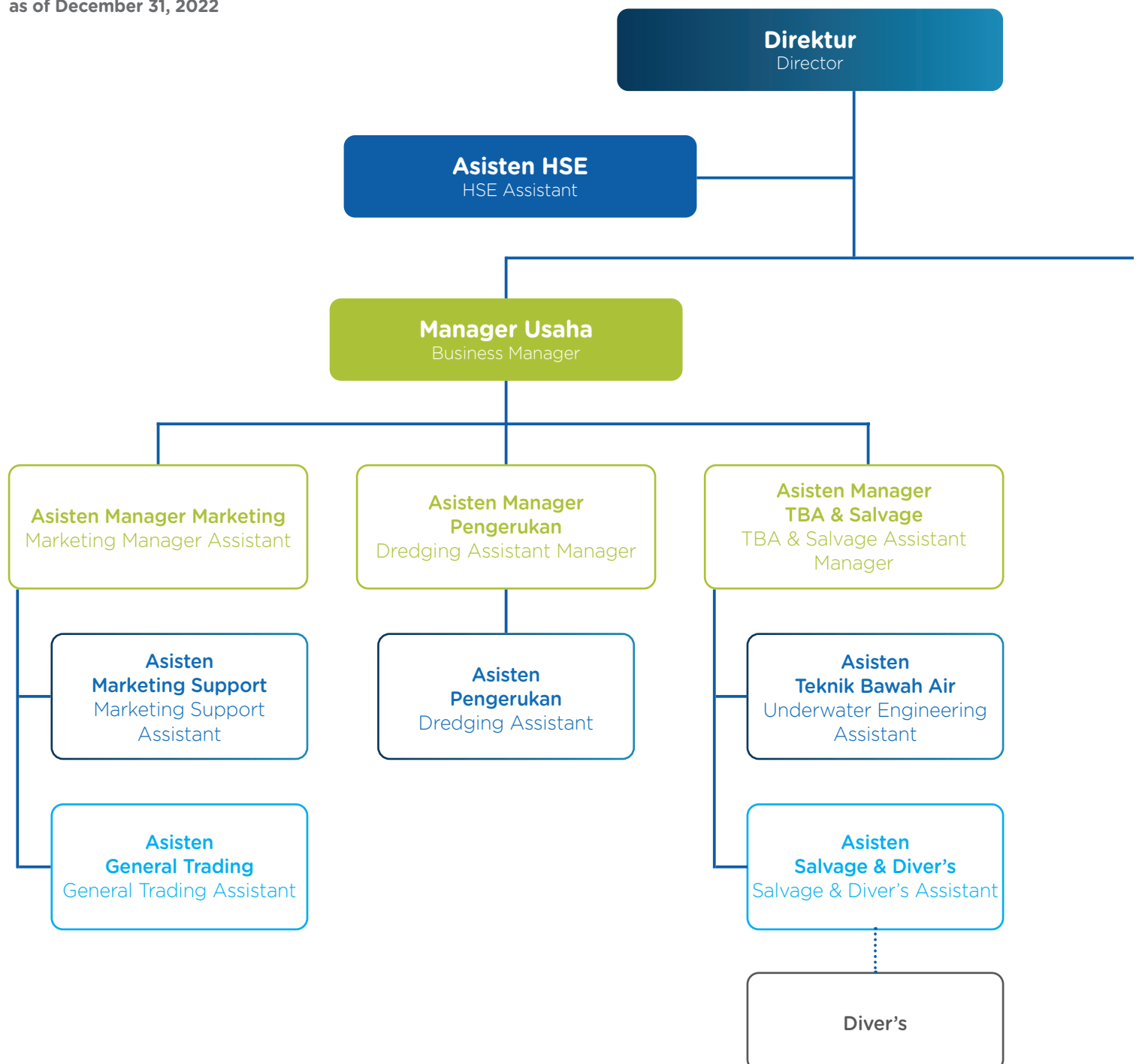
STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

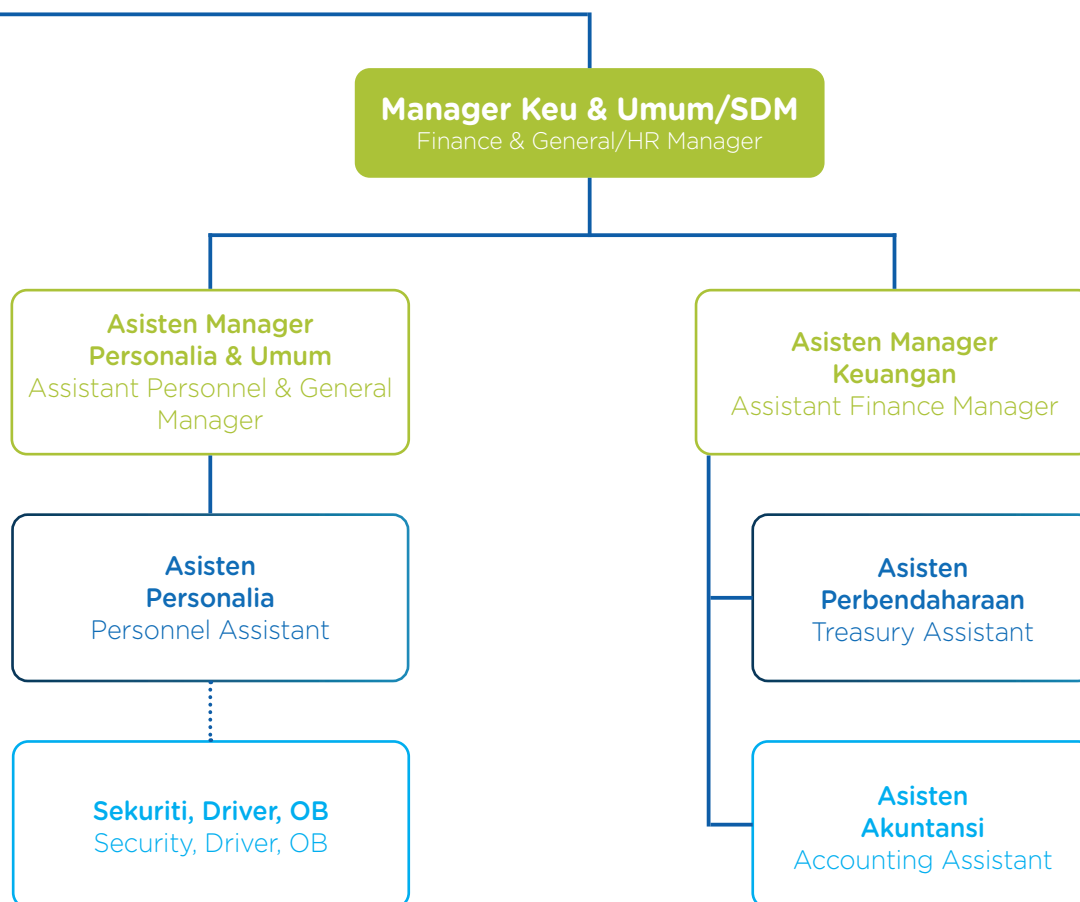
Perusahaan terus melakukan penguatan struktur organisasi demi mencapai tujuan bersama. Setiap lini organisasi diharapkan mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan tujuan Perusahaan. Struktur Organisasi Perusahaan per 31 Desember 2022, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi SK No. Kpts-019/C000/2013-S0 tanggal 26 Agustus 2013 sebagaimana terlampir di bawah ini.

Struktur Organisasi PT Pertamina Marine Engineering per 31 Desember 2022

Organizational Structure of PT Pertamina Marine Engineering as of December 31, 2022



The company continues to strengthen its organizational structure in order to achieve common goals. Each organizational line is expected to be able to carry out its functions in accordance with the Company's objectives. The Company's Organizational Structure as of December 31, 2022, has been stipulated through Directors Decree SK No. Kpts-019/C000/2013-S0 dated Agustus 26, 2013 as attached below.



PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Oce Madril*

Komisaris

Periode Jabatan: 24 Desember 2021 – RUPS 2024, Periode Pertama
Commissioner

Term of Office: December 24, 2021 – 2024 GMS, First Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 39 tahun
Kelahiran Payakumbuh, 18 November 1983

Domisili

Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Komisaris Pertamina Marine Engineering berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 24 Desember 2021, yang telah dilembagakan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 71 tanggal 04 Januari 2022, untuk 1 periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.

Riwayat Pendidikan

1. Sarjana Hukum, Universitas Gadjah Mada (2007)
2. Magister Hukum dan Pemerintahan, Nagoya University Japan (2011)
3. Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada dengan program Sandwich Doctoral Research di Van Vollenhoven Institute for Law, Governance, and Society Leiden University Netherlands (2018)
4. Study for Legislative Practice, Japan International Cooperation Agency (JICA), Tokyo, Japan (2019)

Riwayat Pekerjaan

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Pertamina Marine Engineering, beliau berkarier sebagai Executive Director of Research Center for Law Constitution and Government (2022-sekarang), Expert in drafting administrative decisions and regulations (2018-sekarang), Researcher and Lecturer, Faculty of Law Gadjah Mada University (2012-sekarang), Legal expert in various litigation cases (2013-sekarang), Legal expert in various institutions and local government.

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di luar Perusahaan

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali.

Personal data

Indonesian citizens
39 years old
Born in Payakumbuh, November 18, 1983

Domicile

Yogyakarta, Special Region of Yogyakarta, Indonesia

Appointment History

Appointed as Commissioner of Pertamina Marine Engineering based on GMS resolution on December 24, 2021, which has been institutionalized as stated in Deed No. 71 dated January 4, 2022, for 1 term of office (3 years). Previously he had never served on the Company's Board of Commissioners.

Educational background

1. Bachelor of Law, Gadjah Mada University (2007)
2. Master Degree in Law and Governance, Nagoya University Japan (2011)
3. Doctoral program in Law, Gadjah Mada University with Sandwich Doctoral Research program in Van Vollenhoven Institute for Law, Governance, and Society Leiden University Netherlands (2018)
4. Study for Legislative Practice, Japan International Cooperation Agency (JICA), Tokyo, Japan (2019)

Work Experience

In addition to serving as the Company's Commissioner, he has a career as Executive Director of Research Center for Law Constitution and Government (2022-present), Expert in drafting administrative decisions and regulations (2018-present), Researcher and Lecturer, Faculty of Law Gadjah Mada University (2012-present), Legal expert in various litigation cases (2013-present), Legal expert in various institutions and local government.

Concurrent Position

He does not have multiple positions outside the Company

Affiliated Relationship

He has no affiliation, either with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or with major and controlling shareholders.

*Pernah menjabat sebagai PLT Direktur Perusahaan per 09 April 2022 – 09 Agustus 2022, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

*Once served as Acting Director of the Company as of 09 April 2022 – 09 August 2022, based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS).

PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS PROFILE



Yada Prawira Ganta

Direktur

Periode Jabatan: 10 Agustus 2022 – RUPS 2024, Periode Pertama

Director

Term of Office: August 10, 2022 – 2024 GMS, First Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 40 tahun
Kelahiran Jakarta, 3 Maret 1982

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Pertamina Marine Engineering berdasarkan Keputusan RUPS tanggal 10 Agustus 2022, yang telah dilembagakan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 420 tanggal 10 Agustus 2022, untuk 1 periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Teknik Industri, Universitas Trisakti (2006)
- Magister Administrasi Bisnis, Universitas Gadjah Mada (2013)

Riwayat Pekerjaan

Sebelum menjabat sebagai Direktur Pertamina Marine Engineering, beliau berkarier sebagai Ahli Utama Rules, Safety & Inspection – Own Fleet (2007) – Shipping – PT Pertamina (Persero), Quality & Safety Auditor - Safety Management Representative (2008) Shipping – PT Pertamina (Persero), Ship Operation Support - Shipping Operation (2013) - Shipping – PT Pertamina (Persero), Commercial & Overseas Operation – Commercial (2014) - Shipping – PT Pertamina (Persero), Ast Manager Claim Performance & Insurance - Commercial (2016) - Shipping – PT Pertamina (Persero), Ast Manager Chartering – Commercial (2018) - Shipping – PT Pertamina (Persero), Manager Marine Region VII (2019) – Marketing Operation Regional Sulawesi – PT Pertamina (Persero), Manager Marine Region V (2020) – Marketing Operation Regional Jatimbalinus- PT Pertamina (Persero), VP Marine Business Unit (2021) – PT Pertamina Trans Kontinental, Director of Pertamina Marine Engineering (2022) – SH Integrated Marine Logistics.

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di luar Perusahaan

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali.

Personal data

Indonesian citizens
40 years old
Born in Jakarta, March 3, 1982

Domicile

East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

Appointed as Director of Pertamina Marine Engineering based on GMS resolution on August 10, 2022 which has been institutionalized as stated in Deed No. 420 dated August 10, 2022, for 1 term of office (3 years). Previously he had never served on the Board of Directors of the Company.

Educational background

- Bachelor of Industrial Engineering, Trisakti University (2006)
- Master of Business Administration, Gadjah Mada University (2013)

Work Experience

Prior to serving as Director of Pertamina Marine Engineering, he had a career as Main Expert Rules, Safety & Inspection – Own Fleet (2007) – Shipping – PT Pertamina (Persero), Quality & Safety Auditor - Safety Management Representative (2008) Shipping - PT Pertamina (Persero), Ship Operation Support - Shipping Operation (2013) - Shipping - PT Pertamina (Persero), Commercial & Overseas Operations – Commercial (2014) - Shipping - PT Pertamina (Persero), Ast Manager Claim Performance & Insurance - Commercial (2016) - Shipping - PT Pertamina (Persero), Ast Manager Chartering - Commercial (2018) - Shipping - PT Pertamina (Persero), Manager Marine Region VII (2019) – Sulawesi Regional Marketing Operation – PT Pertamina (Persero), Manager Marine Region V (2020) – Marketing Operation Regional Jatimbalinus - PT Pertamina (Persero), VP Marine Business Unit (2021) – PT Pertamina Trans Kontinental, Director of Pertamina Marine Engineering (2022) – SH Integrated Marine Logistics.

Concurrent Position

He does not have multiple positions outside the Company

Affiliated Relationship

He has no affiliation with the Board of Commissioners or with major and controlling shareholders.



Afridal Rivai*

Kuasa PLT Direktur

Periode Jabatan: 11 April 2022 – 09 Agustus 2022, Periode

Proxy of Acting Director

Term of Office: 11 April 2022 – 09 August 2022, Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 51 tahun
Kelahiran Sungai Tarab, 02 Januari 1971

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

Diangkat sebagai Kuasa PLT Direktur Pertamina Marine Engineering berdasarkan Surat Kuasa No. 001/SKU/DEKOM/PKJ/2022 tanggal 11 April 2022. Sebelumnya beliau pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan per 12 Februari 2016 – 08 April 2022.

Riwayat Pendidikan

Sarjana Manajemen Ekonomi, STIE Indonesia

Riwayat Pekerjaan

Sebelum menjabat sebagai Kuasa PLT Direktur Pertamina Marine Engineering, beliau berkarier sebagai Pengatur Administrasi Pelsus / Sarpel (2001 - 2002) - PT Pertamina Trans Kontinental - Kantor Pusat, Staf Port Operation & Services (2002 - 2006) - PT Pertamina Trans Kontinental - Kantor Pusat, Ast. Man. Port Operation & Services (2006 - 2009) - PT Pertamina Trans Kontinental - Kantor Pusat, Ast. MGR Port Administration (2009 - 2010) - PT Pertamina Trans Kontinental - Kantor Pusat, Manager Port Operation & Services (2010 - 2013) - PT Pertamina Trans Kontinental - Kantor Pusat, Manager Cabang Medan (2013 - 2016) - PT Pertamina Trans Kontinental - Cabang Medan, Direktur PKJ (2016 - 2022) - PT Pertamina Trans Kontinental - Anak Perusahaan.

Rangkap Jabatan

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan di luar Perusahaan

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham utama dan pengendali.

Personal data

Indonesian citizens
51 years old
Birth of Sungai Tarab, 02 January 1971

Domicile

East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Appointment History

Appointed as Proxy of Acting Director of Pertamina Marine Engineering based on GMS Resolution on April 11, 2022, which has been institutionalized as stated based on Power of Attorney No. 001/SKU/DEKOM/PKJ/2022 dated 11 April 2022. Previously he served on the Company's Board of Directors as of February 12, 2016 - April 8, 2022.

Educational background

Bachelor of Economic Management, STIE Indonesia

Work Experience

Prior to serving as Proxy of Acting Director of Pertamina Marine Engineering, he had a career as Administrative Manager of Pelsus / Sarpel (2001 - 2002) - PT Pertamina Trans Kontinental - Head Office, Port Operation & Services Staff (2002 - 2006) - PT Pertamina Trans Kontinental - Head Office, Ast. Man. Port Operation & Services (2006 - 2009) - PT Pertamina Trans Kontinental - Head Office, Ast. MGR Port Administration (2009 - 2010) - PT Pertamina Trans Kontinental - Head Office, Port Operation & Services Manager (2010 - 2013) - PT Pertamina Trans Kontinental - Head Office, Medan Branch Manager (2013 - 2016) - PT Pertamina Trans Kontinental - Medan Branch, PKJ Director (2016 - 2022) - PT Pertamina Trans Kontinental - Subsidiary Company.

Concurrent Position

He does not have concurrent positions outside the Company

Affiliated Relationship

He has no affiliation with the Board of Commissioners or with major and controlling shareholders.

*Pernah menjabat sebagai Direktur Perusahaan per 12 Februari 2016 – 08 April 2022, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- Efektif menjabat sebagai Kuasa PLT Direktur Perusahaan per 11 April 2022 – 09 Agustus 2022, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

*Once Served as Director of the Company as of 12 February 2016 – 08 April 2022, based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS).

- Effectively served as Proxy of Acting Director of the Company as of 11 April 2022 – 09 August 2022, based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS).

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICERS PROFILE



Pevi Wahyudi

Manager Usaha
Menjabat Sejak: 1 Juli 2021
Business Manager
Menjabat Sejak: 1 Juli 2021

Kewarganegaraan

Warga negara Indonesia
Usia 39 tahun

Domisili

Madiun, Jawa Timur, Indonesia

Riwayat Pendidikan

S1-Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2007)

Pengalaman Kerja

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Manager Technical Fleet II di PT Pertamina Trans Kontinental (2020-2021)

Citizenship

Indonesian citizens
39 years old

Domicile

Madiun, East Java, Indonesia

Educational Background

Bachelor-Shipping Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya (2007)

Work Experience

Previously he served as Manager of Technical Fleet II at PT Pertamina Trans Kontinental (2020-2021)



Jhonnedi Naro

Manager Keuangan & Umum/SDM
Menjabat Sejak: 1 Mei 2020
Finance & General/HR Manager
Menjabat Sejak: 1 Mei 2020

Kewarganegaraan

Warga negara Indonesia
Usia 50 Tahun

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

S1-Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Jambi (2004)

Pengalaman Kerja

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Manager Usaha di PT Pertamina Trans Kontinental (2019-2020)

Citizenship

Indonesian citizens
50 years old

Domicile

East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Educational Background

Bachelor of Economics and Development Studies, University of Jambi (2004)

Work Experience

Previously he served as Business Manager at PT Pertamina Trans Kontinental (2019-2020)

DEMOGRAFI PEKERJA DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

EMPLOYEE DEMOGRAPHY AND COMPETENCY DEVELOPMENT

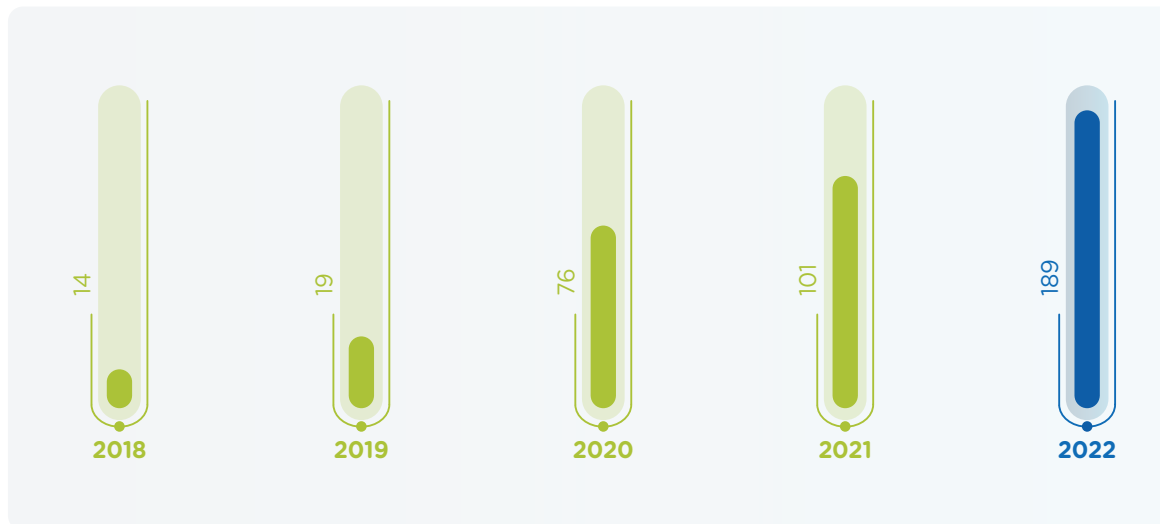
DEMOGRAFI PEKERJA

Per 31 Desember 2022, jumlah pekerja Perusahaan mencapai 189 orang, mengalami peningkatan sebesar 87,13% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 101 orang. Adanya peningkatan ini disebabkan oleh Bisnis Perusahaan.

EMPLOYEES DEMOGRAPHICS

As of December 31, 2022, the number of Company employees reached 189 people, an increase of 87.13% compared to the previous year of 101 people. This increase was due to the Company's Business.

Perkembangan Jumlah Pekerja 2018-2022 (orang)
Development of Total Employees 2018-2022 (person)



Demografi Pekerja Berdasarkan Level Organisasi/Jenjang Jabatan (orang)
Employee Demographics Based on Organizational Level/Office Level (person)

Level Organisasi Organizational Level	2022				2021			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Direktur Board of Directors	1	-	1	0,52%	1	-	1	0,99%
Manager	2	-	2	1,04%	2	-	2	1,98%
Ast. Manager	2	1	3	1,56%	2	1	3	2,97%
Asisten/setara Assistant/equivalent	172	14	186	96,88%	90	5	95	94,06%
Jumlah Total	177	15	192	100,00%	95	6	101	100,00%

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Demografi Pekerja Berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang)

Employee Demographics Based on Education Level (person)

Jenjang Pendidikan Educational level	2022				2021			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Pasca Sarjana Postgraduate	4	-	4	2,08%	4	-	4	3,96%
Sarjana Bachelor	45	13	58	30,21%	28	5	33	32,67%
Diploma Diploma	8	-	8	4,17%	2	-	2	1,98%
SMA dan Setara High School and Equivalent	110	2	112	58,33%	48	2	50	49,50%
SMP Junior High School	7	-	7	3,65%	12	-	12	11,88%
SD Elementary School	3	-	3	1,56%	-	-	-	0%
Jumlah Total	177	15	192	100,00%	94	7	101	100,00%

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Demografi Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)

Employee Demographics Based on Employment Status (person)

Status Kepegawaian Employment status	2022				2021			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Pekerja Tetap (PWTT) Permanent Employees	18	6	24	12,50%	18	6	24	23,76%
Pekerja Kontrak (PWT) Contract Employees	157	7	164	85,42%	68	7	75	74,26%
Pekerja Tidak Tetap (TKJP) Part time Employees	2	2	4	2,08%	1	1	2	1,98%
Jumlah Total	177	15	192	100,00%	87	14	101	100,00%

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Demografi Pekerja Berdasarkan Rentang Usia (orang)

Employee Demographics Based on Age Range (person)

Rentang Usia Age Range	2022				2021			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
> 55 tahun > 55 Year	5	-	5	2,60%	2	-	2	1,98%
51 - 55 tahun 51 - 55 Year	13	1	14	7,29%	15	-	15	14,85%
41 - 50 tahun 41 - 50 Year	33	-	33	17,19%	30	1	31	30,69%

Demografi Pekerja Berdasarkan Rentang Usia (orang)
Employee Demographics Based on Age Range (person)

Rentang Usia Age Range	2022				2021			
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
31 - 40 tahun 31 - 40 Year	51	1	52	27,08%	25	1	26	25,74%
21 - 30 tahun 21 - 30 Year	71	13	84	43,75%	21	5	26	25,74%
< 20 tahun < 20 Year	4	-	4	2,08%	1	-	1	0,99%
Jumlah Total	177	15	192	100,00%	94	7	101	100,00%

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Demografi Pekerja Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)
Employee Demographics Based on Gender (person)

Gender/Jenis Kelamin Gender	2022		2021	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)
Laki-laki Male	177	92,19%	95	94,06%
Perempuan Female	15	7,81%	6	5,94%
Jumlah Total	192	100,00%	101	100,00%

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEKERJA

Berikut program pengembangan kompetensi pekerja untuk semua level jabatan, yang diselenggarakan Perusahaan di sepanjang tahun 2022.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

The following is the employee competency development program for all levels of positions, which will be held by the Company throughout 2022.

Pengembangan Kompetensi Pekerja Berdasarkan Level Organisasi/Jenjang Jabatan Tahun 2022
Employee Competency Development Based on Organizational Level/Office Level Year 2022

Jenjang Jabatan Position Level	Program Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Programs	Jumlah Peserta (orang) Number of participants (person)
Manager/setara Position Level	<ul style="list-style-type: none"> Business Communication Skills Business to Business Sales Skill 	2 Orang 2 Person
Ast. Manager/setara Manager Assistant/equivalent	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Laporan Keuangan Legal Officer Perusahaan Financial Statements Analysis of Company Legal Officers 	3 Orang 3 Person

Pengembangan Kompetensi Pekerja Berdasarkan Level Organisasi/Jenjang Jabatan Tahun 2022
Employee Competency Development Based on Organizational Level/Office Level Year 2022

Jenjang Jabatan Position Level	Program Pendidikan atau Pelatihan Education or Training Programs	Jumlah Peserta (orang) Number of participants (person)
Asisten/setara Assistant/equivalent	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Budgeting Skill</i> • <i>Customer Service Skill fol All</i> • <i>Project Management Fundamental</i> • <i>Akuntansi Pajak Untuk Jasa Konstruksi</i> • <i>Cash Flow & Credit Management</i> • <i>Treasury Management</i> • <i>Penyusunan HPS</i> • <i>Financial Auditing for Internal</i> • <i>Petugas P3K dan K3 Kebakaran</i> • <i>Budgeting Skills</i> • <i>Customer Service Skills follow All</i> • <i>Project Management Fundamentals</i> • <i>Tax Accounting For Construction Services</i> • <i>Cash Flow & Credit Management</i> • <i>Treasury Management</i> • <i>Preparation of HPS</i> • <i>Financial Auditing for Internal</i> • <i>First Aid Officer and Fire OHS</i> 	23 Orang

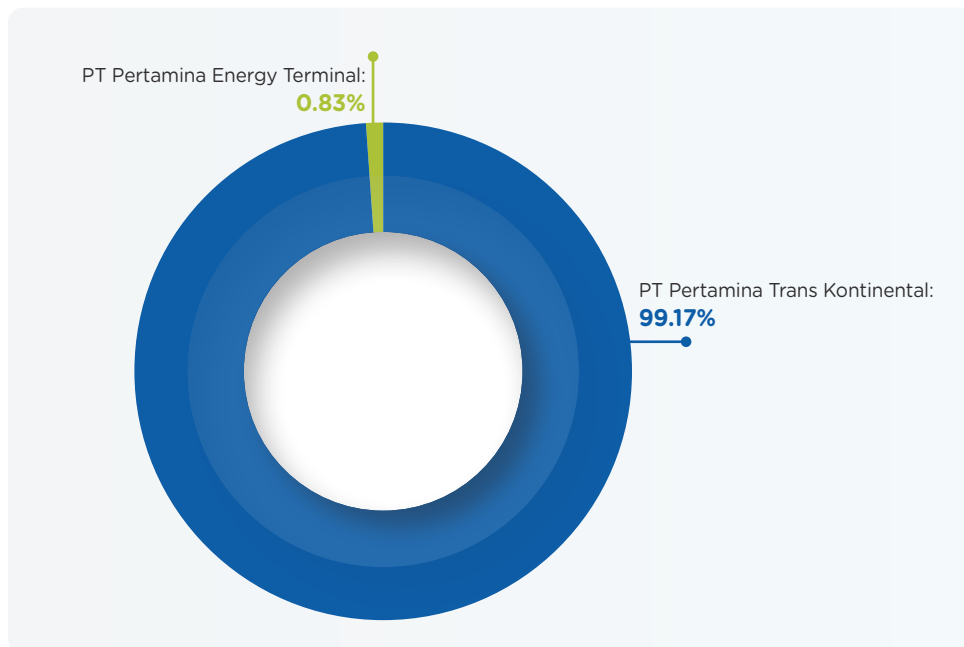
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS COMPOSITION

Kepemilikan Saham PT Pertamina Marine Engineering per 31 Desember 2022
Share Ownership of PT Pertamina Marine Engineering as of December 31, 2022

Nama Pemegang Saham Name of Shareholders	Status Pemegang Saham Shareholder Status	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (sheet)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Paid-up Capital (IDR)	Komposisi Kepemilikan Ownership Composition (%)
Nilai Nominal Saham = Rp1.000/lembar saham Share Nominal Value = IDR1,000/share				
PT Pertamina Trans Kontinental	Perseroan Terbatas	11.900.000	11.900.000.000	99,17%
PT Pertamina Energy Terminal	Limited Liability Company	100.000	100.000.000	0,83%
Jumlah Total		12.000.000	12.000.000.000	100,00%

Komposisi Pemegang Saham PT Pertamina Marine Engineering per 31 Desember 2022
Shareholder Composition of PT Pertamina Marine Engineering as of December 31, 2022

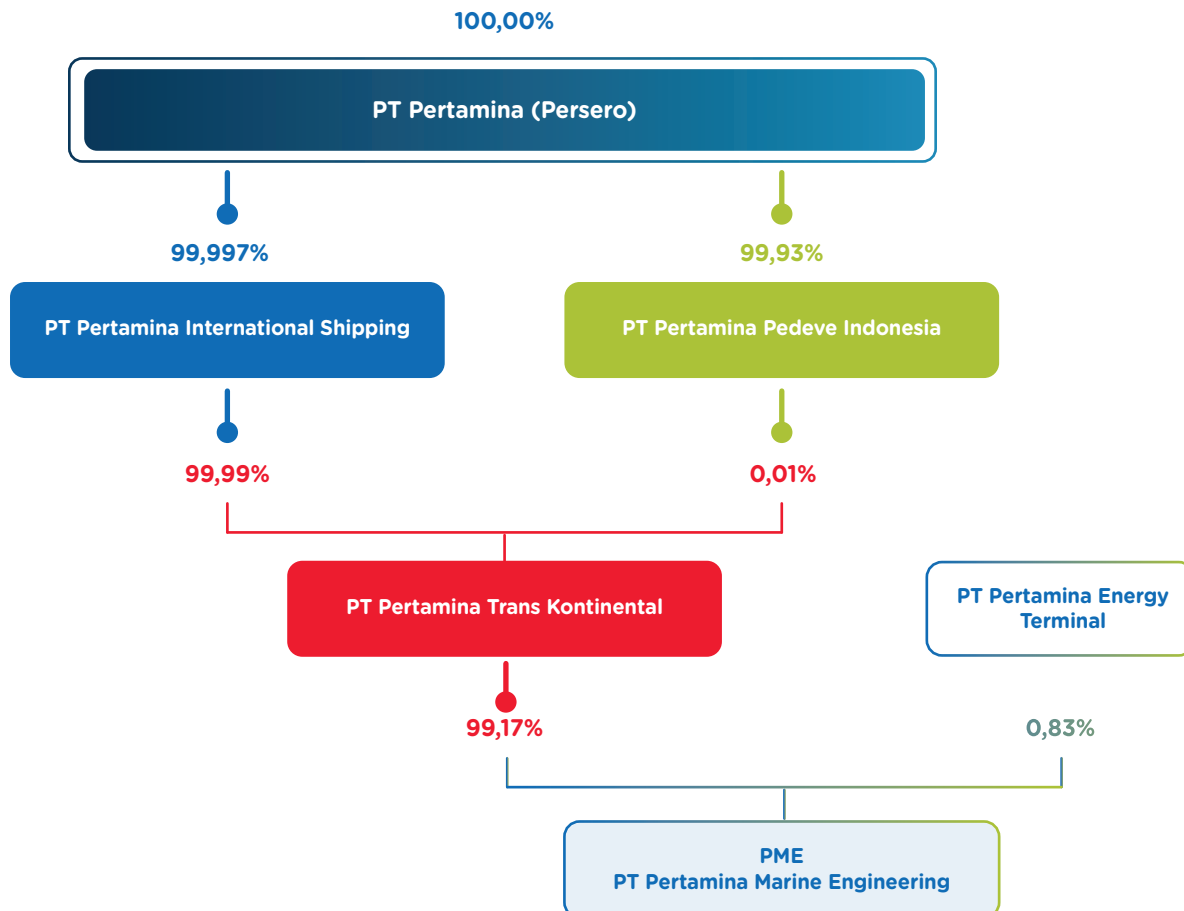


STRUKTUR GRUP GROUP STRUCTURE

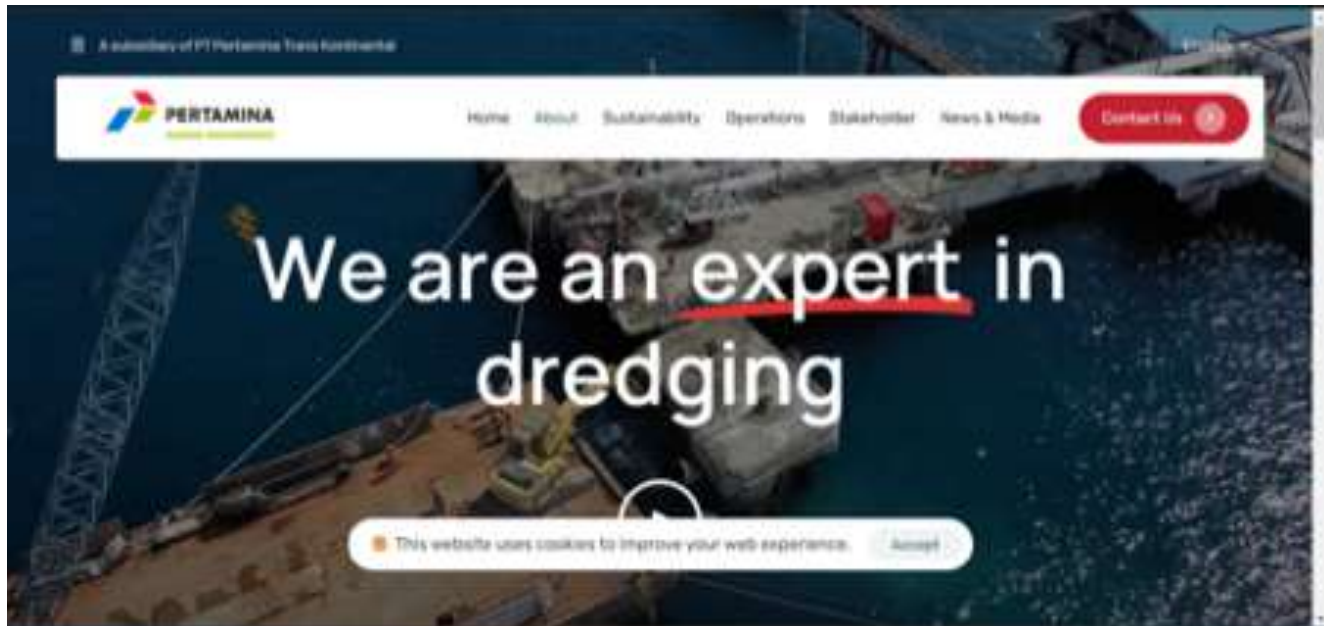
Struktur Grup Pertamina Marine Engineering per 31 Desember 2022
Pertamina Marine Engineering Group Structure as of December 31, 2022



Pemerintah Republik Indonesia
Government of Republic of Indonesia



INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE



PT Pertamina Marine Engineering menyediakan informasi kepada stakeholders yang salah satunya dapat diakses melalui situs web yang beralamat di www.pertamina-pme.com. Situs resmi Perusahaan yang disajikan dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, senantiasa diperbarui secara berkala untuk memberikan informasi *ter-update* bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Selain itu, Perusahaan juga telah melengkapi berbagai informasi seputar korporasi yang meliputi:

1. Informasi Umum Perusahaan;
2. Informasi Bisnis Perusahaan;
3. Informasi Keberlanjutan Perusahaan; dan
4. Informasi Lainnya.

PT Pertamina Marine Engineering provides information to stakeholders, one of which can be accessed through a website located at www.pertamina-pme.com. The Company's official website, which is presented in 2 (two) languages, namely Indonesian and English, is updated regularly to provide updated information for all stakeholders and the general public. In addition, the Company has also completed various information regarding the corporation which includes:

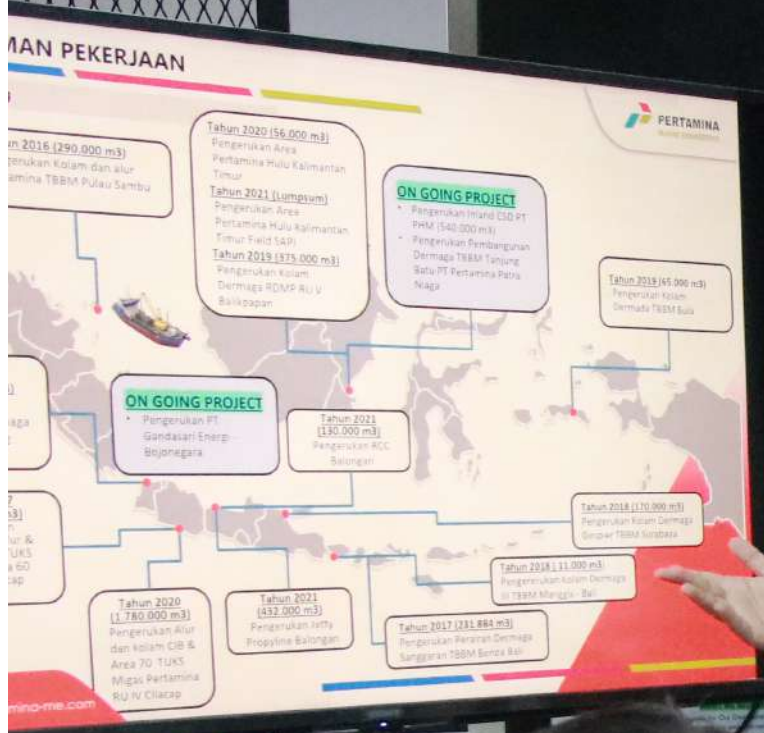
1. General Company Information;
2. Company Business Information;
3. Company Sustainability Information; and
4. Other Information.

SERTIFIKASI CERTIFICATION

SERTIFIKASI YANG MASIH BERLAKU

VALID CERTIFICATION

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Certificate Issuance Date	Nama Sertifikasi Certification Name	Masa Berlaku Validity period	Lembaga yang Memberikan Issuer Institutions
02 Juni 2022 June 02, 2022	Sertifikat Badan Usaha Konstruksi Construction Business Entity Certificate	3 Tahun/Years	Kementerian PUPR Minister of Public Works and Public Housing
06 Oktober 2022 October 06, 2022	Sertifikat Badan Usaha Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri Indonesia (Ardin) Business Entity Certificate of Association of Indonesian Goods Trading Companies, Distributors, Agencies and Industries (Ardin)	1 Tahun/Years	Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan dan Industri Indonesia Association of Indonesian Goods Trading Companies, Distributors, Agencies and Industries
05 September 2022 September 05, 2022	Sertifikat Badan Usaha Asosiasi Perusahaan Kelautan Perikanan dan Industri Maritim Indonesia (Aspek Piranti) Business Entity Certificate of Association of Indonesian Marine Fisheries and Maritime Industry Companies (Aspects of Tools)	1 Tahun/Years	Asosiasi Perusahaan Kelautan Perikanan dan Industri Maritim Indonesia Association of Indonesian Marine Fisheries and Maritime Industry Companies
17 Februari 2023 February 17, 2023	Sertifikat Badan Usaha Asosiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Business Entity Certificate of Association of Chambers of Commerce and Industry (Kadin)	1 Tahun/Years	Asosiasi Kamar Dagang dan Industri Association of Chambers of Commerce and Industry
14 Februari 2023 Februari 14, 2023	Sertifikat Badan Usaha Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (Akaindo) Business Entity Certificate of Indonesian Water Contractors Association (Akaindo)	1 Tahun/Years	Asosiasi Kontraktor Air Indonesia Indonesian Water Contractors Association



PERTAMINA

MARINE ENGINEERING



4

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

PME berhasil membukukan peningkatan total pendapatan sebesar 35,34% dari Rp281,10 miliar di tahun 2021 menjadi Rp380,43 miliar di tahun 2022. PME managed to record an increase in total revenue of 35.34% from IDR 281.10 billion in 2021 to IDR 380.43 billion in 2022.



TINJAUAN PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

OVERVIEW OF ECONOMIC AND INDUSTRIAL



Pada tahun 2022, perekonomian global dihadapkan berbagai tantangan, salah satunya ketegangan geopolitik dunia akibat konflik antara Rusia-Ukraina, yang memperburuk fragmentasi dan prospek ekonomi global sehingga berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas, dan ketidakpastian pasar keuangan global, yang menyebabkan koreksi prakiraan pertumbuhan ekonomi secara global. Dalam laporan *World Economic Outlook* yang dirilis pada Januari 2023, Lembaga Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund/IMF*) memprediksi pertumbuhan ekonomi global berada pada kisaran 3,4% atau turun signifikan dari pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 yang tercatat sebesar 6,2%.

Sementara, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia justru tumbuh menguat sebesar 5,31% di tahun 2022, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70%. Perekonomian Indonesia tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau USD4.783,9.

In 2022, the global economy faced various challenges, one of which is world geopolitical tensions due to the conflict between Russia and Ukraine, which exacerbates global economic fragmentation and prospects resulting in weakening trade transactions, rising commodity prices, and uncertainty in global financial markets, which causes forecast corrections global economic growth. In the *World Economic Outlook* report released in January 2023, the International Monetary Fund (IMF) predicts global economic growth to be in the range of 3.4% or a significant decrease from global economic growth in 2021 which was recorded at 6.2%.

Meanwhile, in the midst of a slowdown in global economic growth, the Central Statistics Agency (BPS) noted, Indonesia's economy actually grew stronger by 5.31% in 2022, higher than the achievements in 2021 which experienced growth of 3.70%. The Indonesian economy in 2022 which is calculated based on the Gross Domestic Product (GDP) at current prices reaches IDR19,588.4 trillion and GDP per capita reaches IDR71.0 million or USD4,783.9.

Berbagai program pemulihan ekonomi, serta didukung oleh kebijakan moneter dan sektor keuangan yang akomodatif, terbukti telah memberikan dorongan besar bagi akselerasi pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022. Efektivitas kebijakan penanganan pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang diterapkan Pemerintah juga berperan besar dalam menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. Akselerasi program vaksinasi dan pendekatan yang tepat dalam penerapan pembatasan sosial masyarakat yang adaptif, secara efektif mengendalikan penularan COVID-19, sekaligus menjaga aktivitas ekonomi untuk dapat pulih lebih cepat. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap kuat didorong oleh perbaikan permintaan domestik sejalan dengan terus meningkatnya mobilitas dan berlanjutnya penyelesaian Program Strategis Nasional (PSN).

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022, menjadi momentum bagi Perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Di mana, Perusahaan telah mengalami perkembangan yang menjadi penanda dari perubahan nama entitas, dari yang dahulu bernama PT Peteka Karya Jala menjadi PT Pertamina Marine Engineering. *Rebranding* ini diharapkan menjadi wujud optimisme di sepanjang tahun 2022.

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan di tahun 2022, Perusahaan juga telah bersinergi dan bekerja keras untuk dapat meningkatkan pencapaian melalui perluasan pasar non-captive, efisiensi di setiap lini, peningkatan kualitas pelayanan, agar kinerja keuangan PME dapat meningkat di masa mendatang.

Sementara itu, beberapa faktor yang secara langsung maupun tidak langsung juga berdampak terhadap kinerja Perusahaan yaitu diperlukan penyiapan modal kerja untuk menunjang rencana bisnis potensial melalui percepatan penagihan piutang terhadap user dan rencana penambahan modal Perusahaan. Peningkatan hubungan sinergi dengan induk perusahaan dan sesama anak perusahaan kerap dioptimalkan sebagai bagian dalam upaya peningkatan pendapatan.

Various economic recovery programs, supported by accommodative monetary and financial sector policies, have proven to have provided a major impetus for accelerating national economic recovery in 2022. The effectiveness of the policy for handling the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic implemented by the Government has also played a major role in maintaining continuing economic recovery. Acceleration of vaccination programs and the right approach in implementing adaptive community social restrictions, effectively controlling the transmission of COVID-19, while maintaining economic activity so that it can recover more quickly. Going forward, economic growth is predicted to remain strong driven by improving domestic demand in line with increasing mobility and continuing completion of the National Strategic Program (PSN).

Along with Indonesia's economic growth in 2022, it will become a momentum for the Company to improve performance. Where, the Company has experienced a development which is a marker of the change in the name of the entity, from what was formerly named PT Peteka Karya Jala to PT Pertamina Marine Engineering. This rebranding is expected to be a form of optimism throughout 2022.

In order to improve the company's performance in 2022, the Company has also synergized and worked hard to be able to increase achievement through expanding the non-captive market, efficiency in every line, improving service quality, so that PME's financial performance can improve in the future.

Meanwhile, several factors directly or indirectly impacted the Company's performance, namely the need to prepare working capital to support potential business plans through accelerating the collection of receivables from users and plans to increase the Company's capital. Increasing synergies with the parent company and fellow subsidiaries is often optimized as part of efforts to increase revenue.

TINJAUAN OPERASIONAL

OPERATIONAL OVERVIEW

Pertamina Marine Engineering (PME) memiliki kegiatan yang bergerak di bidang *dredging & reclamation, underwater work services, EPC & port maintenance, waste management, fresh water management, dan general trading*. Adapun kinerja operasional Perusahaan di tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. *Engineering Procurement, Construction & Diversifikasi Usaha*
Per 31 Desember 2022, PME melaksanakan 34 pekerjaan EPC & Diversifikasi Usaha, diantaranya adalah:
 - a. 21 Pekerjaan EPC di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Trans Kontinental dan PT Peteka Karya Tirta.
 - b. 13 Pekerjaan Diversifikasi Usaha di Sub *Holding IML* dan Sub *Holding C&T*.

Adapun dari 34 pekerjaan EPC & Diversifikasi Usaha, telah berjalan sesuai dengan rencana dan waktu yang telah ditetapkan, serta terdapat 3 *project* baru pada lini bisnis *general trading*. Namun terdapat pekerjaan yang mengalami deviasi cukup signifikan terutama pada pekerjaan EPC, diantaranya:

- a. Deviasi progres fisik *real* 52,80% vs target 100% di pekerjaan revitalisasi Pangkalan Bun. Penyebab terjadinya deviasi tersebut dikarenakan sebelumnya masih belum tersedianya Kapal *Crane Barge, stockyard* dan material untuk pekerjaan tersebut.

Tindak Lanjut:

Telah tersedia keperluan atas Kapal *Crane, stockyard* dan material atas pekerjaan tersebut.

- b. Deviasi progres fisik *real* 52% vs target 89% di pekerjaan revitalisasi Dermaga di IT Cilacap. Penyebab terjadinya deviasi tersebut dikarenakan sebelumnya ketersediaan Kapal Tongkang dan *Tug Boat* untuk pekerjaan pancang di lokasi pekerjaan belum dapat dipenuhi.

Tindak Lanjut:

Telah diajukan *addendum* waktu atas pengadaan Kapal Tongkang dan *Tug Boat* sampai Desember 2022.

Pertamina Marine Engineering (PME) has activities engaged in *dredging & reclamation, underwater work services, EPC & port maintenance, waste management, fresh water management, and general trading*. The Company's operational performance in 2022 is as follows:

1. *Engineering Procurement, Construction & Business Diversification*
As of December 31, 2022, PME carried out 34 EPC & Business Diversification works, including:
 - a. 21 EPC works within PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Trans Kontinental and PT Peteka Karya Tirta.
 - b. 13 Business Diversification Work in IML Sub Holding and C&T Sub Holding.

As for the 34 EPC & Business Diversification jobs, they have been running according to the plan and time that has been set, and there are 3 new projects in the general trading business line. However, there are jobs that experience significant deviations, especially in EPC work, including:

- a. Deviation of real physical progress of 52.80% vs target of 100% in Pangkalan Bun revitalization work. The cause of the deviation was because previously there was still no availability of crane barges, stockyards and materials for the work.

Follow-up:

There is a need for cranes, stockyards and materials for the work.

- b. Deviation of real physical progress of 52% vs target of 89% in the Wharf revitalization work at IT Cilacap. The cause of this deviation was because previously the availability of Barges and Tug Boats for piling work at the work site could not be fulfilled.

Follow-up:

A time addendum has been submitted for the procurement of Barges and Tug Boats until December 2022.

- c. Deviasi progres fisik *real* 99% vs target 100% di pekerjaan revitalisasi Dermaga di Makassar. Penyebab terjadinya deviasi tersebut dikarenakan kendala pada metode pemasangan *fender* dan jadwal kosong Dermaga 1 Makassar.

Tindak Lanjut:

Telah dapat dilakukan pemasangan PRF ada BD 1 & BD 4.

- d. Deviasi progres fisik *real* 3,02% vs target 4,81% di pekerjaan revitalisasi Sei Siak. Penyebab terjadinya deviasi tersebut dikarenakan kendala pada dokumen EDL dan HSE *Plan* belum mendapat *approved* serta persiapan dan *survey* pekerjaan tersebut belum dapat dilaksanakan.

Tindak Lanjut:

- i) Perlu diadakan *konsinyering* dengan tujuan percepatan *approved* dokumen.
- ii) Percepatan segera untuk persiapan dilapangan dan izin kerja *survey soil, bathymetry* dan *sarfes*.

- e. Deviasi progres fisik *real* 90,48% vs target 97,05% di pekerjaan pembangunan pagar tembok pengaman & saluran drainase Terminal LPG *Refrigerated* Jawa Timur (Tuban). Penyebab terjadinya deviasi tersebut dikarenakan cukup banyak terjadinya perubahan permintaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Tindak Lanjut:

Diperlukan pengajuan Addendum Waktu dan Addendum Item pada pekerjaan.

2. *Dredging & Reclamation*

Per 31 Desember 2022, PME melaksanakan 4 pekerjaan *dredging*, diantaranya adalah:

- a. 1 Pekerjaan *dredging* di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga;
- b. 1 Pekerjaan di PT Pertamina Hulu Mahakam;
- c. 1 Pekerjaan di luar *captive market* yaitu PT Gandasari Energi; dan
- d. 1 pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan.

Pekerjaan *dredging & reclamation* masih berjalan sesuai dengan perencanaan, 1 pekerjaan yaitu *dredging* Tanjung Batu telah terselesaikan secara fisik 100%, kemudian untuk pekerjaan *dredging* di PHM (Inland CSD), telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, kemudian untuk 1 pekerjaan *dredging* di PT Gandasari Energi juga masih dalam tahap persiapan dokumen perizinan yang dibutuhkan oleh pemilik pekerjaan dan terakhir untuk pekerjaan *dredging* Kolam Dermaga 7 dan 8 Kilang Plaju, PME telah melaksanakan pengurusan Perizinan K3.

- c. Deviation of real physical progress of 99% vs target of 100% in the Jetty revitalization work in Makassar. The cause of the deviation is due to constraints on the *fender* installation method and the empty schedule for Pier 1 Makassar.

Follow-up:

It has been possible to install PRF on BD 1 & BD 4.

- d. Deviation of real physical progress of 3.02% vs target of 4.81% in the Sei Siak revitalization work. The cause of the deviation is due to the constraints on the EDL and HSE *Plan* documents that have not yet been approved and the preparation and survey of the work have not been carried out.

Follow-up:

- i) It is necessary to hold a consignment with the aim of accelerating the approval of documents.
- ii) Immediate acceleration of field preparations and work permits for soil surveys, bathymetry and *sarfes*.

- e. Deviation of real physical progress of 90.48% vs target of 97.05% in construction of guardrails & drainage channels for East Java Refrigerated LPG Terminal (Tuban). The cause of the deviation is due to quite a lot of changes in requests in the implementation of work.

Follow-up:

Time Addendum and Item Addendum submissions are required on the job

2. *Dredging & Reclamation*

As of December 31, 2022, PME carried out 4 dredging works, including:

- a. 1 dredging work within PT Pertamina Patra Niaga;
- b. 1 job at PT Pertamina Hulu Mahakam;
- c. 1 Job outside the captive market, namely PT Gandasari Energi; And
- d. 1 job at PT Pertamina Hulu Rokan.

The dredging & reclamation work is still progressing according to plan, 1 work, namely dredging at Tanjung Batu, has been physically completed 100%, then for the dredging work at PHM (Inland CSD), it has proceeded according to the target set, then for 1 dredging work at PT Gandasari Energi is also still in the stage of preparing the permit documents required by the job owner and finally for the dredging work of the Pier 7 and 8 of the Plaju Refinery, PME has carried out K3 Licensing arrangements.

3. Underwater Work Services

Per 31 Desember 2022, PME melaksanakan 30 pekerjaan *underwater work service*, diantaranya adalah :

- a. 2 Pekerjaan di SH *Upstream* (PT PHE OSES dan PT PHE ONWJ);
- b. 13 Pekerjaan di SH Commercial & Trading (PT Pertamina Patra Niaga);
- c. 3 Pekerjaan di SH Integrated Marine Logistics (PT Pertamina Internasional Shipping & PT Pertamina Trans Kontinental);
- d. 12 Pekerjaan di SH Refinery & Petrochemical (PT Kilang Pertamina Internasional).

Dari 31 pekerjaan *underwater work service* yang berjalan, hanya 1 *project* yang mengalami deviasi yaitu Pekerjaan Jasa Borongan TBA dengan PT Pertamina Trans Kontinental. Hal ini disebabkan dengan adanya kontrak baru, sehingga jumlah total *diver* berkurang dari rencana RKAP 2022. Adapun beberapa pekerjaan dengan sifat *emergency declare* dan PPHK berpotensi untuk belum dapat di bukukan di tahun 2022, karena administrasi dokumen closing pekerjaan dari user masih dalam proses pengajuan izin prinsip ke pejabat terkait.

3. Underwater Work Services

As of December 31, 2022, PME carried out 30 underwater work service jobs, including:

- a. 2 Jobs at SH *Upstream* (PT PHE OSES and PT PHE ONWJ);
- b. 13 Jobs at SH Commercial & Trading (PT Pertamina Patra Niaga);
- c. 3 Jobs at SH Integrated Marine Logistics (PT Pertamina Internasional Shipping & PT Pertamina Trans Kontinental);
- d. 12 Jobs at SH Refinery & Petrochemical (PT Kilang Pertamina Internasional).

Only 1 of 31 ongoing underwater work service projects that experienced deviation, namely the TBA Wholesale Service Work with PT Pertamina Trans Kontinental. This is due to the existence of new contracts, so the total number of divers has decreased from the planned 2022 RKAP. As for some jobs with an emergency declare and PPHK nature, they have the potential to not be able to be booked in 2022, because the administration of job closing documents from users is still in the process of submitting principle permits to related officials.



TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Analisis dan Pembahasan Manajemen mengenai kinerja keuangan pada laporan tahunan ini, mengacu pada Laporan Keuangan Pertamina Marine Engineering untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*). Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan disusun berdasarkan data-data keuangan yang disajikan sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK”).

Management Discussion and Analysis regarding financial performance in this annual report, referring to Pertamina Marine Engineering’s Financial Statements for the years ended December 31, 2022 and 2021, which were audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*). The presentation and disclosure of the Company’s financial statements is prepared based on financial data presented in accordance with the principles contained in Indonesian Financial Accounting Standards (“SAK”), which include Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Association of Accountants (“DSAK”).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION STATEMENT

Tabel Posisi Keuangan 2021 - 2022
Table of Financial Position 2021 - 2022

Uraian Description	2022 (Rp-ribu) (IDR-thousand)	2021 (Rp-ribu) (IDR-thousand)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-ribu) (IDR-thousand)	Persentase Percentage (%)
Aset Asset				
Aset Lancar Current Assets	288.717.533	184.239.211	104.478.322	56,71%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	9.364.797	29.554.863	(20.190.066)	-68,31%
Jumlah Aset Total Assets	298.082.330	213.794.074	84.288.256	39,42%
Liabilitas dan Ekuitas Liability and Equity				
Liabilitas Liability	154.814.094	93.913.694	60.900.400	64,85%
Ekuitas Equity	143.268.236	119.880.380	23.387.856	19,51%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	298.082.330	213.794.074	84.288.256	39,42%

Berdasarkan tabel di atas, posisi keuangan Perusahaan di tahun 2022 jika dibandingkan tahun sebelumnya, dari sisi jumlah aset tercatat meningkat 39,42%, sementara jumlah liabilitas mengalami peningkatan 64,85%, dan jumlah ekuitas tercatat meningkat 19,51%.

Berikut uraian terkait laporan posisi keuangan Perusahaan di tahun 2022 dibanding tahun 2021, beserta penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut.

Based on the table above, the Company’s financial position in 2022 when compared to the previous year, in terms of total recorded assets increased 39.42%, while total liabilities increased 64.85%, and total recorded equity increased 19.51%.

The following is a description regarding the Company’s financial position report in 2022 compared to 2021, along with an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes.

Aset

Asset

Tabel Aset Perusahaan 2021 - 2022
Company Assets Table 2021 - 2022

Uraian Description	2022 (Rp-ribu) (IDR-thousand)	2021 (Rp-ribu) (IDR-thousand)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-ribu) (IDR-thousand)	Persentase Percentage (%)
Aset Lancar Current Assets				
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	17.910.530	22.280.235	(4.369.705)	-19,61%
Piutang Usaha - Pihak Berelasi Trade Receivables - Related Parties	94.216.541	63.755.750	30.460.791	47,78%
Aset Kontrak Contract Assets				
Pihak Berelasi Related Parties	145.165.948	75.267.179	69.898.769	92,87%
Pihak Ketiga Third party	1.279.423	2.030.000	(750.577)	-36,97%
Uang Muka dan Biaya Dibayar Dimuka Advances and Prepaid Fees	9.676.794	3.154.100	6.522.694	206,80%
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid taxes				
Pajak Lain-Lain Other Taxes	20.465.933	17.751.947	2.713.986	15,29%
Piutang Dividen Dividends Receivable	2.364	-	2.364	-
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	288.717.533	184.239.211	104.478.322	56,71%
Aset tidak Lancar Non Current Assets				
Aset Tetap Fixed Assets	9.131.554	5.446.071	3.685.483	67,67%
Penyertaan Saham Share Investment	40.505	33.486	7.019	20,96%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	66.554	30.968	35.586	114,91%
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes				
Pajak Lain-Lain Other Taxes	-	15.809.734	15.809.734	-
Uang Muka untuk Pembelian Aset Tetap Advances for Purchase of Fixed Assets	-	3.605.000	3.605.000	-
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	126.184	4.629.604	(4.503.420)	-97,27%
Jumlah Aset tidak Lancar Total Non-Current Assets	9.364.797	29.554.863	(20.190.066)	-68,31%
Jumlah Aset Total Asset	298.082.330	213.794.074	84.288.256	39,42%

Per 31 Desember 2022, jumlah aset Perusahaan tercatat sebesar Rp298,08 miliar, mengalami peningkatan Rp84,29 miliar atau sebesar 39,42% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp213,79 miliar. Di mana aset lancar Perusahaan mengalami kenaikan Rp104,48 miliar atau sebesar 56,71% dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp184,24 miliar. Kenaikan tersebut terutama disebabkan

As of December 31, 2022, the Company's total assets were recorded at IDR298.08 billion, an increase of IDR84.29 billion or 39.42% compared to the previous year which was recorded at IDR213.79 billion. Where the Company's current assets experienced an increase of IDR104.48 billion or 56.71% compared to 2021 which was recorded at IDR184.24 billion. The increase was mainly due to an increase in receivables

oleh kenaikan piutang dan penambahan *asset diving equipment*. Adapun aset tidak lancar Perusahaan tercatat sebesar Rp9,36 miliar di tahun 2022, mengalami penurunan Rp20,19 miliar atau sebesar 68,31% dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp29,55 miliar. Penurunan ini lebih disebabkan oleh restitusi pajak yang telah di setujui.

and additional diving equipment assets. The Company's non-current assets were recorded at IDR9.36 billion in 2022, a decrease of IDR20.19 billion or 68.31% compared to 2021 which was recorded at IDR29.55 billion. This decrease was more due to the approved tax refunds.

Liabilitas

Liabilities

Tabel Liabilitas Perusahaan 2021 - 2022
Table of Company Liabilities 2021-2022

Uraian Description	2022 (Rp-ribu) (IDR-thousand)	2021 (Rp-ribu) (IDR-thousand)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-ribu) (IDR-thousand)	Persentase Percentage (%)
Liabilitas Jangka Pendek Short-term liabilities				
Utang Usaha Accounts Payable				
Pihak Berelasi Related Parties	32.549.732	15.193.980	17.355.752	114,23%
Pihak Ketiga Third party	1.014.728	30.845	983.883	3189,76%
Utang Lain-lain Other Payables	1.784.548	640.815	1.143.733	178,48%
Biaya yang Masih Harus Dibayar Accrued Cost	114.225.341	77.044.301	37.181.040	48,26%
Utang Dividen Dividend Payable	64.993	-	64.993	-
Utang Pajak Tax Debt				
Pajak Penghasilan Income tax	4.070.907	457.975	3.612.932	788,89%
Pajak Lain-lain Other Taxes	765.563	545.778	219.785	40,27%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Short Term Liabilities	154.475.812	93.913.694	60.562.118	64,49%
Liabilitas Jangka Panjang Long Term Liabilities				
Liabilitas Imbalan Pascakerja Post-Employment Benefits Obligation	338.282	-	338.282	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Long-Term Liabilities	338.282	-	338.282	-
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	154.814.094	93.913.694	60.900.400	64,85%

Di tahun 2022, jumlah liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp154,81 miliar, mengalami peningkatan Rp60,90 miliar atau sebesar 64,85% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp93,91 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai utang.

In 2022, the Company's total liabilities were recorded at IDR154.81 billion, an increase of IDR60.90 billion or 64.85% compared to the previous year which was recorded at IDR93.91 billion. This increase was mainly due to an increase in the value of debt.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas Perusahaan 2021 - 2022
Company Equity Table 2021 - 2022

Uraian Description	2022 (Rp-ribu) (IDR-thousand)	2021 (Rp-ribu) (IDR-thousand)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-ribu) (IDR-thousand)	Persentase Percentage (%)
Modal Saham Share Capital	12.000.000	12.000.000	0	0,00%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	30.313	24.838	5.475	22,04%
Saldo Laba Retain Earning	131.237.923	107.855.542	23.382.381	21,68%
Jumlah Ekuitas Total Equity	143.268.236	119.880.380	23.387.856	19,51%

Di tahun 2022, jumlah ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp143,27 miliar, mengalami peningkatan Rp23,39 miliar atau sebesar 19,51% dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp119,88 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh laba berjalan.

In 2022, the Company's total equity was recorded at IDR143.27 billion, an increase of IDR23.39 billion or 19.51% compared to 2021 which was recorded at IDR119.88 billion. This increase was due to current profit.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2021 - 2022
Table of Profit and Loss and Other Comprehensive Income 2021 - 2022

Uraian Description	2022 (Rp-ribu) (IDR-thousand)	2021 (Rp-ribu) (IDR-thousand)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-ribu) (IDR-thousand)	Persentase Percentage (%)
Pendapatan Income				
Perdagangan Umum General trading	201.308.622	148.206.291	53.102.331	35,83%
Layanan Bawah Air Underwater Service	146.615.246	63.019.210	83.596.036	132,65%
Pengerukan Dredging	32.505.598	69.873.691	(37.368.093)	-53,48%
Jumlah Total	380.429.466	281.099.192	99.330.274	35,34%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(322.380.298)	(225.396.488)	(96.983.810)	43,03%
Laba (Rugi) Bruto Gross Profit (Loss)	58.049.168	55.702.704	2.346.464	4,21%
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(15.022.125)	(11.907.320)	(3.114.805)	26,16%
Beban Pajak Final Final Tax Expense	(4.491.377)	(3.096.859)	(1.394.518)	45,03%
Pendapatan Keuangan Financial Income	388.915	527.207	(138.292)	-26,23%
Pendapatan Lain-lain, Neto Other Income, Net	410.967	486.665	(75.698)	-15,55%

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2021 - 2022
Table of Profit and Loss and Other Comprehensive Income 2021 - 2022

Uraian Description	2022 (Rp-ribu) (IDR-thousand)	2021 (Rp-ribu) (IDR-thousand)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-ribu) (IDR-thousand)	Persentase Percentage (%)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	39.335.548	41.712.397	(2.376.849)	-5,70%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(8.122.716)	(4.928.660)	(3.194.056)	64,81%
Laba Tahun Berjalan Profit for the year	31.212.832	36.783.737	(5.570.905)	-15,15%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income				
Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasikan Ke Laba Rugi: Items Not Be Reclassified to Profit and Loss				
Perubahan Nilai Wajar Instrumen Ekuitas Melalui Penghasilan Changes in Fair Value of Equity Instruments Through Income	7.019	9.430	(2.411)	-25,57%
Komprehensif Lain Pajak Penghasilan Terkait Other Comprehensive Income Tax Related	(1.544)	(2.075)	531	-25,59%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	31.218.307	36.791.092	(5.572.785)	-15,15%

Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pengerukan (*dredging*), *port EPC & maintenance*, *waste management*, *underwater work services*, Pertamina Marine Engineering mengklasifikasikan sumber pendapatan Perusahaan yang terdiri dari perdagangan umum, layanan bawah air dan pengerukan.

Di tahun 2022, pendapatan dari perdagangan umum tercatat sebesar Rp201,31 miliar, mengalami peningkatan Rp53,10 miliar atau sebesar 35,83% dibanding dengan tahun 2021 yang sebesar Rp148,21 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pekerjaan EPC & Port Maintenance yang sebelumnya 5 lokasi menjadi 16 lokasi pada tahun 2022. Adapun pendapatan dari layanan bawah air tercatat sebesar Rp146,62 miliar di tahun 2022, mengalami peningkatan Rp83,60 miliar atau sebesar 132,65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp63,02 miliar. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh meningkatnya pekerjaan *underwater work service* yang sebelumnya 6 lokasi menjadi 10 lokasi pada tahun 2022. Sementara di tahun 2022, pendapatan yang diperoleh dari pengerukan tercatat sebesar Rp32,51 miliar, mengalami penurunan Rp37,37 miliar atau sebesar 53,48% dibanding tahun 2021 yang sebesar Rp69,87 miliar. Penurunan ini lebih disebabkan oleh pekerjaan yang progresnya belum berjalan dari target 7 lokasi menjadi 1 lokasi pada tahun 2022.

As a company engaged in dredging, port EPC & maintenance, waste management, underwater work services, Pertamina Marine Engineering classifies the Company's sources of income as consisting of general trading, underwater services and dredging.

In 2022, revenue from general trading was recorded at IDR201.31 billion, an increase of IDR53.10 billion or 35.83% compared to 2021 which amounted to IDR148.21 billion. This increase was due to the increase in EPC & Port Maintenance work from previously 5 locations to 16 locations in 2022. Revenue from underwater services was recorded at IDR146.62 billion in 2022, an increase of IDR83.60 billion or 132.65% compared to compared to the previous year which amounted to IDR63.02 billion. This increase was more due to the increase in underwater work service work from 6 locations to 10 locations in 2022. Meanwhile in 2022, revenue derived from dredging was recorded at IDR32.51 billion, decreased by IDR37.37 billion or 53.48% compared to 2021 which amounted to IDR69.87 billion. This decline was more due to work progress not progressing from the target of 7 locations to 1 location in 2022.

Adapun beban pokok pendapatan di tahun 2022, tercatat sebesar Rp322,38 miliar, mengalami peningkatan Rp96,98 miliar atau sebesar 43,03% dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp225,40 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh selaras meningkatnya pendapatan.

Sementara itu, penurunan pendapatan Perusahaan berdampak kepada laba tahun berjalan Perusahaan, yang di tahun 2022 tercatat sebesar Rp31,21 miliar, mengalami penurunan Rp5,57 miliar atau sebesar 15,15% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp36,78 miliar.

As for the cost of revenue in 2022, it was recorded at IDR322.38 billion, an increase of IDR96.98 billion or 43.03% compared to 2021 which was recorded at IDR225.40 billion. This increase was primarily due to a corresponding increase in revenue.

Meanwhile, the decrease in the Company's revenue had an impact on the Company's profit for the year, which in 2022 was recorded at IDR31.21 billion, decreased by IDR5.57 billion or 15.15% compared to the previous year which was recorded at IDR36.78 billion.

LAPORAN ARUS KAS

CASH FLOW STATEMENT

Tabel Arus Kas 2021 - 2022
Table of Cash Flow 2021 - 2022

Uraian Description	2022 (Rp-ribu) (IDR-thousand)	2021 (Rp-ribu) (IDR-thousand)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-ribu) (IDR-thousand)	Persentase Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	7.549.603	5.458.119	2.091.484	38,32%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	(4.153.850)	(3.809.959)	(343.891)	9,03%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Funding Activities	(7.765.458)	-	-	-
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase in Cash and Cash Equivalents	(4.369.705)	1.648.160	(6.017.865)	-365,13%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	22.280.235	20.632.075	1.648.160	7,99%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	17.910.530	22.280.235	(4.369.705)	-19,61%

Perusahaan berhasil mencatatkan kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar Rp4,37 miliar di tahun 2022, mengalami kenaikan Rp6,02 miliar atau sebesar 365,13% dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp1,65 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerimaan piutang. Sementara itu, berdasarkan kenaikan bersih kas dan setara kas yang berhasil dibukukan Perusahaan, tercatat kas dan setara kas akhir tahun 2022 adalah sebesar Rp17,91 miliar, mengalami penurunan Rp4,37 miliar atau sebesar 19,61% dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp22,28 miliar.

The company managed to record a net increase in cash and cash equivalents of IDR4.37 billion in 2022, an increase of IDR6.02 billion or 365.13% compared to 2021 which was recorded at IDR1.65 billion. This increase was mainly due to the receipt of receivables. Meanwhile, based on the net increase in cash and cash equivalents that the Company managed to record, recorded cash and cash equivalents at the end of 2022 amounted to IDR17.91 billion, a decrease of IDR4.37 billion or 19.61% compared to the previous year which was recorded at IDR22.28 billion.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN

COMPARISON BETWEEN TARGETS WITH REALIZATION AND PROJECTIONS FOR THE FINDING YEAR

Uraian Description	Realisasi 2022 (Rp-ribu) Realization 2022 (IDR-thousand)	Target 2022 (Rp-ribu) 2022 targets (IDR-thousand)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2021 Achievement of Realization of the 2021 Target (%)	Proyeksi 2023 (Rp-ribu) 2023 projections (IDR-thousand)	Proyeksi 2023 terhadap Realisasi 2022 2023 Projection of 2022 Realization (%)
	1	2	(1:2)	3	(3:1)
Pendapatan Revenue	380.429.466	460.078.462	82,69%	443.082.336	116,47%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Income for the year	31.212.832	42.931.700	72,70%	32.073.482	102,76%
Aset Asset	298.082.330	216.594.408	137,62%	225.487.425	75,65%
Liabilitas Liability	154.814.094	57.592.369	268,81%	50.220.707	32,44%
Ekuitas Equity	143.268.236	159.002.039	90,10%	175.266.718	122,33%

Pendapatan

Pendapatan yang berhasil di membukukan Perusahaan di tahun 2022, adalah sebesar Rp380,43 miliar atau mencapai 82,69% terhadap target 2022 sebesar Rp460,08 miliar. Pencapaian yang lebih rendah terhadap target tersebut disebabkan oleh tidak tercapai pendapatan dari segmen:

1. *Dredging* (21 % dari RKAP 2022) disebabkan belum terlaksananya *project PHM Project*, PHM Inland, Area 60 RU Cilacap, Jetty 7-8 RU III Plaju
2. *Underwater Work Service* (98% dari RKAP 2022) disebabkan belum tercapainya pekerjaan jasa borongan diver (56% dari RKAP 2022).

Pada tahun 2023, Perusahaan memproyeksikan dapat membukukan pendapatan sebesar Rp443,08 miliar atau mencapai 116,47% terhadap realisasi tahun 2022. Hal ini lebih disebabkan oleh meningkatnya *Dredging*, *EPC & Port Maintenance*, *Underwater Work Service*, dan Diversifikasi Usaha.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

Di tahun 2022, laba tahun berjalan yang berhasil di bukukan Perusahaan adalah sebesar Rp31,21 miliar atau mencapai 72,70% terhadap target 2022 sebesar Rp42,93 miliar. Pencapaian yang lebih rendah terhadap target tersebut disebabkan oleh tidak tercapainya pendapatan usaha. Pada tahun 2023, Perusahaan memproyeksikan dapat membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp32,07 miliar atau mencapai 102,76% terhadap realisasi tahun 2022. Hal ini lebih disebabkan oleh kenaikan pendapatan di segmen *Dredging*, *EPC & Port Maintenance*, dan Diversifikasi Usaha.

Revenue

The revenue that was successfully recorded by the Company in 2022 amounted to IDR380.43 billion or reached 82.69% of the 2022 target of IDR460.08 billion. The lower achievement of this target was due to the non-achievement of revenue from the following segments:

1. *Dredging* (21% of the 2022 RKAP) was due to the non-implementation of the PHM Project, PHM Inland, Area 60 RU Cilacap, Jetty 7-8 RU III Plaju
2. *Underwater Work Service* (98% of the 2022 RKAP) due to the unachieved work of diver wholesale services (56% of the 2022 RKAP).

In 2023, the Company projects to record revenue of IDR443.08 billion or 116.47% of the 2022 realization. This is due to increased *Dredging*, *EPC & Port Maintenance*, *Underwater Work Service*, and Business Diversification.

Profit (Loss) for the year

In 2022, the profit for the year that was successfully recorded by the Company was IDR31.21 billion or reached 72.70% of the 2022 target of IDR42.93 billion. The lower achievement of this target was due to the non-achievement of operating revenues. In 2023, the Company projects to be able to record a profit for the year of IDR32.07 billion or reach 102.76% of the 2022 realization. This is due to increased revenue in the *Dredging*, *EPC & Port Maintenance* segments, and Business Diversification.

Aset

Total aset Perusahaan di tahun 2022, terealisasi sebesar Rp298,08 miliar atau mencapai 137,62% terhadap target 2022 sebesar Rp216,59 miliar. Pencapaian yang melebihi dari target ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha. Sementara itu, Perusahaan memproyeksikan dapat membukukan total aset sebesar Rp225,49 miliar di tahun 2023, atau mencapai 75,65% terhadap realisasi tahun 2022. Hal ini lebih dikarenakan oleh nilai piutang usaha tidak melebihi dari realisasi tahun 2022.

Liabilitas

Per 31 Desember 2022, total liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp154,81 miliar atau mencapai 268,81% terhadap target 2022 sebesar Rp57,59 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha. Sementara total liabilitas Perusahaan tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp50,22 miliar atau mencapai 32,44% terhadap realisasi tahun 2022. Hal ini seiring dengan dengan pekerjaan yang sedang berjalan.

Ekuitas

Di tahun 2022, Perusahaan berhasil membukukan ekuitas sebesar Rp143,27 miliar atau mencapai 90,10% terhadap target 2022 sebesar Rp159,00 miliar. Sementara, Perusahaan memproyeksikan dapat membukukan ekuitas sebesar Rp175,27 miliar di tahun 2023, atau mencapai 122,33% terhadap realisasi tahun 2022. Hal ini lebih dikarenakan penambahan laba tahun berjalan.

Asset

The Company's total assets in 2022 amounted to IDR298.08 billion or reached 137.62% of the 2022 target of IDR216.59 billion. The achievement that exceeded this target was mainly due to an increase in trade receivables. Meanwhile, the Company projects that it will be able to record total assets of IDR225.49 billion in 2023, or 75.65% of the 2022 realization. This is due to the trade receivables value not exceeding the 2022 realization.

Liabilities

As of December 31, 2022, the Company's total liabilities were recorded at IDR154.81 billion, or 268.81% of the 2022 target of IDR57.59 billion. This was mainly due to an increase in trade payables. Meanwhile, the Company's total liabilities in 2023 are projected at IDR50.22 billion or reaching 32.44% of the realization in 2022. This is in line with ongoing work.

Equity

In 2022, the Company managed to record equity of IDR143.27 billion or 90.10% of the 2022 target of IDR159.00 billion. Meanwhile, the Company projects that it will be able to record equity of IDR175.27 billion in 2023, or reach 122.33% of the realization in 2022. This is more due to the additional profit for the year

PROSPEK USAHA TAHUN 2023

BUSINESS PROSPECTS IN 2023

Kondisi perekonomian global di tahun 2022 masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, salah satunya akibat konflik antara Rusia - Ukraina. Kondisi tersebut berdampak pada pelemahan transaksi perdagangan, kenaikan harga komoditas, dan ketidakpastian pasar keuangan global, yang menyebabkan koreksi prakiraan pertumbuhan ekonomi secara global.

Meski demikian, PME menyadari bahwa di tahun 2023, Perusahaan masih akan menghadapi segala tantangan pada kegiatan bisnis Perusahaan, yaitu dengan adanya penambahan bisnis baru yaitu *Fresh Water Supply* dan *Waste Management* sebagai bentuk diversifikasi usaha PME. Selain itu, Perusahaan juga telah menyusun kebijakan dan inisiatif strategis dan meyakini dapat menerapkannya di tahun 2023.

Untuk itu, Perusahaan terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi bisnis ke depan. Hal tersebut tercermin dari kebijakan strategis yang telah disusun sebagai acuan dalam menjalankan kinerja operasional di tahun 2023. Selain itu, Perusahaan juga telah menyusun target dalam RKAP tahun 2023, di mana Perusahaan memproyeksikan dapat membukukan total pendapatan sebesar Rp1.152,25 miliar atau mencapai 150,43% terhadap realisasi tahun 2022.

Global economic conditions in 2022 was still faced with various challenges, one of which is the result of the conflict between Russia and Ukraine. These conditions had an impact on weakening trade transactions, rising commodity prices, and uncertainty on global financial markets, which resulted in corrections to forecasts for global economic growth.

However, PME realizes that in 2023, the Company still faced all challenges in the Company's business activities, namely by adding new businesses namely *Fresh Water Supply* and *Waste Management* as a form of business diversification of PME. In addition, the Company has also developed strategic policies and initiatives and believes it can implement them in 2023.

For this reason, the Company continues to strive to optimize future business potential. This is reflected in the strategic policies that have been prepared as a reference in carrying out operational performance in 2023. In addition, the Company has also set targets in the 2023 RKAP, in which the Company projects to record a total revenue of IDR 1,152.25 billion or reach 150.43% of the realization in 2022.





5

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

PME senantiasa berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, YANG salah satu tujuannya adalah untuk mendorong perkembangan bisnis Perusahaan yang berkelanjutan.

PME always strives to implement GCG principles, WHICH one of the objectives is to encourage the Company's sustainable business development.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan rangkaian sistem yang bertujuan memberikan gambaran kepada entitas usaha tentang pengelolaan organisasi dengan tujuan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG bukan hanya kewajiban melainkan kebutuhan dalam mendorong pertumbuhan Perusahaan masa depan. Untuk itu, Perusahaan menempatkan penerapan GCG sebagai fondasi dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan sehingga Perusahaan mampu berkembang dan memiliki daya saing tinggi untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders*.

Untuk mencapai tujuan di atas, Perusahaan memiliki komitmen tinggi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada semua organ dan jenjang organisasi secara terencana, terarah, dan terukur sehingga penerapan GCG dapat berlangsung secara konsisten dan sesuai dengan praktik-praktik terbaik penerapan GCG.

Prinsip Dasar Penerapan GCG di Lingkup Perusahaan

PME berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek bisnis dan operasional dengan mengacu pada pemenuhan lima prinsip dasar GCG yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Hal ini dapat mendorong perkembangan bisnis Perusahaan yang berkelanjutan bagi kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip GCG Perusahaan yang menjadi prinsip Insan PME adalah sebagai berikut:

1. **Transparansi**
Menjamin pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara terbuka jelas, memadai, akurat, dapat dibandingkan dan tepat waktu serta mudah diakses oleh *stakeholders*/ pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. **Akuntabilitas**
Menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban seluruh Insan PME Yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan Terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban insan PME atau fungsi kerja Perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimiliki dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dipercayakan oleh PME kepadanya.
3. **Kemandirian**
Dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.

Good Corporate Governance (GCG) is a series of systems that aim to provide business entities with an overview of organizational management with the aim of providing added value to all stakeholders. The company realizes that the implementation of GCG is not only an obligation but a necessity in driving the future growth of the company. For this reason, the Company places the implementation of GCG as the foundation in creating a healthy and sustainable business climate so that the Company is able to develop and have high competitiveness to create added value for stakeholders.

To achieve the above objectives, the Company is highly committed to implementing GCG principles in all organs and levels of the organization in a planned, directed and measurable manner so that GCG implementation can take place consistently and in accordance with the best practices of GCG implementation.

Basic Principles of GCG Implementation within the Company

PME is committed to implementing GCG principles in every aspect of business and operations with reference to the fulfillment of the five basic GCG principles which are carried out systematically and consistently. This can encourage the Company's sustainable business development for the long term benefit of shareholders without ignoring the interests of other stakeholders. The Company's GCG principles that become the principles of PME personnel are as follows:

1. **Transparency**
Ensure the disclosure of material and relevant information regarding performance, financial condition and other information in a clear, adequate, accurate, comparable and timely manner and is easily accessible to stakeholders according to their rights.
2. **Accountability**
Guarantee the clarity of functions, implementation and accountability of all PME personnel which enables the management of the company to be carried out effectively. Accountability refers to the obligations of PME personnel or the Company's work functions related to the implementation of the authority possessed and/ or the implementation of the responsibilities entrusted by PME to him.
3. **Independence**
Managed professionally without conflict of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with the applicable laws and regulations and GCG principles.

4. Bertanggung Jawab
Menjamin aktivitas bisnisnya dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.
5. Kewajaran
Menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*/pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan ketentuan perjanjian dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUJUAN PENERAPAN GCG

PME berkomitmen untuk menerapkan GCG yang mampu memberikan dampak positif dalam pencapaian kinerja dan keberlanjutan Perusahaan. Tujuan penerapan *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 terutama adalah:

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat dan handal, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efektif dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.
3. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

KOMITMEN PENINGKATAN PENERAPAN GCG

Perusahaan telah memiliki kelengkapan kebijakan-kebijakan yang mengatur berbagai aspek pelaksanaan GCG yang disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan dan telah mengacu pada berbagai ketentuan yang berlaku di Indonesia, di antaranya:

1. Pedoman *Code of Conduct* yang telah disahkan pada Desember 2022; dan
2. Pelaksanaan *assessment* atas implementasi GCG Perusahaan untuk tahun buku 2022 yang mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

4. Be Responsible
Ensure that business activities are carried out according to sound corporate principles, fulfill obligations to the Government in accordance with applicable laws and regulations, cooperate actively for mutual benefits and strive to be able to make a real contribution to society.
5. Fairness
Ensure fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders/stakeholders that arise based on the provisions of the agreement and the applicable laws and regulations.

PURPOSE OF GCG IMPLEMENTATION

PME is committed to implementing GCG that is capable of having a positive impact on achieving the Company's performance and sustainability. The purpose of implementing Good Corporate Governance according to the Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated August 01, 2011 mainly are:

1. Optimizing the value of the company so that the company has strong and reliable competitiveness, both nationally and internationally, so that it is able to maintain its existence and live sustainably to achieve the company's goals and objectives.
2. Encouraging professional, effective and efficient company management, as well as empowering functions and increasing the independence of company organs.
3. Encouraging company organs to make decisions and carry out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of corporate social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around the company.
4. Increasing the company's contribution to the national economy.
5. Improving a conducive climate for the development of national investment.

COMMITMENT TO IMPROVE GCG IMPLEMENTATION

The company has a complete set of policies that regulate various aspects of GCG implementation which are arranged in such a way as needed and have referred to various regulations that apply in Indonesia, including:

1. Guidelines for the Code of Conduct which was ratified in December 2022; And
2. Implementation of an assessment of the implementation of the Company's GCG for the 2022 fiscal year which refers to the copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

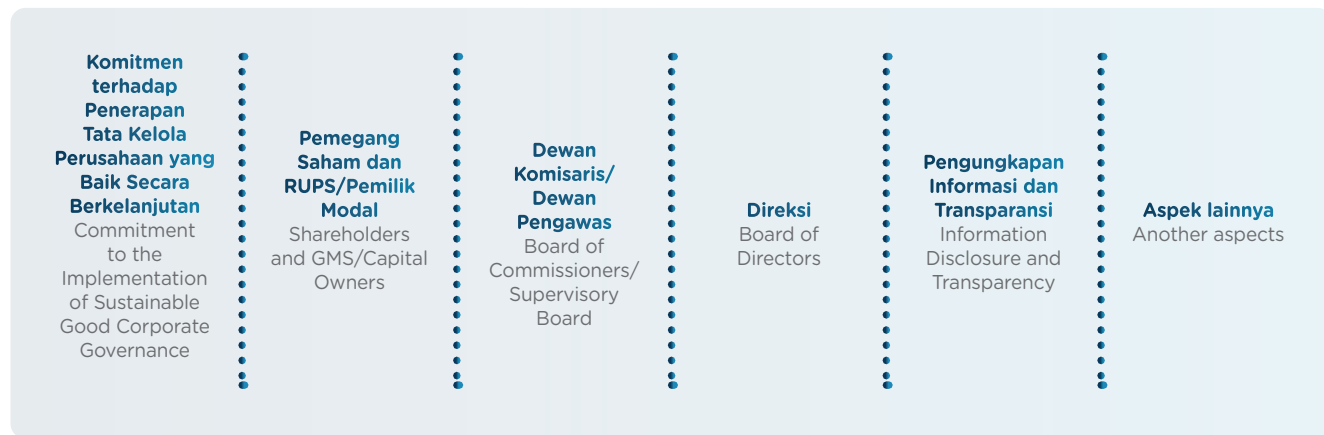
DASAR DAN METODE PENGUKURAN

Dalam memperoleh gambaran kualitas penerapan GCG, Perusahaan menerapkan mekanisme penilaian atau *assessment* sebagai upaya dalam memelihara akuntabilitas Perusahaan di mata Pemegang Saham dan pemangku kepentingan. Mekanisme penilaian penerapan GCG di lingkungan PME mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Metode penilaian dan evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang terdiri dari 6 (enam) aspek dengan bobot yang telah ditentukan.

BASIS AND METHOD OF MEASUREMENT

In obtaining an overview of the quality of GCG implementation, the Company applies an assessment mechanism as an effort to maintain corporate accountability in the eyes of shareholders and stakeholders. The mechanism for assessing the implementation of GCG in the PME environment refers to the Decree of the Secretary of the Ministry of BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. This assessment and evaluation method is carried out using a measuring instrument consisting of 6 (six) aspects with predetermined weights

6 Aspek Assessment GCG
(Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012)
6 Aspects of GCG Assessment
(Decree of the Secretary of the SOE Ministry No. SK-16/S.MBU/2012)



PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN BUKU 2022

Untuk pertama kalinya, Perusahaan telah melaksanakan *assessment* penerapan GCG tahun buku 2022 dengan dibantu oleh DPS Consulting pada bulan Mei-Juni 2023. Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan *assessment* penerapan GCG tahun buku 2022, Perusahaan memperoleh skor 46,18.

GCG IMPLEMENTATION ASSESSMENT FOR THE 2022 FISCAL YEAR

For the first time, the Company has carried out an assessment of GCG implementation for the 2022 fiscal year with the assistance of DPS Consulting in May-June 2023. Based on the report on the results of the GCG implementation assessment for the 2022 fiscal year, the Company obtained a score of 46.18.

Rincian hasil *Assessment* penerapan GCG Perusahaan untuk tahun buku 2022 sebagai berikut:

Details of the results of the Company's GCG implementation assessment for the 2022 fiscal year are as follows:

Aspek Pengujian Examination Aspects	Bobot Weight	Pencapaian Tahun Buku 2022 Achievements for the 2022 Fiscal Year		
		Skor Score	Capaian (%) Achievements	Kualitas Penerapan GCG Quality of GCG Implementation
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance	7,00	3,48	49,79%	"Tidak Baik" "Not Good"
Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	9,00	5,26	58,46%	"Kurang Baik" "Poor"
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,00	16,18	46,22%	"Tidak Baik" "Not Good"
Direksi Board of Directors	35,00	19,37	55,35%	"Kurang Baik" "Poor"
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	1,76	19,58%	"Tidak Baik" "Not Good"
Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	0,00	0,00%	-
Skor Keseluruhan Overall Score	100,00			46,18
Kualifikasi Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Qualification				"Tidak Baik" "Not Good"

Keterangan:

0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-85 : Baik | 85-100 : Sangat Baik
Note: 0-50: Very Poor | 50-60: Poor | 60-75: Satisfactory | 75-85: Good | 85-100: Very Good

Berdasarkan hasil *assessment* penerapan GCG untuk tahun buku 2022, terdapat 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) rekomendasi terhadap *Area of Improvement* (Aoi) dalam penerapan prinsip GCG, yakni sebagai berikut:

Based on the results of the GCG implementation assessment for the 2022 financial year, there are 399 (three hundred and ninety nine) recommendations for Areas of Improvement (Aoi) in the application of GCG principles, which are as follows:

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
1	Belum terdapat bukti adanya pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Muatan Pedoman Perilaku There is no evidence yet of a statement of commitment by the Board of Directors and the Board of Commissioners/Supervisory Board on the Content of the Code of Conduct
2	Belum terdapat bukti adanya Perlindungan harta perusahaan pada Muatan Pedoman Perilaku There is no evidence of protection for company assets in the Content of the Code of Conduct
3	Belum terdapat bukti adanya kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik yang terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code). There is no evidence that there are additional policies and guidelines that can provide further guidance on the various practices contained in the Guidelines for Good Corporate Governance (GCG Code).
4	Belum terdapat bukti karyawan menandatangani secara berkala pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku. There is no evidence that employees regularly sign statements of compliance with the Code of Conduct.
5	Telah terdapat bukti terkait tingkat pemahaman yang baik terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan organ pendukungnya, Direksi dan karyawan perusahaan, namun capaian Hasil Kuesioner hanya 75,39% There has been evidence regarding the level of good understanding of the Guidelines for Good Corporate Governance and the Code of Conduct by the Board of Commissioners/Supervisory Board and their supporting organs, Directors and company employees, but the achievement of the Questionnaire Results was only 75.39%
6	Belum terdapat bukti adanya Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya yang termasuk menjadi materi dalam proses <i>induction</i> (pengenalan) bagi karyawan baru. There is no evidence yet of the existence of a Code of Conduct and technical regulations/guidelines for its implementation which are included as material in the induction process for new employees.

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
7	Belum terdapat bukti adanya Penilaian (<i>assessment</i>), yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan There is no evidence yet of the existence of an assessment, namely a program to identify the implementation of Good Corporate Governance in the company through measuring the implementation and application of Good Corporate Governance in the company
8	Belum terdapat bukti adanya Evaluasi (<i>review</i>), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di perusahaan yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian. There is no evidence of an evaluation (review), namely a program to describe the follow-up to the implementation and application of Good Corporate Governance in the company which is carried out in the following year after the assessment.
9	Belum terdapat bukti adanya hasil <i>assessment</i> /penilaian dan evaluasi dilaporkan dalam Laporan Tahunan. There is no evidence that the results of the assessment/assessment and evaluation have been reported in the Annual Report.
10	Belum terdapat bukti adanya KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen There is no evidence of any KPI regarding the implementation of Good Corporate Governance as outlined in the Management Contract
11	Belum terdapat bukti adanya tingkat pencapaian yang memadai atas KPI mengenai pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut. There is no evidence of an adequate level of achievement of the KPI regarding the implementation of Good Corporate Governance.
12	Telah terdapat bukti terkait Penyelenggara Negara mampu menyusun LHKPN secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun belum ditemukan bukti laporan dari komisaris There is evidence that state administrators are able to prepare LHKPN in a timely manner according to the applicable laws and regulations. However, there has been no evidence of reports from commissioners
13	Telah terdapat bukti terkait tingkat kepatuhan Penyelenggara Negara di perusahaan dalam menyampaikan LHKPN. Namun belum ditemukan bukti laporan dari komisaris There is already evidence regarding the level of compliance of state administrators in companies in submitting LHKPN. However, there has been no evidence of reports from commissioners
14	Telah terdapat bukti terkait pelaporan berkala tentang perkembangan pemenuhan kewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK. Namun belum ditemukan bukti laporan dari komisaris There is evidence regarding periodic reporting on the progress of fulfilling the obligation to submit LHKPN to the KPK. However, there has been no evidence of reports from commissioners
15	Telah terdapat bukti terkait pemberian teguran/sanksi bagi Penyelenggara Negara yang belum/tidak menyampaikan LHKPN sesuai peraturan perundang-undangan. Namun belum ditemukan bukti laporan dari komisaris There has been evidence regarding the provision of warnings/sanctions for State Administrators who have not/did not submit LHKPN in accordance with statutory regulations. However, there has been no evidence of reports from commissioners
16	Belum terdapat bukti adanya kebijakan/ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi yang meliputi komitmen Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, ketentuan-ketentuan tentang gratifikasi, fungsi yang ditugaskan mengelola gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, pemantauan atas pelaksanaan dan sanksi atas penyimpangan ketentuan gratifikasi. There is no evidence yet of the existence of a policy/provision concerning Gratification Control which includes the commitment of the Board of Commissioners/Supervisory Board and the Board of Directors, provisions regarding gratification, functions assigned to manage gratification, mechanism for reporting gratification, monitoring of implementation and sanctions for deviations from provisions on gratification.
17	Belum terdapat bukti adanya pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan perusahaan. There is no evidence of implementation of communication and outreach regarding Gratification Control to the Board of Commissioners/Supervisory Board, Directors and company employees.
18	Belum terdapat bukti adanya kegiatan pendistribusian ketentuan dan perangkat Pengendalian Gratifikasi di lingkungan perusahaan. There is no evidence of distribution of Gratification Control provisions and tools within the company.
19	Telah terdapat bukti adanya tingkat pemahaman Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan yang memadai terhadap kebijakan Pengendalian Gratifikasi. Namun survei dari kuesioner Pemahaman GCG hasilnya hanya 78,18% There is evidence that the Board of Commissioners/Supervisory Board, the Board of Directors and employees have an adequate level of understanding of the Gratification Control policy. However, the GCG Understanding Questionnaire survey yielded only 78.18%
20	Belum terdapat bukti adanya kegiatan diseminasi tentang Pengendalian Gratifikasi kepada <i>stakeholder</i> perusahaan. There is no evidence of any dissemination activities regarding Gratification Control to company stakeholders.
21	Belum terdapat bukti adanya kegiatan pengelolaan gratifikasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. There is no evidence of gratification management activities in accordance with applicable laws.
22	Belum terdapat bukti adanya pelaporan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaan. There is no evidence of reporting on gratuity control within the company.
23	Belum terdapat bukti adanya peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung. There is no evidence of periodic review and improvement of supporting tools.
24	Belum terdapat bukti adanya kebijakan mengenai pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing system</i>). There is no evidence yet of a policy regarding reporting of alleged irregularities within the company (<i>whistle blowing system</i>).
25	Belum terdapat bukti adanya materi Pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistle blowing</i>) yang memuat perlindungan pelapor There is no evidence yet of material Guidelines for implementing a whistleblowing system that contains protection for whistleblowers

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
26	Belum terdapat bukti adanya materi Pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistle blowing</i>) yang memuat unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran There is no evidence yet of material Guidelines for the implementation of a whistleblowing system which contains the management unit for the whistleblowing system
27	Belum terdapat bukti adanya materi Pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistle blowing</i>) yang memuat kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran There is no evidence yet of material Guidelines for implementing a whistleblowing system which contains an obligation to report violations
28	Belum terdapat bukti adanya materi Pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistle blowing</i>) yang memuat mekanisme penyampaian pelanggaran (infrastruktur dan mekanisme, kerahasiaan dan perlindungan pelapor, komunikasi dengan pelapor) There is no evidence yet of material Guidelines for the application of a whistle blowing system which contains a mechanism for submitting violations (infrastructure and mechanisms, confidentiality and protection of the whistleblower, communication with the whistleblower).
29	Belum terdapat bukti adanya materi Pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistle blowing</i>) yang memuat pelaksanaan investigasi There is no evidence yet of material Guidelines for the implementation of a whistleblowing system that contains investigations
30	Belum terdapat bukti adanya materi Pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistle blowing</i>) yang memuat pelaporan atas penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran There is no evidence yet of material Guidelines for the implementation of a whistleblowing system which contains reporting on the implementation of a violation reporting system
31	Belum terdapat bukti adanya kegiatan sosialisasi kebijakan <i>whistle blowing</i> system kepada karyawan perusahaan. There is no evidence yet of any socialization of the whistle blowing system policy to the company's employees.
32	Belum terdapat bukti adanya kegiatan sosialisasi kebijakan <i>whistle blowing</i> system kepada stakeholders perusahaan. There is no evidence yet of any socialization of the whistle blowing system policy to company stakeholders.
33	Belum terdapat bukti adanya sarana/media perusahaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan <i>whistle blowing</i> system. There is no evidence yet of adequate company facilities/media to support the implementation of the whistle blowing system policy.
34	Belum terdapat bukti adanya penanganan/tindak lanjut sesuai dengan kebijakan atas pengaduan yang diterima perusahaan. There is no evidence of handling/follow-up in accordance with the policy on complaints received by the company.
35	Belum terdapat bukti adanya pelaporan atas pelaksanaan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan (<i>whistle blowing</i> system). There is no evidence of reporting on the implementation of the policy regarding reporting of alleged irregularities within the company (<i>whistle blowing</i> system).
36	Belum terdapat bukti adanya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan <i>whistle blowing</i> secara berkala. There is no evidence of regular evaluation and reporting of the implementation of the whistle blowing policy.
37	Belum terdapat bukti adanya mekanisme penjurangan atau nominasi calon anggota Direksi; There is no evidence yet that there is a mechanism for selecting or nominating candidates for members of the Board of Directors;
38	Belum terdapat bukti adanya Penilaian/pengujian atas kepatutan dan kelayakan (<i>fit and proper test</i>) bagi anggota Direksi. There is no evidence yet of the existence of a fit and proper test for members of the Board of Directors.
39	Belum terdapat bukti adanya Daftar Bakal Calon yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN dan berisikan nama-nama yang diperoleh melalui proses penjurangan dalam rangka memperoleh calon anggota Direksi. There is no evidence yet of the existence of a List of Prospective Candidates approved by the State Minister for SOEs and containing the names obtained through a screening process in order to obtain candidates for members of the Board of Directors.
40	Belum terdapat bukti adanya pelaksanaan UKK yang dilakukan oleh Tim terhadap: (1) Bakal calon anggota Direksi yang telah menyelesaikan masa jabatannya untuk diangkat menjadi anggota Direksi pada jabatan yang berbeda atau menjadi anggota Direksi pada BUMN yang lain; (2) Bakal calon anggota Direksi yang berasal dari pejabat eselon I dan II Instansi Pemerintah; There is no evidence yet of the UKK being implemented by the Team for: (1) Prospective members of the Board of Directors who have completed their term of office to be appointed as members of the Board of Directors in a different position or become members of the Board of Directors in another SOE; (2) Candidates for members of the Board of Directors come from echelon I and II officials of Government Agencies;
41	Belum terdapat bukti adanya pelaksanaan UKK dilakukan oleh Lembaga Profesional dan dievaluasi oleh Tim terhadap bakal calon Direksi There is no evidence yet that UKK is being implemented by a professional institution and evaluated by the Team for potential candidates for the Board of Directors
42	Belum terdapat bukti adanya penetapan hasil akhir UKK calon Direksi dan Evaluasi oleh Tim dan disampaikan kepada Pemegang Saham There is no evidence that the final UKK results for candidates for the Board of Directors have been determined and evaluated by the Team and submitted to the Shareholders
43	Belum terdapat bukti adanya Tim yang dibentuk untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan bakal calon Direksi There is no evidence yet that a team has been formed to carry out the fit and proper test for prospective Directors
44	Belum terdapat bukti adanya Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan menilai semua kriteria penilaian Direksi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. There is no evidence yet that the implementation of a fit and proper test assessed all the criteria for evaluating the Board of Directors as stipulated in statutory provisions.

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
45	<p>Belum terdapat bukti adanya Anggota Direksi tercantum dalam penetapan hasil UKK dan Evaluasi yang disampaikan oleh Tim. There is no evidence yet that members of the Board of Directors are listed in the determination of the UKK and Evaluation results submitted by the Team.</p>
46	<p>Telah terdapat bukti adanya Penetapan Direksi melalui RUPS/Pelantikan Direksi yang didukung dengan Berita Acara RUPS/ Pelantikan Direksi, sebagaimana tertuang dalam Naskah Pengukuhan Jabatan No.NPJ-486/PTK0000/2022-S8 tanggal 11 Agustus 2022. Namun belum terdapat tanda tangan pada dokumen Berita Acara Pengukuhan Direksi There has been evidence of the appointment of the Board of Directors through the GMS/Inauguration of the Board of Directors which is supported by the Minutes of the GMS/Inauguration of the Board of Directors, as stated in the Position Confirmation Paper No.NPJ-486/PTK0000/2022-S8 dated 11 August 2022. However, there has been no signature on the document Minutes of Board of Directors Inauguration</p>
47	<p>Telah terdapat bukti adanya Pembidangan tugas Direksi ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Penunjukan Direksi dan/atau Berita Acara RUPS/Pelantikan Direksi, sebagaimana tertuang dalam Naskah Pengukuhan Jabatan No.NPJ-486/PTK0000/2022-S8 tanggal 11 Agustus 2022. Namun belum terdapat lampiran daftar tugas dan tanggung jawab yang akan diserahkan. There is evidence that the Board of Directors' job assignments have been stipulated in the Decision Letter regarding the Appointment of the Board of Directors and/or Minutes of the Board of Directors' GMS/Inauguration, as stated in the Position Confirmation Document No.NPJ-486/PTK0000/2022-S8 dated 11 August 2022. However, there is no attachment yet. List of tasks and responsibilities to be assigned.</p>
48	<p>Belum terdapat bukti adanya Ketentuan perangkapan jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan tersebut termasuk jenis-jenis perangkapan jabatan dan pengaturan/mekanisme pengunduran diri dari jabatan rangkap tersebut atau jabatan anggota Direksi, yang paling lambat 30 hari sejak terjadi perangkapan jabatan tersebut. There is no evidence yet of the existence of Provisions for concurrent positions that give rise to a conflict of interest, including the types of concurrent positions and arrangements/mechanisms for resignation from the concurrent positions or the positions of members of the Board of Directors, no later than 30 days after the concurrent positions occur.</p>
49	<p>Belum terdapat bukti adanya Penetapan pemberhentian anggota Direksi Persero dapat dilakukan dengan keputusan RUPS secara fisik, dan keputusan seluruh Pemegang Saham di luar RUPS. There is no evidence yet that the decision to dismiss members of the Persero's Board of Directors can be done with a physical GMS decision, and decisions of all Shareholders outside the GMS.</p>
50	<p>Belum terdapat bukti adanya Rencana pemberhentian anggota Direksi diberitahukan kepada yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh pejabat yang ditunjuknya; There is no evidence yet that the plan to dismiss a member of the Board of Directors has been notified to the person concerned orally or in writing by the appointed official;</p>
51	<p>Belum terdapat bukti adanya Keputusan pemberhentian karena alasan-alasan: (a) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; (b) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; (c) tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; (d) terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara; (e) dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. There is no evidence of a decision to terminate due to the following reasons: (a) unable to fulfill the obligations agreed in the management contract; (b) unable to carry out their duties properly; (c) does not comply with statutory provisions and/or provisions in the articles of association; (d) involved in actions that are detrimental to SOE and/or the state; (e) declared guilty in a court decision that has permanent legal force, taken after the person concerned has been given the opportunity to defend himself.</p>
52	<p>Belum terdapat bukti adanya Keputusan RUPS memuat alasan pemberhentian. There is no evidence yet that the GMS decision contains reasons for dismissal.</p>
53	<p>Belum terdapat bukti adanya Pedoman pengangkatan dan pemberhentian, diantaranya mengatur mengenai: (a) penjarangan atau nominasi calon anggota Dewan Komisaris; (b) penilaian bagi calon anggota Dewan Komisaris There is no evidence yet of the existence of Guidelines for appointment and dismissal, including those that regulate: (a) selection or nomination of candidates for members of the Board of Commissioners; (b) evaluation of prospective members of the Board of Commissioners</p>
54	<p>Belum terdapat bukti adanya Pemegang Saham/RUPS mencari usulan calon anggota Dewan Komisaris. There is no evidence that Shareholders/GMS are seeking proposals for candidates for members of the Board of Commissioners.</p>
55	<p>Belum terdapat bukti adanya Pemegang Saham/RUPS melaksanakan penilaian terhadap Calon Dewan Komisaris. There is no evidence yet that Shareholders/GMS has conducted an assessment of Candidates for the Board of Commissioners.</p>
56	<p>Belum terdapat bukti adanya Penilaian mencakup semua kriteria penilaian Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan di bidang BUMN (penilaian terhadap persyaratan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan). Proses penilaian calon Dewan Komisaris didukung dengan Berita Acara penilaian. There is no evidence yet. The assessment covers all the criteria for evaluating the Board of Commissioners stipulated in the statutory provisions in the SOE sector (assessment of integrity requirements, dedication, understanding company management issues related to one of the management functions and having adequate knowledge in the business sector company). The process for assessing candidates for the Board of Commissioners is supported by Minutes of Assessment.</p>
57	<p>Belum terdapat bukti adanya Penetapan Dewan Komisaris terpilih berdasarkan hasil akhir penilaian. There is no evidence yet of the appointment of an elected Board of Commissioners based on the final results of the assessment.</p>
58	<p>Belum terdapat bukti adanya RUPS/Pemilik Modal menetapkan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen paling sedikit 20% dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara eksplisit dalam keputusan pengangkatannya. Komisaris Independen memiliki kompetensi di bidang <i>auditing</i>, keuangan dan akuntansi. There is no evidence yet that the GMS/Capital Owners stipulate members of the Board of Commissioners/Independent Supervisory Board at least 20% of the members of the Board of Commissioners/Supervisory Board explicitly in their appointment decisions. Independent Commissioners have competence in auditing, finance and accounting.</p>

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
59	Belum terdapat bukti adanya keputusan RUPS/AD/peraturan lainnya yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris. There is no evidence yet of the resolution of the GMS/AD/other regulations governing and stipulating the maximum number of positions for the Board of Commissioners and Supervisory Board that can be held by a member of the Board of Commissioners.
60	Belum terdapat bukti adanya Dewan Komisaris menyampaikan pemaparan/tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS. There is no evidence yet that the Board of Commissioners has submitted a presentation/response to matters proposed by the Board of Directors to be decided by the GMS.
61	Belum terdapat bukti adanya Pemegang Saham/RUPS memberikan pengesahan/persetujuan terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP. There is no evidence yet that Shareholders/GMS has given approval/approval of the RJPP draft or the RJPP Revision.
62	Belum terdapat bukti adanya Pengesahan/persetujuan rancangan RJPP atau Revisi RJPP dilaksanakan tepat waktu. There is no evidence that the ratification/approval of the RJPP draft or the RJPP revision was carried out on time.
63	Belum terdapat bukti adanya Pembahasan/pengkajian/ penelaahan terhadap rancangan RKAP oleh RUPS, didahului oleh pemaparan Direksi atas hal-hal yang diagendakan untuk diputuskan oleh RUPS/Pemilik Modal. There is no evidence of discussion/review/review of the draft RKAP by the GMS, preceded by the presentation of the Board of Directors on matters that are scheduled to be decided by the GMS/Capital Owners.
64	Belum terdapat bukti adanya Dewan Komisaris menyampaikan pemaparan/ tanggapan atas hal-hal yang diusulkan oleh Direksi untuk diputuskan oleh RUPS. There is no evidence yet that the Board of Commissioners has submitted a presentation/response to matters proposed by the Board of Directors to be decided by the GMS.
65	Belum terdapat bukti adanya Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal memberikan pengesahan/ persetujuan terhadap rancangan RKAP. There is no evidence that Shareholders/GMS/Capital Owners have approved/approved the RKAP draft.
66	Belum terdapat bukti adanya RUPS memberikan pengesahan/persetujuan rancangan RKAP tepat waktu. There is no evidence yet that the GMS gave validation/approval of the RKAP draft on time.
67	Belum terdapat bukti adanya Kontrak Kinerja, yang memuat target kinerja Dewan Komisaris (majelis), yang disahkan/disetujui Pemegang Saham/RUPS There is no evidence of a Performance Contract, which contains performance targets for the Board of Commissioners (assembly), which was ratified/approved by Shareholders/GMS
68	Belum terdapat bukti adanya Pemegang Saham/RUPS menetapkan pedoman penunjukan audit eksternal. There is no evidence yet that Shareholders/GMS has set guidelines for external audit appointments.
69	Belum terdapat bukti adanya Pemegang Saham/RUPS memutuskan penunjukan Auditor Eksternal yang akan mengaudit laporan keuangan perusahaan, belum terdapat penetapan besarnya honorarium/imbal jasa untuk auditor eksternal tersebut There is no evidence that the Shareholders/GMS have decided on the appointment of an External Auditor to audit the company's financial statements, and there has been no determination of the amount of honorarium/reward for the external auditor.
70	Telah terdapat bukti adanya telaahan terhadap laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh Pemegang Saham/RUPS, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT PME 23 Juni 2022. Namun belum terdapat telaahan terhadap laporan tahunan perusahaan. There has been evidence of a review of the financial reports and report on supervisory duties of the Board of Commissioners carried out by the Shareholders/GMS, as stated in the PT PME GMS Minutes June 23, 2022. However, there has been no review of the company's annual report.
71	Telah terdapat bukti adanya pemberian persetujuan laporan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang dituangkan dalam risalah RUPS, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT PME 23 Juni 2022. Namun belum terdapat telaahan terhadap laporan tahunan perusahaan. There has been evidence of granting approval for reports including ratification of financial reports as well as supervisory duties for the Board of Commissioners/Supervisory Board, as set forth in the minutes of the GMS, as stated in the Minutes of the PT PME GMS June 23, 2022. However, there has been no review of the company's annual report.
72	Telah terdapat bukti adanya RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan laporan keuangan dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku yang lampau, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT PME 23 Juni 2022. Namun belum terdapat pengesahan terhadap laporan tahunan perusahaan. There is evidence that the GMS/Capital Owners' Decision to ratify the financial statements was carried out on time according to the provisions, namely no later than 6 (six) months after the end of the previous financial year, as stated in the PT PME GMS Minutes June 23, 2022. However, there has been no ratification to the company's annual report.
73	Belum terdapat bukti adanya Pemegang Saham melakukan upaya-upaya menindaklanjuti <i>area of improvement</i> yang dihasilkan dari <i>assessment</i> atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada perusahaan yang bersangkutan. There is no evidence that the Shareholders have made efforts to follow up on areas of improvement resulting from an assessment of the implementation of Good Corporate Governance in the company concerned.
74	Belum terdapat bukti adanya RUPS menetapkan sistem penerimaan laporan mengenai gejala penurunan kinerja dari Direksi dan/ atau Dewan Komisaris. There is no evidence yet that the GMS has established a system for receiving reports regarding symptoms of decreased performance from the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
75	Belum terdapat bukti adanya rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris There is no evidence of a work plan and budget for training activities for members of the Board of Commissioners

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
76	Belum terdapat bukti adanya Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Dewan Komisaris. There is no evidence yet that training for members of the Board of Commissioners has been realized in accordance with the work plan of the Board of Commissioners.
77	Belum terdapat bukti adanya laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris There is no evidence yet of reports on the results of the training that has been undertaken by members of the Board of Commissioners
78	Belum terdapat bukti adanya penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan oleh Dewan Komisaris There is no evidence that the Board of Commissioners has prepared an annual work plan and budget
79	Belum terdapat bukti adanya Rencana kerja dan anggaran tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran untuk melaksanakan rencana kerja tersebut, serta disahkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. There is no evidence that there is a work plan and annual budget that contains a work plan and budget to implement the work plan, and is approved by the Board of Commissioners/Supervisory Board.
80	Belum terdapat bukti adanya Rencana kerja dan anggaran tahunan memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. There is no evidence yet that the work plan and annual budget contain key performance indicators and targets that reflect the measure of the success of carrying out supervisory duties and providing advice to the Board of Directors.
81	Belum terdapat bukti adanya Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan perangkat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara optimal. There is no evidence yet that the process for preparing the Annual Work Plan and Budget for the Board of Commissioners/Supervisory Board uses the Board of Commissioners/Supervisory Board optimally.
82	Belum terdapat bukti adanya Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi untuk dimasukkan sebagai bagian dari RKAP. There is no evidence yet of the submission of the Board of Commissioners'/Supervisory Board's Annual Work Plan and Budget to the Board of Directors to be included as part of the RKAP.
83	Belum terdapat bukti adanya Rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk mendapatkan pengesahan. There is no evidence that the annual work plan and budget for the Board of Commissioners/Supervisory Board has been submitted in writing to Shareholders/Equity Owners for approval.
84	Belum terdapat bukti adanya Substansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat: bentuk informasi yang disampaikan baik yang berkala maupun insidental, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi. There is no evidence yet. The substance of the policy/guideline includes: the form of information submitted both periodically and incidentally, the standard time for delivery and the mechanism for conveying this information by the Board of Directors.
85	Belum terdapat bukti adanya rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berkaitan dengan proses persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi. There is no evidence that there is a work plan for the Board of Commissioners/Supervisory Board related to the RJPP approval process submitted by the Board of Directors.
86	Belum terdapat bukti adanya proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. There is no evidence of a review process in accordance with the established work plan, either through an internal discussion process or joint meetings of the Board of Commissioners/Supervisory Board and the Board of Directors.
87	Belum terdapat bukti adanya Substansi Adanya hasil telaah rancangan RJPP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau Rapat Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas). There is no evidence of substance. There is a written review of the draft RJPP (Minutes of internal meetings of the Board of Commissioners/Supervisory Board or Committee Meetings of the Board of Commissioners/Supervisory Board).
88	Belum terdapat bukti adanya Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memastikan hasil telaah rancangan RJPP dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi. There is no evidence that the Board of Commissioners/Supervisory Board ensures that the results of the RJPP draft review are communicated and followed up by the Board of Directors.
89	Belum terdapat bukti adanya Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. There is no evidence yet that the review process was carried out by the Board of Commissioners/Supervisory Board using all instruments on the Board of Commissioners/Supervisory Board.
90	Belum terdapat bukti adanya Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RJPP kepada RUPS/Pemilik Modal. There is no evidence yet that there is a written response in the form of opinions and suggestions regarding the RJPP draft to the GMS/Capital Owners.
91	Belum terdapat bukti adanya Tanggapan rancangan RJPP oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberikan dalam jangka waktu sesuai ketentuan/kebijakan. There is no evidence yet that the response to the RJPP draft by the Board of Commissioners/Supervisory Board was given within the timeframe according to the provisions/policies.
92	Belum terdapat bukti adanya rencana kerja Dewan Komisaris/Pengawas yang berkaitan dengan proses persetujuan rancangan RKAP yang disampaikan Direksi. There is no evidence yet that there is a work plan for the Board of Commissioners/Supervisors related to the approval process for the RKAP draft submitted by the Board of Directors.

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
93	Belum terdapat bukti adanya proses telaah rancangan RKAP sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. There is no evidence yet that there is a process for reviewing the draft RKAP in accordance with the established work plan, either through an internal discussion process or a joint meeting of the Board of Commissioners and Directors.
94	Belum terdapat bukti adanya hasil telaah rancangan RKAP dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi. There is no evidence that the results of the RKAP draft review have been communicated and followed up by the Board of Directors.
95	Belum terdapat bukti adanya Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RKAP kepada RUPS/ Pemilik Modal. There is no evidence yet. There is a written response in the form of opinions and suggestions regarding the draft RKAP to the GMS/ Capital Owners.
96	Belum terdapat bukti adanya simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP. There is no evidence of a conclusion that the draft RKAP is aligned and/or not aligned with the RJPP.
97	Belum terdapat bukti adanya penyediaan bahan bacaan/referensi yang memudahkan Dewan Komisaris memperbaharui pengetahuan tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan dan/atau permintaan arahan dari Direksi tentang permasalahan yang dihadapi perusahaan. There is no evidence of providing reading/reference materials that make it easier for the Board of Commissioners to update knowledge about changes in the business environment and problems faced by the company and/or requests for direction from the Board of Directors regarding problems faced by the company.
98	Belum terdapat bukti adanya melakukan telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis There is no evidence of conducting a review of current issues regarding changes in the business environment
99	Belum terdapat bukti adanya memberikan arahan kepada Direksi berdasarkan hasil telaah mengenai isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan, termasuk pemberian persetujuan jika respon perusahaan dalam kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. There is no evidence of providing direction to the Board of Directors based on the results of a review of current issues regarding changes in the business environment and problems faced by the company, including giving approval if the company's response is within the authority of the Board of Commissioners/Supervisory Board.
100	Belum terdapat bukti adanya pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya. There is no evidence of oversight and provision of advice on internal control system policies/designs and their implementation.
101	Belum terdapat bukti adanya melakukan telaah atas: (1) kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern; (2) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas; (3) hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas; (4) <i>internal control report</i> . There is no evidence of conducting a review of: (1) the policy/design and implementation of the internal control system; (2) evaluation results on the effectiveness of internal control at the entity level; (3) evaluation results on the effectiveness of internal control at the operational/activity level; (4) internal control reports.
102	Belum terdapat bukti adanya hasil telaah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya. There is no evidence yet of the results of the review by the Board of Commissioners/Supervisory Board on internal control system policies/designs and their implementation.
103	Belum terdapat bukti adanya menyampaikan arahan tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern kepada Direksi. There is no evidence yet of conveying directions regarding increasing the effectiveness of the internal control system to the Board of Directors.
104	Belum terdapat bukti adanya rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. There is no evidence yet that there is a plan for the Board of Commissioners/Supervisory Board regarding the supervision and provision of advice on the company's risk management policies and implementation.
105	Belum terdapat bukti adanya telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan (termasuk rencana kerja unit manajemen risiko), hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya, dan laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan oleh Direksi. There is no evidence yet of a review of the company's risk management policies and implementation (including the risk management unit work plan), the results of the risk analysis on the RKAP draft and its handling strategy, and periodic risk management implementation reports submitted by the Board of Directors.
106	Belum terdapat bukti adanya telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko hasil telaah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. There is no evidence of a review of risk management policies and implementation as a result of the review by the Board of Commissioners/Supervisory Board on the company's risk management policies and implementation.
107	Belum terdapat bukti adanya arahan tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. There is no evidence yet of directives regarding improving the quality of the company's risk management policies and implementation.
108	Belum terdapat bukti adanya rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya. There is no evidence yet of any plans by the Board of Commissioners/Supervisory Board regarding the supervision and provision of advice on the company's information technology system policies and their implementation.

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
109	Belum terdapat bukti adanya telaah terhadap kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. There is no evidence yet of a review of information technology system policies and their implementation in accordance with a predetermined work plan.
110	Belum terdapat bukti adanya hasil telaah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya. There is no evidence yet of the review by the Board of Commissioners/Supervisory Board of the company's information technology system policies and the implementation.
111	Belum terdapat bukti adanya arahan kepada Direksi tentang kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi. There is no evidence of directives to the Board of Directors regarding policy and implementation of information technology systems.
112	Belum terdapat bukti adanya rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut. There is no evidence that the Board of Commissioners/Supervisory Board plans to supervise and provide advice on human resource policies and the implementation of these policies.
113	Belum terdapat bukti adanya telaah terhadap: (1) kebijakan pengembangan karir serta pelaksanaannya, yang meliputi penempatan karyawan pada jabatan dalam struktur organisasi perusahaan, promosi dan demosi, serta mutasi; (2) Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi. There is no evidence of a review of: (1) career development policies and their implementation, which includes placement of employees in positions within the company's organizational structure, promotions and demotions, and transfers; (2) Plans for promotion and transfer of one position level below the Board of Directors.
114	Belum terdapat bukti adanya arahan berdasarkan hasil pengawasan dan penelaahan atas rencana suksesi dan pelaksanaannya. There is no evidence of directives based on the results of monitoring and review of the succession plan and its implementation.
115	Belum terdapat bukti adanya arahan kepada Direksi tentang kebijakan suksesi manajemen dan pelaksanaannya. There is no evidence of directives to the Board of Directors regarding the management succession policy and its implementation.
116	Belum terdapat bukti adanya rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan tersebut. There is no evidence that the Board of Commissioners/Supervisory Board plans to supervise accounting policies and the preparation of financial reports and the implementation of these policies.
117	Belum terdapat bukti adanya pembahasan mengenai kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya. There is no evidence of discussions regarding accounting policies and the preparation of financial reports and the implementation.
118	Belum terdapat bukti adanya arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya. There is no evidence of directives to the Board of Directors regarding accounting policies and the preparation of financial reports and their implementation.
119	Belum terdapat bukti adanya rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya. There is no evidence that the Board of Commissioners/Supervisory Board plans to supervise and provide advice on procurement policies and the implementation.
120	Belum terdapat bukti adanya pembahasan terhadap terhadap kebijakan pengadaan. There is no evidence of any discussion of procurement policies.
121	Belum terdapat bukti adanya arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengadaan There is no evidence of directives to the Board of Directors regarding procurement policies
122	Belum terdapat bukti adanya tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. There is no evidence of supervisory and advisory duties on quality and service policies and their implementation.
123	Belum terdapat bukti adanya pembahasan terhadap terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. There is no evidence that there has been a discussion of the quality and service policies and their implementation.
124	Belum terdapat bukti adanya arahan kepada Direksi tentang kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. There is no evidence of directives to the Board of Directors regarding quality and service policies and the implementation.
125	Belum terdapat bukti adanya rencana kerja Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang membahas kepatuhan direksi terhadap peraturan per-UU-an dan perjanjian dengan pihak ketiga. There is no evidence that there is a work plan for the Board of Commissioners/Supervisory Board that discusses the board of directors' compliance with laws and regulations and agreements with third parties.
126	Belum terdapat bukti adanya kepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. There is no evidence yet of the Board of Directors' compliance with laws and regulations and agreements with third parties.
127	Belum terdapat bukti adanya arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada Direksi berdasarkan hasil telaahan. There is no evidence of directives from the Board of Commissioners/Supervisory Board to the Board of Directors based on the results of the review.
128	Belum terdapat bukti adanya Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaporkan hasil evaluasi/pembahasan tersebut kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas semesteran dan tahunan. There is no evidence yet that the Board of Commissioners/Supervisory Board reported the results of the evaluation/discussion to the GMS/Capital Owners in the semiannual and annual reports on supervisory duties carried out by the Board of Commissioners/Supervisory Board.

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
129	Belum terdapat bukti adanya rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKAP. There is no evidence that the Board of Commissioners/Supervisory Board plans to evaluate the implementation of the RKAP.
130	Terdapat evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja (inisiatif perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP. There is an evaluation of the Company's achievements which include the suitability of the implementation of work programs (company initiatives) and the budget set out in the RKAP.
131	Belum terdapat bukti adanya Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan I s.d. Triwulan III, serta seluruh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menandatangani Laporan Manajemen Tahunan, setelah dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. There is no evidence that the President Commissioner/Chairman of the Supervisory Board has signed the Quarterly Management Report I to Quarter III, as well as all members of the Board of Commissioners/Supervisory Board sign the Annual Management Report, after being evaluated/discussed by the Board of Commissioners/Supervisory Board and the Board of Directors.
132	Belum terdapat bukti adanya Dewan Komisaris diharapkan untuk memastikan adanya rencana kerja Dewan Komisaris untuk membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS/Pemilik Modal. There is no evidence yet that the Board of Commissioners is expected to ensure that there is a work plan for the Board of Commissioners to discuss transactions or actions within the scope of the authority of the Board of Commissioners or GMS/Capital Owners.
133	Belum terdapat bukti adanya pemberian otorisasi atau rekomendasi oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atau RUPS/Pemilik Modal. There is no evidence of authorization or recommendation by the Board of Commissioners/Supervisory Board for transactions or actions of the Board of Directors within the scope of the authority of the Board of Commissioners/Supervisory Board or GMS/Capital Owners.
134	Belum terdapat bukti adanya Pemberian otorisasi atau rekomendasi paling lambat 14 hari sejak usulan atau dokumen secara lengkap diterima oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. There is no evidence of authorization or recommendation no later than 14 days after the complete proposal or document is received by the Board of Commissioners/Supervisory Board.
135	Belum terdapat bukti adanya penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit eksternal dalam RKAT Dewan Komisaris. There is no evidence yet of the appointment of prospective auditors and the budget for external audit fees in the RKAT of the Board of Commissioners.
136	Belum terdapat bukti adanya Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing perusahaan, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya. There is no evidence yet that the Board of Commissioners through the Audit Committee conducted the process of appointing external auditor candidates in accordance with the provisions for the procurement of goods and services for each company, and if necessary, may request the assistance of the Board of Directors in the appointment process.
137	Belum terdapat bukti adanya Dewan Komisaris menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut. There is no evidence yet that the Board of Commissioners has conveyed to the GMS/Capital Owners the amount of honorarium/reward proposed for the external auditor.
138	Belum terdapat bukti adanya Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. There is no evidence yet that the Board of Commissioners evaluates the performance of the External Auditor in accordance with applicable regulations and standards.
139	Belum terdapat bukti adanya rencana kerja Dewan Komisaris tentang pengawasan efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris. There is no evidence yet of the existence of a work plan for the Board of Commissioners regarding monitoring the effectiveness of the implementation of external audits and internal audits, as well as the implementation of reviews of complaints related to SOEs received by the Board of Commissioners.
140	Belum terdapat bukti adanya Terdapat penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui: (1) pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3) telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal. There is no evidence yet. There is an assessment of the effectiveness of the external audit implementation through: (1) monitoring the suitability of the completion of the audit progress with the work plan; (2) examine the suitability of the audit implementation with the public accountant professional standards; and (3) review of external audit results and quality of external audit recommendations.
141	Belum terdapat bukti adanya penyampaian arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit internal dan audit eksternal. There is no evidence yet of delivering directions to the Board of Directors regarding increasing the effectiveness of internal audits and external audits.
142	Belum terdapat bukti adanya Dewan Komisaris melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi, sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. There is no evidence yet that the Board of Commissioners has conducted a review and/or research/examination of the candidates for the Board of Directors proposed by the Board of Directors, before submitting them to Shareholders/Capital Owners.
143	Belum terdapat bukti adanya usulan Komisaris atas calon-calon anggota Direksi yang baru kepada RUPS/Pemilik Modal. There is no evidence that the Commissioners proposed new members of the Board of Directors to the GMS/Capital Owners.

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
144	<p>Belum terdapat bukti adanya rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal.</p> <p>There is no evidence yet that there is a plan for the Board of Commissioners/Supervisory Board regarding monitoring the performance of the Board of Directors and reporting to Shareholders/Capital Owners.</p>
145	<p>Belum terdapat bukti adanya penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegal dengan realisasi pencapaiannya.</p> <p>There is no evidence yet of the Board of Directors' performance assessment based on a review of the criteria, targets and key performance indicators included in the Board of Directors' Management Contract collegially with the realization of their achievements.</p>
146	<p>Belum terdapat bukti adanya Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu kepada RUPS/Pemilik Modal dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara semesteran dan tahunan.</p> <p>There is no evidence yet that the Board of Commissioners submitted the results of the performance assessment of the Board of Directors collegially and individually to the GMS/Capital Owners in the semi-annual and annual supervisory reports of the Board of Commissioners.</p>
147	<p>Belum terdapat bukti adanya rencana Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menelaah pengusulan remunerasi Direksi.</p> <p>There is no evidence yet that there is a plan for the Board of Commissioners/Supervisory Board to review the proposed remuneration for the Board of Directors.</p>
148	<p>Belum terdapat bukti adanya rencana kerja Dewan Komisaris untuk memantau penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</p> <p>There is no evidence yet that there is a work plan for the Board of Commissioners to monitor the implementation of the principles of Good Corporate Governance.</p>
149	<p>Belum terdapat bukti adanya Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</p> <p>There is no evidence yet that the Board of Commissioners/Supervisory Board monitors the implementation of the principles of Good Corporate Governance.</p>
150	<p>Belum terdapat bukti adanya Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menindaklanjuti <i>area of improvement</i> hasil <i>assessment/review</i> GCG yang menjadi kewenangannya.</p> <p>There is no evidence yet that the Board of Commissioners/Supervisory Board has followed up on areas of improvement on GCG assessment/review results under their authority.</p>
151	<p>Belum terdapat bukti adanya Dewan Komisaris memiliki/menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja beserta target-targetnya, dan disetujui oleh RUPS/Menteri setiap tahun berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.</p> <p>There is no evidence yet that the Board of Commissioners has/sets Performance Achievement Indicators and their targets, and they are approved by the GMS/Minister every year based on the proposal from the Board of Commissioners concerned.</p>
152	<p>Belum terdapat bukti adanya Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>There is no evidence yet that the Board of Commissioners or Board of Commissioners' Committees evaluate the performance achievements of each member of the Board of Commissioners and set it forth in the minutes of the Board of Commissioners' meeting.</p>
153	<p>Belum terdapat bukti adanya penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.</p> <p>There is no evidence yet of the performance appraisal of the Board of Commissioners being reported in the Report on the Implementation of the Supervisory Duties of the Board of Commissioners.</p>
154	<p>Belum terdapat bukti adanya Pedoman/tata tertib Rapat Dewan Komisaris, antara lain mengatur: 1) etika Rapat, 2) Pembahasan/ telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi dan Dewan Komisaris</p> <p>There is no evidence yet of the existence of Guidelines/rules of conduct for the Board of Commissioners' Meetings, among others regulating: 1) Meeting ethics, 2) Discussion/review of the Directors' proposals and GMS directions/decisions related to the proposals of the Directors and the Board of Commissioners</p>
155	<p>Belum terdapat bukti adanya evaluasi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya.</p> <p>There is no evidence of an evaluation by the Board of Commissioners/Supervisory Board on the follow-up to the results of the previous meeting.</p>
156	<p>Belum terdapat bukti adanya Hasil rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelumnya telah ditindak lanjuti seluruhnya.</p> <p>There is no evidence that the results of the previous Board of Commissioners/Supervisory Board meetings have been fully followed up.</p>
157	<p>Belum terdapat bukti adanya uraian tugas bagi Sekretariat Komisaris yang ditetapkan oleh Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas.</p> <p>There is no evidence that there is a job description for the Secretariat of Commissioners that is determined by the Main Commissioner/Chairman of the Supervisory Board.</p>
158	<p>Belum terdapat bukti adanya Tugas pokok dan fungsi adalah membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam bidang kegiatan kesekretariatan paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:</p> <p>There is no evidence yet. The main duties and functions are to assist the Board of Commissioners/Supervisory Board in the field of secretarial activities, at least covering the following matters:</p>
159	<p>Belum terdapat bukti adanya komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.</p> <p>There is no evidence that there is an audit committee that works collectively and functions to assist the Board of Commissioners/Supervisory Board in carrying out their duties.</p>

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
160	<p>Belum terdapat bukti adanya komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris berdasarkan analisis mengenai kebutuhan untuk mendukung Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya.</p> <p>There is no evidence yet of the existence of other committees to assist the duties of the Board of Commissioners based on an analysis of the need to support the Board of Commissioners in carrying out their duties.</p>
161	<p>Belum terdapat bukti adanya Ketua maupun Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS/Pemilik Modal.</p> <p>There is no evidence that the Chairman or Committee Members were appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the GMS/Capital Owners.</p>
162	<p>Belum terdapat bukti adanya Ketua Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.</p> <p>There is no evidence yet that the Chairman of the Committee for the Board of Commissioners/Supervisory Board is a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board.</p>
163	<p>Belum terdapat bukti adanya Salah seorang anggota Komite memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang tugas masing-masing Komite.</p> <p>There is no evidence yet that one member of the Committee has sufficient knowledge and work experience in the field of duties of each Committee.</p>
164	<p>Belum terdapat bukti adanya anggota Komite harus berasal dari pihak di luar perusahaan dan tidak mempunyai kaitan dengan manajemen, kaitan kepemilikan dan dengan kegiatan usaha perusahaan.</p> <p>There is no evidence yet that members of the Committee must come from parties outside the company and have no connection with management, ownership links and with the company's business activities.</p>
165	<p>Belum terdapat bukti adanya Jumlah keanggotaan masing-masing Komite yang berasal dari luar Dewan Komisaris/Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>There is no evidence yet that the number of members of each Committee comes from outside the Board of Commissioners/Supervisors in accordance with applicable regulations.</p>
166	<p>Belum terdapat bukti adanya Piagam untuk setiap Komite yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala.</p> <p>There is no evidence yet of the existence of a Charter for each Committee established by the Board of Commissioners, which is reviewed and updated periodically.</p>
167	<p>Belum terdapat bukti adanya Muatan Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Muatan piagam Komite lainnya sesuai kebutuhan Dewan Komisaris.</p> <p>There is no evidence yet of the contents of the Audit Committee Charter in accordance with the applicable regulations; Contents of other Committee charters according to the needs of the Board of Commissioners.</p>
168	<p>Belum terdapat bukti adanya program kerja tahunan yang disetujui/ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.</p> <p>There is no evidence of an annual work program approved/stipulated by the Board of Commissioners/Supervisory Board.</p>
169	<p>Belum terdapat bukti adanya Jumlah pertemuan berkala dan agenda yang dibahas sesuai dengan program kerja tahunan serta jumlah kegiatan lain yang ditugaskan sesuai yang ditugaskan Dewan Komisaris.</p> <p>There is no evidence yet. The number of periodic meetings and the agenda discussed is in accordance with the annual work program and the number of other activities assigned according to those assigned by the Board of Commissioners.</p>
170	<p>Belum terdapat bukti adanya risalah Rapat Komite Dewan Komisaris harus dibuat untuk setiap rapat, memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap Rapat Komite Dewan Komisaris diserahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan di perusahaan.</p> <p>There is no evidence yet that the minutes of the Board of Commissioners' Committee Meetings must be made for each meeting, containing the results of the analysis, review and evaluation of the events scheduled, as well as the original minutes of each Committee Meeting of the Board of Commissioners submitted to the Secretary to the Board of Commissioners to be kept in the company.</p>
171	<p>Belum terdapat bukti adanya laporan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasi.</p> <p>There is no evidence yet of a report to the Board of Commissioners/Supervisory Board for each assignment accompanied by recommendations.</p>
172	<p>Belum terdapat bukti adanya laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.</p> <p>There is no evidence yet of the Committee's quarterly and annual reports to the Board of Commissioners, at least containing a comparison of the realization of activities with the annual work program as well as the substance of the results of the activities and recommendations.</p>
173	<p>Belum terdapat bukti adanya rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi.</p> <p>There is no evidence of a work plan and budget for training activities for members of the Board of Directors.</p>
174	<p>Telah terdapat bukti adanya pelatihan bagi anggota Direksi direalisasikan sesuai dengan rencana kerja Direksi, namun hal tersebut masih program Perusahaan Induk</p> <p>There is evidence that training for members of the Board of Directors has been realized in accordance with the work plan of the Board of Directors, but this is still the Parent Company's program</p>
175	<p>Belum terdapat bukti adanya laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi.</p> <p>There is no evidence yet of reports on the results of the training that members of the Board of Directors have undergone.</p>
176	<p>Belum terdapat bukti adanya permintaan persetujuan Dewan Komisaris atas struktur organisasi</p> <p>There is no evidence yet of a request for approval from the Board of Commissioners on the organizational structure</p>

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
177	Belum terdapat bukti adanya kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP di perusahaan There is no evidence that there is a policy regarding guidelines for preparing SOPs in the company
178	Belum terdapat bukti adanya SOP untuk seluruh proses bisnis inti perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan perusahaan There is no evidence of the existence of SOPs for all of the company's core business processes as a guide for carrying out company activities
179	Belum terdapat bukti adanya sosialisasi SOP untuk proses bisnis inti perusahaan kepada karyawan yang terkait There is no evidence of SOP socialization for the company's core business processes to the related employees
180	Belum terdapat bukti adanya SOP untuk proses bisnis inti perusahaan dilaksanakan konsisten dan tidak terdapat penyimpangan atas prosedur There is no evidence that SOPs for the company's core business processes are implemented consistently and there are no deviations from procedures
181	Belum terdapat bukti adanya Direksi melakukan peninjauan dan penyempurnaan SOP secara berkala. There is no evidence that the Board of Directors regularly reviews and improves SOPs.
182	Telah terdapat bukti adanya rancangan RJPP yang sesuai dengan pedoman penyusunan RJPP yang ditetapkan, namun masih berupa paparan belum buku RJPP yang resmi There is evidence that the RJPP draft is in accordance with the established RJPP preparation guidelines, but it is still in the form of an official RJPP book presentation
183	Belum terdapat bukti adanya Direksi menyosialisasikan dalam RJPP kepada seluruh karyawan perusahaan. There is no evidence that the Board of Directors socialized the RJPP to all company employees.
184	Belum terdapat bukti adanya Direksi menyosialisasikan RKAP kepada seluruh karyawan perusahaan. There is no evidence yet that the Board of Directors socialized the RKAP to all company employees.
185	Belum terdapat bukti adanya kebijakan/pedoman perusahaan mengenai manajemen karir di perusahaan, dan sistem dan prosedur promosi, demosi dan mutasi di perusahaan. There is no evidence that there is a company policy/guideline regarding career management in the company, and systems and procedures for promotions, demotions and transfers in the company.
186	Belum terdapat bukti adanya penempatan karyawan pada setiap level jabatan dalam organisasi perusahaan. Tidak terdapat jabatan yang kosong. There is no evidence of placement of employees at every position level within the company's organization. There are no vacant positions.
187	Belum terdapat bukti adanya penempatan karyawan pada setiap level jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ditetapkan. There is no evidence yet of the placement of employees at each position level in accordance with the established job specifications.
188	Belum terdapat bukti adanya Direksi memiliki <i>database (list)</i> tentang orang yang memiliki skill dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditargetkan dapat tersedia di setiap posisi/jabatan-jabatan di perusahaan. Daftar tersebut menyebutkan siapa saja yang dapat mengambillalih pekerjaan-pekerjaan utama apabila karyawan-karyawan berhenti, pensiun, meninggal dengan tak terduga. There is no evidence yet that the Board of Directors has a database (list) of people who have the skills and competencies as well as sufficient experience to carry out the targeted jobs available in every position/positions in the company. The list lists who can take over key jobs if employees quit, retire, or die unexpectedly.
189	Belum terdapat bukti adanya pelaksanaan seleksi untuk suksesi/promosi pejabat satu level di bawah Direksi sesuai dengan ketentuan melalui proses <i>assessment</i> . There is no evidence yet of the implementation of selection for the succession/promotion of officials one level below the Board of Directors in accordance with the provisions through the assessment process.
190	Belum terdapat bukti adanya tingkat objektivitas dan transparansi yang memadai dalam penempatan karyawan pada setiap level jabatan. There is no evidence of an adequate level of objectivity and transparency in the placement of employees at each position level.
191	Belum terdapat bukti adanya setiap pelaksanaan program/kegiatan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, telah melalui melalui mekanisme yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan atau sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. There is no evidence that any implementation of programs/activities that require the approval of the Board of Commissioners/Supervisory Board has gone through a mechanism that is in accordance with the company's articles of association or in accordance with the authority set out in the Articles of Association.
192	Belum terdapat bukti adanya program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah signifikan telah diputuskan melalui analisis yang memadai berdasarkan informasi yang cukup, studi/kajian kelayakan serta analisis risiko terhadap program/kegiatan tersebut dan tindakan pengendalian untuk mencegah terjadinya risiko tersebut. There is no evidence that there are programs/activities that require significant investment and debt. It has been decided through adequate analysis based on sufficient information, feasibility studies/assessments as well as risk analysis of these programs/activities and control measures to prevent these risks from occurring.
193	Belum terdapat bukti adanya proses pengambilan keputusan atau kebijakan Direksi dilaksanakan tepat waktu, sesuai pedoman/ mekanisme tentang pengambilan keputusan. There is no evidence yet that the decision-making process or the Board of Directors' policies were carried out in a timely manner, in accordance with the guidelines/mechanisms for decision-making.

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
194	Belum terdapat bukti adanya prosedur operasional standar atas pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan (struktural) dalam perusahaan. There is no evidence of standard operational procedures for measuring and evaluating performance for units and positions (structural) within the company.
195	Belum terdapat bukti adanya sistem pengukuran kinerja didukung dengan aplikasi komputer. There is no evidence yet of a performance measurement system supported by a computer application.
196	Belum terdapat bukti adanya tingkat pencapaian target kinerja Direksi (kontrak manajemen-kolektif). There is no evidence yet of the level of achievement of the performance targets of the Board of Directors (-collective management contract).
197	Belum terdapat bukti adanya Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pencapaian kinerja masing-masing Direktorat berdasarkan target-target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi. There is no evidence yet that the Board of Directors has prepared and submitted to the Board of Commissioners/Supervisory Board the performance achievements of each Directorate based on the targets in the Management Contract as the performance of each Director.
198	Belum terdapat bukti adanya tingkat pencapaian target kinerja anggota Direksi (individu). There is no evidence yet of the level of achievement of the performance targets of members of the Board of Directors (individuals).
199	Belum terdapat bukti adanya Perusahaan menetapkan <i>Information Technology Master Plan</i> (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi dan <i>Information Technology Detail Plan</i> (ITDP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai ITMP. There is no evidence yet that the Company has established an Information Technology Master Plan (ITMP) as a guide in the development of information technology and an Information Technology Detail Plan (ITDP) as a further elaboration of the ITMP, which is used as a reference for implementation of the annual planning according to the ITMP.
200	Belum terdapat bukti adanya arsitektur sistem informasi sebaiknya juga telah mendesain sampai dengan level data dan sistem keamanannya. There is no evidence of the existence of an information system architecture should also have been designed up to the level of data and security systems.
201	Belum terdapat bukti adanya arah penggunaan dan pengadaan teknologi informasi yang digunakan telah direncanakan dengan memperkirakan trend perkembangan teknologi. There is no evidence that the direction of use and procurement of information technology used has been planned by predicting the trend of technological development.
202	Belum terdapat bukti adanya terdapat kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan pelaporan TI. There is no evidence yet that there is a data management policy, data management procedures, and IT reporting.
203	Belum terdapat bukti adanya penerapan TI di perusahaan sesuai dengan masterplan dan disertai dengan perencanaan TI yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI. There is no evidence yet of the implementation of IT in the company in accordance with the master plan and accompanied by a mature IT plan covering human resources, management organizational structure and level of services provided by IT.
204	Belum terdapat bukti adanya audit atas TI. There is no evidence of an IT audit yet.
205	Belum terdapat bukti adanya tingkat kesesuaian penerapan TI saat ini dengan kebutuhan perusahaan. There is no evidence yet of the degree of suitability of current IT implementations with company needs.
206	Belum terdapat bukti adanya laporan pelaksanaan sistem TI secara tertulis terkait dengan pelaksanaan IT <i>Master Plan</i> dan ITDP serta disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik diminta ataupun tidak diminta. There is no evidence yet of a written IT system implementation report related to the implementation of the IT Master Plan and ITDP and submitted to the Board of Commissioners/Supervisory Board, whether requested or not.
207	Belum terdapat bukti adanya laporan kinerja teknologi yang disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (termasuk hasil audit TI). There is no evidence yet of a technology performance report submitted to the Board of Commissioners/Supervisory Board (including IT audit results).
208	Telah terdapat bukti adanya Perusahaan memiliki kebijakan mengenai standar pelayanan minimal. Namun masih implisit dalam kontrak There is evidence that the Company has a policy regarding minimum service standards. But still implicit in the contract
209	Telah terdapat bukti adanya perusahaan memiliki SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun masih implisit dalam kontrak There is evidence that the company has Customer Service SOPs and Minimum Service Standards (SPM). But still implicit in the contract
210	Telah terdapat bukti adanya SOP dan SPM diinformasikan secara terbuka. Namun masih implisit dalam kontrak There is evidence that SOP and SPM have been openly informed. But still implicit in the contract
211	Telah terdapat bukti adanya Indikator SPM tercapai. Namun masih implisit dalam kontrak There is evidence that the MSS Indicators have been achieved. But still implicit in the contract
212	Belum terdapat bukti adanya tingkat kualitas yang memadai mengenai kemudahan layanan dan <i>fairness</i> . There is no evidence yet of an adequate level of quality regarding ease of service and fairness.

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
213	Belum terdapat bukti adanya sistem pengendalian mutu diterapkan secara konsisten, ditandai dengan keluhan pelanggan atas mutu produk/jasa menurun. There is no evidence that a quality control system has been implemented consistently, marked by customer complaints about the declining quality of products/services.
214	Belum terdapat bukti adanya sistem mutu dievaluasi dan diaudit secara berkala. There is no evidence that the quality system is regularly evaluated and audited.
215	Belum terdapat bukti adanya pedoman/kebijakan pengadaan dipublikasikan/dapat diakses pemasok/calon pemasok. There is no evidence yet that procurement guidelines/policies are published/accessible to suppliers/potential suppliers.
216	Telah terdapat bukti adanya pengadaan barang dan jasa perusahaan terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. Namun masih penunjukan langsung There has been evidence of the procurement of goods and services by open companies for goods/services providers who meet the requirements and is carried out through fair competition among goods/services providers who are equal and meet certain requirements/criteria based on clear and transparent terms and procedures. But still a direct appointment
217	Belum terdapat bukti adanya perusahaan memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia. There is no evidence that companies have self-estimated prices (HPS) that are calculated based on expertise and based on accountable data. The total HPS value is open and not confidential.
218	Belum terdapat bukti adanya tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan auditor internal mengenai pengadaan yang merugikan perusahaan dan tidak terdapat sanggahan pemilihan penyedia barang/jasa perusahaan. There is no evidence yet that there are no audit findings, both by external auditors and internal auditors regarding procurement that is detrimental to the company and there is no objection to the selection of the company's goods/services provider.
219	Belum terdapat bukti adanya tingkat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. There is no evidence of a level of transparency in the procurement of goods and services.
220	Telah terdapat bukti adanya perusahaan melaksanakan kebijakan/program pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Namun belum ada realisasinya. There is evidence that the company implements the education and training policies/programs in accordance with the established work plans. But there is no realization yet.
221	Belum terdapat bukti adanya evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan. There is no evidence of post-education and training evaluation.
222	Belum terdapat bukti adanya tingkat keadilan yang memadai atas kesempatan pendidikan dan pelatihan karyawan. There is no evidence yet of an adequate level of equity in employee education and training opportunities.
223	Telah terdapat bukti adanya perusahaan memiliki program pengembangan SDM melalui <i>training</i> . Namun belum terdapat untuk <i>coaching dan assignment</i> . There is evidence that the company has an HR development program through training. But there is no coaching and assignment yet.
224	Belum terdapat bukti adanya pelaksanaan program pengembangan berhasil yang ditunjukkan dengan pencapaian target indikator keberhasilan (ada evaluasi dan kriteria keberhasilannya). There is no evidence of a successful development program implementation as indicated by the achievement of success indicator targets (there are evaluations and success criteria).
225	Belum terdapat bukti adanya kebijakan mencakup sisi kinerja individu dan kompetensi karyawan. There is no evidence of policies covering individual performance and employee competencies.
226	Belum terdapat bukti adanya perusahaan memberikan kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi tertentu yang sesuai dengan kompetensi. There is no evidence that the company provides adequate opportunities to occupy certain positions that are in accordance with competence.
227	Telah terdapat bukti adanya kebijakan mengenai: (1) skema remunerasi bagi karyawan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat <i>fair/adil</i> secara internal, kompetitif secara eksternal dan motivatif; (2) pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, misalnya kesertaan pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jaminan Hari Tua, Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Kematian, dll) dalam peraturan perusahaan, namun tidak ada petunjuk teknis. There is evidence of policies regarding: (1) remuneration schemes for employees, in accordance with applicable laws and regulations, which are fair/fair internally, externally competitive and motivating; (2) fulfillment of employee welfare rights in accordance with applicable laws, for example participation in the Worker's Social Security program (Old Age Security, Work Accident Insurance, Death Insurance, etc.) in company regulations, but there are no technical instructions.
228	Telah terdapat bukti adanya kebijakan remunerasi ditinjau secara komprehensif dan disempurnakan secara berkala (periode tertentu) berdasarkan indikator evaluasi yang jelas dalam peraturan perusahaan, namun tidak ada petunjuk teknis. There is evidence that the remuneration policy is comprehensively reviewed and refined periodically (certain periods) based on clear evaluation indicators in company regulations, but there are no technical guidelines.
229	Telah terdapat bukti adanya kebijakan disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan, namun belum terdokumentasi dengan baik There is evidence that the policy has been socialized and understood by all employees, but it has not been well documented
230	Belum terdapat bukti adanya tingkat keadilan dan tingkat kompetitif skema remunerasi yang diberlakukan perusahaan. There is no evidence of a level of fairness and a competitive level of remuneration schemes applied by the company.

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
231	<p>Telah terdapat bukti adanya kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh karyawan, namun belum terdokumentasi dengan baik</p> <p>There is evidence that reward and punishment policies have been socialized and understood by all employees, but they have not been well documented</p>
232	<p>Telah terdapat bukti adanya penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada karyawan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dan konsisten, diberikan saat penilaian karyawan oleh atasan, namun belum terdokumentasi dengan baik</p> <p>There has been evidence of the implementation of rewards and punishments for employees in accordance with established and consistent policies, given during employee appraisal by superiors, but not well documented</p>
233	<p>Belum terdapat bukti adanya perusahaan memiliki kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang berkaitan dengan perencanaan Perusahaan yang dapat berpengaruh signifikan bagi karyawan/pekerja.</p> <p>There is no evidence yet that the company has a policy regarding the disclosure of information relating to the Company's plans that can have a significant effect on employees/workers.</p>
234	<p>Belum terdapat bukti adanya media komunikasi atau sistem informasi yang menyediakan kebijakan perusahaan serta dapat diakses oleh seluruh karyawan.</p> <p>There is no evidence yet of the existence of communication media or information systems that provide company policies and can be accessed by all employees.</p>
235	<p>Belum terdapat bukti adanya pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi tersebut secara konsisten.</p> <p>There is no evidence of consistent implementation of the information disclosure policy.</p>
236	<p>Belum terdapat bukti adanya Direksi menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.</p> <p>There is no evidence yet that the Board of Directors has established accounting policies and prepared financial reports in accordance with Financial Accounting Standards.</p>
237	<p>Belum terdapat bukti adanya Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan diterapkan secara konsisten, tidak ada penyesuaian dan temuan auditor atas pengakuan, pengukuran dan pencatatan serta pembukuan transaksi dan pengungkapan kebijakan akuntansi.</p> <p>There is no evidence that the accounting policies and preparation of financial statements are applied consistently, there are no adjustments and auditor findings on the recognition, measurement and recording as well as the bookkeeping of transactions and disclosure of accounting policies.</p>
238	<p>Belum terdapat bukti adanya rencana kerja perusahaan untuk menerapkan kebijakan manajemen risiko.</p> <p>There is no evidence yet of the existence of a company work plan to implement risk management policies.</p>
239	<p>Telah terdapat bukti adanya Direksi melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko antara lain mencakup identifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan/atau RUPS/Pemilik Modal). Namun belum terdokumentasi dengan baik</p> <p>There is evidence that the Board of Directors has implemented a risk management program (a risk management program includes identifying and managing risks in business processes, projects and proposed company actions that must obtain approval from the Board of Commissioners/Supervisory Board and/or GMS/Capital Owner). However, it has not been well documented</p>
240	<p>Telah terdapat bukti adanya Direksi melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko. Namun belum terdokumentasi dengan baik</p> <p>There is evidence that the Board of Directors has carried out monitoring of the risk management program. However, it has not been well documented</p>
241	<p>Belum terdapat bukti adanya pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan Direksi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulanan.</p> <p>There is no evidence of any follow-up being reported by the Board of Directors to the Board of Commissioners/Supervisory Board periodically at least 3 (three) months.</p>
242	<p>Belum terdapat bukti adanya kajian hukum (<i>legal opinion</i>) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku.</p> <p>There is no evidence of a legal review (<i>legal opinion</i>) on the action plan and the problems that have occurred related to the suitability of the law or the applicable provisions.</p>
243	<p>Belum terdapat bukti adanya kegiatan evaluasi kajian risiko dan legal (<i>risk and legal review</i>) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh perusahaan.</p> <p>There is no evidence that there has been an evaluation of risk and legal reviews of business initiatives, policies and plans for cooperation to be carried out by the company.</p>
244	<p>Belum terdapat bukti adanya kegiatan penyebaran/penerusan data keluhan pelanggan kepada pihak-pihak terkait dalam perusahaan.</p> <p>There is no evidence of dissemination/forwarding customer complaint data to related parties within the company.</p>
245	<p>Belum terdapat bukti adanya pihak-pihak terkait dalam perusahaan mendefinisikan masalah keluhan pelanggan secara tertulis dan pencarian penyebab permasalahan, serta mengimplementasikan tindakan untuk mengatasi penyebab permasalahan dari keluhan pelanggan.</p> <p>There is no evidence that related parties within the company define the problem of customer complaints in writing and find the causes of the problems, as well as implement actions to address the causes of problems from customer complaints.</p>
246	<p>Belum terdapat bukti adanya progres kinerja penanganan hak-hak dan keluhan pelanggan telah ditindaklanjuti/ditangani.</p> <p>There is no evidence of progress in handling rights and customer complaints have been followed up/handled.</p>

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
247	Belum terdapat bukti adanya perusahaan melaksanakan survei secara sistematis dan dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan/konsumen dan hasil indeks survey kepuasan: dilaksanakan secara berkala. There is no evidence yet that the company conducts surveys systematically and periodically to determine the level of customer/ consumer satisfaction and the results of the satisfaction survey index: conducted periodically.
248	Belum terdapat bukti adanya rekomendasi hasil survei pelanggan ditindaklanjuti/ditangani. There is no evidence that the recommendations from the customer survey have been followed up/addressed.
249	Belum terdapat bukti adanya hasil survei pelanggan menunjukkan tingkat kepuasan yang baik. There is no evidence that the results of a customer survey show a good level of satisfaction.
250	Belum terdapat bukti adanya secara berkala perusahaan melakukan <i>assessment</i> pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (quality, cost, delivery, service). There is no evidence that the company regularly conducts supplier assessments based on QCDS (quality, cost, delivery, service) achievements.
251	Belum terdapat bukti adanya ketidakterlambatan pembayaran kepada pemasok sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian/ kontrak. There is no evidence of non-delay in payment to suppliers in accordance with the terms of the agreement/contract.
252	Belum terdapat bukti adanya pelaksanaan survei tingkat kepuasan pemasok terhadap perusahaan. There is no evidence that a supplier satisfaction survey has been conducted for the company.
253	Belum terdapat bukti adanya hasil survei tingkat kepuasan pemasok terhadap <i>fairness</i> dan transparansi pelaksanaan sistem dan prosedur pengadaan. There is no evidence yet of survey results on the level of supplier satisfaction with respect to the fairness and transparency of the implementation of procurement systems and procedures.
254	Belum terdapat bukti adanya perusahaan memiliki kebijakan mengenai metode penilaian untuk mengukur kepuasan karyawan dan melaksanakan survei kepuasan karyawan. There is no evidence that the company has a policy regarding assessment methods for measuring employee satisfaction and conducting employee satisfaction surveys.
255	Belum terdapat bukti adanya pengukuran kepuasan karyawan secara berkala. There is no evidence of measuring employee satisfaction on a regular basis.
256	Belum terdapat bukti adanya hasil survei tingkat kepuasan (indeks kepuasan karyawan). There is no evidence of satisfaction level survey results (employee satisfaction index).
257	Belum terdapat bukti adanya tindakan atau program kerja untuk menindaklanjuti hasil survei kepuasan karyawan. There is no evidence of action or work programs to follow up on the results of the employee satisfaction survey.
258	Belum terdapat bukti adanya mekanisme penanganan keluhan <i>stakeholders</i> (pemasok, karyawan dan lain-lain). There is no evidence of the existence of a stakeholder complaint <i>handling</i> mechanism (suppliers, employees and others).
259	Belum terdapat bukti adanya mekanisme keluhan <i>stakeholders</i> dilaksanakan secara konsisten dan efektif. There is no evidence yet that a stakeholder grievance mechanism has been implemented consistently and effectively.
260	Belum terdapat bukti adanya penyelesaian atas keluhan <i>stakeholders</i> secara tuntas. There is no evidence of a complete resolution of stakeholder complaints.
261	Belum terdapat bukti adanya kebijakan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sebagai penjabaran Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. There is no evidence that there is a policy regarding corporate social and environmental responsibility, as the elaboration of Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
262	Belum terdapat bukti adanya kebijakan tentang pembinaan usaha kecil. There is no evidence of a policy regarding the development of small businesses.
263	Belum terdapat bukti adanya perusahaan memiliki indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pengelolaan PKBL atau CSR atau TJSL. There is no evidence that the company has performance indicators to measure the success of PKBL or CSR or TJSL management.
264	Belum terdapat bukti adanya perusahaan memiliki SOP yang memuat kewajiban perusahaan memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas perusahaan lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. There is no evidence yet that the company has an SOP that contains the company's obligation to ensure that the company's assets and business locations and other facilities comply with applicable laws and regulations regarding environmental preservation, occupational health and safety.
265	Belum terdapat bukti adanya perusahaan memiliki rencana kerja untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan. There is no evidence that the company has a work plan to implement corporate social responsibility.
266	Belum terdapat bukti adanya rencana kerja implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan bukan sebagai distribusi laba. There is no evidence yet that a work plan for implementing corporate social responsibility is budgeted in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and not as a distribution of profits.
267	Belum terdapat bukti adanya pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial sesuai dengan rencana yang ditetapkan. There is no evidence yet of the implementation of social responsibility activities in accordance with the established plans.
268	Belum terdapat bukti adanya perusahaan memiliki rencana kerja untuk melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil. There is no evidence that the company has a work plan to implement a partnership program with small businesses.

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
269	Belum terdapat bukti adanya rencana kerja implementasi program kemitraan dianggarkan dalam RKAP dan bukan sebagai distribusi laba. There is no evidence yet that there is a work plan for the implementation of the partnership program budgeted in the RKAP and not as a distribution of profits.
270	Belum terdapat bukti adanya pelaksanaan kegiatan kemitraan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. There is no evidence of the implementation of partnership activities in accordance with the established work plan.
271	Belum terdapat bukti bahwa tidak terdapat tambahan tunggakan pengembalian dana kemitraan yang dipinjamkan kepada usaha kecil. There is no evidence yet that there are no additional arrears in returning partnership funds loaned to small businesses.
272	Belum terdapat bukti bahwa perusahaan menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. There is no evidence yet that the company has set indicators for successful implementation of corporate social responsibility.
273	Belum terdapat bukti bahwa perusahaan melakukan evaluasi atas pencapaian indikator keberhasilan dengan target-targetnya. There is no evidence yet that the company evaluates the achievement of success indicators against its targets.
274	Belum terdapat bukti adanya sosialisasi kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural perusahaan. There is no evidence of socialization of policies regarding mechanisms to prevent personal gain for Directors and structural officials of the company.
275	Belum terdapat bukti adanya penyampaian laporan kepemilikan Saham pada perusahaan dan perusahaan lainnya kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam Daftar Khusus. There is no evidence yet of submitting reports on share ownership in companies and other companies to the Company (Corporate Secretary) to be recorded in the Special Register.
276	Telah terdapat bukti adanya Direksi membuat laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan, namun tidak disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham. There is evidence that the Board of Directors has prepared quarterly and annual management reports as well as annual reports, but these have not been submitted to the Board of Commissioners/Supervisory Board prior to submission to the Shareholders.
277	Telah terdapat bukti adanya pembuatan laporan manajemen (triwulanan dan tahunan) dan laporan tahunan, namun tidak disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu, yakni sebelum batas waktu penyampaian kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal. There is evidence of management reports (quarterly and annual) and annual reports, but they were not submitted to the Board of Commissioners/Supervisory Board on time, namely before the deadline for submission to Shareholders/Capital Owners.
278	Telah terdapat bukti adanya Direksi membuat laporan manajemen triwulanan yang telah ditandatangani seluruh anggota Direksi serta laporan manajemen tahunan dan laporan tahunan yang ditandatangani seluruh anggota Direksi, dan laporan tahunan kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal, namun tidak disampaikan ke anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas There is evidence that the Board of Directors has prepared quarterly management reports that have been signed by all members of the Board of Directors as well as annual management reports and annual reports signed by all members of the Board of Directors, and annual reports to Shareholders/Capital Owners, but not submitted to members of the Board of Commissioners/Supervisory Board
279	Telah terdapat bukti adanya pembuatan laporan manajemen dilakukan tepat waktu (laporan manajemen triwulanan 1 bulan setelah triwulanan ybs dan laporan manajemen tahunan 2 bulan setelah berakhirnya tahun buku) kepada Pemegang Saham ; dan penyampaian laporan tahunan kepada Pemegang Saham paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. Namun tidak disampaikan ke anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas There is evidence that management reports are prepared on time (quarterly management report 1 month after the relevant quarterly and annual management report 2 months after the end of the financial year) to Shareholders; and submission of annual reports to Shareholders no later than 5 (five) months after the end of the financial year. However, this was not conveyed to members of the Board of Commissioners/Supervisory Board
280	Telah terdapat bukti adanya muatan (<i>content</i>) laporan manajemen triwulanan dan laporan manajemen tahunan lengkap (untuk muatan laporan tahunan parameter tersendiri) minimal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun tidak disampaikan ke anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas There is evidence that the content of the quarterly management report and the complete annual management report (for separate parameter annual reports) is at least in accordance with the applicable regulations. However, this was not conveyed to members of the Board of Commissioners/Supervisory Board
281	Belum terdapat bukti adanya etika rapat pada pedoman/tata tertib Rapat Direksi There is no evidence of meeting ethics in the Board of Directors meeting guidelines/rules of conduct
282	Belum terdapat bukti adanya pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terkait dengan usulan Direksi pada pedoman/tata tertib Rapat Direksi There is no evidence of discussions/reviews of directions/proposals and/or follow-up implementation of the decisions of the Board of Commissioners/Supervisory Board related to the Directors' proposals in the guidelines/rules of Directors' Meetings
283	Belum terdapat bukti adanya rencana Rapat Direksi dan agenda yang dibahas. There is no evidence yet that there is a plan for the Board of Directors meeting and the agenda discussed.
284	Belum terdapat bukti adanya jumlah rapat yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit sekali dalam sebulan. There is no evidence yet that the number of meetings is planned as needed, at least once a month.
285	Belum terdapat bukti adanya penyelenggaraan Rapat Direksi sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKAT. There is no evidence that the Board of Directors meeting has been held in accordance with the plan set out in the RKAT.

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
286	Belum terdapat bukti bahwa SPI mengevaluasi sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi. There is no evidence yet that SPI evaluates the extent to which program goals and objectives and operational activities have been set in line with organizational goals.
287	Belum terdapat bukti bahwa SPI memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada manajemen. There is no evidence yet that SPI provides input on the consistency of the results obtained from activities and programs with the goals and objectives that have been set for management.
288	Belum terdapat bukti bahwa sekretaris perusahaan telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh perusahaan. There is no evidence yet that the Corporate Secretary has met the educational qualifications set by the company.
289	Belum terdapat bukti bahwa pengalaman profesional dan kompetensi yang dimiliki sekretaris perusahaan mencakup hukum, pasar modal, manajemen keuangan, dan komunikasi perusahaan. There is no evidence yet that the professional experience and competence of a corporate secretary includes law, capital markets, financial management and corporate communications.
290	Belum terdapat bukti adanya struktur organisasi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya. There is no evidence yet that there is an organizational structure for the Corporate Secretary in accordance with the needs for carrying out their duties.
291	Belum terdapat bukti adanya uraian tugas Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG; There is no evidence yet of the Corporate Secretary's job description ensuring that the company complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles
292	Belum terdapat bukti adanya uraian tugas Sekretaris Perusahaan There is no evidence yet of the description of the duties of the Corporate Secretary
293	Belum terdapat bukti adanya uraian tugas Sekretaris Perusahaan sebagai penghubung (liaison officer) There is no evidence yet of the Corporate Secretary's job description as a liaison officer
294	Belum terdapat bukti adanya uraian tugas Sekretaris Perusahaan menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan RUPS. There is no evidence yet of the description of the duties of the Corporate Secretary administering and storing company documents, including but not limited to the Register of Shareholders, Special Register and minutes of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Commissioners/Supervisory Board and GMS.
295	Belum terdapat bukti adanya sekretaris perusahaan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan. There is no evidence yet of a Corporate Secretary coordinating the preparation of an accurate and reliable Quarterly and Annual Management Report.
296	Belum terdapat bukti adanya sekretaris perusahaan menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu There is no evidence yet of the Corporate Secretary submitting Quarterly and Annual Management Reports to the Board of Commissioners/Supervisory Board on time
297	Belum terdapat bukti adanya sekretaris perusahaan memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website perusahaan maupun website perusahaan on line dimutakhirkan secara berkala. There is no evidence that the Corporate Secretary updates the information material presented on the company website or on line company website which is updated regularly.
298	Belum terdapat bukti adanya sekretaris perusahaan mengkoordinasikan penyiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk "Proses Release" atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi. There is no evidence yet of the Corporate Secretary coordinating the preparation and provision of materials for the "Release Process" for each statement at the Board of Directors level.
299	Belum terdapat bukti adanya sekretaris perusahaan memberikan pelayanan informasi atas informasi yang dibutuhkan mengenai data atau performance dari perusahaan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Protokol Informasi yang ditetapkan perusahaan dan penyampaian laporan-laporan lainnya yang kepada kepada stakeholders lainnya sesuai peraturan perundang-undangan disampaikan tepat waktu. There is no evidence yet of the Corporate Secretary providing information services for the information needed regarding the data or performance of the company within the limits stipulated in the Information Protocol determined by the company and submission of other reports to other stakeholders in accordance with laws and regulations submitted on time .
300	Belum terdapat bukti adanya sekretaris perusahaan memiliki tingkat ketepatan waktu yang memadai atas penyampaian laporan-laporan dan informasi relevan lainnya yang disampaikan kepada mereka. There is no evidence that the corporate secretary has an adequate level of timeliness in submitting reports and other relevant information submitted to them.
301	Belum terdapat bukti adanya sekretaris Perusahaan mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, RUPS dan Kegiatan lainnya dengan <i>stakeholders</i> a.l <i>press conference</i> , dengar pendapat dengan anggota Dewan, dsb. There is no evidence yet of the Corporate Secretary organizing and coordinating Board of Directors meetings, Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board meetings, GMS and other activities with stakeholders, i.e. press conferences, hearings with members of the Board, etc.

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
302	<p>Belum terdapat bukti adanya Sekretaris Perusahaan menyusun jadwal dan tahapan kegiatan menjelang RUPS/RUPS LB dan Rapat Direksi. There is no evidence that the Corporate Secretary has compiled a schedule and stages of activities ahead of the Extraordinary GMS/GMS and Board of Directors Meetings.</p>
303	<p>Belum terdapat bukti adanya Sekretaris Perusahaan membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Khusus. There is no evidence that the Corporate Secretary has created, maintained and kept the Special List.</p>
304	<p>Telah terdapat bukti adanya Risalah RUPS RJPP memuat sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS, tapi tidak disimpan oleh sekretaris perusahaan There is evidence that the RJPP GMS Minutes contain at least the time, agenda, participants, opinions developed at the GMS, and the GMS resolutions, but not kept by the Corporate Secretary</p>
305	<p>Telah terdapat bukti adanya Risalah RUPS sebagaimana dimaksud wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris, tapi tidak disimpan oleh sekretaris perusahaan There is evidence that the Minutes of the GMS as intended must be signed by the chairman of the GMS and at least 1 (one) Shareholder appointed from and by the GMS participants. The signature is not required if the minutes of the GMS are drawn up with a notarial deed, but are not kept by the Corporate Secretary</p>
306	<p>Telah terdapat bukti adanya Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi. Namun tidak dibuat, dipelihara, dan disimpan oleh sekretaris perusahaan There is evidence that the Minutes of the Board of Directors Meeting must be made for each Board of Directors Meeting. However, it is not created, maintained, and kept by the Corporate Secretary</p>
307	<p>Telah terdapat bukti adanya dalam Risalah Rapat Direksi harus dicantumkan pula pendapat yang berbeda (<i>dissenting comments</i>) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi (bila ada). Namun tidak dibuat, dipelihara, dan disimpan oleh sekretaris perusahaan There has been evidence that the Minutes of Meeting of the Board of Directors must include dissenting comments from what was decided at the Meeting of the Board of Directors (if any). However, it is not created, maintained, and kept by the Corporate Secretary</p>
308	<p>Telah terdapat bukti adanya Risalah Rapat mencantumkan jalannya rapat (dinamika rapat). Namun tidak dibuat, dipelihara, dan disimpan oleh sekretaris perusahaan There has been evidence of the existence of the Minutes of Meeting including the course of the meeting (meeting dynamics). However, it is not created, maintained, and kept by the Corporate Secretary</p>
309	<p>Telah terdapat bukti adanya Risalah rapat memuat hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya. Namun tidak dibuat, dipelihara, dan disimpan oleh sekretaris perusahaan There is evidence that the minutes of the meeting contain the results of an evaluation of the implementation of the decisions of the previous meeting. However, it is not created, maintained, and kept by the Corporate Secretary</p>
310	<p>Telah terdapat bukti adanya Risalah rapat memuat keputusan rapat sebelumnya. Namun tidak dibuat, dipelihara, dan disimpan oleh sekretaris perusahaan There is evidence that the minutes of the meeting contained the decisions of the previous meeting. However, it is not created, maintained, and kept by the Corporate Secretary</p>
311	<p>Telah terdapat bukti adanya Setiap anggota Direksi menerima salinan risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut. Namun tidak dibuat, dipelihara, dan disimpan oleh sekretaris perusahaan There is evidence that each member of the Board of Directors receives a copy of the minutes of the Board of Directors meeting, regardless of whether the member of the Board of Directors concerned is present or absent at the Board of Directors meeting. However, it is not created, maintained, and kept by the Corporate Secretary</p>
312	<p>Telah terdapat bukti adanya Validasi risalah rapat sesuai dengan tata tertib yang ditetapkan. Namun tidak dibuat, dipelihara, dan disimpan oleh sekretaris perusahaan There has been evidence of validation of the minutes of the meeting in accordance with the stipulated regulations. However, it is not created, maintained, and kept by the Corporate Secretary</p>
313	<p>Telah terdapat bukti adanya Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan di perusahaan. Namun tidak dibuat, dipelihara, dan disimpan oleh sekretaris perusahaan There is evidence that the original minutes of each meeting of the Board of Directors must be kept in the company. However, it is not created, maintained, and kept by the Corporate Secretary</p>
314	<p>Telah terdapat bukti adanya Risalah asli dari setiap Rapat Direksi dapat diakses oleh setiap anggota Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. Namun tidak dibuat, dipelihara, dan disimpan oleh sekretaris perusahaan There is evidence that the original minutes of each meeting of the Board of Directors can be accessed by every member of the Board of Commissioners/Supervisory Board and the Board of Directors. However, it is not created, maintained, and kept by the corporate secretary</p>
315	<p>Belum terdapat bukti adanya rencana kerja mengenai program pengenalan perusahaan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang baru diangkat There is no evidence of a work plan regarding the company introduction program for newly appointed members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners/Supervisory Board</p>

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
316	<p>Belum terdapat bukti adanya Program pengenalan yang minimal meliputi: (1) pelaksanaan prinsip-prinsip GCG; (2) gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; (3) keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; (4) keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.</p> <p>There is no evidence yet of an induction program that at a minimum includes: (1) implementation of GCG principles; (2) description of SOEs in terms of objectives, nature and scope of activities, financial performance and operations, strategy, short and long term business plans, competitive position, risk and other strategic issues; (3) information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee; (4) information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners/Supervisory Board and the Board of Directors and matters that are not permitted.</p>
317	<p>Belum terdapat bukti adanya laporan sekretaris perusahaan yang berkaitan dengan tugasnya secara berkala, dan apabila diminta dapat memberikannya kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.</p> <p>There is no evidence that the Corporate Secretary reports that are related to his duties on a regular basis, and if requested he can provide them to the Board of Commissioners/Supervisory Board.</p>
318	<p>Belum terdapat bukti adanya laporan sekretaris perusahaan terkait laporan/hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru.</p> <p>There is no evidence yet of the Corporate Secretary's report regarding the report/result of the review of the new laws and regulations.</p>
319	<p>Belum terdapat bukti adanya laporan sekretaris perusahaan terkait laporan/hasil telaah tingkat kepatuhan perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>There is no evidence yet of the Corporate Secretary's report regarding the report/result of the review of the company's level of compliance with the applicable laws and regulations.</p>
320	<p>Belum terdapat bukti adanya evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan.</p> <p>There is no evidence of an evaluation of the implementation of the duties of the Corporate Secretary.</p>
321	<p>Belum terdapat bukti adanya capaian program kerja pelaksanaan tugas Sekretaris perusahaan.</p> <p>There is no evidence of the achievement of the work program for the implementation of the duties of the Corporate Secretary.</p>
322	<p>Belum terdapat bukti adanya kebijakan tentang pengendalian informasi perusahaan.</p> <p>There is no evidence yet of the existence of a policy on controlling company information.</p>
323	<p>Belum terdapat bukti adanya informasi apa saja yang dikategorikan informasi publik dan informasi rahasia perusahaan.</p> <p>There is no evidence of any information that is categorized as public information and company confidential information.</p>
324	<p>Belum terdapat bukti adanya pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik;</p> <p>There is no evidence yet that there are parties who can provide and/or convey public information;</p>
325	<p>Belum terdapat bukti adanya prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada stakeholders.</p> <p>There is no evidence yet that there is a procedure for disclosing company information to stakeholders.</p>
326	<p>Telah terdapat tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan, namun tingkat pencapaian kepatuhan atas kebijakan informasi hanya 75,45%</p> <p>There has been a level of company compliance with company information control policies, but the level of achievement of compliance with information policies is only 75.45%.</p>
327	<p>Belum terdapat bukti adanya kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhiran <i>website</i>.</p> <p>There is no evidence of a policy regarding website management and updating.</p>
328	<p>Belum terdapat bukti adanya Pengelolaan <i>website</i> sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan secara konsisten.</p> <p>There is no evidence that website management is consistent with established policies.</p>
329	<p>Belum Terdapat bukti adanya kebijakan yang dipublikasikan, antara lain: Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code), Boards Manual, dan Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.</p> <p>There is no evidence that policies have been published, including: Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG Code), Boards Manual, and Code of Conduct, and Corporate Gratuity Control Program.</p>
330	<p>Belum Terdapat bukti adanya informasi penting (selain Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) yang dipublikasikan.</p> <p>There is no evidence that important information (other than the Annual Report and Financial Report) has been published.</p>
331	<p>Telah terdapat bukti adanya sosial media untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan, namun belum terdapat majalah internal atau buletin untuk mengkomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan</p> <p>There has been evidence of the existence of social media to communicate important company information policies, but there is no internal magazine or bulletin to communicate important company information policies.</p>
332	<p>Telah terdapat bukti adanya <i>website</i> perusahaan, namun belum terdapat Informasi yang disediakan dalam <i>website</i> Perusahaan dan <i>bumn.go.id</i> dimutakhirkan secara berkala.</p> <p>There is evidence of a company website, but the information provided on the company's website and <i>bumn.go.id</i> is not updated regularly.</p>
333	<p>Belum terdapat bukti adanya Informasi yang dimuat dalam <i>website</i> perusahaan mudah diakses dan diunduh (<i>download</i>).</p> <p>There is no evidence that the information contained in the company's website is easy to access and download.</p>
334	<p>Belum Terdapat bukti adanya Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara berdampingan.</p> <p>There is no evidence that the annual report is presented in Indonesian and English side by side.</p>
335	<p>Belum Terdapat bukti adanya Laporan tahunan dicetak pada kertas yang berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas.</p> <p>There is no evidence that the annual report was printed on light-colored paper to make it easy to read and clear.</p>

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
336	<p>Belum Terdapat bukti adanya Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas, yakni terdapat tahun Laporan Tahunan dan identitas perusahaan berupa nama perusahaan (bukan nama <i>Group</i>) di halaman depan (sampul), di samping (yang dicetak dengan huruf yang jelas, mudah terbaca), halaman belakang (sampul) dan identitas perusahaan di setiap halaman.</p> <p>There is no evidence that the annual report clearly states the company's identity, namely the year of the Annual Report and the company's identity in the form of the company name (not the group name) on the front page (cover), on the side (which is printed in clear, easy-to-read letters), pages back (cover) and company identity on each page.</p>
337	<p>Belum terdapat bukti adanya Laporan Tahunan disajikan dalam <i>website</i> Perusahaan dan dapat diunduh. Yang dimaksud dengan <i>website</i> Perusahaan adalah <i>website</i> yang dimiliki sendiri atau oleh induk, bukan <i>website</i> pihak lain (contoh: tercantum di <i>website</i> Kementerian Negara perusahaan atau <i>website</i> BEI).</p> <p>There is no evidence that the Annual Report is presented on the Company's website and can be downloaded. What is meant by a company website is a website that is owned by itself or by the parent, not another party's website (for example: listed on the company's State Ministry website or the IDX website).</p>
338	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Perusahaan menyajikan informasi keuangan (laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan) dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. The Company presents financial information (statement of financial position, statement of comprehensive income, financial ratios in general and relevant to the company's industry) in comparative form for 5 (five) fiscal years.</p>
339	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan wajib memuat informasi harga Saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah Saham yang diperdagangkan (dicatatkan) untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada). Harga Saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan Saham, dividen Saham, dan Saham bonus dalam bentuk grafik dan tabel (NA jika <i>listed company</i> hanya menerbitkan obligasi atau <i>non listed company</i>).</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report which must contain information on the highest, lowest and closing share prices, as well as the number of shares traded (listed) for each quarter in the last 2 (two) financial years (if any). The share price prior to the last change in capital must be adjusted in the event that it occurs, among others, due to stock splits, share dividends and bonus shares in the form of graphs and tables (NA if a listed company only issues bonds or a non-listed company).</p>
340	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan wajib memuat informasi jumlah obligasi atau obligasi konvertibel yang diterbitkan yang masih beredar, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo dalam 2 (dua) tahun buku terakhir: (1) Jumlah obligasi/obligasi konversi yang beredar; (2) Tingkat bunga; (3) Tanggal jatuh tempo; (4) Peringkat obligasi (NA jika tidak menerbitkan obligasi/non listed company).</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report which must contain information on the number of outstanding bonds or convertible bonds issued, interest rates and maturity dates in the last 2 (two) financial years: (1) Total outstanding convertible bonds/bonds; (2) interest rate; (3) Due date; (4) Bond rating (NA if not issuing bonds/non-listed company).</p>
341	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memuat hal-hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi; 3. Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; 4. Perubahan komposisi dewan komisaris/Dewan Pengawas (jika ada). <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. The report of the Board of Commissioners/Supervisory Board contains the following matters:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assessment of the performance of the directors regarding company management; 2. Views on the company's business prospects prepared by the directors; 3. Committees under the supervision of the Board of Commissioners/Supervisory Board; 4. Changes in the composition of the board of commissioners/Supervisory Board (if any).
342	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Laporan Direksi memuat hal-hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan; 2. Prospek usaha; 3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan; 4. Perubahan komposisi direksi (jika ada). <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. The Board of Directors' report contains the following matters:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The company's performance includes strategic policies, comparison between the results achieved and the target, and the constraints faced by the company; 2. Business prospects; 3. Implementation of Good Corporate Governance that has been implemented by the company; 4. Changes in the composition of the board of directors (if any).

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
343	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris/dewan pengawas memuat hal-hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; 2. Pernyataan bahwa direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; 3. Ditandatangani seluruh anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan anggota direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari ybs dalam hal terdapat anggota dewan komisaris/dewan pengawas atau direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Signatures of members of the board of directors and members of the board of commissioners/supervisory board contain the following matters:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The signature is written on a separate sheet; 2. Statement that the board of directors and board of commissioners/supervisory board are fully responsible for the accuracy of the contents of the annual report; 3. Signed by all members of the board of commissioners/supervisory board and members of the board of directors stating their names and positions; 4. A written explanation in a separate letter from the concerned member of the board of commissioners/supervisory board or directors who does not sign the annual report, or a written explanation in a separate letter from another member in the event that there is no written explanation from the person concerned.
344	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Nama dan alamat perusahaan, antara lain mencakup informasi tentang nama dan alamat, kode pos, no. Telp & atau no. <i>Fax, email, dan website</i>.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. The name and address of the company, including but not limited to information about the name and address, zip code, no. Tel & or no. Fax, e-mail, and website.</p>
345	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Riwayat singkat perusahaan mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama perusahaan jika ada.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. The brief history of the company includes, among others: date/year of establishment, name and change of company name, if any.</p>
346	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Bidang usaha meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Business fields include the types of products and or services produced.</p>
347	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Struktur Organisasi dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report of the Organizational Structure in the form of a chart, including names and positions.</p>
348	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Visi dan Misi Perusahaan yang mencakup: (a) Penjelasan tentang visi perusahaan; (b) Penjelasan tentang misi perusahaan.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the Company's Vision and Mission annual report which includes: (a) An explanation of the company's vision; (b) Explanation of the company's mission.</p>
349	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas (umur, pendidikan dan pengalaman kerja).</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report of the name, position and brief curriculum vitae of members of the Board of Commissioners/Supervisory Board (age, education and work experience).</p>
350	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota direksi (umur, pendidikan, dan pengalaman kerja).</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report of the name, position and brief curriculum vitae of members of the board of directors (age, education and work experience).</p>
351	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan). Informasi paling sedikit memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan; 4. Adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan; 5. Biaya yang telah dikeluarkan. <p>There is no evidence of disclosure in the annual report on the number of employees (comparative 2 years) and the description of competency development (eg aspects of employee education and training). Information that contains at least includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Number of employees for each organizational level; 2. Number of employees for each level of education; 3. Employee training that has been and will be carried out; 4. There is equal opportunity for all employees; 5. Costs that have been incurred.

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
352	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Komposisi Pemegang Saham mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih Saham; 2. Direktur dan komisaris yang memiliki Saham (Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan Sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya); 3. Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan Saham masing-masing kurang dari 5%. <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Composition of Shareholders includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of shareholder who owns 5% or more shares; 2. Directors and commissioners who own Shares (the Board of Directors and the Board of Commissioners/Supervisory Board must report to the company regarding their and/or their family's share ownership in the company concerned and other companies, including any changes thereto); 3. Public Shareholders with share ownership of less than 5% each.
353	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Daftar Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Asosiasi antara lain memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi; 2. % Kepemilikan Saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha anak perusahaan atau perusahaan asosiasi; 4. Keterangan status operasi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). <p>There is no evidence of disclosure in the annual report of the List of Subsidiaries and or Associated Companies, including information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of Subsidiary/Associated Company; 2. % Share Ownership; 3. Information on the line of business of the subsidiary or associated company; 4. Information on the operating status of the subsidiary or associated company (already operating or not yet operating).
354	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Kronologis pencatatan Saham, antara lain memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kronologis pencatatan Saham; 2. Jenis tindakan perusahaan (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah Saham; 3. Perubahan jumlah Saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; 4. Nama bursa dimana Saham perusahaan dicatatkan (NA bagi <i>listed company</i> yang hanya menerbitkan obligasi atau <i>non listed company</i>). <p>There is no evidence of disclosure in the annual report Chronology of listing of Shares, including information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chronology of Share listing; 2. Types of corporate actions that cause changes in the number of shares; 3. Changes in the number of shares from the beginning of listing to the end of the financial year; 4. Name of the stock exchange where the company's shares are listed (NA for listed companies that only issue bonds or non-listed companies).
355	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Kronologis pencatatan Efek lainnya mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kronologis pencatatan efek lainnya; 2. Jenis tindakan perusahaan (<i>corporate action</i>) yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya; 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku; 4. Nama Bursa dimana efek lainnya perusahaan dicatatkan; 5. Peringkat efek (NA <i>listed company</i> yang hanya menerbitkan Saham atau <i>non listed company</i>). <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Chronology of other securities listings includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chronology of listing of other securities; 2. Types of corporate actions that cause changes in the number of other securities; 3. Changes in the number of other securities from the beginning of listing to the end of the financial year; 4. Name of the Exchange where the company's other securities are listed; 5. Securities rating (NA listed company that only issues shares or non listed company).
356	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat BAE; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Names and addresses of capital market supporting institutions and or professions, including among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and address of BAE; 2. Name and address of the Public Accounting Firm; 3. Name and address of the securities rating company.
357	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Akuntan Perseroan memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa periode audit akuntan publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan; 2. Berapa periode audit kantor akuntan publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan; (1) Besarnya fee audit; (2) Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit. <p>There is no evidence of disclosure in the annual report of the Company's Accountant which includes, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. How many audit periods has the public accountant audited the company's financial statements; 2. How many audit periods has the public accounting firm audited the company's financial statements; (1) The amount of the audit fee; (2) Other services provided by accountants other than financial audit services.

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
358	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa berlaku 2. Nama penghargaan/sertifikasi (berskala nasional dan internasional); 3. Tahun perolehan; 4. Badan pemberi penghargaan/sertifikasi; <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Awards and certifications received by companies, both on a national and international scale, include among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Validity period 2. Name of award/certification (national and international scale); 3. Year of acquisition; 4. Award/certification agency;
359	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada).</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report of the names and addresses of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any).</p>
360	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Tinjauan operasi per segmen usaha, memuat uraian mengenai: (1) produksi; (2) penjualan/pendapatan usaha; (3) profitabilitas; (4) Peningkatan/penurunan kapasitas produksi untuk masing-masing segmen usaha (NA untuk perusahaan yang tidak mempunyai segmen).</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report Operational review per business segment, including descriptions of: (1) production; (2) sales/business income; (3) profitability; (4) Increase/decrease in production capacity for each business segment (NA for companies that do not have segments).</p>
361	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Uraian atas Kinerja Keuangan Perusahaan yakni analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: (1) aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva; (2) kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban; (3) penjualan/pendapatan usaha; (4) beban usaha; (5) laba/rugi bersih.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Description of the Company's Financial Performance, namely an analysis of financial performance which includes a comparison between the financial performance of the year in question and that of the previous year (in the form of narration and tables), including regarding: (1) current assets, non-current assets, and total assets; (2) current liabilities, non-current liabilities, and total liabilities; (3) sales/business income; (4) operating expenses; (5) net profit/loss.</p>
362	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan antara lain memuat penjelasan tentang: (1) kemampuan membayar hutang; (2) tingkat kolektibilitas piutang.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Discussion and analysis of the ability to pay debts and the level of collectibility of the Company's receivables includes explanations regarding: (1) ability to pay debts; (2) the level of receivables collectibility.</p>
363	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>), kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>), dan tingkat likuiditas perusahaan (<i>liquidity</i>) antara lain penjelasan atas: (1) struktur modal (<i>capital structure</i>); (2) kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); (3) tingkat likuiditas perusahaan (<i>liquidity</i>).</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Discussion on capital structure, management policies on capital structure (<i>capital structure policies</i>), and the level of company liquidity (<i>liquidity</i>) includes explanations on: (1) capital structure; (2) management policies on capital structure (<i>capital structure policies</i>); (3) the level of company liquidity (<i>liquidity</i>).</p>
364	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal memuat antara lain penjelasan tentang: (1) tujuan dari ikatan tersebut; (2) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; (3) mata uang yang menjadi denominasi; (4) langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. The discussion regarding material commitments for capital goods investment includes among other things an explanation of: (1) the purpose of the commitments; (2) the source of funds expected to fulfill these commitments; (3) the currency that is denominated; (4) the steps the company plans to take to protect against risks from related foreign currency positions.</p>
365	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Discussion and analysis of reported financial information containing extraordinary and rare events.</p>
366	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Description of the substantial components of other income and expenses, to be able to determine the company's operating results.</p>
367	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. If the financial statements reveal a material increase or decrease in sales or net income, then it must be accompanied by a discussion of the extent to which these changes can be related, among others, to the amount of goods or services sold, and or the existence of products or new services.</p>

No	Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
368	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Discussion of the impact of price changes on the company's sales or net income and operating profit for 2 (two) years or since the company started its business, if it has only started its business for less than 2 (two) years.</p>
369	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Material information and facts that occurred after the date of the accountant's report, including the impact on performance and business risks in the future.</p>
370	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Uraian tentang prospek usaha perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Description of the company's business prospects in relation to industry, the general economy and international markets and can be accompanied by quantitative supporting data if there is a credible data source.</p>
371	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Description of the marketing aspects of the company's products and services, including but not limited to market share.</p>
372	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per Saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir, memuat uraian mengenai: (1) besarnya dividen untuk masing-masing tahun; (2) besarnya <i>Payout Ratio</i>.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. The statement regarding dividend policy and the date and amount of cash dividends per share and the amount of dividends per year declared or paid during the last 2 (two) financial years, contains a description of: (1) the amount of dividends for each each year; (2) the amount of Payout Ratio.</p>
373	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, memuat uraian mengenai: (1) total perolehan dana; (2) rencana penggunaan dana; (3) rincian penggunaan dana; (4) saldo; (5) perubahan penggunaan dana (jika ada)--(NA untuk non <i>listed company</i>).</p> <p>There is no evidence yet of disclosure in the annual report on the realization of the use of proceeds from a public offering, containing a description of: (1) total proceeds from the public offering; (2) plans for using the funds; (3) details on the use of funds; (4) balance; (5) changes in the use of funds (if any)--(NA for non-listed companies).</p>
374	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Material information, including regarding investments, expansions, divestitures, acquisitions, debt/capital restructuring, transactions involving conflicts of interest and the nature of transactions with affiliated parties.</p>
375	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Description of changes in laws and regulations that have a significant effect on the company and their impact on the financial statements.</p>
376	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. A description of the changes in accounting policies, the reasons for them and their impact on the financial statements.</p>
377	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Uraian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memuat antara lain: (1). Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (3) Frekuensi pertemuan; (4)Tingkat kehadiran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dalam pertemuan.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. The description of the Board of Commissioners/Supervisory Board contains, among others: (1). Description of the implementation of the duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board; (2) Disclosure of the procedure for determining and the amount of remuneration for members of the Board of Commissioners/Supervisory Board; (3) Meeting frequency; (4) The level of attendance of the Board of Commissioners/Supervisory Board in meetings.</p>
378	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Uraian Direksi memuat antara lain: (1) Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; (2) Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota direksi, yang meliputi gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari perusahaan yang bersangkutan dan anak perusahaan/ perusahaan patungan perusahaan yang bersangkutan; (3) Frekuensi pertemuan; (4) tingkat kehadiran anggota direksi dalam pertemuan; (5) Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. The description of the Board of Directors includes, among others: (1) The scope of work and responsibilities of each member of the Board of Directors; (2) Disclosure of the procedure for determining and the amount of remuneration for members of the board of directors, which includes salaries, facilities and/or other allowances received from the company concerned and its subsidiaries/joint venture companies concerned; (3) Meeting frequency; (4) the level of attendance of members of the board of directors in meetings; (5) Training programs in order to improve the competency of the directors.</p>

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
379	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Komite Audit mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite audit; (2) Uraian tugas dan tanggung jawab; (3) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit; (4) Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit; (5) Independensi anggota komite audit</p> <p>There is no evidence of any disclosure in the annual report of the Audit Committee including among others: (1) Name, position and brief curriculum vitae of members of the audit committee; (2) Description of duties and responsibilities; (3) Frequency of meetings and attendance of the audit committee; (4) Brief report on the implementation of audit committee activities; (5) Independence of audit committee members</p>
380	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Komite nominasi dan remunerasi mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan remunerasi; (2) Independensi anggota komite nominasi dan remunerasi; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan remunerasi.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report of the nomination and remuneration Committee which includes, among others: (1) Name, position and brief curriculum vitae of members of the nomination and remuneration committee; (2) Independence of nomination and remuneration committee members; (3) Description of duties and responsibilities; (4) Description of the implementation of nomination and remuneration committee activities; (5) Frequency of meetings and attendance of the nomination and remuneration committee.</p>
381	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Komite manajemen risiko mencakup antara lain: (1) Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite pemantauan risiko; (2) Independensi anggota komite pemantauan risiko; (3) Uraian tugas dan tanggung jawab; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan komite pemantauan risiko; (5) Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite pemantauan risiko.</p> <p>There is no evidence of any disclosure in the annual report of the risk management committee which includes among others: (1) Name, position and brief curriculum vitae of the members of the risk monitoring committee; (2) Independence of risk monitoring committee members; (3) Description of duties and responsibilities; (4) Description of the implementation of risk monitoring committee activities; (5) Meeting frequency and attendance level of the risk monitoring committee.</p>
382	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan mencakup antara lain: (1) Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; (2) Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. The description of the duties and functions of the Corporate Secretary includes, among others: (1) Name and brief position history of the corporate secretary; (2) Description of the implementation of the duties of the Corporate Secretary.</p>
383	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern (internal audit and control).</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Description regarding the implementation of internal audit and control.</p>
384	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Uraian tentang Unit Audit internal mencakup antara lain: (1) Informasi tentang keberadaan Unit Audit Internal; (2) Penjelasan tentang Piagam Audit Internal; (3) Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal; (4) Uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal; (5) Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. The description of the Internal Audit Unit includes, among others: (1) Information about the whereabouts of the Internal Audit Unit; (2) Explanation of the Internal Audit Charter; (3) Explanation of the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit; (4) Description of the implementation of the activities of the Internal Audit Unit; (5) Name and brief curriculum vitae of the head of the Internal Audit Unit.</p>
385	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan mencakup antara lain: (1) Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah); (2) Upaya untuk mengelola risiko tersebut.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. The description of the company's risk management includes, among others: (1) An explanation of the risks faced by the company (for example risks caused by fluctuations in exchange rates or interest rates, business competition, supply of raw materials, provisions of other countries or international regulations, and government policies); (2) Efforts to manage these risks.</p>
386	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen mencakup antara lain informasi tentang: (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. A description of the activities and costs incurred related to corporate social responsibility, especially regarding the company's commitment to consumer protection, includes among others information regarding: (1) Establishment of a Consumer Complaint Center; (2) Service improvement program for consumers; (3) incurred costs.</p>
387	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "community development program" yang telah dilakukan, mencakup antara lain informasi tentang: (1) Mitra Usaha binaan Perusahaan; (2) Program pengembangan pendidikan; (3) Program perbaikan kesehatan; (4) Program pengembangan seni budaya; (5) Biaya yang telah dikeluarkan.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. A description of the activities and costs incurred related to corporate social responsibility, especially regarding the "community development program" that has been carried out, includes among others information about: (1) the Company's fostered Business Partners; (2) Educational development program; (3) health improvement program; (4) Cultural arts development program; (5) incurred expenses.</p>
388	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan, mencakup antara lain informasi tentang (1) Aktivitas pelestarian lingkungan (2) Aktivitas pengelolaan lingkungan; (3) sertifikasi atas pengelolaan lingkungan; (4) Biaya yang telah dikeluarkan.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. A description of activities and costs incurred related to corporate social responsibility, especially environmental activities, includes among others information about (1) environmental conservation activities (2) environmental management activities; (3) environmental management certification; (4) incurred Costs.</p>

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2022 GCG Implementation Assessment Recommendations for the 2022 Fiscal Year
389	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, Direksi dan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang sedang menjabat dan klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan perusahaan, mencakup antara lain: (1) pokok perkara/gugatan; (2) kasus posisi; (2) status penyelesaian perkara/gugatan; (4) pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Important cases being faced by the company, the Board of Directors and members of the Board of Commissioners/Supervisory Board in office and material claims filed by and/or against the company, and cases in court or arbitral bodies which are involving companies, including among others: (1) main case/lawsuit; (2) position case; (2) case/lawsuit settlement status; (4) the impact on the company's financial condition.</p>
390	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan akses informasi dan data perusahaan, yaitu uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui <i>website</i>, media massa, <i>mailing list</i>, <i>bulletin</i> dsb.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. Access to company information and data, namely a description of the availability of access to company information and data to the public, for example through websites, mass media, mailing lists, bulletins, etc.</p>
391	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Etika Perusahaan memuat uraian antara lain: (1) Keberadaan Pedoman Perilaku ; (2) Isi Pedoman Perilaku; (3) penyebaran Pedoman Perilaku kepada karyawan dan upaya penegakannya; (4) pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report of the Company's Ethics annual report, which includes descriptions including: (1) Existence of a Code of Conduct; (2) Contents of the Code of Conduct; (3) distribution of the Code of Conduct to employees and efforts to enforce it; (4) a statement regarding the company's corporate culture.</p>
392	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan Bapepam.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report of the Board of Directors Statement regarding the Board of Directors' Responsibility for Financial Statements in accordance with Bapepam regulations.</p>
393	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Opini akuntan atas laporan keuangan adalah wajar tanpa pengecualian (WTP).</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. The accountant's opinion on the financial statements is unqualified (WTP).</p>
394	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Deskripsi Auditor Independen di Opini antara lain: (1) Nama & tanda tangan; (2) Tanggal Laporan Audit; (3) No. izin KAP (jika ada).</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report Description of the Independent Auditor in Opinion, including: (1) Name & signature; (2) Date of Audit Report; (3) No. KAP permit (if any).</p>
395	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Laporan keuangan yang lengkap, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta disajikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak usaha dimulai bagi perusahaan yang memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun buku.</p> <p>There is no evidence yet of disclosure in the annual report Complete financial reports, namely: balance sheet, income statement, statement of changes in equity, cash flow statement, and notes to financial statements and presented for the last 2 (two) years or since the business started for companies that start their business less than 2 (two) financial years.</p>
396	<p>Belum terdapat bukti adanya pengungkapan dalam laporan tahunan Penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan Bapepam & LK dan/atau institusi yang berwenang.</p> <p>There is no evidence of disclosure in the annual report. The presentation of financial statements is in accordance with the provisions of the Guidelines for the Presentation of Financial Statements issued by Bapepam & LK and/or authorized institutions.</p>
397	<p>Belum terdapat bukti adanya Perusahaan menang dalam <i>Annual Report Award (ARA)</i>.</p> <p>There is no evidence that the Company has won the Annual Report Award (ARA).</p>
398	<p>Belum terdapat bukti adanya Perusahaan berpartisipasi dan memperoleh penghargaan dalam CSR (<i>Sustainability Reporting Award</i>) dan sejenisnya.</p> <p>There is no evidence that the Company participated in and won awards in the CSR (Sustainability Reporting Award) and the like.</p>
399	<p>Belum terdapat bukti adanya Penghargaan lain di bidang publikasi dan keterbukaan informasi.</p> <p>There is no evidence of other awards in the field of publication and information disclosure.</p>

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

Struktur tata kelola perusahaan di PME terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sesuai ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Struktur GCG Perusahaan dibentuk untuk mengakomodasi implementasi GCG secara sistematis dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Seluruh organ tata kelola perusahaan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan ketentuan lainnya untuk kepentingan Perusahaan.

The corporate governance structure at PME consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors in accordance with the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007. The Company's GCG structure was formed to accommodate the implementation of GCG in a systematic manner with clear division of roles and responsibilities. All corporate governance organs carry out their functions in accordance with statutory provisions, the Articles of Association and other provisions for the benefit of the Company.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan lembaga tertinggi Perusahaan, sebagai wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The General Meeting of Shareholders (GMS), is the highest institution of the Company, as a forum for shareholders to make important decisions whose authority is not given to the Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations.

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS yang diadakan pada tanggal 23 Juni 2022 dengan dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham. Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun agenda dan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 23 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Throughout 2022, the Company held 1 (one) time the GMS which held on June 23, 2022 attended by the entire Board of Commissioners, Directors and Shareholders. The agenda and resolution of the 2021 Annual GMS for the 23 June 2022 are as follows:

1. RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022

1. The 2021 Fiscal Year Annual GMS which was held on June 23, 2022

RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 23 Juni 2022 Annual GMS for the 2021 Fiscal Year on June 23, 2022

Mata Acara Rapat ke-1:

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*fit and proper test*) kepada Direktur dan Komisaris.

Hasil keputusan:

Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*fit and proper test*) kepada anggota Direktur dan Komisaris Perseroan yang menjabat atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang:

1. Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk laporan keuangan) Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 23 Juni 2022 Annual GMS for the 2021 Fiscal Year on June 23, 2022

1st Meeting Agenda:

Approval of the Annual Report including Ratification of the Company's Financial Statements Accompanied by the Granting of Full Release and Release of Responsibility (volledig acquiet et de charge) to Directors and Commissioners.

Resolution:

Approved the Annual Report including Ratification of the Company's Financial Statements Accompanied by the Granting of Full Release and Release of Responsibility (volledig acquiet et de charge) to members of the Company's Directors and Commissioners who served for management and supervisory actions carried out in the financial year ending December 31, 2022, as long as:

1. These actions are reflected in the Company's Annual Report (including financial statements) for the Fiscal Year ending December 31, 2022;
2. These actions are not criminal acts and/or acts against the law.

Mata Acara Rapat ke-2:

Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2022

Hasil keputusan:

Menetapkan Penggunaan Laba Tahun Buku 2022 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara sirkuler.

2nd Meeting Agenda:

Determination of the Use of Profits for the 2022 Fiscal Year

Resolution:

Determining the Use of Profits for the 2022 Fiscal Year will be determined later and will be carried out in a circular General Meeting of Shareholders.

Mata Acara Rapat ke-3:

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2023

Hasil keputusan:

Menyetujui agar Pemegang Saham memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Independen untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 agar mengikuti Induk Perusahaan (PT Pertamina Trans Kontinental).

3rd Meeting Agenda:

Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the 2023 Fiscal Year

Resolution:

Approved that the Shareholders give power of attorney and delegate authority to the Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (KAP) as an Independent Auditor to conduct an examination of the Company's Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023 so that they follow the Parent Company (PT Pertamina Trans Kontinental).

Mata Acara Rapat ke-4:

Pengusulan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direktur dan Komisaris Tahun Buku 2021

Hasil keputusan:

Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direktur dan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara sirkuler.

4th Meeting Agenda:

Proposal for Performance Awards (Tantiem) to Directors and Commissioners for the 2021 Fiscal Year

Resolution:

Awards for Performance (Tantiem) for the Directors and Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2022 will be determined later and will be held in a circular General Meeting of Shareholders.

Mata Acara Rapat ke-5:

Pengusulan Remunerasi Direktur dan Komisaris Tahun Buku 2023

Hasil keputusan:

Remunerasi Direktur dan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara sirkuler.

5th Meeting Agenda:

Proposal for Director and Commissioner Remuneration for Fiscal Year 2023

Resolution:

Remuneration for Directors and Commissioners of the Company for the 2023 Fiscal Year will be determined later and will be carried out in a circular General Meeting of Shareholders.

2. RUPS Sirkuler

Selain itu, juga terdapat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang dihasilkan di tahun 2022, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham mengeluarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 13 Mei 2022, tentang Perubahan Nama Perusahaan yang telah dilembagakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Marine Engineering No. 02 tanggal 03 Juni 2022.
- b. Pemegang Saham mengeluarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 08 Agustus 2022 tentang Penambahan Bidang Usaha yang telah dilembagakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Marine Engineering No. 1016 tanggal 26 Agustus 2022.
- c. Pemegang Saham mengeluarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 10 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Anggota Direksi yang telah dilembagakan melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Marine Engineering No. 420 tanggal 10 Agustus 2022.

2. Circular GMS

In addition, there is also a Circular Resolution of Shareholders produced in 2022, with the following explanation:

- a. The Shareholders issued a Circular Shareholder Resolution dated May 13, 2022, regarding the Change of Company Name which has been institutionalized through the Deed of Statement of Circular Shareholder Decision of PT Pertamina Marine Engineering No. 02 of June 03, 2022.
- b. The Shareholders issued a Circular Shareholder Resolution dated August 8, 2022 concerning the Addition of Business Fields that have been institutionalized through the Deed of Statement of Circular Shareholder Resolutions of PT Pertamina Marine Engineering No. 1016 dated August 26, 2022.
- c. The Shareholders issued a Circular Shareholder Resolution dated August 10, 2022 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors which has been institutionalized through the Deed of Statement of Circular Shareholder Resolutions of PT Pertamina Marine Engineering No. 420 dated August 10, 2022.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris merupakan organ pengawas Perusahaan yang memiliki tugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan Perusahaan oleh Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab memastikan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, menjaga kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham, memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif.

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2022

Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sehingga memungkinkan pengambilan keputusan Dewan Komisaris dapat dilakukan secara efektif, cepat, dan tepat. Di sepanjang tahun 2022, tidak terdapat pergantian Dewan Komisaris, dengan demikian komposisi dan susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is the supervisory organ of the Company which has the task of supervising the management policies of the Company by the Directors. The Board of Commissioners is responsible for ensuring the implementation of good corporate governance, safeguarding the interests of the Company by taking into account the interests of Shareholders, ensuring an effective internal control system.

Number and Composition of the Board of Commissioners in 2022

The Board of Commissioners is determined by the GMS so as to enable the decision making of the Board of Commissioners to be carried out effectively, quickly and accurately. Throughout 2022, there was no change in the Board of Commissioners, thus the Structure and Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2022 were as follows:

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2022

Structure and Composition of the Board of Commissioners for 2022

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of service	Periode Jabatan Period	Dasar Pengangkatan Basic of appointment
Oce Madril	Komisaris Commissioner	24 Desember 2021 – RUPS 2024 24 December 2021 –2024 GMS	Ke-1 First	Keputusan RUPS tanggal 24 Desember 2021, yang telah dilembagakan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 71 tanggal 04 Januari 2022 GMS resolution on 24 December 2021, which has been institutionalized as stated in Deed No. 71 of January 04, 2022

Profil Dewan Komisaris per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris meliputi:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris setia waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lan serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dewan Komisaris harus:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran; dan
 - b. Bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dan bertanggung jawab kepada Perusahaan dalam hal ini diwakili oleh Pemegang Saham.
4. Apabila dianggap perlu, dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dapat mempekerjakan tenaga ahli baik yang bekerja sendiri-sendiri maupun dalam kelompok untuk jangka waktu terbatas atas beban Perusahaan.
5. Anggota Dewan Komisaris berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam ayat 6 pasal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
8. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

The profile of the Board of Commissioners as of December 31, 2022 can be seen in the Company Profile chapter.

Duties and Authorities of the Board of Commissioners

Based on the Company's Articles of Association, the duties and authorities of the Board of Commissioners include:

1. The Board of Commissioners is tasked with supervising the policies of the Board of Directors in carrying out the management of the Company and providing advice to the Board of Directors including the implementation of the Company's Long Term Plan, Work Plan and Company Budget, which are regulated based on the provisions contained in the Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders and applicable laws and regulations.
2. The Board of Commissioners is loyal at any time during working hours of the Company's office has the right to enter buildings and courtyards or other places used or controlled by the Company and has the right to examine all books, letters and other evidence, check and match the condition of cash and others and has the right know all the actions that have been carried out by the Board of Directors.
3. In carrying out these tasks, the Board of Commissioners must:
 - a. Comply with the Articles of Association and laws and regulations, and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness; And
 - b. Act from time to time for the interests and business of the Company and are responsible to the Company in this case represented by the Shareholders.
4. If deemed necessary, in carrying out its duties the Board of Commissioners may employ experts either working individually or in groups for a limited period of time at the expense of the Company.
5. Members of the Board of Commissioners have the right to inquire and request clarification on all matters relating to the management of the Company to the Directors and the Directors are required to provide an explanation.
6. The Board of Commissioners has the right at any time to temporarily suspend one or more members of the Board of Directors if the member of the Board of Directors acts contrary to the Articles of Association and or the applicable laws and regulations.
7. The temporary dismissal as stipulated in paragraph 6 of this article must be notified to the person concerned, along with the reasons.
8. Within a maximum period of 30 (thirty) days after the temporary dismissal, the Board of Commissioners is required to hold a General Meeting of Shareholders which will decide whether the member of the Board of Directors concerned will be dismissed permanently or returned to his original position, while the member of the Board of Directors who was temporarily dismissed given the opportunity to appear in self-defence.

9. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat 7 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorang pun anggota Dewan Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.
10. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perusahaan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perusahaan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggung jawab mereka bersama.
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
13. Setiap Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi dan secara bersama-sama (tanggung renteng) apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
14. Dewan Komisaris wajib memberikan laporan mengenai tugas pengawasan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.
15. Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau bantuan kepada anggota Direksi Perusahaan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
16. Dalam melakukan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris dapat membentuk Komite.
17. Dalam hubungannya dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana dalam pasal ini maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
 - c. Segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
 - d. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disajikan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
 - e. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai saham yang dimiliki anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perusahaan dan perusahaan lainnya untuk dicatat dalam daftar khusus.
9. The General Meeting of Shareholders referred to in paragraph 7 of this article is chaired by the President Commissioner if he is not present, by another member of the Board of Commissioners and if no member of the Board of Commissioners is present, then the meeting is chaired by and from among those present . The absence does not need to be proven to the other party.
10. If the General Meeting of Shareholders is not held within 30 (thirty) days after the temporary dismissal, then the temporary dismissal becomes null and void, and the person concerned has the right to return to his original position.
11. If all members of the Board of Directors are suspended and the Company does not have any members of the Board of Directors, the Board of Commissioners is temporarily obliged to take care of the Company. In such case the Board of Commissioners has the right to give temporary power to one or more of them for their joint responsibility.
12. In the event that there is only one member of the Board of Commissioners, then all duties and powers given to President Commissioner or members of the Board of Commissioners in this Articles of Association also apply to him.
13. Each Board of Commissioners is responsible individually and collectively (joint responsibility) if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties for the interests and business of the Company.
14. The Board of Commissioners is required to provide a report regarding supervisory duties at the annual General Meeting of Shareholders.
15. The Board of Commissioners may provide approval or assistance to members of the Company's Board of Directors in carrying out certain legal actions.
16. In carrying out the duties and supervision of the Board of Commissioners may form a Committee.
17. In relation to the duties and authorities of the Board of Commissioners as referred to in this article, the Board of Commissioners is obliged to:
 - a. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors.
 - b. Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any issues deemed important to the management of the Company.
 - c. Immediately report to the General Meeting of Shareholders if there are signs of a decline in the Company's performance.
 - d. Examining and reviewing the periodic reports and annual reports presented by the Board of Directors and signing the annual reports.
 - e. Report to the Company regarding the shares owned by the member of the Board of Commissioners concerned and/or his family in the Company and other companies to be recorded in a special register.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2022

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris terus melakukan pengawasan kinerja dan memberikan masukan kepada Direksi. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Perusahaan yang berlaku. Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

1. Sebagai Penasihat
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham
 - i) Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
 - ii) Mengajukan usulan indikator pencapaian kinerja (*Fit and proper test*) untuk ditetapkan oleh RUPS.
 - iii) Menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi indikator pencapaian kinerja kepada Pemegang Saham.
 - iv) Mengajukan akuntan publik kepada RUPS berdasarkan usulan dari Komite Audit.
 - v) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi.
 - vi) Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan (RKAP).
 - vii) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana jangka panjang & Perusahaan dan rencana kerja dan anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani rencana jangka panjang Perusahaan dan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
 - viii) Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
 - ix) Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan tahunan, apabila diminta.
 - x) Menandatangani laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris tidak bersedia menandatangani laporan tahunan, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.
 - b. Pencalonan Anggota Direksi (Nominasi dan Remunerasi)
 - i) Mengusulkan kebijakan nominasi dan seleksi bagi calon Anggota Direksi Perusahaan serta calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan Perusahaan, serta mengajukannya kepada RUPS untuk disahkan.
 - ii) Mengusulkan calon Anggota Direksi Perusahaan kepada Pemegang Saham.

Implementation of Duties of the Board of Commissioners in 2022

As part of the duties and responsibilities, the Board of Commissioners continues to monitor performance and provide input to the Board of Directors. The supervision carried out by the Board of Commissioners is in line with applicable laws and regulations and the Company's internal provisions. Throughout 2022, the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities, including:

1. As Advisor
 - a. General Meeting of Shareholders
 - i) Submit a report on supervisory duties that have been carried out during the recent financial year to the GMS.
 - ii) Submit a proposal for performance indicators (Key Performance Indicators) to be determined by the GMS.
 - iii) Delivering quarterly reports on the progress of the realization of performance achievement indicators to Shareholders.
 - iv) Submitting a public accountant to the GMS based on a recommendation from the Audit Committee.
 - v) Report immediately to the GMS if there are signs of a decline in the Company's performance as well as suggestions that have been submitted to the Board of Directors to fix the problems that have occurred.
 - vi) Develop an annual work program and include it in the Company's work plan and budget (RKAP).
 - vii) Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the Company's long-term plans and work plans and the Company's budget regarding the reasons for the Board of Commissioners signing the Company's long-term plans and work plans and the Company's budget.
 - viii) Following the development of the Company's activities, providing opinions and suggestions to the GMS regarding issues considered important for the management of the Company.
 - ix) Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the annual report, if requested.
 - x) Sign the annual report. In the event that a member of the Board of Commissioners is unwilling to sign the annual report, the reasons must be stated in writing.
 - b. Nomination of Members of the Board of Directors (Nomination and Remuneration)
 - i) Propose nomination and selection policies for candidates for Members of the Company's Board of Directors and candidates for Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company's Subsidiaries, and submit them to the GMS for approval.
 - ii) Proposing candidates for members of the Company's Board of Directors to Shareholders.

- iii) Melakukan penelaahan dan pengawasan untuk memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki strategi dan kebijakan nominasi yang meliputi proses analisis organisasi, prosedur dan kriteria rekrutmen, seleksi dan promosi.
- iv) Melakukan kajian atas sistem remunerasi yang sesuai bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengajukan kepada RUPS.
- v) Memastikan bahwa Perusahaan memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variabel.
- vi) Menyusun kebijakan mengenai pengajuan usulan remunerasi Direksi kepada RUPS.
- vii) Menelaah usulan remunerasi Direksi bersama dengan Komite terkait.
- viii) Mengusulkan insentif kinerja/tantiem, mempertimbangkan penilaian kinerja Direksi dan pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan.
- ix) Mengusulkan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS. Rapat Dewan Komisaris

- iii) Conduct review and supervision to ensure that the Company has a nomination strategy and policy that includes organizational analysis processes, procedures and criteria for recruitment, selection and promotion.
- iv) Reviewing the appropriate remuneration system for Members of the Board of Commissioners and Directors and submitting it to the GMS.
- v) Ensuring that the Company has a transparent remuneration system in the form of salary or honorarium, fixed benefits and facilities and variable incentives.
- vi) Develop policies regarding the submission of recommendations for the remuneration of the Board of Directors to the GMS.
- vii) Reviewing the remuneration proposals for the Board of Directors together with the relevant Committees.
- viii) Propose performance incentives/tantiem, taking into account the performance assessment of the Board of Directors and the achievement of the Company's soundness level.
- ix) Propose remuneration (salary, benefits and facilities as well as performance bonuses/incentives) for the Board of Directors to the GMS.

DIREKSI

Direksi bertugas secara kolegial dengan area tanggung jawab masing-masing sebagai Organ Perusahaan yang memiliki kewenangan dalam pengurusan Perusahaan sesuai maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku. Direksi juga bertugas untuk mewakili Perusahaan, baik dalam maupun di luar pengadilan. Dalam struktur tata kelola perusahaan, Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS dengan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Jumlah dan Komposisi Direksi Tahun 2022

Pada tahun 2022, komposisi Direksi Perusahaan mengalami perubahan sesuai dengan keputusan Pemegang Saham dengan mengangkat Yada Prawira Ganta sebagai Direktur Perusahaan, menggantikan Afridal Rivai selaku pejabat sebelumnya. Dengan demikian komposisi anggota Direksi Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah 1 (satu) orang.

BOARD OF DIRECTORS

The Directors work collegially with their respective areas of responsibility as Company Organs that have authority in managing the Company in accordance with the aims and objectives in the Articles of Association and applicable laws. The Board of Directors is also tasked with representing the Company, both in and out of court. In the corporate governance structure, the Board of Directors is responsible to shareholders through the GMS with supervision carried out by the Board of Commissioners.

Number and Composition of the Board of Directors in 2022

In 2022, the composition of the Company's Board of Directors has changed in accordance with the Shareholders' decision by appointing Yada Prawira Ganta as Director of the Company, replacing Afridal Rivai as the previous official. Thus the composition of the members of the Company's Board of Directors as of December 31, 2022 is 1 (one) person.

Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of service	Periode Jabatan Period	Dasar Pengangkatan Basis of appointment
Yada Prawira Ganta	Direktur Director	10 Agustus 2022 - RUPS 2024 10 August 2022 -2024 GMS	Ke-1 First	Keputusan RUPS tanggal 10 Agustus 2022, yang telah dilembagakan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 420 tanggal 10 Agustus 2022 GMS resolution on August 10, 2022, which has been institutionalized as stated in Deed No. 420 of August 10, 2022

Profil Direksi per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris meliputi:

1. Tugas Pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan.
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan, itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi dan secara bersama-sama (tanggung renteng) apabila yang bersangkutan bersalah atau lalu menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
5. Direksi melakukan penempatan investasi sesuai Kebijakan Investasi yang telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
6. Direksi mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan Perusahaan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 7, 8, dan 9.
7. Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, untuk:
 - a. Menerima pinjaman jangka pendek dari bank atau Lembaga lain yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - b. Memberikan pinjaman jangka panjang pendek yang tidak bersifat operasional melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - d. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis di atas 5 (lima) tahun;
 - e. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tidak bergerak yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - f. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - g. Menghapuskan persediaan barang mati yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - h. Mengadakan kerja sama operasi untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun;

Profiles of the Board of Directors as of December 31, 2022 can be seen in the Company Profile chapter.

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Based on the Company's Articles of Association, the duties and authorities of the Board of Commissioners include:

1. Main Duties of the Board of Directors are:
 - a. Lead and manage the Company in accordance with the interests and objectives of the Company.
 - b. Mastering, maintaining and managing the Company's assets.
2. The Board of Directors is fully responsible for carrying out its duties for the benefit of the Company in achieving its aims and objectives.
3. Each member of the Board of Directors must, in good faith and with full responsibility, carry out their duties for the interests and business of the Company by complying with the applicable laws and regulations.
4. Each member of the Board of Directors is responsible individually and collectively (joint responsibility) if the person concerned is guilty or then carries out his duties for the interests and business of the Company.
5. The Board of Directors makes investment placements in accordance with the Investment Policy that has been determined by the General Meeting of Shareholders
6. The Board of Directors represents the Company inside and outside the Court and performs all actions and deeds both regarding the management and ownership of the Company's assets and binds the Company to other parties and or other parties to the Company, with the limitations as stipulated in paragraphs 7, 8 and 9.
7. The Board of Directors must obtain written approval from the Board of Commissioners, for:
 - a. Receive short-term loans from banks or other institutions that exceed a certain value determined by the Board of Commissioners;
 - b. Providing non-operational short term loans that exceed a certain value determined by the Board of Commissioners;
 - c. Collateralize fixed assets needed in carrying out short-term credit withdrawals that exceed a certain value determined by the Board of Commissioners;
 - d. Releasing and writing off movable fixed assets with an economic life of more than 5 (five) years;
 - e. Releasing and writing off immovable assets that exceed a certain value determined by the Board of Commissioners;
 - f. Write off from the books of bad debts exceeding a certain value determined by the Board of Commissioners;
 - g. Write off the inventory of dead goods that exceed a certain value determined by the Board of Commissioners;
 - h. Holding joint operations for a period of more than 5 (five) years;

- i. Mengadakan kontrak manajemen untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - j. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sepanjang mengakibatkan penambahan beban *overhead* Perusahaan;
8. Direksi memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris untuk:
 - a. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perseroan lain atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru, termasuk dalam hal pendirian anak perusahaan yang telah ada, pendirian anak perusahaan dalam rangka meningkatkan pendapatan, dan pendirian anak perusahaan dalam rangka partisipasi (*participating interest*).
 - b. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perusahaan dalam perseroan lain atau badan-badan lain atau dalam partisipasi (*participating interest*);
 - c. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang;
 - d. Memberikan pinjaman jangka menengah/panjang;
 - e. Mengagunkan aktiva tetap sebagai agunan pinjaman menengah/panjang;
 - f. Mengadakan kerja sama operasi untuk jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
 - g. Mengadakan kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun;
 - h. Mengadakan kerja sama Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangunan Guna Milik (*Build, Operate and Owned/BOO*), atau Bagun Sewa Serah (*Built, Rent, and Transfer/BRT*);
 - i. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (*borg* tau *avalist*).
 9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang lebih dari 50% harta kekayaan Perusahaan (yang bukan merupakan barang dagangan) baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut, kecuali jaminan dalam rangka untuk kegiatan operasional antara lain jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, garansi bank dan lain sebagainya.
 10. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
- i. Enter into a management contract for a period of more than 3 (three) years;
 - j. Establish and adjust the organizational structure as long as it results in the addition of the Company's overhead expenses
8. The Board of Directors requires prior approval from the General Meeting of Shareholders after obtaining a recommendation from the Board of Commissioners for:
 - a. Participating either in part or in whole or participating in other companies or other entities or establishing a new company, including in the case of establishing an existing subsidiary, establishing a subsidiary in order to increase revenue, and establishing a subsidiary in the framework of participation (*participating interest*).
 - b. Releasing part or all of the Company's participation in other companies or other entities or participating interests;
 - c. Receive medium/long term loans;
 - d. Providing medium/long term loans;
 - e. Pledge fixed assets as collateral for medium/long term loans;
 - f. Holding joint operations for a period of more than 10 (ten) years;
 - g. Enter into a business management contract for a period of more than 5 (five) years;
 - h. Enter into cooperation between Build, Operate and Transfer/BOT, Build, Operate and Owned/BOO, or Build, Rent, and Transfer/BRT;
 - i. Binding the Company as guarantor (*borg* tau *avalist*).
 9. Legal actions to transfer, release rights, or make debt guarantees for more than 50% of the Company's assets (which are not merchandise) either in one transaction or several transactions that are independent or related to one another must obtain approval from the General Meeting of Shareholders attended or represented by Shareholders who own at least $\frac{3}{4}$ (three-quarters) of the total number of shares with valid voting rights and approved by at least $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total votes, except for guarantees for operational activities including bid guarantees, performance guarantees, bank guarantees and so on.
 10. Legal actions to transfer or make as collateral for debt or to release the rights to the Company's assets as referred to in paragraph 8 must also be announced in 2 (two) daily newspapers in the Indonesian language which are published and circulated widely/nationally in the territory of the Republic of Indonesia no later than 30 (thirty) days from the date of the legal action.

11. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta memiliki Perusahaan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, 2(dua) orang anggota Direksi lainnya secara bersama-sama atau bila anggota Direksi hanya 2 (dua) orang saja, Direktur lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan.
 12. Hak dan Kewajiban Direksi adalah:
 - a. Direksi berhak untuk:
 - i) Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin kepengurusan Perusahaan.
 - ii) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan upah dan penghasilan lain, pesangon dan atau pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - iii) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iv) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain.
 - v) Direksi dapat mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan
 - vi) Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurus maupun mengenai pemilikan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.
 - b. Direksi berkewajiban untuk :
 - i) Mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.
 - ii) Menyiapkan rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Perusahaan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang setelah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapat pengesahan.
 - iii) Menyiapkan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan untuk ditelaah oleh Dewan Komisaris dan selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan.
11. a. The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and owns the Company.
 - b. In the event that the President Director is absent or unavailable due to any reason whatsoever, which does not need to be proven to a third party, 2 (two) other members of the Board of Directors together or if there are only 2 (two) members of the Board of Directors, the other Directors have the right and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
 12. The rights and obligations of the Board of Directors are:
 - a. The Board of Directors has the right to:
 - i) Establish policies in leading the management of the Company.
 - ii) Regulates provisions regarding the employment of the Company including the determination of wages and other income, severance pay and/or pensions based on applicable laws and regulations and/or resolutions of the General Meeting of Shareholders.
 - iii) Appoint and dismiss Company employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations.
 - iv) Arrange the transfer of powers of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court to one or several members of the Board of Directors specifically appointed for that purpose or to one or several employees of the Company either individually or jointly or to other people.
 - v) The Board of Directors may appoint a Corporate Secretary
 - vi) Carry out other actions, both regarding the management and regarding the ownership of the Company, in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and stipulated by the General Meeting of Shareholders based on the applicable laws and regulations.
 - b. The Board of Directors is obliged to:
 - i) Devoting energy, mind and attention fully to the duties, obligations and achievement of the Company's goals.
 - ii) Prepare a draft of the Company's Long Term Plan which is a strategic plan containing the goals and objectives of the Company to be achieved within a period of 5 (five) years, which after being signed with the Board of Commissioners is submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.
 - iii) Prepare a draft Company Work Plan and Budget which is the annual elaboration of the Company's Long Term Plan to be reviewed by the Board of Commissioners and then submitted to the General Meeting of Shareholders for approval and approval.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> iv) Mengadakan dan memelihara pembukuan, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Direksi dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan v) Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, menyampaikan laporan tahunan dan laporan manajemen, yang telah ditandatangani anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan perhitungan tahunan kepada Rapat untuk memperoleh pengesahan. vi) Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. vii) Memberi pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan berupa laporan kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini serta setiap kali diminta oleh Rapat Umum Pemegang Saham. viii) Menetapkan susunan organisasi pengurusan Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya. ix) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta Dewan Komisaris. x) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan. xi) Melaporkan kepada Perusahaan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perusahaan dan perseroan lainnya untuk dicatat dalam daftar khusus. | <ul style="list-style-type: none"> iv) Organize and maintain books of account, Minutes of the General Meeting of Shareholders, Minutes of Directors' Meetings and Company administration in accordance with the custom that applies to a Company v) Within 6 (six) months after the closing of the Company's fiscal year, submit annual reports and management reports, which have been signed by members of the Board of Directors and Board of Commissioners and annual calculations to the Meeting for approval. vi) Develop an accounting system in accordance with financial accounting standards and based on the principles of internal control, especially the separation of functions of management, recording, storage and supervision. vii) Provide accountability and all information regarding the conditions and operations of the Company in the form of reports on Company activities including financial reports both in the form of annual reports and in the form of other periodic reports in the manner and time specified in these Articles of Association and whenever requested by the General Meeting of Shareholders. viii) Determine the organizational structure of the management of the Company complete with details of their duties. ix) Provide an explanation of all matters asked or requested by the Board of Commissioners. x) Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in these Articles of Association and determined by the General Meeting of Shareholders based on laws and regulations. xi) Report to the Company regarding the shares owned by the member of the Board of Directors concerned and/or his family in the Company and other companies to be recorded in a special register. |
|---|--|

Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2022

Selama tahun 2022, Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, baik dalam pengurusan Perusahaan maupun kewajiban pengelolaan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan tugas Direksi juga diwujudkan salah satunya melalui rapat Direksi dengan Dewan Komisaris yang telah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Pengambilan keputusan dalam rapat tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan Perusahaan dan mencapai keberhasilan jangka panjang.

Implementation of the Board of Directors' Duties in 2022

During 2022, the Board of Directors has carried out their duties and responsibilities, both in managing the Company and in managing the Company in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. In addition, Implementation of the duties of the Board of Directors is also manifested, one of which is through meetings between the Board of Directors and the Board of Commissioners which have been held 10 (ten) times. Decision making at the meeting aims to encourage the growth of the Company and achieve long-term success.

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris mengadakan rapat dengan mengundang Direksi sebanyak 10 (sepuluh) kali. Adapun agenda, risalah rapat, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Throughout 2022, the Board of Commissioners held meetings inviting the Directors 10 (ten) times. The agenda, minutes of meeting, and recapitulation of the attendance level of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

Agenda Rapat Gabungan

Joint Meeting Agenda

Tanggal	Tempat	Agenda
19 Januari 2022 January 19, 2022	Ruang Rapat Setia Budi One, Kuningan, Jakarta Selatan Setia Budi One Meeting Room, Kuningan, South Jakarta	1. Pemaparan Overview Bisnis PKJ 2. Pemaparan RKAP 2022 1. Presentation of the PKJ Business Overview 2. Presentation of the 2022 RKAP
14 Maret 2022 March 14, 2022	Kantor PKJ PKJ Office	Kinerja Operasi dan Keuangan Periode Februari 2022 BOD BOC Financial Performance & Operational as of YTD Februari 2022
18 April 2022 April 18, 2022	Kantor PKJ PKJ Office	BOD BOC Kinerja Keuangan & Operasional Ytd Maret 2022 BOD BOC Financial Performance & Operational as of YTD March 2022
25 Mei 2022 May 25, 2022	Kantor PKJ PKJ Office	BOD BOC Kinerja Keuangan & Operasional Ytd April 2022 BOD BOC Financial Performance & Operational as of YTD April 2022
16 Juni 2022 June 16, 2022	Kantor PKJ PKJ Office	BOD BOC Kinerja Keuangan & Operasional Ytd Mei 2022 BOD BOC Financial Performance & Operational as of YTD May 2022
22 Juli 2022 July 22, 2022	Kantor PKJ PKJ Office	BOD BOC Kinerja Keuangan & Operasional Ytd Juni 2022 BOD BOC Financial Performance & Operational as of YTD June 2022
20 September 2022 September 20, 2022	Kantor PME PME Office	BOD BOC Kinerja Keuangan & Operasional Ytd Agustus 2022 BOD BOC Financial Performance & Operational as of YTD August 2022
21 Oktober 2022 October 21, 2022	Kantor PME PME Office	BOD BOC Kinerja Keuangan & Operasional Ytd September 2022 BOD BOC Financial Performance & Operational as of YTD September 2022
23 November 2022 November 23, 2022	Kantor PME PME Office	BOD BOC Kinerja Keuangan & Operasional Ytd Oktober 2022 BOD BOC Financial Performance & Operational as of YTD October 2022
26 Desember 2022 December 26, 2022	Kantor PME PME Office	BOD BOC Kinerja Keuangan & Operasional Ytd November 2022 BOD BOC Financial Performance & Operational as of YTD November 2022

Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan

Recapitulation of Board of Commissioners and Directors Attendance at Joint Meetings

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Masa Jabatan Term of service	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Oce Madril (Komisaris) Oce Madril (Commissioner)	24 Desember 2021 - RUPS 2024 December 24, 2021 -2024 GMS	10	10	100%
Direksi Board of Directors				
Afridal Rivai (Direktur) Afridal Rivai (Director)	tgl/bln/thn - 10 Agustus 2022 tgl/bln/thn - August 10, 2022	6	6	100%
Yada Prawira Ganta (Direktur) Yada Prawira Ganta (Director)	10 Agustus 2022 - RUPS 2024 August 10, 2022 -2024 GMS	4	4	100%
Rata-rata Average				100%

KEY PERFORMANCE INDICATOR

KEY PERFORMANCE INDICATOR

Berikut *Key Performane Indikator* (KPI) Perusahaan untuk tahun buku 2022, sebagaimana terlampir di bawah ini.

The following are the Company's Key Performance Indicators (KPI) for the 2022 fiscal year, as attached below.

No.	KPI	Unit	Realisasi KPI 2021 Realization of 2021 KPI	Target KPI 2022 2022 KPI targets	Polaritas Polarity	Bobot Weight(%)		Realisasi YTD Desember 2022 December 2022 YTD realization			
						Sub	Total	Target	Real	Perf.	% WP
A. Financial (35%)											28,34
1	EBITDA PTK	Miliar/Billion IDR	1111,06	1301,64	Max	3	35	1301,64	1691,79	110%	3,30
2	EBITDA PME	Miliar Billion IDR	44,89	55,74	Max	12		55,74	42,84	77%	9,22
3	Marine Cost Per Unit	USD/KL	N/A	2,35	Min	5		1,35	1,33	101%	5,07
4	Net Profit Margin	%	13,07	9,17	Max	5		9,17	8,43	92%	4,60
5	Cash From Operation	Miliar/Billion IDR	55,70	60,52	Max	5		60,52	58,05	96%	4,80
6	Realisasi Investasi (ABI) Investment Realization (ABI)	%	90,00	85-100	Max	5		85-100	21,30	27%	1,35
B. Customer Focus (20%)											22,00
1	% Non Captive Market	%	N/A	7,5	Max	5	20	7,50	14,74	110%	5,50
2	Customer Satisfaction Index	Skala Likert Likert Scale	4	4	Max	5		4,00	4,51	110%	5,50
3	New Entry Market Capture	%	N/A	100	Max	5		100,00	110,00	110%	5,50
4	Collection Period	Hari Day	56	69	Max	5		69,00	48,00	110%	5,50
C. Internal Process (35%)											35,85
1	Total Recordable Incident Rate (TRIR)	Rate	0,12	0,11	Min	6	35	0,11	0,09	110%	6,60
2	Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri TKDN Use of Domestic Component Level TKDN	%	100	30	Max	6		30	72,02	110%	6,60
3	Realisasi Investasi (Progress Fisik) Investment Realization (Physical Progress)	%	100	90	Max	6		90	72	66%	3,95
4	Dredging & Reclamation Spot	#	4	3	Max	5		3	4	110%	5,50
5	EPC & Port Maintenance Spot	#	14	7	Max	7		14	34	110%	7,70
6	Underwater Work Service Spot	#	10	8	Max	5		9	30	110%	5,50

No.	KPI	Unit	Realisasi KPI 2021 Realization of 2021 KPI	Target KPI 2022 2022 KPI targets	Polaritas Polarity	Bobot Weight(%)		Realisasi YTD Desember 2022 December 2022 YTD realization			
						Sub	Total	Target	Real	Perf.	% WP
D. Learning % Growth (10%)											10,75
1	Pencapaian Roadmap Transformasi Digital PME Achievements of PME Digital Transformation Roadmap	%	100	100	Max	3	10	75	100	110%	3,30
2	Program Strategic Initiatives Strategic Initiatives Program	%	100	100	Max	4		100	103,7	104%	4,15
3	Knowledge Sharing & CIP	%	100	100	Max	3		100	110	110%	3,30
Subtotal							100,00				96,94
E. Boundary KPI											-1,00
1	Number of Accident (NoA)	#	5	0	Min			0	3	0%	-3,00
2	Pelaporan e-LHKPN e-LHKPN Reporting	%	100	100	Max			100	100	100%	0,00
3	Peningkatan Nilai Sinergi Grup Pertamina Increase of Pertamina Group Synergy Value	%	N/A	2	Max			2	53	100%	2,00
4	Pengelolaan Risiko Risk Management	%	100	100	Max			100	100	100%	0,00
5	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Internal & Eksternal Follow-up on Internal & External Audit Results Recommendations	%	100	100	Max			100	100	100%	0,00
											95,94

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

KEBIJAKAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan penetapan remunerasi Dewan Komisaris berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 96 ayat (1), ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditentukan berdasarkan ketentuan RUPS dan Pasal 113 yang berbunyi ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Komisaris ditentukan berdasarkan ketentuan RUPS. Sehingga dalam hal ini prosedur untuk melaksanakan remunerasi telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

PROSEDUR PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Secara garis besar Prosedur penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan diajukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan beberapa indikator terhadap kondisi Perusahaan, regulasi dan indikator lainnya yang terjadi selama tahun buku. Usulan tersebut dikaji dan ditinjau ulang dalam RUPS untuk mendapat persetujuan dari Pemegang Saham Perusahaan.

PENGUNGKAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICY FOR DETERMINING REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

The policy for determining the remuneration for the Board of Commissioners is guided by the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In Article 96 paragraph (1), the provisions regarding the amount of salaries and allowances for members of the Board of Directors are determined based on the provisions of the GMS and Article 113 which reads the provisions concerning the amount of salaries and benefits of members of the Board of Commissioners are determined based on the provisions of the GMS. So that in this case the procedures for carrying out remuneration have been adjusted to statutory regulations.

PROPOSAL PROCEDURE UP TO DETERMINATION OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

In general, the procedure for determining the amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company is proposed by the Board of Directors by taking into account several indicators of the condition of the Company, regulations and other indicators that occurred during the fiscal year. The proposal is reviewed and reviewed in the GMS to obtain approval from the Company's Shareholders.

DISCLOSURE OF REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021-2022
Total Remuneration for the Board of Commissioners and Directors for 2021-2022

Uraian Description	Jumlah (Rp) Amount (IDR)	
	2022	2021
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration for the Board of Commissioners	Rp 410.160.000	Rp360.000.000
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration for the Board of Directors	Rp184.572.000	Rp145.800.000
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Total Remuneration for the Board of Commissioners and Directors	Rp594.732.000	Rp505.800.000

AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditetapkan melalui RUPS dan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, KAP yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, Perusahaan menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022.

The function of independent oversight of financial aspects is carried out by a Public Accounting Firm (KAP) which is determined through the GMS and takes into account recommendations from the Board of Commissioners. The selection process is carried out in accordance with the applicable goods and services procurement mechanism. To guarantee the independence and quality of the audit results, the appointed KAP must not have a conflict of interest with the Company.

In carrying out the financial statement audit, the Company appointed KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*PricewaterhouseCoopers*) to conduct an audit of the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year.

Akuntan Publik Tahun 2022 Public Accountant for 2022

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	:	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (<i>PricewaterhouseCoopers</i>) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (<i>PricewaterhouseCoopers</i>)
Akuntan Accountant	:	Daniel Kohar, S.E., CPA
Tahun Audit Year of Audit	:	Tahun Buku 2022 Fiscal Year 2022
Jasa Services	:	Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 General audit of Financial Statements for Fiscal Year 2022
Jasa Lainnya Other Services	:	-

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT

PME menyadari bahwa risiko telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnisnya. Risiko-risiko tersebut melekat pada semua aktivitas dan pengambilan keputusan serta dampak dari risiko tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi kestabilan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan berupaya meminimalisir terjadinya ancaman dan memaksimalkan peluang yang ada melalui penerapan manajemen risiko melalui proses identifikasi, pengukuran, pemetaan sampai dengan pengendalian risiko. Seluruh penerapan manajemen risiko di Perusahaan telah sesuai dengan berbagai pedoman dan kebijakan manajemen risiko yang berlaku.

PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

PME berkomitmen membangun sistem manajemen risiko secara menyeluruh untuk memastikan tujuan strategis dan tanggung jawab tata kelola perusahaan terpenuhi. Dalam penerapannya, Perusahaan mengacu pada pedoman manajemen risiko yang berlaku di PT Pertamina Trans Kontinental selaku Induk Perusahaan.

PROFIL RISIKO TAHUN 2022 DAN MITIGASINYA

PME menerapkan sistem manajemen risiko dengan cara melihat keseluruhan bisnis proses secara terintegrasi. Selama tahun 2022, Perusahaan telah mengidentifikasi risiko dan melakukan mitigasinya guna mengurangi dampak ataupun kerugian yang dapat mengganggu kinerja Perusahaan sebagaimana uraian di bawah ini:

PME realizes that risk has become an integral part of every business process. These risks are inherent in all activities and decision making and the impact of these risks can significantly affect the stability of the Company. For this reason, the Company seeks to minimize the occurrence of threats and maximize existing opportunities through the implementation of risk management through the process of identifying, measuring, mapping to controlling risks. The entire implementation of risk management in the Company complies with various applicable risk management guidelines and policies.

GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

PME is committed to building a comprehensive risk management system to ensure strategic objectives and corporate governance responsibilities are met. In its implementation, the Company refers to the risk management guidelines that apply to PT Pertamina Trans Kontinental as the Parent Company.

2022 RISK PROFILE AND THE MITIGATION

PME implements a risk management system by looking at all business processes in an integrated manner. During 2022, the Company has identified risks and implemented mitigation in order to reduce impacts or losses that could disrupt the Company's performance as described below:

No.	Jenis Risiko Type of Risk	Mitigasi yang Dilakukan Mitigation Performed
1	Operational/Project	
a	Izin usaha Pengerukan PKJ tidak <i>comply</i> dengan persyaratan PKJ dredging business permit does not comply with the requirements	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Dirjen HUBLA jika proses pembangunan kapal keruk sudah dimulai guna mengupayakan SIUPR bisa diproses lebih cepat. Mengupayakan investasi kapal <i>second</i> jika spek kapal yang tersedia sesuai kebutuhan. Menjalin kerja sama dengan mitra strategis yang memiliki kapal dan SIUPR.
		<ol style="list-style-type: none"> Coordinate with the Director General of HUBLA if the dredger construction process has started in order to make SIUPR processed more quickly. Strive to invest in second-hand ships if the available vessel specs are as needed. Establish cooperation with strategic partners who own ships and SIUPR.

No.	Jenis Risiko Type of Risk	Mitigasi yang Dilakukan Mitigation Performed
b	Keterlambatan <i>delivery</i> pekerjaan pengerukan Delay in delivery of dredging work	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan User/Mitra Strategis untuk melakukan <i>monitoring</i> berkala pekerjaan yang berlangsung. 2. Melakukan pengecekan kapal sebelum melaksanakan kegiatan pengerukan. 3. Melakukan <i>safety induction</i> dan <i>safety briefing</i> HSSE+C19 kepada <i>crew</i> dan pekerja operasional pengerukan. 4. Memasukkan klausul kondisi Kahar/<i>Force Majeur</i> dalam kontrak. <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinate with Strategic Users/Partners to periodically monitor ongoing work. 2. Checking the ship before carrying out dredging activities. 3. Conducting safety induction and HSSE+C19 safety briefings for dredging operational crews and workers. 4. Include a Force Majeure condition clause in the contract.
c	Keterlambatan <i>delivery</i> pekerjaan EPC & <i>Port Maintenance</i> Delay in delivery of EPC & Port Maintenance work	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan User/Mitra Strategis untuk melakukan <i>monitoring</i> berkala pekerjaan yang berlangsung. 2. Menyusun Kajian Teknis Eksekusi dan S-Curve. 3. <i>Monitoring Progress</i> Mobilisasi. 4. Melakukan <i>Safety Induction</i> dan <i>Safety Briefing</i> HSSE+C19 kepada <i>Crew</i> dan Pekerja. 5. Memasukkan Klausul Kondisi Kahar/<i>Force Majeur</i> dalam Kontrak. <ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinate with Strategic Users/Partners to periodically monitor ongoing work. 2. Prepare Execution and S-Curve Technical Studies. 3. Monitoring the Progress of Mobilization. 4. Conducting Safety Induction and HSSE+C19 Safety Briefing for Crew and Workers. 5. Include a Force Majeure Conditions Clause in the Contract.
d	Keterlambatan <i>delivery</i> SDM dan <i>Equipment</i> untuk pekerjaan <i>on call basis</i> UWS Delays in HR and Equipment delivery for work on call on a UWS basis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>safe house</i> sebelum keberangkatan <i>diver</i>. 2. Melakukan <i>gathering</i> informasi vendor <i>diving equipment</i> diluar rekanan eksisting. <ol style="list-style-type: none"> 1. Conducting a safe house before the diver's departure. 2. Conducting information gathering on diving equipment vendors outside of existing partners.
2	Komersial/Financial	
a	Tingginya angka piutang usaha High number of accounts receivable	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reminder bulanan terkait kelengkapan dokumen penagihan kepada fungsi usaha. 2. Pembuatan Ceklis dokumen. 3. Penunjukan PIC administrasi penagihan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Monthly reminder regarding completeness of billing documents to business functions. 2. Preparation of document checklists. 3. Appointment of billing administration PIC.
b	Meningkatnya nilai denda pajak Increased value of tax penalties	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Keuangan membuat Memorandum ke Fungsi Usaha untuk percepatan pembuatan advis tagih. 2. Fungsi Usaha akan meminta percepatan penerimaan Surat Tanda Terima Barang sementara via <i>email</i> atau <i>whatsapp</i>. <ol style="list-style-type: none"> 1. The Finance Function makes a Memorandum to the Business Function to expedite the preparation of billing advice. 2. The Business Function will request the acceleration of receipt of temporary Goods Receipt via email or whatsapp.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sistem Pengendalian Internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Perusahaan secara berkesinambungan. Sistem Pengendalian Internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Perusahaan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Perusahaan yang sehat dan aman. Implementasi sistem pengendalian internal di Perusahaan tercermin dari pelaporan keuangan dan operasional bisnis Perusahaan yang senantiasa sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan Perusahaan telah terlaksana secara menyeluruh dan terintegrasi pada proses bisnis Perusahaan dengan mengacu pada mekanisme sistem pengendalian internal di PT Pertamina Trans Kontinental yang juga mengadaptasi pada COSO *Internal Control*. Pelaksanaan sistem pengendalian internal Perusahaan ditujukan untuk:

1. Mengamankan aset.
2. Mengupayakan efisiensi dan efektivitas operasi Perusahaan.
3. Mengembangkan keandalan dan kelengkapan informasi akuntansi/finansial dan manajemen.
4. Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku.

The Internal Control System is a monitoring mechanism established by the Company's management on an ongoing basis. An effective Internal Control System is an important component in the Company's management and forms the basis for the Company's healthy and safe operational activities. The implementation of the internal control system in the Company is reflected in the Company's financial reporting and business operations which are always in accordance with the Articles of Association and applicable regulations.

The internal control system implemented by the Company has been implemented thoroughly and integrated into the Company's business processes with reference to the mechanism of the internal control system at PT Pertamina Trans Kontinental which also adapts to COSO Internal Control. The implementation of the Company's internal control system is aimed at:

1. Securing assets.
2. Strive for efficiency and effectiveness of the Company's operations.
3. Develop the reliability and completeness of accounting/ financial and management information.
4. Ensuring compliance with policies and procedures as well as applicable laws and regulations.

PERKARA PENTING SIGNIFICANT ISSUES

PERMASALAHAN HUKUM

Berikut adalah permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan di tahun 2022, yakni sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Permasalahan Hukum Legal Cases	2022	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Completed and has permanent legal force	-	-
Dalam proses penyelesaian In the process of completion	-	-
Jumlah Total	-	-

LEGAL CASES

Following are the legal cases faced by the Company in 2022, namely as presented in the table below.

PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

Selama tahun 2022, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan yang memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

DISCLOSURE OF LEGAL CASES FACED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

During 2022, there were no members of the Company's Board of Commissioners or Directors who had legal issues, both civil and criminal.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

Teknologi informasi berperan penting untuk mendukung kemajuan suatu perusahaan. Kemampuan teknologi informasi dalam mengatur, mengelola dan mempermudah sistem kerja, mengingat bisnis Perusahaan yang semakin berkembang dengan sistem kerja yang lebih kompleks. Oleh karena itu, Perusahaan berupaya mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mendukung fokus pada portofolio usaha dan peningkatan kualitas pelayanan.

RENCANA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI TAHUN 2022

Adapun rencana pengembangan Teknologi Informasi di 2022 adalah sebagai berikut:

1. *Dashboard project management system*
2. *File management system*
3. *Agenda management system*
4. *Website Perusahaan*
5. *Email join domain @pertamina.com*
6. *SAP (module Finance & HC)*

Information technology plays an important role in supporting the progress of a company. Information technology capabilities in organizing, managing and facilitating work systems, considering that the Company's business is growing with more complex work systems. Therefore, the Company seeks to prioritize the use of information technology that can support a focus on business portfolio and improve service quality.

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT PLAN IN 2022

The Information Technology development plans in 2022 are as follows:

1. Project management system dashboard
2. File management system
3. Agenda management system
4. Company Website
5. Email join domain @pertamina.com
6. SAP (Module Finance & HC)

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY

Pengadaan barang dan jasa PME telah diselaraskan dengan kebutuhan Perusahaan. Perusahaan berkomitmen proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara profesional dan transparan dengan tetap patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam menjaga efektivitas dan efisiensi, Perusahaan memperhitungkan jumlah kebutuhan barang dan atau jasa di sesuaikan dengan rencana penambangan, rencana produksi serta rencana fungsi pendukung lainnya.

Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mengacu pada kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa perencanaan kebutuhan disiapkan secara matang oleh setiap fungsi/ Panitia Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Perusahaan dengan cara mengelola Rencana Kerja Perusahaan yang disusun dalam bentuk Rencana Pengadaan Barang/Jasa (TOR) yang siap diproses dan dapat dikonsolidasikan secara fungsi sesuai cakupan.
2. Memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa mengikuti pedoman/prosedur pengadaan barang /jasa dan tidak bertentangan dengan ketentuan lain yang lebih tinggi.
3. Memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang telah dievaluasi secara teknis, HSE dan finansial serta dapat dipertanggungjawabkan dalam hal biaya dan kualitas.
4. Memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara kompetitif dengan tetap memperhatikan aspek keekonomian dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
5. Memastikan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan Kontrak atau Perjanjian yang disetujui antara Perusahaan dengan Penyedia Barang/jasa.
6. Memastikan bahwa HSE Plan menjadi bagian yang dievaluasi dalam persyaratan HSE yang ditawarkan oleh Kontraktor pada pengadaan barang/jasa yang memiliki risiko terhadap aspek HSE berkategori menengah dan tinggi.
7. Memastikan HSE Plan yang disepakati dalam proses pengadaan barang/jasa diimplementasikan oleh Kontraktor pada tahap pelaksanaan pekerjaan dan dievaluasi kinerja HSE-nya sesuai dengan ketentuan manajemen kinerja penyedia barang/jasa yang berlaku.

The procurement of PME goods and services has been aligned with the needs of the Company. The company is committed to carrying out the process of procuring goods and services in a professional and transparent manner while still complying with the laws and regulations in force in Indonesia. In maintaining effectiveness and efficiency, the Company calculates the number of needs for goods and or services according to the mining plan, production plan and other supporting function plans.

The process of procuring goods and services is carried out with reference to the following policies:

1. Ensuring that planning for needs is carefully prepared by each function/Procurement Committee within the Company by managing the Company's Work Plan prepared in the form of a Goods/Services Procurement Plan (TOR) which is ready to be processed and can be consolidated functionally according to scope.
2. Ensuring that the goods/services procurement process follows the guidelines/procedures for goods/services procurement and does not conflict with other higher regulations.
3. Ensuring that the procurement of goods/services is carried out by providers of goods/services that have been evaluated technically, HSE and financially and can be accounted for in terms of cost and quality.
4. Ensuring that the process of procuring goods/services is carried out in a competitive manner while taking into account the economic and efficiency aspects of its implementation.
5. Ensuring that the procurement of goods/services is carried out with a contract or agreement agreed between the company and the goods/services provider.
6. Ensuring that the HSE Plan is part of the evaluation of the HSE requirements offered by the Contractor for the procurement of goods/services that have a risk of medium and high HSE aspects.
7. Ensuring that the HSE Plan agreed upon in the process of procuring goods/services is implemented by the Contractor at the stage of work implementation and evaluating its HSE performance in accordance with the provisions of the performance management of the applicable goods/services provider

KODE ETIK PERUSAHAAN COMPANY CODE OF CONDUCT

Kode Etik Perusahaan merupakan komitmen Perusahaan yang ditetapkan sebagai pedoman bersikap dan berperilaku bagi seluruh karyawan Perusahaan dalam menjalankan usaha Perusahaan, menjalankan tugas dan kegiatan pekerjaan sehari-hari, serta berinteraksi dengan pelanggan, mitra kerja, lingkungan, Pemerintah dan masyarakat di lingkungan aktivitas Perusahaan. Pelanggaran kode etik akan diperlakukan secara serius, dan dapat mengakibatkan tindakan disipliner yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perusahaan. PME menghormati hak membela diri dari Insan Perusahaan yang disangka melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan.

PME memiliki Pedoman *Code of Conduct* yang telah disahkan pada Desember 2022, dengan pokok-pokok isi sebagai berikut:

- Bab I : Umum
- Bab II : Visi, Misi dan Tata Nilai Unggulan Perusahaan
- Bab III : Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)
- Bab IV : Persaingan Sehat
- Bab V : Kerahasiaan Data dan Transparansi
- Bab VI : Sikap Profesional
- Bab VII : Komitmen terhadap Pemangku Kepentingan Lainnya
- Bab VIII : *Whistleblowing System*
- Bab IX : Konsekuensi Pelanggaran Pedoman Perilaku
- Bab X : Komitmen Insan PME

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku tidak diharapkan oleh Perusahaan dan oleh karenanya setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh fungsi terkait yang akan memberikan hasil kajiannya kepada manajemen puncak Perusahaan. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan tentu saja akan diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perusahaan. Di sepanjang tahun 2022, tidak terdapat pelaporan terkait pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku di lingkup Perusahaan, yang dilakukan oleh Insan PME.

The Company's Code of Conduct is the Company's commitment established as a guideline for attitude and behavior for all Company employees in running the Company's business, carrying out their daily work tasks and activities, as well as interacting with customers, work partners, the environment, the Government and the community within the Company's activities. Violations of the code of ethics will be treated seriously, and may result in disciplinary action in accordance with the provisions of the Company Regulations and other provisions that apply in the Company. PME respects the right to self-defense of company personnel who are suspected of having committed a violation and hears their explanations for consideration in determining the form of disciplinary consequences to be given.

PME has a Code of Conduct Guidelines which was ratified in December 2022, with the main contents as follows:

- Chapter I: General
- Chapter II : Vision, Mission and Superior Values of the Company
- Chapter III : Principles of Good Corporate Governance (GCG)
- Chapter IV : Fair Competition
- Chapter V : Data Confidentiality and Transparency
- Chapter VI : Professional Attitude
- Chapter VII : Commitment to Other Stakeholders
- Chapter VIII : Whistleblowing System
- Chapter IX : Consequences of Violating the Code of Conduct
- Chapter X : Commitment of PME Personnel

Violations of the Code of Conduct are not expected by the Company and therefore any violations will be followed up by the relevant function which will provide the results of its review to the top management of the Company. Sanctions for violations committed will of course be given in accordance with the provisions of the Company Regulations and other provisions that apply in the Company. Throughout 2022, there were no reports regarding violations of the Code of Conduct within the scope of the Company, made by PME personnel.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Perusahaan terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG di setiap aspek bisnis dan operasional demi terciptanya iklim kerja yang sehat dan hubungan industrial yang harmonis. Untuk mendukung hal tersebut, Perusahaan telah memiliki mekanisme pelaporan atas pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau prosedur serta etika dan nilai-nilai Perusahaan, yaitu *Whistleblowing System (WBS)* sebagaimana tertuang dalam Pedoman *Code of Conduct*. Pelaporan dapat disampaikan kepada pimpinan tertinggi di fungsi Insan PME ditugaskan.

Pelaporan melalui *Whistleblowing System* dilakukan dengan prinsip anonim, rahasia, dan independen. *Whistle Blowing System* ditujukan pada pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum, seperti korupsi, suap, benturan kepentingan, pencurian, kecurangan/*fraud*, pelanggaran hukum dan peraturan perusahaan.

Pelapor dapat menyampaikan laporan pengaduan mereka kepada Perusahaan, baik secara langsung maupun melalui saluran sebagai berikut:

1. Telepon: +62 21 29461227, 29461228
2. *Faximile*: +62 21 29615166
3. Web: www.pertamina-pme.com
4. *Email*: aedoffice@pertamina-me.com

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan tidak mendapati adanya pelaporan melalui *whistleblowing system*.

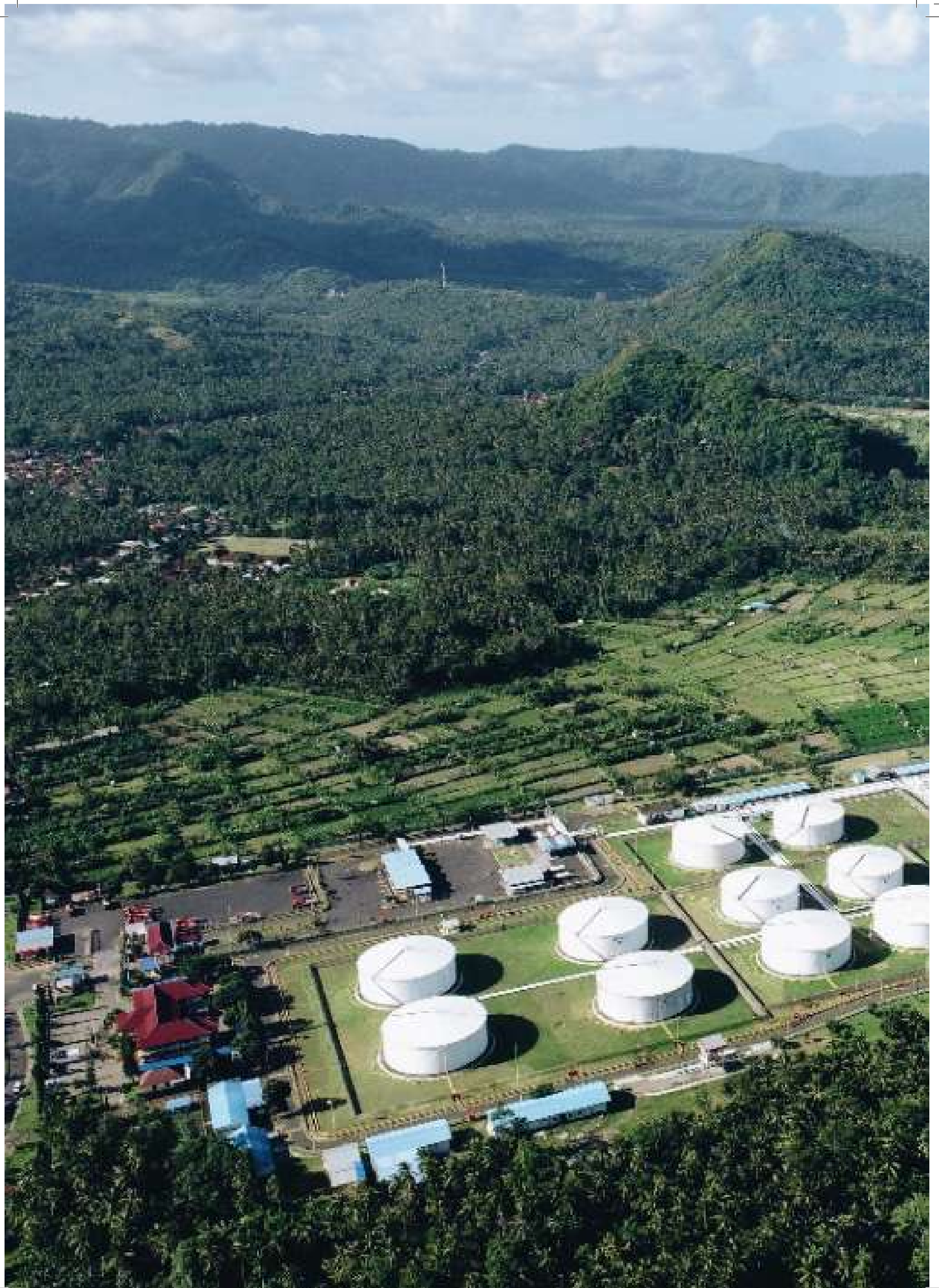
The company continues to apply GCG principles in every aspect of business and operations in order to create a healthy work climate and harmonious industrial relations. To support this, the Company has a reporting mechanism for violations of policies and/or procedures as well as ethics and Company values, namely the Whistleblowing System (WBS) as stated in the Code of Conduct Guidelines. Reports can be submitted to the highest leadership in the assigned PME Personnel function.

Reporting through the Whistleblowing System is carried out anonymously, confidentially and independently. The Whistle Blowing System is aimed at reporting suspected violations of the law, such as corruption, bribery, conflicts of interest, theft, fraud, violations of laws and company regulations.

Whistleblowers can submit their complaint reports to the Company, either directly or through the following channels:

1. Telepon: +62 21 29461227, 29461228
2. *Faximile*: +62 21 29615166
3. Web: www.pertamina-pme.com
4. *Email*: aedoffice@pertamina-me.com

Throughout 2022, the Company did not find any reporting through the whistleblowing system.



6

Keberlanjutan SUSTAINABILITY

Perusahaan terus berupaya melaksanakan program keberlanjutan sebagai salah satu fondasi untuk meningkatkan nilai Perusahaan.
The company continues to strive to implement a sustainability program as one of the foundations for increasing corporate value.

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN CORPORATE SUSTAINABILITY GOVERNANCE



Pertamina Marine Engineering (PME), meyakini bahwa program keberlanjutan merupakan salah satu fondasi Perusahaan dalam menjalankan roda usaha. PME memandang, bahwa program keberlanjutan tidak hanya dalam ruang lingkup yang menekankan pada pembangunan citra Perusahaan, tetapi juga kegiatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan lingkungan. Untuk itu, Perusahaan memfokuskan program keberlanjutan pada pengelolaan program *Health, Safety, Security, and Environment* (HSSE) dan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Melalui program ini, Perusahaan senantiasa menekankan pada seluruh Insan PME untuk memiliki wawasan sosial dan lingkungan. Hal ini penting agar proses bisnis PME bisa berjalan secara aman dan sehat, sekaligus dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas Perusahaan di mata para pemangku kepentingan.

HEALTH, SAFETY, SECURITY, AND ENVIRONMENT (HSSE)

Bagi PME, HSSE adalah komitmen tertinggi dalam kegiatan operasi. Hal ini diwujudkan dengan konsistensi pelaksanaan HSSE berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan standar operasi yang berlaku di lingkungan Perusahaan. Komitmen ini juga menyangkut pada jaminan Perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan proses, keamanan, lingkungan, aset, reputasi, dan keberlangsungan bisnis. Selama tahun 2022, PME mencatatkan nihilnya insiden fatal di lingkungan operasi Perusahaan. Pencapaian ini merupakan sebuah keberhasilan PME dalam menerapkan HSSE di lingkungan Perusahaan.

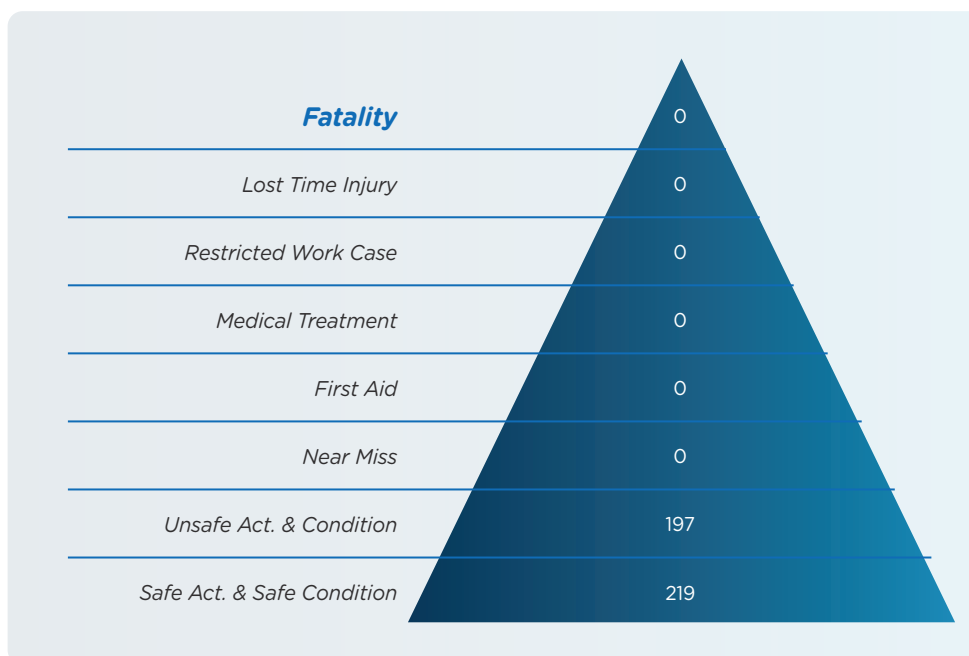
Pertamina Marine Engineering (PME), believes that the sustainability program is one of the Company's foundations in running the business. PME views that the sustainability program is not only in the scope of emphasizing the building of the Company's image, but also activities that can provide added value to stakeholders and the environment. For this reason, the Company focuses its sustainability program on managing Health, Safety, Security and Environment (HSSE) programs and Corporate Social Responsibility (CSR) programs. Through this program, the Company always emphasizes to all PME personnel to have social and environmental insights. This is important so that PME's business processes can run safely and soundly, while at the same time increasing the reputation and credibility of the Company in the eyes of stakeholders.

HEALTH, SAFETY, SECURITY, AND ENVIRONMENT (HSSE)

For PME, HSSE is the highest commitment in operations. This is realized by consistent implementation of HSSE based on laws and regulations, and operating standards that apply within the Company. This commitment also concerns the Company's guarantees for occupational health and safety, process safety, security, environment, assets, reputation and business continuity. During 2022, PME recorded zero fatal incidents in the Company's operational environment. This achievement is a success of PME in implementing HSSE within the Company.

Berikut kinerja penerapan HSSE di lingkup Perusahaan dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) per 31 Desember 2022, adalah sebagaimana terlampir di bawah ini.

The following is the performance of HSSE implementation within the scope of the Company in terms of Occupational Safety and Health (K3) as of December 31, 2022, as attached below.



Kinerja HSSE 2022		
a	Manhours	: 782.022
b	Lost Time Incident Rate (LTIR)	: 0
c	Management Walkthrough	: 5 kali

Adapun kegiatan HSSE di lingkungan Perusahaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. HSSE *meeting* bulanan;
2. HSSE *training* (keadaan darurat, penggunaan APAR dan sistem izin serta standar K3, *field competency validation & verification training*);
3. *Coaching HSE Plan* Revitalisasi Dermaga FT Sei Siak;
4. *Coaching HSE Plan* Revitalisasi Dermaga FT Sei Siak;
5. Pembuatan HSE *Plan* pekerjaan penambahan *breasting dolphin* di Jetty IV Terminal LPG Refrigerated Arun;
6. Pembuatan HSE jasa perbaikan pangkalan LLP Ampenan;
7. Pembuatan HSE *Plan* perbaikan *fire truck* di Kantor Region Jatimbalinus;
8. Pembuatan HSE *Plan* perawatan & perbaikan *Quick Response Unit* (QRU) di IT Surabaya;
9. Pembuatan HSE *Plan* instalasi & perbaikan *fire suppression system* Lt. 1, 2, & 12, Kantor Region Jatimbalinus; dan
10. Pembuatan HSE *Plan* pengadaan material & jasa perbaikan *sheet pile* di PT Perta Arun Gas.

The HSSE activities within the Company for 2022 are as follows:

1. Monthly HSSE meeting;
2. HSSE training (emergencies, use of fire extinguishers and permit systems as well as OSH standards, field competency validation & verification training);
3. Coaching HSE Plan Revitalization of FT Sei Siak Pier;
4. Coaching HSE Plan Revitalization of FT Sei Siak Pier;
5. Preparation of the HSE plan for the addition of breasting dolphin at Jetty IV Terminal LPG Refrigerated Arun;
6. Making HSE repair services at LLP Ampenan base;
7. Making an HSE Plan for repairing fire trucks at the Jatimbalinus Regional Office;
8. Making an HSE Plan for maintenance & repair of the Quick Response Unit (QRU) at IT Surabaya;
9. Preparation of HSE Plan for installation & repair of fire suppression system Lt. 1, 2, & 12, Jatimbalinus Regional Office; and
10. Preparation of HSE Plan for procurement of materials & sheet pile repair services at PT Perta Arun Gas.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Pertamina Marine Engineering menjalankan program CSR yang berkaitan dengan proses bisnis Perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Selama tahun 2022, PME telah melaksanakan program CSR, yakni sebagai berikut:

1. Tanggal, 21 Februari 2022
Pemberian Santunan Yatim Piatu di Makassar
2. Tanggal, 15 Maret 2022
Pemberian Santunan Anak Yatim di Jakarta Timur
3. Tanggal, 18 April 2022
Pemberian Santunan Yatim Piatu di Balikpapan Barat
4. Tanggal, 23 April 2022
Pemberian Santunan Yatim Piatu di Kupang
5. Tanggal, 26 April 2022
Pemberian Santunan Yatim Piatu di Cilacap
6. Tanggal, 18 Mei 2022
Pemberian Santunan Yatim Piatu di Kepulauan Seribu
7. Tanggal, 09 Juli 2022
Hewan Qurban di PTK
8. Tanggal, 15 Agustus 2022
Pemberian Santunan Yatim Piatu di Balikpapan
9. Tanggal, 19 Agustus 2022
Pemberian Santunan Yatim Piatu di Camplong
10. Tanggal, 08 Oktober 2022
Pemberian Santunan Yatim Piatu di Cilacap
11. Tanggal, 11 November 2022
Pemberian Santunan Yatim Piatu di Jakarta Timur

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Pertamina Marine Engineering carries out CSR programs related to the Company's business processes in order to provide added value to society and the environment. During 2022, PME has implemented CSR programs, namely as follows:

1. February 21, 2022
Donation for Orphans in Makassar
2. March 15, 2022
Donation for Orphans in East Jakarta
3. April 18, 2022
Donation for Orphans in West Balikpapan
4. April 23, 2022
Donation for Orphans in Kupang
5. April 26, 2022
Donation for Orphans in Cilacap
6. May 18, 2022
Donation for Orphans in the Thousand Islands
7. July 09, 2022
Sacrificial Animals at PTK
8. August 15, 2022
Donation for Orphans in Balikpapan
9. August 19, 2022
Donation for Orphans in Camplong
10. October 8, 2022
Donation for Orphans in Cilacap
11. November 11, 2022
Donation for Orphans in East Jakarta







7

Laporan Keuangan Financial Report



**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/*FORMERLY* PT PETEKA KARYA JALA)**

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2022/
*31 DECEMBER 2022***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING**

**TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERKAHIR PADA
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

**THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT 31 DECEMBER 2022 AND 2021
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2022 AND 2021**

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1. Nama : Yada Prawira Ganta
Alamat : Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistik Armada Perkapalan, Jl. Yos Sudarso Kav. 205, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Telepon : (021) 29461227, 29461228
Jabatan : Direktur

1. Name : Yada Prawira Ganta
Address : Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistik Armada Perkapalan, Jl. Yos Sudarso Kav. 205, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Telephone : (021) 29461227, 29461228
Position : Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Pertamina Marine Engineering, dahulu PT Peteka Karya Jala ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

1. *The Board of Directors are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Pertamina Marine Engineering, formerly PT Peteka Karya Jala (the "Company");*
2. *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements;*
b. *The Company's financial statements do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or facts; and*
4. *The Board of Directors are responsible for the Company's internal control systems.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi.

For and on behalf of the Board of Directors.

Jakarta,
13 April/April 2023



[Signature]
Yada Prawira Ganta
Direktur / Director



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pertamina Marine Engineering, dahulu PT Peteka Karya Jala ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Pertamina Marine Engineering, formerly PT Peteka Karya Jala (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00620/2.1025/AU.1/06/1130-5/1/IV/2023



Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*



- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
13 April 2023

Daniel Kohar, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1130



Pertamina Marine Engineering
00620/2.1025/AU.1/06/1130-5/11V/2023

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in thousands of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	17,910,530	22,280,235	<i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang usaha				<i>Trade receivables</i>
- Pihak berelasi	5, 17	94,216,541	63,755,750	<i>Related parties -</i>
Aset kontrak				<i>Contract assets</i>
- Pihak berelasi	6, 17	145,165,948	75,267,179	<i>Related parties -</i>
- Pihak ketiga	6	1,279,423	2,030,000	<i>Third parties -</i>
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	8	9,676,794	3,154,100	<i>Advances and prepayments</i>
Pajak dibayar dimuka				<i>Prepaid taxes</i>
- Pajak lain-lain	11a	20,465,933	17,751,947	<i>Other taxes -</i>
Piutang dividen		2,364	-	<i>Dividend receivables</i>
Jumlah aset lancar		288,717,533	184,239,211	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	7	9,131,554	5,446,071	<i>Fixed assets</i>
Penyertaan saham	17	40,505	33,486	<i>Investment in shares</i>
Aset pajak tangguhan	11d	66,554	30,968	<i>Deferred tax assets</i>
Pajak dibayar dimuka				<i>Prepaid taxes</i>
- Pajak lain-lain	11a	-	15,809,734	<i>Other taxes -</i>
Uang muka untuk pembelian aset tetap		-	3,605,000	<i>Advances for purchase of fixed assets</i>
Aset tidak lancar lainnya		126,184	4,629,604	<i>Other non-current assets</i>
Jumlah aset tidak lancar		9,364,797	29,554,863	Total non-current assets
JUMLAH ASET		298,082,330	213,794,074	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				<i>Trade payables</i>
- Pihak ketiga	9	32,549,732	15,193,980	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	9, 17	1,014,728	30,845	<i>Related parties -</i>
Utang lain-lain		1,784,548	640,815	<i>Other payables</i>
Biaya yang masih harus dibayar	10	114,225,341	77,044,301	<i>Accrued expenses</i>
Utang dividen	12	64,993	-	<i>Dividend payables</i>
Utang pajak				<i>Taxes payables</i>
- Pajak penghasilan	11b	4,070,907	457,975	<i>Corporate income taxes -</i>
- Pajak lain-lain	11b	765,563	545,778	<i>Other taxes -</i>
Jumlah liabilitas jangka pendek		154,475,812	93,913,694	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Kewajiban imbalan pasca kerja		338,282	-	<i>Post-employment benefits obligation</i>
Jumlah liabilitas jangka panjang		338,282	-	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		154,814,094	93,913,694	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali data saham)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in thousands of Rupiah,
except for share data)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - modal dasar dan disetor penuh 12.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham	13	12,000,000	12,000,000	Share capital - authorised and fully paid 12,000 shares at par value of Rp1,000 per share
Penghasilan komprehensif lain		30,313	24,838	Other comprehensive income
Saldo laba		<u>131,237,923</u>	<u>107,855,542</u>	Retained earnings
JUMLAH EKUITAS		<u>143,268,236</u>	<u>119,880,380</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>298,082,330</u>	<u>213,794,074</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in thousands of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
Pendapatan	14	380,429,466	281,099,192	Revenue
Beban pokok pendapatan	15	<u>(322,380,298)</u>	<u>(225,396,488)</u>	Cost of revenue
Laba bruto		58,049,168	55,702,704	Gross profit
Beban umum dan administrasi	16	(15,022,125)	(11,907,320)	<i>General and administrative expenses</i>
Beban pajak final		(4,491,377)	(3,096,859)	<i>Final tax expenses</i>
Pendapatan keuangan		388,915	527,207	<i>Finance income</i>
Pendapatan lain-lain, neto		<u>410,967</u>	<u>486,665</u>	<i>Other income, net</i>
Laba sebelum pajak penghasilan		39,335,548	41,712,397	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	11c	<u>(8,122,716)</u>	<u>(4,928,660)</u>	<i>Income tax expense</i>
Laba tahun berjalan		<u>31,212,832</u>	<u>36,783,737</u>	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to the profit or loss:
Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain		7,019	9,430	<i>Changes in the fair value of equity instruments at fair value through other comprehensive income</i>
Pajak penghasilan terkait		<u>(1,544)</u>	<u>(2,075)</u>	<i>Related income tax</i>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		<u><u>31,218,307</u></u>	<u><u>36,791,092</u></u>	Total comprehensive income for the year

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 3 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

**STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in thousands of Rupiah)

	Catatan/ <i>Note</i>	Modal saham/ <i>Share capital</i>	Saldo laba/ <i>Retained earnings</i>	Penghasilan komprehensif lain/ <i>Other comprehensive Income</i>	Total ekuitas/ <i>Total equity</i>	
Saldo per 1 Januari 2021		12,000,000	71,071,805	17,483	83,089,288	Balance as at 1 January 2021
Labanya tahun berjalan		-	36,783,737	-	36,783,737	<i>Profit for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain		-	-	7,355	7,355	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo per 31 Desember 2021		12,000,000	107,855,542	24,838	119,880,380	Balance as at 31 December 2021
Dividen diumumkan	12	-	(7,830,451)	-	(7,830,451)	<i>Dividends declared</i>
Labanya tahun berjalan		-	31,212,832	-	31,212,832	<i>Profit for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		-	-	5,475	5,475	<i>Other comprehensive income, net of tax</i>
Saldo per 31 Desember 2022		12,000,000	131,237,923	30,313	143,268,236	Balance as at 31 December 2022

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2022**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)

**STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022**
(Expressed in thousands of Rupiah)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan		280,649,384	332,532,329	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(284,682,276)	(322,440,639)	Cash paid to suppliers and employees
Penerimaan kas dari pendapatan keuangan		388,915	527,207	Cash receipts from finance income
Penerimaan kas dari Restitusi Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")		15,660,443	-	Cash receipt from Value Added Tax ("VAT") restitution
Pembayaran atas pajak penghasilan badan		<u>(4,466,863)</u>	<u>(5,160,778)</u>	Payments of corporate income taxes
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi		<u>7,549,603</u>	<u>5,458,119</u>	Net cash flows provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Perolehan aset tetap	7	(4,153,850)	(204,959)	Acquisition of fixed assets
Uang muka untuk pembelian aset tetap		<u>-</u>	<u>(3,605,000)</u>	Advances for purchase of fixed assets
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(4,153,850)</u>	<u>(3,809,959)</u>	Net cash flows used for investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activity
Pembayaran dividen	12	<u>(7,765,458)</u>	-	Payment of cash dividends
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>(7,765,458)</u>	<u>-</u>	Net cash flows used for financing activity
(Penurunan)/kenaikan neto kas dan setara kas		(4,369,705)	1,648,160	Net (decrease)/increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	4	<u>22,280,235</u>	<u>20,632,075</u>	Cash and cash equivalents at beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	4	<u>17,910,530</u>	<u>22,280,235</u>	Cash and cash equivalents at end of the year

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Pertamina Marine Engineering, dahulu PT Peteka Karya Jala ("Perusahaan"), entitas anak PT Pertamina Trans Kontinental, didirikan berdasarkan Akta Notaris Sinta Susikto, S.H., No. 62 tanggal 6 November 1991 di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 02-758.HT.01.01.TH92 tanggal 24 Januari 1992 dan telah diumumkan dalam lembaran Berita Negara No. 51 tanggal 26 Juni 1992. Nama Perusahaan diubah menjadi PT Pertamina Marine Engineering berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 3 Juni 2022 oleh Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0038659.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 3 Juni 2022.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Fernandia Fabiola, S.H., M.Kn. No. 1016 tanggal 26 Agustus 2022, mengenai penambahan bidang usaha. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0062597.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 1 September 2022.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1991.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan, yang antara lain meliputi: perlengkapan alat apung, dak dan perbaikan, kerusakan, pekerjaan bawah air, serta rekayasa konstruksi, mekanik, dan ekspor/impor.

Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistik Armada Perkapalan, Jl. Yos Sudarso Kav. 205, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Pertamina Marine Engineering, formerly PT Peteka Karya Jala (the "Company"), a subsidiary of PT Pertamina Trans Kontinental, was established based on Notarial Deed No. 62 of Sinta Susikto, S.H., dated 6 November 1991, in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in its Decree No. 02-758.HT.01.01.TH92 dated 24 January 1992, and was published in Supplement No. 51 of State Gazette dated 26 June 1992. The Company's name was changed to PT Pertamina Marine Engineering based on Notarial Deed No. 2 dated 3 June 2022, of Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0038659.AH.01.02 Year 2022 dated 3 June 2022.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 1016 of Fernandia Fabiola, S.H., M.Kn. dated 26 August 2022, concerning addition of business services. The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with Decree No. AHU-0062597.AH.01.02 Year 2022 dated 1 September 2022.

The Company started its commercial operations in 1991.

In accordance with Article 3 of the Articles of Association, the Company's scope of activities is to engage in the field of trade and service, which among others, includes: floating equipment, docks and improvement, damage, underwater works, and construction, mechanical engineering, and export/import.

The Company's head office is located in PT Pertamina Trans Kontinental Building, Area Logistik Armada Perkapalan Building, Jl. Yos Sudarso Kav. 205, Tanjung Priok, North Jakarta.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Komisaris	Oce Madril
Direksi Direktur	Afridal Rivai

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perusahaan memiliki 18 karyawan tetap (tidak diaudit). Beberapa fungsi Perusahaan sementara dilakukan oleh karyawan perbantuan dari PT Pertamina Trans Kontinental, induk Perusahaan.

c. Penyelesaian atas laporan keuangan

Laporan keuangan ini diotorisasi untuk diterbitkan sesuai dengan resolusi Direksi Perusahaan pada tanggal 13 April 2023.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi dan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors and Employees

The composition of the Company's Commissioner and Director as at 31 December 2022 and 2021 are as follows:

Board of Commissioners Commissioner
Director Director

As at 31 December 2022 and 2021, the Company had 18 permanent employees (unaudited). Several functions are temporarily performed by seconded employees from PT Pertamina Trans Kontinental, the parent Company.

c. Completion of the financial statements

These financial statements were authorised for issue in accordance with a resolution of the Director of the Company at 13 April 2023.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Company, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

The accounting policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared under the historical cost convention and using the accrual basis except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgment in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan
Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan ("ISAK")**

Implementasi dari standar-standar, amendemen dan penyesuaian tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022 dibawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau sebelumnya:

- Amendemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis (Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan)";
- Amendemen PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi: Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 71 "Instrumen Keuangan";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 73 "Sewa";
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 69 "Agrikultur".

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Perusahaan, namun baru berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan antara lancar dan tidak lancar;
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi;
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi;
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal;
- Amendemen PSAK 107 "Akuntansi Ijarah" tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akad ijarah.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

**a. Basis of preparation of the financial
statements (continued)**

**Changes to Statements of Financial
Accounting Standards ("SFAS") and
Interpretations of Statements of Financial
Accounting Standards ("IFAS")**

The implementation of the following new standards, amendments and annual improvements which are effective from 1 January 2022 did not result in changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for current or prior financial years:

- The amendments to SFAS 22 "Business Combination (References to the Conceptual Framework of Financial Reporting)";
- The amendments to SFAS 57 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets: Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contracts";
- Annual improvement on SFAS 71 "Financial Instruments";
- Annual improvement on SFAS 73 "Lease";
- Annual improvement on SFAS 69 "Agriculture".

New standards, amendments and interpretations issued which are relevant to the Company's operation, but only effective for the financial year beginning 1 January 2023 are as follows:

- The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities between current and non-current;
- The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about disclosure of accounting policies;
- The amendments to SFAS 16 "Property, Plant and Equipment" about proceeds before intended use;
- The amendments to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" about definition of accounting estimates;
- The amendments to SFAS 46 "Income Tax" about deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction;
- The amendments to SFAS 107 "Ijarah Accounting" about recognition, measurement, and disclosure of ijarah contracts.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan
(lanjutan)**

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Perusahaan, namun baru berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik;
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan.

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Perusahaan, namun baru berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

- PSAK 74 "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 74 "Kontrak Asuransi" tentang penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 – informasi komparatif.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Perusahaan masih mengevaluasi dampak dari penerapan standar dan interpretasi diatas terhadap laporan keuangan Perusahaan.

b. Mata uang fungsional dan penyajian

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi (mata uang fungsional).

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("IFAS") (continued)

New standards, amendments and interpretations issued which are relevant to the Company's operation, but only effective for the financial year beginning 1 January 2024 are as follows:

- The amendments to SFAS 73 "Leases" about lease liability in a sale and leaseback;
- The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants.

New standards, amendments and interpretations issued which are relevant to the Company's operation, but only effective for the financial year beginning 1 January 2025 are as follows:

- SFAS 74 "Contract Insurance";
- The amendments to SFAS 74 "Insurance Contract" about initial application of SFAS 74 and SFAS 71 - comparative information.

As at the completion date of the financial statements, the Company is still evaluating the impact of the application of the above standards and interpretations on the Company's financial statements.

b. Functional and presentation currency

Items included in the financial statements of the Company are measured using the currency of the primary economic environment in which the relevant entity operates (the functional currency).

The financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency.

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, and cash in banks with a maturity period of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or restricted.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

d. Transaksi pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

e. Piutang usaha

Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk jasa yang diberikan dalam transaksi bisnis pada umumnya.

Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar. Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

f. Aset kontrak

Aset kontrak merupakan jumlah pendapatan yang belum ditagihkan pada akhir periode pelaporan keuangan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan.

g. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

h. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

d. Transactions with related parties

The Company entered into transactions with related parties as defined in SFAS 7 (Revised 2015) "Related Party Disclosures".

Transactions with related parties are based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transaction between unrelated parties.

e. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for services performed in the ordinary course of business.

If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets. Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, less any provision for impairment.

f. Contract assets

Contract assets represent the unbilled amounts at the end of the financial reporting period in respect of services performed.

g. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over their beneficial periods using the straight-line method.

h. Fixed assets

Fixed assets are initially stated at the cost of acquisition, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Cost of acquisition includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

h. Aset tetap (lanjutan)

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Perusahaan mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi ketika terjadi.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Kapal	25	Vessel
Bangunan	20	Buildings
Peralatan kantor	5	Office equipments

Masa manfaat aset, nilai sisa, dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan, jika diperlukan, setidaknya setiap akhir periode pelaporan. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laporan laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dengan jumlah tercatat aset) diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai tercatat aset segera diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah terpulihkan.

i. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

h. Fixed assets (continued)

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the profit or loss during the financial period in which they are incurred.

All repair and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are charged to the profit or loss as incurred.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

The assets' useful lives, residual values and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at least at the financial period-end. The effects of any revisions are recognised in the profit or loss, when the changes arise.

An item of fixed assets is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the profit or loss and in the period in which the asset is derecognised.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

i. Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laba rugi sesuai kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

i. Impairment of non-financial assets (continued)

The recoverable amount is the higher of an asset's Fair Value Less Cost to Sell ("FVLCTS") and Value in Use ("VIU"). Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognised in the profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses recognised for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognised impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognised in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar atas barang dan jasa selain pembelian yang dilakukan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Utang usaha dan utang lain-lain dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar harga perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

k. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui pada laporan laba rugi, kecuali untuk pajak atas transaksi yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pendapatan usaha Perusahaan ada yang terkena pajak penghasilan final. Penghasilan Perusahaan atas pendapatan dari jasa pengerukan yang diberikan kepada perusahaan domestik dikenakan pajak final dengan tarif 4% sesuai dengan Undang-undang Perpajakan di Indonesia.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis dan saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

j. Trade payables and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are obligations for goods or services other than purchases that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

k. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions, where appropriate, based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Certain revenues are subject to final income tax. The Company's income from dredging service provided to Indonesian companies is subject to a final tax at a rate of 4% and under the Taxation Laws of Indonesia.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. The deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination and when the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/9 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

k. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan berasal dari pajak yang dapat dikompensasi diakui jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan. Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

i. Instrumen keuangan

1. Aset keuangan

Klasifikasi

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori:

1. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
2. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal pelaporan keuangan, Perusahaan hanya memiliki aset keuangan dengan kategori sebagai biaya diamortisasi dan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan dengan kategori biaya diamortisasi terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan kontrak aset. Aset keuangan dengan kategori nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari penyertaan saham.

Perusahaan melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

k. Taxation (continued)

The deferred tax assets of the tax loss carried forward are recognised when it is probable that there will be future taxable profit available against which the unused tax losses can be utilised. Deferred income tax is determined using tax rates pursuant to laws or regulations that have been enacted or substantially enacted by the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled. Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

i. Financial instruments

1. Financial assets

Classification

Financial assets are classified in the following two categories:

1. *Financial assets at amortised cost; and*
2. *Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") or other comprehensive income ("FVOCI").*

The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.

As at the reporting date, the Company only has financial assets which are categorised as amortised cost and fair value through other comprehensive income. The Company's amortised costs comprise cash and cash equivalents, trade receivables and contract assets. The Company's fair value through other comprehensive income comprises investment in shares.

The Company reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran

Pembelian dan penjualan aset keuangan diakui pada saat tanggal perdagangan dimana, Perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut telah kedaluwarsa atau dialihkan dan Perusahaan telah mengalihkan secara substansial risiko dan manfaat atas kepemilikan.

Saat pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah dengan, dalam hal aset keuangan diukur dengan nilai wajar tidak melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi aset keuangan. Biaya transaksi atas aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat dua kategori pengukuran dalam mengklasifikasikan instrumen utang:

i. Biaya perolehan diamortisasi

Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disajikan dalam keuntungan/(kerugian) lainnya. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Recognition and measurement

Regular purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date, i.e. the date on which the Company commits to purchase or sell the asset. Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the financial assets have expired or have been transferred and the Company has transferred substantially all of the risks and rewards of ownership.

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at FVTPL, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in the profit or loss.

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the business model for managing the asset and the cash flows characteristics of the asset. There are two measurement categories into which the Company classifies its debt instruments:

i. Amortised cost

Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows solely represent payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses). Impairment losses are presented as a separate line item in the profit or loss.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

I. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

- ii. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai wajar dicatat pada penghasilan komprehensif lain. Kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan/(beban) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada pendapatan/(beban) lain-lain, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laporan laba rugi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)

I. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Recognition and measurement
(continued)

Debt instruments (continued)

- ii. FVOCI

Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where payments of principal and interest are measured at FVOCI. Movements in the fair value are taken through other comprehensive income ("OCI"). Impairment losses, interest income and foreign exchange gains and losses are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income/(expenses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses), and impairment expenses are presented as a separate line item in the profit or loss.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/12 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen ekuitas

Perusahaan selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Dimana manajemen Perusahaan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi sebagai penghasilan lainnya ketika hak Perusahaan untuk menerima pembayaran ditetapkan. Investasi pada instrumen ekuitas tidak diuji penurunan nilai.

Penurunan nilai

Perusahaan mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian ("KKE") atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha, kontrak aset dan piutang sewa pembiayaan tanpa komponen pendanaan yang signifikan diukur dengan jumlah yang sama dengan KKE sepanjang umurnya. KKE sepanjang umurnya adalah KKE yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan. Ketika menentukan apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan KKE, Perusahaan mempertimbangkan informasi relevan yang wajar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perseroan dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

**Recognition and measurement
(continued)**

Equity instruments

The Company subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Company's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Company's right to receive payments is established. Equity investments are not tested for impairment.

Impairment

The Company has recognised impairment loss provision for expected credit losses ("ECLs") on financial assets measured at amortised cost. Impairment loss provision for trade receivables, contract assets and finance lease receivables without a significant financing component are measured at an amount equal to lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk. When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Company considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Company's historical experience, credit rating and future information.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai (lanjutan)

KKE adalah perkiraan probabilitas-tertimbang dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang dari suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang Perusahaan harapkan untuk diterima). KKE didiskontokan pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan tersebut.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menentukan apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan pada perkiraan arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa suatu aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit termasuk data yang dapat diobservasi sebagai berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari pelanggan;
- pelanggaran kontrak seperti gagal bayar; atau
- ada kemungkinan bahwa pelanggan akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya.

2. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai pada saat pengakuan awal. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi pada awalnya dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Impairment (continued)

ECLs are probability-weighted estimates of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e. the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Company expects to receive). ECLs are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

At each reporting date, the Company assesses whether financial assets carried at amortised cost are credit-impaired. A financial asset is 'credit-impaired' when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.

Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- *significant financial difficulty of the customer;*
- *breach of contract such as default; or*
- *it is probable that the customer will enter bankruptcy or other financial reorganisation.*

2. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through the profit or loss, financial liabilities measured at amortised cost, or derivatives that are designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at their fair values plus directly attributable transaction costs.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

I. Instrumen keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

**Pengakuan awal dan pengukuran
(lanjutan)**

Seluruh liabilitas keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi.

Liabilitas keuangan Perusahaan mencakup utang usaha, utang lain-lain, utang dividen dan biaya yang masih harus dibayar.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

I. Financial instruments (continued)

2. Financial liabilities (continued)

**Initial recognition and measurement
(continued)**

All of the Company's financial liabilities are classified as financial liabilities measured at amortised cost.

The Company's financial liabilities include trade payables, other payables, dividend payables and accrued expenses.

Subsequent measurement

After initial recognition, financial liabilities measured at amortised cost are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Gains and losses are recognised in the profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the amortisation process.

Derecognition

A financial liability is derecognised when, and only when, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another financial liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the profit or loss.

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, the entity currently has a legally enforceable right to offset the recognised amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liabilities simultaneously.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/15 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di yang tertuang dalam nilai kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu titik waktu; atau
- b. Suatu periode waktu. Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

m. Revenue and expense recognition

Revenue

Revenue recognition has to fulfill five steps of assessment:

1. Identify contract(s) with customer;
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
3. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each of the distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price is estimated based on expected cost plus margin; and
5. Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of said goods or services).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time; or
- b. Over time. For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price differs for each contract. A contract asset is recognised once the consideration paid by the customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised once the consideration paid by the customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Penerapan panduan praktis

Perusahaan memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak menyesuaikan jumlah imbalan atas efek komponen pendanaan signifikan, jika Perusahaan mengharapkan, saat kontrak dimulai, bahwa periode antara saat Perusahaan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan saat pelanggan melakukan pembayaran atas barang atau jasa adalah satu tahun atau kurang.

Pendapatan bunga

Pendapatan atau biaya bunga untuk semua instrumen keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dicatat menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, sebagaimana mestinya, digunakan periode yang lebih singkat, sampai mencapai nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Beban

Beban dari kontrak dengan pelanggan

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak dan menghasilkan meningkatkan atau meningkatkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") dan biaya tambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") diakui sebagai aset bila biaya tersebut memenuhi syarat untuk dikapitalisasi berdasarkan PSAK 72 dan diharapkan akan dipulihkan. Aset ini diamortisasi dengan dasar sistematis yang konsisten dengan pengalihan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset tersebut.

Beban lainnya

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Penerapan panduan praktis

Perusahaan memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk mengakui biaya yang terjadi untuk mendapatkan kontrak sebagai beban saat terjadinya jika periode amortisasi aset tersebut adalah satu tahun atau kurang.

**2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(continued)**

m. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue (continued)

Application of practical expedient

The Company applies the practical expedient to not adjust the promised amount of consideration for the effects of a significant financing component if the Company expects, at contract inception, that the period between when the Company transfers a promised good or services to the customer and when the customer pays for the goods or services will be one year or less.

Interest revenue

Interest income or expense on all financial instruments measured at amortised cost is recorded using the effective interest rate method, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Expenses

Expenses from contracts with customers

The costs that directly relate to the contract generate or enhance resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") and incremental costs of obtaining a contract ("cost to obtain") are recognised as assets if they meet the criteria for capitalisation under SFAS 72 and expected to be recovered. These assets are amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer to the customer of the goods or services to which the assets relate.

Other expenses

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Application of practical expedient

The Company applies the practical expedient to recognise the incremental cost of obtaining a contract as an expense when incurred if the amortisation period of the asset is one year or less.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 21.

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun finansial berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Rugi penurunan nilai piutang dan aset kontrak

Perusahaan menghitung KKE piutang usaha dan aset kontrak. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Judgements

The following judgements are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognised in the financial statements:

Classifications of financial assets and liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 21.

Estimation and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that carry a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Impairment loss on receivables and contract assets

The Company calculates ECLs for trade receivables and contract assets. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Rugi penurunan nilai piutang dan aset kontrak (lanjutan)

Perusahaan menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Pajak penghasilan dan pajak lainnya

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan pengurangan beban tertentu dalam mengestimasi provisi beban pajak penghasilan untuk Perusahaan. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak selama bisnis normal.

Penghasilan usaha Perusahaan ada yang dikenakan pajak penghasilan final.

Perusahaan mengestimasi bagian final atas biaya umum yang tidak dapat dipisahkan antara bagian pajak penghasilan final dan tidak final dengan alokasi secara proporsional berdasarkan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final terhadap penghasilan bruto.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Kantor Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimation and assumptions (continued)

Impairment loss on receivables and contract assets (continued)

The Company adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customers' actual default in the future.

Income taxes and other taxes

Judgements and assumptions are required to determine the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income tax expense for the Company. In particular, the calculation of the Company's income tax expenses involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain, during the ordinary course of business.

Certain revenues of the Company are subject to final income tax.

The Company estimates the final portion of general expenses that cannot be itemised between the final and non-final income tax portion, using an allocation based on proportion of revenue subject to final income tax to the gross revenue.

All judgements and estimates taken by management, as discussed above, may be challenged by the Tax Office. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI (lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2k dan 11.

3. USE OF JUDGEMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimation and assumptions (continued)

The Company recognises liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Notes 2k and 11.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Kas			Cash on hand
Rupiah	27,720	43,773	Rupiah
Kas pada bank			Cash in banks
Entitas berelasi dengan			Government-related entity
Pemerintah (Catatan 17)			(Note 17)
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri			PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk ("Mandiri")	<u>17,882,810</u>	<u>22,236,462</u>	(Persero) Tbk ("Mandiri")
Jumlah	<u>17,910,530</u>	<u>22,280,235</u>	Total

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak berelasi (Catatan 17)	94,452,137	63,885,238	Related parties (Note 17)
Dikurangi:			Less:
Provisi penurunan nilai			Provision for impairment
pihak berelasi	<u>(235,596)</u>	<u>(129,488)</u>	of related parties
Jumlah piutang usaha, neto	<u>94,216,541</u>	<u>63,755,750</u>	Total trade receivables, net

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables based on the aging schedule are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
0 - 30 hari	68,669,898	30,758,469	0 - 30 days
30 - 90 hari	10,672,792	3,063,221	30 - 90 days
90 - 365 hari	4,345,311	26,683,845	90 - 365 days
Lebih dari 365 hari	<u>10,764,136</u>	<u>3,379,703</u>	More than 365 days
	94,452,137	63,885,238	
Dikurangi:			Less:
Provisi penurunan nilai	<u>(235,596)</u>	<u>(129,488)</u>	Provision for impairment
Jumlah	<u>94,216,541</u>	<u>63,755,750</u>	Total

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Mutasi saldo provisi penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal	129,488	13,693	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	106,108	129,295	<i>Additions</i>
Pemulihan	-	(13,500)	<i>Recovery</i>
Saldo akhir	<u>235,596</u>	<u>129,488</u>	<i>Ending balance</i>

Manajemen berpendapat bahwa nilai provisi penurunan nilai cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

The movements in the provision for impairment of trade receivables are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	129,488	13,693	<i>Beginning balance</i>
	106,108	129,295	<i>Additions</i>
	-	(13,500)	<i>Recovery</i>
	<u>235,596</u>	<u>129,488</u>	<i>Ending balance</i>

Management believes that the provision for impairment is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts receivable.

6. ASET KONTRAK

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak berelasi (Catatan 17)	145,300,634	75,336,874	<i>Related parties (Note 17)</i>
Dikurangi: Provisi penurunan nilai	<u>(134,686)</u>	<u>(69,695)</u>	<i>Less: Provision for impairment</i>
	145,165,948	75,267,179	
Pihak ketiga	<u>1,279,423</u>	<u>2,030,000</u>	<i>Third parties</i>
Jumlah	<u>146,445,371</u>	<u>77,297,179</u>	<i>Total</i>

Mutasi saldo provisi penurunan aset kontrak adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Saldo awal	69,695	-	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	<u>64,991</u>	<u>69,695</u>	<i>Additions</i>
Saldo akhir	<u>134,686</u>	<u>69,695</u>	<i>Ending balance</i>

Manajemen berkeyakinan bahwa provisi penurunan nilai aset kontrak tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya aset kontrak.

6. CONTRACT ASSETS

The movements in the provision for impairment of contract assets are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
	69,695	-	<i>Beginning balance</i>
	<u>64,991</u>	<u>69,695</u>	<i>Additions</i>
	<u>134,686</u>	<u>69,695</u>	<i>Ending balance</i>

Management believes that the provision for impairment of contract assets is adequate to cover possible losses on uncollectible contract assets.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP

7. FIXED ASSETS

		2022			
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>		
Harga perolehan					Acquisition cost
Bangunan	69,051	-	69,051		Buildings
Peralatan kantor	649,117	51,350	700,467		Office equipments
Peralatan bawah air	-	3,980,000	3,980,000		Deep water equipments
Kapal	5,150,000	-	5,150,000		Vessel
	<u>5,868,168</u>	<u>4,031,350</u>	<u>9,899,518</u>		
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	141,467	3,453	144,920		Buildings
Peralatan kantor	280,630	84,914	365,544		Office equipments
Kapal	-	257,500	257,500		Vessel
	<u>422,097</u>	<u>345,867</u>	<u>767,964</u>		
Nilai buku neto	<u>5,446,071</u>		<u>9,131,554</u>		Net book value
		2021			
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>		
Harga perolehan					Acquisition cost
Bangunan	69,051	-	69,051		Buildings
Peralatan kantor	444,158	204,959	649,117		Office equipments
Kapal	-	5,150,000	5,150,000		Vessel
	<u>513,209</u>	<u>5,354,959</u>	<u>5,868,168</u>		
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Bangunan	48,138	93,329	141,467		Buildings
Peralatan kantor	277,178	3,452	280,630		Office equipments
	<u>325,316</u>	<u>96,781</u>	<u>422,097</u>		
Nilai buku neto	<u>187,893</u>		<u>5,446,071</u>		Net book value

Penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation is allocated as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beban pokok pendapatan (Catatan 15)	257,500	-	Cost of revenue (Note 15)
Beban umum dan administrasi (Catatan 16)	88,367	96,781	General and administrative expenses (Note 16)
Jumlah	<u>345,867</u>	<u>96,781</u>	Total

Pada tahun 2022 dan 2021, aset tetap Perusahaan tidak diasuransikan.

In 2022 and 2021, the Company's fixed assets were not covered by insurance.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Management believes that there was no impairment in the value of fixed assets as at 31 December 2022 and 2021.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/22 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

8. ADVANCES AND PREPAYMENTS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Uang muka kepada pemasok	7,654,167	1,611,218	<i>Advance to suppliers</i>
Uang muka kerja	1,837,532	1,377,362	<i>Operational advances</i>
Lain-lain	185,095	165,520	<i>Others</i>
Jumlah	<u>9,676,794</u>	<u>3,154,100</u>	Total

9. UTANG USAHA

9. TRADE PAYABLES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pihak berelasi (Catatan 17)	1,014,728	30,845	<i>Related parties (Note 17)</i>
Pihak ketiga	32,549,732	15,193,980	<i>Third parties</i>
Jumlah	<u>33,564,460</u>	<u>15,224,825</u>	Total

10. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

10. ACCRUED EXPENSES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Perdagangan umum	70,417,833	50,224,969	<i>General trading</i>
Layanan bawah air	20,336,440	7,497,183	<i>Deep water services</i>
Pengerukan	15,191,860	8,821,424	<i>Dredging service</i>
Insentif, bonus dan tantiem	5,372,300	3,894,779	<i>Incentive, bonus and tantiem</i>
Pembelian aset tetap	80,665	5,150,000	<i>Purchase of fixed assets</i>
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50.000)	2,826,243	1,455,946	<i>Others (each below Rp50,000)</i>
Jumlah	<u>114,225,341</u>	<u>77,044,301</u>	Total

11. PERPAJAKAN

11. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pajak lain-lain - PPN	20,465,933	33,561,681	<i>Other taxes VAT -</i>
Jumlah	<u>20,465,933</u>	<u>33,561,681</u>	Total
Bagian lancar	20,465,933	17,751,947	<i>Current portion</i>
Bagian tidak lancar	-	15,809,734	<i>Non-current portion</i>

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Pajak penghasilan badan	4,070,907	457,975	Corporate income taxes
Pajak lain-lain			Other taxes
- Pasal 25	80,051	-	Article 25 -
- Pasal 23	196,078	472,188	Article 23 -
- Pasal 21	52,232	27,867	Article 21 -
- Pasal 15	58,780	29,980	Article 15 -
- Pasal 4(2)	378,422	15,743	Article 4(2) -
	<u>765,563</u>	<u>545,778</u>	
Jumlah	<u>4,836,470</u>	<u>1,003,753</u>	Total

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Kini	7,596,435	4,965,991	Current
Tangguhan	(37,130)	(37,331)	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	563,411	-	Adjustment in respect of prior years
	<u>8,122,716</u>	<u>4,928,660</u>	
Jumlah	<u>8,122,716</u>	<u>4,928,660</u>	Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The reconciliations between profit before income tax of the Company and the Company's estimated taxable income for the years ended 31 December 2022 and 2021, are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	39,335,548	41,712,397	Profit before income tax
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
Provisi atas penurunan nilai piutang dan aset kontrak	94,796	149,527	Provision for impairment of trade receivables and contract assets
Penyusutan aset tetap	(264,303)	33,660	Depreciation of fixed assets
Provisi atas liabilitas imbalan pasca kerja	338,282	-	Provision for post-employment benefits obligation
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(388,915)	(527,207)	Finance income subject to final tax
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak	409,404	1,042,869	Expenses not deductible for tax purposes
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(169,653,425)	(82,293,427)	Revenue subject to final tax
Beban pokok pendapatan atas pendapatan yang dikenakan pajak final	160,166,489	59,358,010	Cost of revenue related to revenue subject to final tax
Beban pajak final	<u>4,491,377</u>	<u>3,096,859</u>	Final tax expense
Estimasi laba kena pajak	<u>34,529,253</u>	<u>22,572,688</u>	Estimated taxable income

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/24 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The reconciliations between profit before income tax of the Company and the Company's estimated taxable income for the years ended 31 December 2022 and 2021, are as follows: (continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Beban pajak kini	7,596,435	4,965,991	Current income tax
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:			Less prepaid income taxes:
- Pasal 25	960,442	3,397,697	Article 25 -
- Pasal 23	2,552,591	979,855	Article 23 -
- Pasal 22	12,495	130,464	Article 22 -
	<u>3,525,528</u>	<u>4,508,016</u>	
Kurang bayar pajak penghasilan	<u>4,070,907</u>	<u>457,975</u>	Underpayment of corporate income tax

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan ketika SPT disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak ("DJP").

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when the SPT is submitted to the Directorate General of Taxation ("DGT").

Pajak atas laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan berbeda dari nilai teoritis yang muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba pada entitas sebagai berikut:

The tax on the Company's profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits on the entity as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba sebelum pajak	39,335,548	41,712,397	Profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	8,653,821	9,176,727	Income tax calculated at applicable tax rate
Dampak pajak penghasilan atas: Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak	90,068	229,431	Tax effects of: Expenses not deductible for tax purposes
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(37,323,754)	(18,104,554)	Revenue subject to final tax
Beban pokok pendapatan atas pendapatan yang dikenakan pajak final	35,236,628	13,058,762	Cost of revenue related to revenue subject to final tax
Beban pajak final	988,103	681,309	Final tax expense
Pendapatan keuangan yang dikenakan pajak final	(85,561)	(115,985)	Finance income subject to final tax
Penyesuaian pajak tangguhan	-	2,970	Deferred tax adjustment
Penyesuaian tahun lalu	563,411	-	Adjustment in respect of prior years
Beban pajak penghasilan	<u>8,122,716</u>	<u>4,928,660</u>	Income tax expense

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax assets

2022					
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dibebankan pada pendapatan komprehensif lainnya/ Charged to other comprehensive income		Saldo akhir/ Ending balance	
Provisi penurunan piutang usaha dan aset kontrak	32,939	20,855	-	53,794	Provision for impairment of trade receivables and contract assets
Penyusutan aset tetap	2,871	(58,147)	-	(55,276)	Depreciation of fixed assets
Penyertaan saham	(7,368)	-	(1,544)	(8,912)	Investment in shares
Liabilitas imbalan pasca kerja	-	74,422	-	74,422	Post-employment benefit obligations
Lain-lain	2,526	-	-	2,526	Others
Jumlah	30,968	37,130	(1,544)	66,554	Total
2021					
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan pada laba rugi/ Credited to profit or loss	Dibebankan pada pendapatan komprehensif lainnya/ Charged to other comprehensive income	Penyesuaian pajak tangguhan/ Deferred tax adjustment	Saldo akhir/ Ending balance	
Provisi penurunan piutang usaha dan aset kontrak	3,013	32,896	(2,970)	32,939	Provision for impairment of trade receivables and contract assets
Penyusutan aset tetap	(4,534)	7,405	-	2,871	Depreciation of fixed assets
Penyertaan saham	(5,293)	-	(2,075)	(7,368)	Investment in shares
Lain-lain	2,526	-	-	2,526	Others
Jumlah	(4,288)	40,301	(2,075)	30,968	Total

e. Tarif pajak

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Catatan 18). Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya 20% menjadi tidak berlaku setelah Undang-Undang ini disahkan.

e. Tax rates

On 29 October 2021, the Government issued Law of the Republic of Indonesia No. 7 year 2021 concerning Harmonisation of Tax Regulations (Note 18). The regulation has stipulated the income tax rate for domestic taxpayers and business establishments of 22% which will be effective from the Fiscal Year 2022 onwards. Hence, the previously tax rate determination of 20% will not be applicable after the ratification of this Law.

f. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

f. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxes may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes due.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/26 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat ketetapan pajak

Pada bulan Mei 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar untuk PPN tahun 2020 sebesar Rp15.790.929 dari jumlah sebesar Rp15.809.734 yang diklaim oleh Perusahaan. Perusahaan telah menerima pengembalian pajak tersebut sebesar Rp15.660.443 pada Juli 2022 dan sisanya dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

11. TAXATION (continued)

g. Tax assessment letter

In May 2022, the Company received an Overpayment Tax Assessment Letter for VAT year 2020 amounted to Rp15,790,929 out of the amount of Rp15,809,734 as claimed by the Company. The Company received the tax refund amounted to Rp15,660,443 in July 2022 and the remaining was charged to profit or loss in the current year.

12. DIVIDEN

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Pemegang Saham menyetujui penetapan penggunaan laba dan laba ditahan sebagai dividen sebesar Rp7.830.451. Dividen sejumlah Rp7.765.458 dibayarkan pada tanggal 18 Oktober 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, terdapat utang dividen yang belum dibayarkan oleh Perusahaan sebesar Rp64.993.

12. DIVIDENDS

Based on the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders, Shareholders approved to use the profit and retained earnings as dividends amounting to Rp7,830,451. The dividends amounting to Rp7,765,458 were paid on 18 October 2022.

As at 31 December 2022, there were dividends payable amounting to Rp64,993.

13. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah modal ditempatkan dan disetor adalah sebagai berikut:

13. SHARE CAPITAL

As at 31 December 2022 and 2021, the Company's issued and paid-up share capital position was as follows:

<u>Pemegang saham</u>	<u>Jumlah saham/ Number of share</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership</u>	<u>Modal saham/ Share capital</u>	<u>Shareholders</u>
PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK")	11,900	99.17%	11,900,000	PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK")
PT Pertamina Energy Terminal ("PET")	100	0.83%	100,000	PT Pertamina Energy Terminal ("PET")
Jumlah	<u>12,000</u>	<u>100%</u>	<u>12,000,000</u>	Total

14. PENDAPATAN

14. REVENUE

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Perdagangan umum	201,308,622	148,206,291	General trading
Layanan bawah air	146,615,246	63,019,210	Deep water services
Pengerukan	32,505,598	69,873,691	Dredging service
Jumlah	<u>380,429,466</u>	<u>281,099,192</u>	Total

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PENDAPATAN (lanjutan)

Perusahaan mengakui aset kontrak terkait pendapatan berikut ini:

	2022	2021	
Layanan bawah air	73,542,592	9,088,717	<i>Deep water services</i>
Perdagangan umum	53,477,465	64,576,163	<i>General trading</i>
Pengerukan	19,560,000	3,701,994	<i>Dredging service</i>
Jumlah	146,580,057	77,366,874	Total

Lihat Catatan 17 untuk informasi transaksi dengan pihak berelasi.

14. REVENUE (continued)

The Company has recognised contract assets related to the following revenues:

	2022	2021	
Layanan bawah air	73,542,592	9,088,717	<i>Deep water services</i>
Perdagangan umum	53,477,465	64,576,163	<i>General trading</i>
Pengerukan	19,560,000	3,701,994	<i>Dredging service</i>
Jumlah	146,580,057	77,366,874	Total

Refer to Note 17 for information on related party transactions.

15. BEBAN POKOK PENDAPATAN

	2022	2021	
Perdagangan umum	178,971,841	126,435,479	<i>General trading</i>
Layanan bawah air	111,460,966	49,439,261	<i>Deep water services</i>
Pengerukan	31,689,991	49,521,748	<i>Dredging service</i>
Penyusutan (Catatan 7)	257,500	-	<i>Depreciation (Notes 7)</i>
Jumlah	322,380,298	225,396,488	Total

Lihat Catatan 17 untuk informasi transaksi dengan pihak berelasi.

15. COST OF REVENUE

	2022	2021	
Perdagangan umum	178,971,841	126,435,479	<i>General trading</i>
Layanan bawah air	111,460,966	49,439,261	<i>Deep water services</i>
Pengerukan	31,689,991	49,521,748	<i>Dredging service</i>
Penyusutan (Catatan 7)	257,500	-	<i>Depreciation (Notes 7)</i>
Jumlah	322,380,298	225,396,488	Total

Refer to Note 17 for information on related party transactions.

16. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2022	2021	
Gaji dan tunjangan	12,590,428	9,318,901	<i>Salaries and allowances</i>
Transportasi	576,607	536,162	<i>Transportation</i>
Kesekretariatan	248,632	150,012	<i>General affairs</i>
Jasa profesional	245,873	184,181	<i>Professional fees</i>
Penyusutan (Catatan 7)	88,367	96,781	<i>Depreciation (Notes 7)</i>
Perlengkapan kantor	80,459	83,706	<i>Office supplies</i>
Sumbangan sosial	80,000	124,150	<i>Social donations</i>
Pemeliharaan bangunan	48,474	646,702	<i>Building maintenance</i>
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp50.000)	1,063,285	766,725	<i>Others (each below Rp50,000)</i>
Jumlah	15,022,125	11,907,320	Total

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/28 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**17. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI DAN ENTITAS BERELASI
DENGAN PEMERINTAH**

**17. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES**

Sifat dari hubungan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of relationships with related parties is as follows:

Pihak-pihak yang berelasi/ Related parties	Sifat hubungan/ Nature of relations	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Pemegang saham utama/ <i>Ultimate shareholder</i>	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha dan aset kontrak/ <i>Revenue, cost of revenue, trade receivables and contract assets.</i>
PT Pertamina International Shipping ("PIS")	Entitas induk pemegang saham/ <i>Parent company to the direct shareholder</i>	Pendapatan, piutang usaha dan aset kontrak/ <i>Revenue, trade receivables and contract assets.</i>
PTK	Pemegang saham mayoritas/ <i>Majority shareholder</i>	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak, utang usaha dan biaya yang masih harus dibayar/ <i>Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables and accrued expenses.</i>
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ ("PHE ONWJ")	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan, piutang usaha dan aset kontrak/ <i>Revenue, trade receivables and contract assets.</i>
PT Pertamina Patra Niaga ("PPN")	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan, piutang usaha dan aset kontrak/ <i>Revenue, trade receivables and contract assets.</i>
PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia ("TPPI")	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Piutang usaha/ <i>Trade receivables.</i>
PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra ("PHE OSES")	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan dan aset kontrak/ <i>Revenue and contract assets.</i>
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ("PHKT")	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan dan aset kontrak/ <i>Revenue and contract assets.</i>
PT Pertamina Lubricants ("PTPL")	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ <i>Cost of revenue and trade payables.</i>
PT Pertamina Bina Medika ("Pertamedika")	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan, utang usaha dan biaya yang masih harus dibayar/ <i>Cost of revenue, trade payables and accrued expenses.</i>
PET	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak dan biaya yang masih harus dibayar/ <i>Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets and accrued expenses.</i>
PT Pertamina Marine Solution ("PMSol")	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, penyertaan saham dan biaya yang masih harus dibayar/ <i>Revenue, cost of revenue, trade receivables, investment in shares and accrued expenses.</i>
PT Kilang Pertamina International ("KPI")	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha dan aset kontrak/ <i>Revenue, cost of revenue, trade receivables and contract assets.</i>
PT Tugu Pratama Indonesia ("TPI")	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan/ <i>Cost of revenue.</i>
PT Elnusa Tbk ("Elnusa")	Entitas sepengendali/ <i>Entity under common control</i>	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ <i>Cost of revenue and trade payables.</i>
PT Jawa Satu Power ("JSP")	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government-related entities</i>	Pendapatan, piutang usaha dan kontrak aset/ <i>Revenue, trade receivables and contract assets.</i>
Mandiri	Entitas berelasi dengan pemerintah/ <i>Government-related entities</i>	Penempatan kas/ <i>Placement cash</i>

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/29 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN PEMERINTAH (lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah, yang terafiliasi dengan Perusahaan melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak ketiga.

Saldo-saldo signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Kas dan setara kas (Catatan 4)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Kas di bank Rupiah	17,882,810	22,236,462
Jumlah	<u>17,882,810</u>	<u>22,236,462</u>

Penghasilan keuangan yang diperoleh Perusahaan terkait dengan kas dan setara kas yang ditempatkan pada entitas berelasi dengan Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp388.915 dan Rp527.207.

Piutang usaha (Catatan 5)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PTK	38,819,179	21,053,374
PET	35,427,303	2,141,302
PPN	9,109,510	6,357,111
PIS	6,548,976	91,681
PHE ONWJ	2,527,900	8,334,999
Pertamina	1,048,412	631,512
JSP	555,000	3,692,700
PMSol	415,857	-
KPI	-	17,182,559
TPPI	-	4,400,000
Jumlah	<u>94,452,137</u>	<u>63,885,238</u>

17. NATURE OF RELATIONSHIPS AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)

In the normal course of business, the company entered into trade and other transactions with related parties and Government-related entities which are affiliated with the Company through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control. Sales or purchase prices among related parties and Government-related entities are made based on forms agreed by the parties and may not be the same as those of transactions between third parties.

Significant balances with related parties are as follows:

Cash and cash equivalents (Note 4)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Cash in banks Rupiah	17,882,810	22,236,462
Total	<u>17,882,810</u>	<u>22,236,462</u>

Finance income earned by the Company related to placement of cash and cash equivalents in entities related with Government as at 31 December 2022 and 2021 amounted to Rp388,915 and Rp527,207, respectively.

Trade receivables (Note 5)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
PTK	38,819,179	21,053,374
PET	35,427,303	2,141,302
PPN	9,109,510	6,357,111
PIS	6,548,976	91,681
PHE ONWJ	2,527,900	8,334,999
Pertamina	1,048,412	631,512
JSP	555,000	3,692,700
PMSol	415,857	-
KPI	-	17,182,559
TPPI	-	4,400,000
Total	<u>94,452,137</u>	<u>63,885,238</u>

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**17. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI DAN ENTITAS BERELASI
DENGAN PEMERINTAH (lanjutan)**

**17. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)**

Aset kontrak (Catatan 6)

Contract assets (Note 6)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
PPN	94,593,739	33,910,755	PPN
PIS	35,929,009	3,835,900	PIS
PTK	6,190,425	15,928,311	PTK
PHE OSES	5,317,062	4,796,763	PHE OSES
KPI	1,374,922	3,301,000	KPI
Pertamina	970,697	845,587	Pertamina
PET	493,145	9,016,564	PET
JSP	420,000	-	JSP
PHE ONWJ	11,635	-	PHE ONWJ
PHKT	-	3,701,994	PHKT
Jumlah	<u>145,300,634</u>	<u>75,336,874</u>	Total

Penyertaan saham

Investment in shares

	Kepemilikan/ Ownership (%)	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
PMSol	0.02%	40,505	33,486	PMSol
Jumlah		<u>40,505</u>	<u>33,486</u>	Total

Utang usaha (Catatan 9)

Trade payables (Note 9)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
PTK	489,208	-	PTK
Elnusa	353,918	-	Elnusa
PTPL	168,792	30,845	PTPL
Pertamedika	2,810	-	Pertamedika
Jumlah	<u>1,014,728</u>	<u>30,845</u>	Total

Biaya yang masih harus dibayar (Catatan 10)

Accrued expenses (Note 10)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
PTK	5,167,632	90,980	PTK
PMSol	423,377	46,977	PMSol
PET	3,693	-	PET
Pertamedika	-	14,048	Pertamedika
Jumlah	<u>5,594,702</u>	<u>152,005</u>	Total

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/31 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**17. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI DAN ENTITAS BERELASI
DENGAN PEMERINTAH (lanjutan)**

**17. NATURE OF RELATIONSHIPS AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)**

Pendapatan (Catatan 14)

Revenue (Note 14)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
PPN	152,536,903	63,341,626	PPN
PET	63,215,449	10,962,932	PET
PTK	52,230,264	40,520,838	PTK
PHE OSES	41,237,366	35,316,533	PHE OSES
KPI	39,269,922	25,488,682	KPI
PHE ONWJ	13,130,375	3,390,760	PHE ONWJ
PIS	8,955,698	4,951,596	PIS
Pertamina	3,763,510	82,727,382	Pertamina
PMSol	824,381	-	PMSol
JSP	420,000	-	JSP
PHKT	-	3,701,994	PHKT
Jumlah	<u>375,583,868</u>	<u>270,402,343</u>	Total

Beban pokok pendapatan (Catatan 15)

Cost of revenue (Note 15)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
PTK	5,203,362	105,897	PTK
PTPL	4,294,142	6,807,845	PTPL
PMSol	650,918	570,279	PMSol
TPI	367,145	-	TPI
Elnusa	318,847	-	Elnusa
KPI	83,741	-	KPI
PET	26,505	12,707	PET
Pertamedika	11,238	-	Pertamedika
Pertamina	-	412,940	Pertamina
Jumlah	<u>10,955,898</u>	<u>7,909,668</u>	Total

Kompensasi manajemen kunci

Key management compensation

Manajemen kunci adalah Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci adalah sebagai berikut:

Key management includes Director and Boards of Commissioner of the Company. The compensation paid or payables to key management are as below:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Gaji dan imbalan lainnya	<u>1,224,446</u>	<u>1,464,965</u>	Salaries and other benefits

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/32 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PERIKATAN PENTING

Perjanjian pengelolaan pelabuhan bundling dan unbundling

Pada tanggal 9 Juni 2021, konsorsium grup PTK, dimana Perusahaan termasuk di dalamnya, mengadakan perjanjian pengelolaan pelabuhan bundling dan unbundling terkait jasa kepelabuhanan, jasa marine, dan jasa konstruksi untuk Sub Holding Refinery and Petrochemical dengan Pertamina. Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang efektif sejak tanggal 1 Mei 2021. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah Rp908.884 per tahun.

Pada tanggal 11 Juni 2021, konsorsium grup PTK juga mengadakan perjanjian pengelolaan pelabuhan bundling dan unbundling terkait jasa kepelabuhanan, jasa marine, dan jasa konstruksi untuk Sub Holding Commercial and Trading dengan Pertamina. Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang efektif sejak tanggal 1 Mei 2021. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah Rp27,97 per liter dengan jumlah Rp1.736.238 per tahun.

Undang-Undang Cipta Kerja

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi mengundangkan berbagai peraturan pelaksana Undang-Undang Omnibus. Salah satu dari peraturan pelaksana ini adalah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan pelaksana ini mengatur, antara lain, jangka waktu kontrak untuk karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu adalah lima tahun maksimum dan karyawan ini berhak atas uang kompensasi yang dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja, termasuk pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Perusahaan memiliki karyawan perjanjian kerja waktu tertentu. Manajemen berpendapat bahwa paket kompensasi karyawan yang diberikan kepada karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu-nya telah memenuhi ketentuan PP 35/2021.

18. SIGNIFICANT COMMITMENTS

Bundling and unbundling port management agreement

On 9 June 2021, PTK group consortium, where the Company is included, entered into a bundling and unbundling port management agreement related to port, marine and construction for Sub Holding Refinery and Petrochemical with Pertamina. The agreement is valid for 10 (ten) years effective from 1 May 2021. Contract value of this agreement is Rp908,884 per year.

On 11 June 2021, PTK group consortium also entered into a bundling and unbundling port management agreement related to port, marine and construction services for Sub Holding Commercial and Trading with Pertamina. The agreement is valid for 10 (ten) years effective from 1 May 2021. Contract value of this agreement is Rp27.97 per litre with a total amount of Rp1,736,238 per year.

Job Creation Bill

In February 2021, the Government officially enacted various implementing regulations of the Omnibus Law. One of these implementing regulations is Government Regulation No. 35 of 2021 concerning the Limited Time Employment Agreement, Outsourcing, Working Time and Break Time, and Termination of Employment. This implementing regulation regulates, among other things, that the contract period for employees with a limited time employment agreement is five years maximum and these employees are entitled to compensation benefit which is calculated proportionally based on the length of service, including severance pay and service pay.

The Company has employees with limited time employment agreements. The management is of the opinion that the employee compensation package provided to its Temporary Appointment Work Agreement employees has complied with the provision of PP 35/2021.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/33 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PERIKATAN PENTING (lanjutan)

Undang-Undang No. 7/2021

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan oleh Presiden sebagai UU No. 7/2021 ("UU HPP"). UU ini mengatur sejumlah aturan baru perpajakan sebagai salah satu cara Pemerintah mereformasi sistem perpajakan, salah satu implementasinya Nomor Induk Kependudukan ("NIK") sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") untuk wajib pajak orang pribadi

Ketentuan kebijakan lainnya yang menjadi poin penting di dalam UU HPP adalah:

PPN

Kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Adanya sistem multi tarif PPN dengan rentang sekitar 5% - 15% dan tarif PPN 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud, tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

Pajak Penghasilan Orang pribadi ("PPh OP")

Adanya perubahan dan penambahan rentang tarif PPh OP menjadi 5 lapisan atau kategori yaitu lapisan kena pajak sampai dengan Rp60.000 (tarif pajak 5%), diatas Rp60.000 - Rp250.000 (tarif pajak 15%), diatas Rp250.000 - Rp500.000 (tarif pajak 25%), diatas Rp500.000 - Rp5.000.000 (tarif pajak 30%), dan lapisan kelima untuk pendapatan diatas Rp5.000.000 (tarif pajak 35%).

Program Pengungkapan Sukarela

Program ini akan diberlakukan selama enam bulan, yaitu pada kurun waktu 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022 dan program ini hanya akan berlaku bagi wajib pajak badan yang sebelumnya berpartisipasi dalam program pengampunan pajak dan wajib pajak orang pribadi.

PPH Badan

Tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

18. SIGNIFICANT COMMITMENTS (continued)

Law No. 7/2021

On 7 October 2021, the Indonesian Parliament approved the Harmonisation of Tax Regulations Bill, which on 29 October 2021, was signed into law by the President as Law No. 7/2021 ("HPP Law"). This law regulates a number of new tax rules as one way for the Government to reform the tax system, one of which is the implementation of the Population Identification Number as Taxpayer Identification Number for individual taxpayers.

Other policy provisions that are important points in the HPP Law are:

VAT

Gradual increase in general VAT rates, increasing from 10% to 11% starting 1 April 2022 and 12% rate starting 1 January 2025. There is a VAT multi-tariff system with a range of around 5% - 15% and a VAT rate of 0% for the export of tangible and intangible taxable goods and the export of taxable services.

Personal Income Tax ("PPh OP")

There are changes and additions to the range of PPh OP rates into 5 layers or categories, namely: taxable layer up to Rp60,000 (5% tax rate), above Rp60,000 - Rp250,000 (15% tax rate), above Rp250,000 - Rp500,000 (25% tax rate), above Rp500,000 - Rp5,000,000 (30% tax rate) and the fifth layer for income above Rp5,000,000 (tax rate of 35%).

Voluntary Disclosure Programme

This programme will be implemented for six months, from 1 January 2022 to 30 June 2022 and this will be applicable only for corporate taxpayers who previously participated in the tax amnesty programme and individual taxpayers.

Corporate Income Tax

Domestic corporate income tax rates and permanent establishments are 22% which will come into effect in the 2022 fiscal year.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/34 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. PERIKATAN PENTING (lanjutan)

Undang-Undang No. 7/2021 (lanjutan)

Perubahan UU Cukai

Perubahan berupa penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai, menggunakan prinsip pemidanaan sebagai upaya terakhir terkait pelanggaran cukai yang mencakup pelanggaran perizinan, pengeluaran barang kena cukai, barang kena cukai tidak dikemas, barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana, dan jual beli pita cukai.

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga). Tujuan dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perusahaan.

a. Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko *counterparty* gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah maksimal eksposur dari risiko kredit adalah Rp258.544.722 (2021: Rp163.289.391).

Risiko kredit terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan aset kontrak. Untuk transaksi kas di bank, Perusahaan telah menempatkan dananya pada bank yang memiliki kualitas kredit yang baik terlihat dengan sebagian besar bank tersebut berperingkat "IdAAA" dari lembaga pemeringkat Pefindo.

18. SIGNIFICANT COMMITMENTS (continued)

Law No. 7/2021 (continued)

Changes to the Excise Law

The change is the addition or reduction of types of excisable goods, using the principle of punishment as a last resort related to excise violations which include licensing violations, releasing excisable goods, unpackaged excisable goods, excisable goods originating from criminal acts and the sale and purchase of excise stamps.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company's activities expose it to a variety of financial risks: credit risk, liquidity risk, and market risk (including the effects of foreign currency exchange rates risk, and interest rates risk). The objectives of the Company's risk management are to identify, measure, monitor, and manage basic risks in order to safeguard the Company's long-term business continuity and to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Company.

a. Credit risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Company. As at 31 December 2022, the total maximum exposure to credit risk was Rp258,544,722 (2021: Rp163,289,391).

Credit risk arises from cash and cash equivalents, trade receivables and contract assets. For cash in bank, the Company has placed its bank balances and time deposit in banks that have good credit quality as evidenced by most of the banks being rated "IdAAA" based on Pefindo.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Risiko kredit (lanjutan)

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Perusahaan memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, terdapat perjanjian yang mengikat secara hukum untuk kontrak penjualan, dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang usaha yang bermasalah. Kebijakan umum Perusahaan untuk pelanggan yang baru dan pelanggan yang sudah ada adalah sebagai berikut:

- Memilih pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik.
- Menerima pelanggan baru yang disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kekuasaan Perusahaan.

b. Risiko likuiditas

Untuk mengatur risiko likuiditas, Perusahaan melakukan monitor dan menjaga level kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Perusahaan dan mengurangi pengaruh fluktuasi dalam arus kas. Manajemen juga secara rutin melakukan monitor atas perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana.

Tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan berdasarkan jatuh temponya yang relevan berdasarkan periode sisa hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

	2022			Jumlah/ Total	
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1 sampai 5 tahun/ Between 1 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Later than 5 years		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha - pihak ketiga	1,014,728	-	-	1,014,728	Trade payables - third parties
Utang usaha - pihak berelasi	32,549,732	-	-	32,549,732	Trade payables - related parties
Utang lain-lain	1,784,548	-	-	1,784,548	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	108,853,041	-	-	108,853,041	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	144,202,049	-	-	144,202,049	Total financial liabilities

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Credit risk (continued)

Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure to credit risk given that the Company has clear policies on the selection of customers, where the Company have legally binding agreements for its sales contracts, and historically low levels of bad debts. The Company has also established general policies for new and existing customers, which are as follows:

- Selection of customers with strong financial conditions and good reputations.
- Acceptance of new customers is approved by authorised personnel according to the Company's delegation of authority policy.

b. Liquidity risk

To manage its liquidity risk, the Company monitors its level of cash and cash equivalents, and maintains these at a level deemed adequate to finance the Company's operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in cash flows. The Company's management also regularly monitors projected and actual cash flows, including loans payable maturity profiles and continuously assesses the financial markets or opportunities to raise funds.

The table below analyses the Company's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity groupings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/36 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

b. Risiko likuiditas (lanjutan)

b. Liquidity risk (continued)

	2021			Jumlah/ Total	
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1 sampai 5 tahun/ Between 1 and 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Later than 5 years		
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang usaha - pihak ketiga	15,193,980	-	-	15,193,980	Trade payables - third parties
Utang usaha - pihak berelasi	30,845	-	-	30,845	Trade payables - related parties
Utang lain-lain	640,815	-	-	640,815	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	73,149,522	-	-	73,149,522	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	89,015,162	-	-	89,015,162	Total financial liabilities

c. Estimasi nilai wajar

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan diharapkan akan dapat direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dekat. Oleh karena itu, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

Nilai wajar pinjaman ditentukan menggunakan diskonto arus kas masa depan pada suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati saat ini untuk instrumen dengan jangka waktu dan jatuh tempo yang sama.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya.

d. Manajemen risiko permodalan

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, laba ditahan dan komponen ekuitas lainnya.

Direksi secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari reviu ini, Direktur juga mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

c. Fair value estimation

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

The Company's current financial assets and liabilities are expected to be realised or settled in the near term. Therefore, their carrying amounts approximate their fair value.

The fair value is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms and remaining maturities.

Management considers that the carrying amounts of interest bearing financial assets and financial liabilities recorded at amortised cost in the financial statements approximate their fair values.

d. Capital risk management

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as a going concern, in addition to maximising the profits of the shareholders through the optimisation of the balance of debt and equity. The capital structure of the Company consists of cash and cash equivalents and equity attributable to equity holders of the parent, comprising issued capital, retained earnings and other equity components.

The Company's Directors periodically review the capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risk.

**PT PERTAMINA MARINE ENGINEERING
(DAHULU/FORMERLY PT PETEKA KARYA JALA)**

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2022**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Risiko pasar

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan tidak terekspos secara signifikan dengan risiko nilai tukar mata uang asing karena tidak ada transaksi dan saldo dalam mata uang asing yang signifikan.

ii. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana arus kas atau nilai wajar di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Perusahaan tidak terekspos secara signifikan dengan risiko suku bunga karena tidak ada aset dan liabilitas berbunga yang signifikan. Pendapatan dan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi secara substansial independen terhadap perubahan suku bunga pasar.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Market risk

i. Foreign exchange risk

The Company is not significantly exposed to foreign exchange risk since there are no significant foreign exchange transactions and balances using foreign exchange.

ii. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates.

The Company is not significantly exposed to interest rate risk since there are no significant interest-bearing assets and liabilities. The Company's income and operating cash flows are substantially independent of changes in market interest rates.

20. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang usaha dan aset kontrak sebesar Rp258.572.442 (2021: Rp163.333.164) sebagai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, dan mengklasifikasikan penyertaan saham sebesar Rp40.505 (2021: Rp33.486) sebagai aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan mengklasifikasikan utang usaha, utang lain-lain, utang dividen dan biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp144.267.042 (2021: Rp89.015.162) sebagai liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

20. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 December 2022, the Company classified its cash and cash equivalents, trade receivables and contract assets amounting to Rp258,572,442 (2021: Rp163,333,164) as financial assets measured at amortised cost, and classified its investment in shares amounting to Rp40,505 (2021: Rp33,486) as financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

As at 31 December 2022, the Company classified its trade payables, other payables, dividend payables and accrued expenses amounting to Rp144,267,042 (2021: Rp89,015,162) as financial liabilities measured at amortised cost.

21. TRANSAKSI NON-KAS

21. NON-CASH TRANSACTIONS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Perolehan aset tetap melalui biaya yang masih harus dibayar	1,422,500	5,150,000	<i>Addition of fixed assets through accrued expenses</i>
Perolehan aset tetap melalui uang muka	(3,605,000)	-	<i>Addition of fixed assets through advances</i>



Synergy and **Transformation** to **Strengthen Competitive** **Advantages**



PT Pertamina Marine Engineering

Gedung PTK Area Logistic Armada Perkapalan lantai 2,
Jl Yos Sudarso Kav. 205,
Sunter Jaya Jakarta Utara 14350

Telp : (021) 2961 5165
Fax : (021) 2961 5166
Email : headoffice@pertamina-me.com